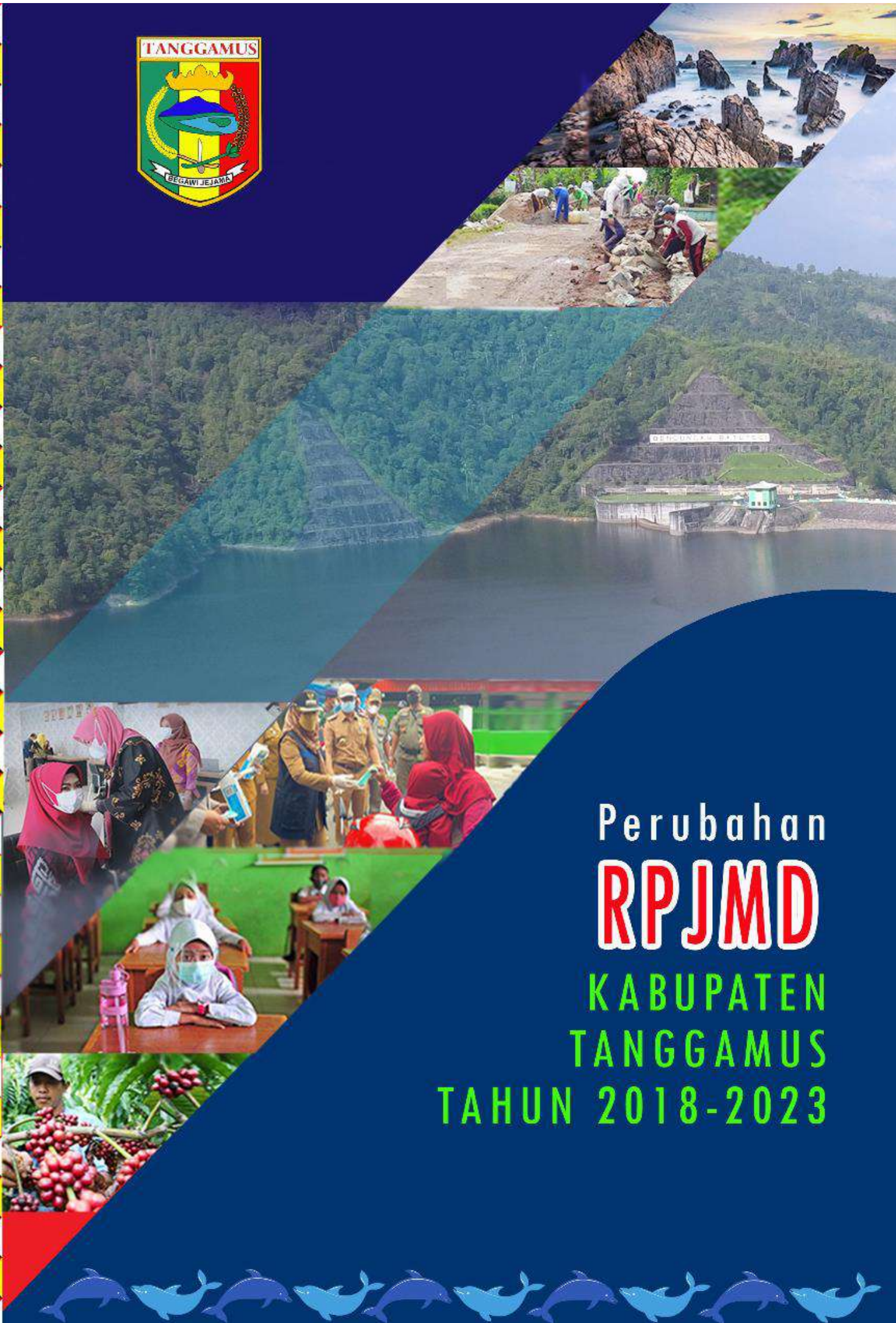




Perubahan
RPJMD
KABUPATEN
TANGGAMUS
TAHUN 2018-2023



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati masa jabatan 2018 sampai dengan 2023 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar (bencana non alam/*Covid-19*), penyeselarasan dengan Kebijakan Nasional (RPJMN) dan Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor);
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 78);
42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

Pasal 2

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023.

Pasal 3

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi , Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dasar penyusunan Perubahan Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan RPJMD dan Renstra-PD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupataen Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 205
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG NOMOR: 02/1265/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

I. Umum

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanggamus diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kabupaten Tanggamus perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan peranserta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, maka pembangunan daerah tersebut adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yakni:

1. Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan nasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam RPJMN tersebut Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Industri yang akan dikembangkan dan harus segera ditindaklanjuti;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, peraturan ini mengamanatkan terjadinya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
3. Telah terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, hal ini berakibat terdapat beberapa Perangkat Daerah belum tercantum dalam RPJMD;

4. Hasil revidi APIP menyatakan agar segera dilakukan Perubahan RPJMD untuk menyesuaikan nomenklatur program, pagu, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Terjadinya kejadian luar biasa yaitu wabah pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional, hal ini berakibat APBN dan APBD mulai Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanggulangan dan penanganan dampak pandemi *Covid-19*, agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak cepat dan tepat menghadapi perkembangan kondisi ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kerangka pendanaan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
NOMOR 97



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 13
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 67
1.5 Sistematika Penulisan	I - 68
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 45
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 72
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 144
2.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II - 155
2.6 Sustainable Development Goals	II - 184
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III - 2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III - 18
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III - 34
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV - 1
4.2 Isu Strategis.....	IV - 16



	Halaman
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V - 1
5.1 Visi.....	V - 1
5.2 Misi.....	V - 3
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V - 13
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1 Strategi	VI - 2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI - 10
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI - 13
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII - 1
7.1 Program Perangkat Daerah.....	VII - 1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII - 1
BAB IX PENUTUP.....	IX - 1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX - 3



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	I - 8
Gambar I.2. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I - 14
Gambar I.3. Pengembangan Kawasan Provinsi Lampung.....	I - 25
Gambar I.4. Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.....	I - 27
Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II - 1
Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus.....	II - 2
Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 7
Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II - 10
Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 15
Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 16
Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 17
Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus	II - 19
Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus.....	II - 20
Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus	II - 21
Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus	II - 22

	Halaman
Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus	II - 23
Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus	II - 24
Gambar II.15. Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.....	II - 34
Gambar II.16. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	II - 37
Gambar II.17. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 51
Gambar II.18. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2016-2020.....	II - 52
Gambar II.19. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	II - 57
Gambar II.20. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020	II - 59
Gambar II.21. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2020.....	II - 60
Gambar II.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....	II - 63
Gambar II.23. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....	II - 64
Gambar II.24. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2015-2020.....	II - 65
Gambar II.25. Persentase Penolong Proses Kelahiran Terakhir yang Ditangani Tenaga Medis di Kabupaten Tanggamus, 2020.....	II - 65
Gambar II.26. Komparasi TPAK dan TPT Antara Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional....	II - 67
Gambar II.27. Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Tanggamus.....	II - 71

	Halaman
Gambar II.28. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus	II - 117
Gambar II.29. Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020	II - 145
Gambar III.1. Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017 (%)...	III - 9
Gambar III.2. Perkembangan Rasio Lancar Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 13
Gambar III.3. Perkembangan Rasio Cair (Quick Ratio) Keuangan Kabupaten Tanggamus 2013-2017 (%).....	III - 13
Gambar III.4. Perkembangan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 14
Gambar III.5. Perkembangan Debt Rasio Pemkab Tanggamus 2013-2016 (%).....	III - 15
Gambar III.6. Perkembangan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Pemerintah Tanggamus 2013-2016 (%).....	III - 15
Gambar III.7. Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Per Komponen Tahun 2017.....	III - 26
Gambar III.8. Proporsi Realisasi Belanja Langsung Per Komponen Tahun 2017.....	III - 26
Gambar III.9. Proporsi Anggaran Belanja Pegawai (Tidak Langsung dan Langsung) Tahun 2015-2017.....	III - 27
Gambar V.1. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1.....	V - 4
Gambar V.2. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2.....	V - 5
Gambar V.3. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3.....	V - 5
Gambar V.4. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4.....	V - 6
Gambar V.5. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5.....	V - 7
Gambar V.6. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6.....	V - 7
Gambar V.7. Bangun Visi, Misi, dan Prioritas.....	V - 8



	Halaman
Gambar VI.1. Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal dan Internal Kabupaten Tanggamus	VI - 4
Gambar VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD.....	VII - 3
Gambar VII.2. Ilustrasi Pengintegrasian Agenda Politik Kepala Daerah ke Dalam Program Pembangunan.....	VII - 5



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Situasi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Tanggamus Per Tanggal 27 Desember 2021.....	I - 4
Tabel I.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	I - 16
Tabel I.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.....	I - 29
Tabel I.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023	I - 57
Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 6
Tabel II.2. Penutupan Lahan Tahun 2020 Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus	II - 9
Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 18
Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031.....	II - 19
Tabel II.6. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.....	II - 25
Tabel II.7. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus.....	II - 27
Tabel II.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.....	II - 27
Tabel II.9. Luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus	II - 29

	Halaman
Tabel II.10. Luas Lahan Cadangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II - 30
Tabel II.11. Luas Baku Sawah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	II - 31
Tabel II.12. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus.....	II - 35
Tabel II.13. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus...	II - 39
Tabel II.14. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus.....	II - 39
Tabel II.15. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus	II - 40
Tabel II.16. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus	II - 40
Tabel II.17. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus.....	II - 41
Tabel II.18. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus..	II - 41
Tabel II.19. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus.....	II - 41
Tabel II.20. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	II - 45
Tabel II.21. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	II - 46
Tabel II.22. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	II - 47
Tabel II.23. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	II - 48
Tabel II.24. Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	II - 49

	Halaman
Tabel II.25. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	II - 49
Tabel II.26. Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus (persen), 2016-2020.....	II - 50
Tabel II.27. Nilai Inflasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2016.....	II - 53
Tabel II.28. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021.....	II - 53
Tabel II.29. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 54
Tabel II.30. Nilai Gini Rasio Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020.....	II - 54
Tabel II.31. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019.....	II - 55
Tabel II.32. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus (ribu) Tahun 2016-2020.....	II - 57
Tabel II.33. Persentase Penduduk Miskin 2016-2020 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.....	II - 57
Tabel II.34. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel II.35. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel II.36. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020.....	II - 61
Tabel II.37. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel II.38. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 66
Tabel II.39. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 68
Tabel II.40. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 69

	Halaman
Tabel II.41. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 69
Tabel II.42. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 72
Tabel II.43. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 73
Tabel II.44. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 73
Tabel II.45. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel II.46. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 74
Tabel II.47. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus	II - 75
Tabel II.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 76
Tabel II.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel II.50. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 77
Tabel II.51. Cakupan AKB dan AKBa Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2020.....	II - 78
Tabel II.52. Cakupan AKI Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2020.....	II - 79
Tabel II.53. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017- 2020.....	II - 81
Tabel II.54. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2015-2020.....	II - 82
Tabel II.55. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 82

	Halaman
Tabel II.56. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus.....	II - 83
Tabel II.57. Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 83
Tabel II.58. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2020.....	II - 84
Tabel II.59. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2014-2020 Kabupaten Tanggamus.....	II - 86
Tabel II.60. Jumlah Dokter Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus.....	II - 87
Tabel II.61. Jumlah Dokter Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus	II - 87
Tabel II.62. Jumlah Tenaga Medis Dokter Spesialis,Umum, Gigi Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus.....	II - 88
Tabel II.63. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.....	II - 88
Tabel II.64. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 89
Tabel II.65. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.....	II - 90
Tabel II.66. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)/Rikesdas Tahun 2017-2019.....	II - 90
Tabel II.67. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus.....	II - 91
Tabel II.68. Kasus Covid-19 Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 sampai dengan 27 Desember 2021.....	II - 92
Tabel II.69. Sasaran dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan 27 Desember 2021.....	II - 92

	Halaman
Tabel II.70. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 93
Tabel II.71. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 94
Tabel II.72. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 dan 2020.....	II - 95
Tabel II.73. Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 96
Tabel II.74. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 97
Tabel II.75. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020.....	II - 97
Tabel II.76. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Tanggamus.....	II - 98
Tabel II.77. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020.....	II - 99
Tabel II.78. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	II - 101
Tabel II.79. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 102
Tabel II.80. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 103
Tabel II.81. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 104
Tabel II.82. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 105
Tabel II.83. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 106
Tabel II.84. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 108

	Halaman
Tabel II.85. Data Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan 20 Januari 2020.....	II - 109
Tabel II.86. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 111
Tabel II.87. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 111
Tabel II.88. Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021.....	II - 112
Tabel II.89. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 113
Tabel II.90. Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 114
Tabel II.91. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020.....	II - 115
Tabel II.92. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 117
Tabel II.93. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 118
Tabel II.94. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2018.....	II - 119
Tabel II.95. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 119
Tabel II.96. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 120
Tabel II.97. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 124
Tabel II.98. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 125
Tabel II.99. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 126

	Halaman
Tabel II.100 Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 127
Tabel II.101 Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 128
Tabel II.102 Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 129
Tabel II.103 Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 131
Tabel II.104 Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 132
Tabel II.105 Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 133
Tabel II.106 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 135
Tabel II.107 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 136
Tabel II.108 Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Indeks Dimensi Tahun 2020.....	II - 137
Tabel II.109 Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Indeks Pilar Tahun 2020.....	II - 138
Tabel II.110 Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus berdasarkan Indeks Aspek Tahun 2020.....	II - 138
Tabel II.111 Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Aspek Yang Dinilai Tahun 2021.....	II - 139
Tabel II.112 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 140
Tabel II.113 Perkembangan Indikator Penerapan SIDA Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 140

	Halaman
Tabel II.114 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020.....	II - 141
Tabel II.115 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 142
Tabel II.116 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019.....	II - 143
Tabel II.117 Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus.....	II - 143
Tabel II.118 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 144
Tabel II.119 Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 146
Tabel II.120 Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 147
Tabel II.121 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022.....	II - 148
Tabel II.122 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus	II - 150
Tabel II.123 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023.....	II - 156
Tabel II.124 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 dan 2020.....	II - 167
Tabel II.125 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019-2023.....	II - 170
Tabel II.126 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023.....	II - 177

	Halaman
Tabel II.127 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	II - 179
Tabel II.128 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023.....	II - 179
Tabel II.129 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023.....	II - 181
Tabel II.130 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023.....	II - 183
Tabel II.131 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus.....	II - 186
Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Tanggamus	III - 3
Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 8
Tabel III.3. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 9
Tabel III.4. Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 10
Tabel III.5. Perkembangan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017.....	III - 11
Tabel III.6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 16
Tabel III.7. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 25
Tabel III.8. Analisis Proporsi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 28

	Halaman
Tabel III.9. Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 29
Tabel III.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 31
Tabel III.11. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 32
Tabel III.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 33
Tabel III.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017.....	III - 33
Tabel III.14. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus	III - 39
Tabel III.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Tanggamus.....	III - 42
Tabel III.16 Paket Kebijakan Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	III - 45
Tabel III.17 Pekerjaan Yang Pembiayaannya Dari Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021-2022.....	III - 46
Tabel III.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	III - 64
Tabel III.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	III - 65
Tabel III.20 Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	III - 67
Tabel IV.1. Identifikasi Isu Strategis Daerah dan Prioritas Pembangunan.....	IV - 19
Tabel V.1 Penyusunan Penjelasan Visi.....	V - 3

		Halaman
Tabel V.2	Interkoneksi Visi, Misi dengan Isu-Isu Strategis Daerah.....	V - 10
Tabel V.3	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	V - 15
Tabel V.4	Indikator Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	V - 21
Tabel V.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	V - 25
Tabel VI.1	Strategi Berdasarkan Analisis SWOT.....	VI - 5
Tabel VI.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VI - 8
Tabel VI.3	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VI - 11
Tabel VI.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VI - 14
Tabel VI.5	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus Terhadap Program Prioritas Nasional.....	VI - 102
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus.....	VII - 4
Tabel VII.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	VII - 4
Tabel VII.3	Integrasi Agenda Politik Kepala Daerah Dalam Program Pembangunan Kabupaten Tanggamus.....	VII - 6
Tabel VII.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VII - 15
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VIII - 2



Halaman

Tabel VIII.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VIII	-	3
Tabel VIII.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	VIII	-	7
Tabel VIII.4	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023.....	VIII	-	27



BAB I

PENDAHULUAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, maka pembangunan daerah tersebut adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Lebih lanjut, Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Perda paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasangan Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan H. AM. Syafe'i, S.Ag. selaku Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang ditetapkan berdasarkan rapat pleno KPU Nomor: 777 PL.03.3-BA/1806/KPU-Kab/VII/2018 dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan ketua KPU Tanggamus Nomor: 778/H.-03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018 yang telah dilantik oleh Gubernur Lampung Atas Nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2018, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018–2023 dan telah ditetapkan pada tanggal 12 April 2019.

Dokumen RPJMD ini memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Tanggamus ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun

perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024. Penyelarasan tersebut dilakukan karena dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023 ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan proyek strategis nasional (*major project*) yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional tersebut harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanggamus, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD yang menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional non-alam. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *Covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kabupaten Tanggamus. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Tabel I.1 Situasi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus Per Tanggal 27 Desember 2021

NO	KASUS POSITIF	KASUS POSITIF SEMBUH	ANGKA KESEMBUHAN KUMULATIF	KASUS POSITIF MENINGGAL	KASUS AKTIF	TOTAL SASARAN VAKSIN	VAKSINASI DOSIS 1	VAKSINASI DOSIS 2
1	2.549	2.408	94,46%	139	2	471.722	327.773 (69,48%)	148.968 (31,58%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan *Covid-19*. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kabupaten Tanggamus akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yakni:

- 1) Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan nasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam RPJMN tersebut Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Industri yang akan dikembangkan dan harus segera ditindaklanjuti;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, peraturan ini mengamanatkan terjadinya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2) Perlunya sinkronisasi dengan perubahan kebijakan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

- 3) Telah terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, hal ini berakibat terdapat beberapa Perangkat Daerah belum tercantum dalam RPJMD;
- 4) Hasil rewiu APIP menyatakan agar segera dilakukan Perubahan RPJMD untuk menyesuaikan nomenklatur program, pagu, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Terjadinya kejadian luar biasa yaitu wabah pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional, hal ini berakibat APBN dan APBD mulai Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanggulangan dan penanganan dampak pandemi *Covid-19*, agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak cepat dan tepat menghadapi perkembangan kondisi ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kerangka pendanaan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

- 1) Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan



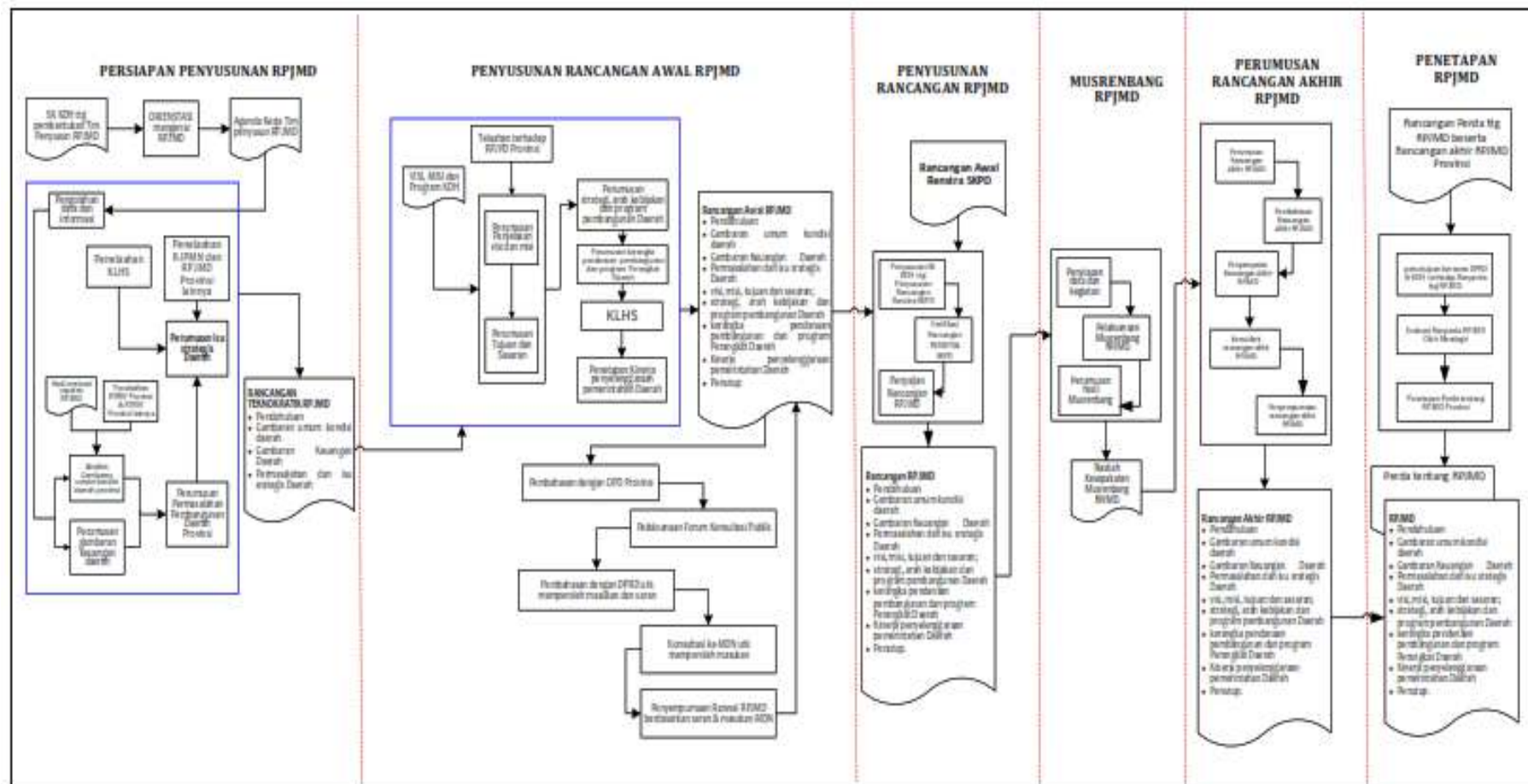
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus menjadi dokumen yang sangat strategis karena:

- 1) Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
- 2) Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
- 3) Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031;
- 4) Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
- 5) Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
- 6) Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

Gambar I.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Landasan Operasional yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

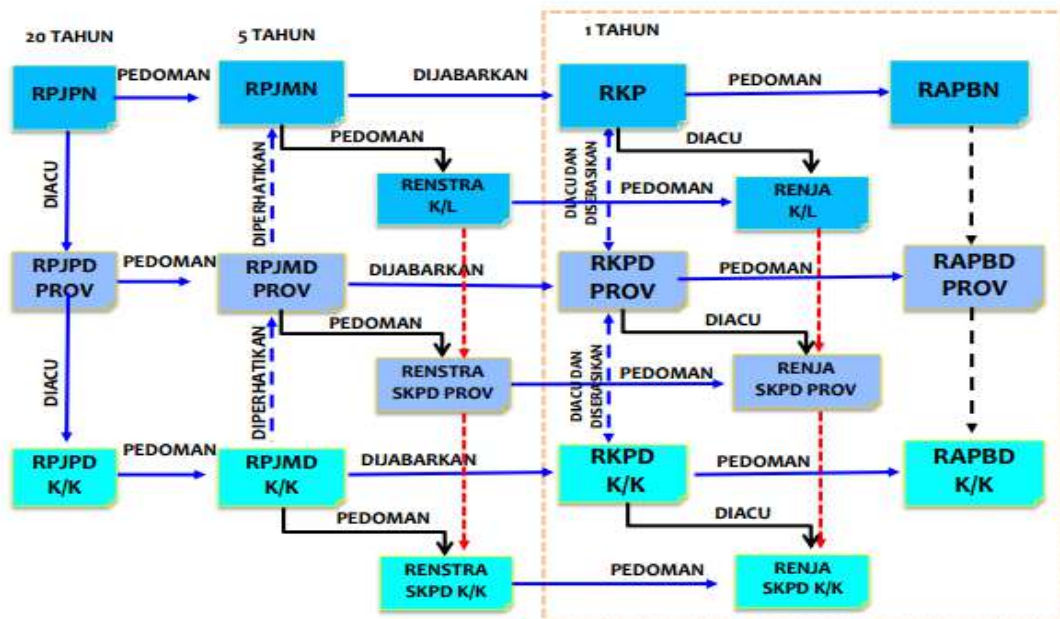
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 28) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor);
- 36) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 11);

- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 78);
- 41) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Tanggamus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra-PD yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahunnya. Pola hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

RPJPD harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), disamping itu akan dijabarkan pula di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah, dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah itulah Perangkat Daerah dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahunnya. Proses akhir dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yaitu tersusunnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, isu strategis kewilayahan tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Penurunan ketimpangan antar wilayah.
- 2) Penguatan pusat pertumbuhan wilayah.
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah.
- 4) Pengelolaan urbanisasi.
- 5) Pemanfaatan ruang.

Dari kelima isu strategis kewilayahan tersebut diatas, yang keterkaitannya sangat besar dengan Kabupaten Tanggamus yaitu isu strategis tentang penguatan pusat pertumbuhan wilayah karena Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu daerah yang ditetapkan menjadi Kawasan Industri (KI) sebagai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang diarahkan untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional tersebut harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

Tabel I.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	RPJMN										PERUBAHAN RPJMD	
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
1.	PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi KP : Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah P : Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³) Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik) Tambahan penyediaan air baku (m3/detik) (m3/detik) Tambahan debit air baku di kawasan strategis lainnya (m3/detik) (m3/detik)	4,0 4,3 4,3 -	4,4 11,3 11,3 0,1	4,7 11,4 11,4 0,1	5,1 11,4 11,4 0,7	5,4 11,4 11,4 0,7	283.664,7 16.838,5 16.838,5 535,2	 KI/KEK termasuk KI Tanggamus	 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	 Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)8,1 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen) Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun) Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	3,7 6,5 5,0 4,8 1.189 – 1.214 5,6	3,7 6,9 5,5 5,0 1.314 – 1.333 6,2	3,9 7,2 6,5 5,2 1.439 – 1.452 6,9	4,0 7,5 7,5 5,3 1.564 – 1.570 7,8	4,1 7,8 8,1 5,5 1.689 8,4	800.341,9				

NO	RPJMN								PERUBAHAN RPJMD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
	KP : Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa ProP : Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi Jalan Akses KI Tanggamus	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	370.385,2				
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0 – 3,3	3,1 – 3,5	3,2 – 3,7	3,2 – 4,0	3,5 – 4,5					
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7					
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0					
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0					
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0					
		Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)	5 KI – 8 KEK	9 KI – 8 KEK	12 KI – 8 KEK	15 KI – 8 KEK	16 KI – 8 KEK	296.235,0				
		Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	2,0	20,0	KI Tanggamus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
3.	PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	1.383.141,9				



NO	RPJMN								PERUBAHAN RPJMD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
	KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	38.748,0				
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325					
		Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43					
		Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	-	5	17	21	21					
		Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	-	7	8	9	10					
	ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43	37.938,7				
		Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)	3	5	7	9	10					
		Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah (unit)	3	5	7	9	10					
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	-	0,58	0,64	0,70	0,72	856,7	KI/KEK termasuk KI Tanggamus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	RPJMN										PERUBAHAN RPJMD	
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
4	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1213 orang	1021 orang	948 orang	876 orang	803 orang	224,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1,2	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah,	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa



NO	RPJMN										PERUBAHAN RPJMD	
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan			
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	57,1	Lampung Barat,	Kementerian Desa,	Meningkatkan Nilai Tambah	Program Pemberdayaan

NO	RPJMN								PERUBAHAN RPJMD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
		mengembangkan Desa Digital							Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
	Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	RPJMN								PERUBAHAN RPJMD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan			
	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat,	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

NO	RPJMN										PERUBAHAN RPJMD	
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Tulang Bawang, Way Kanan			
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	RPJMN										PERUBAHAN RPJMD	
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
5.	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan komoditas unggulan kopi Kawasan Kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung Kawasan Kopi (ha)	-	-	-	-	799,25	50,67	Provinsi Lampung, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan	Kementerian Pertanian	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Kegiatan Pengembangan komoditas unggulan lada Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	-	-	-	-	1.933,67	42,13	Provinsi Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Way Kanan	Kementerian Pertanian	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sumber : RPJMN 2020-2024

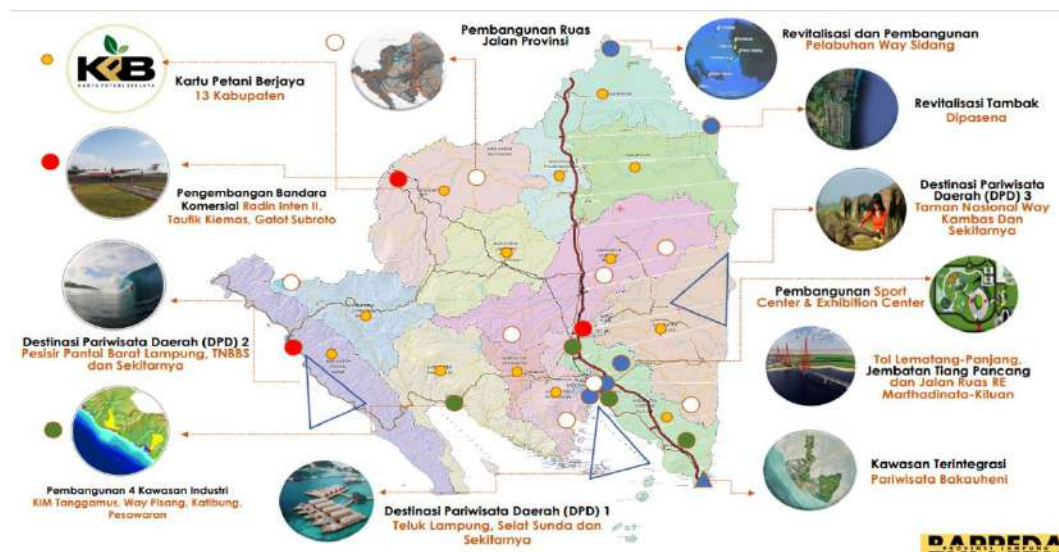
1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, ditetapkan Visi Provinsi Lampung yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” (*aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera*), dengan misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
- 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan daerah tersebut maka telah ditetapkan rencana pengembangan Kawasan yang salah satunya berupa 4 (empat) Kawasan Provinsi Lampung yaitu Kawasan Industri Tanggamus, Way Pisang, Katibung dan Pesawaran.

Gambar I.3 Pengembangan Kawasan Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2021

1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 saat ini direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Pada Peraturan Daerah tersebut tercantum Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, yaitu:

- 1) Kawasan Strategis Ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Gisting di Kecamatan Gisting;
- 2) Kawasan Strategis Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. Kawasan Waduk Batu Tegi di Kecamatan Air Naningan; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Pematang Sawa dan Semaka.

Pola ruang Provinsi Lampung yang terkait dengan Kabupaten Tanggamus meliputi :

- 1) Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, Kabupaten Tanggamus banyak terkait dengan keberadaan Hutan Lindung, Kawasan rawan bencana terutama daerah rawan longsor, Kawasan perlindungan setempat terutama daerah *Catchment Area* Bendungan Batutegi.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, terutama di Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
- 3) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, antara lain arahan rencana Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri.

1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap

keempat atau tahap terakhir dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yang memuat visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu :

- 1) Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis;
- 2) Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis;
- 3) Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik;
- 4) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.4 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025

Dalam kaitannya dengan dokumen Renstra-PD dan Renja-PD, Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renstra-PD. Perubahan Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD ini

serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah Kabupaten Tanggamus. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD.

1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011, didalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di perkotaan Kota Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Wonosobo, yang berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - a. Perkotaan Talang Padang, yang berfungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Pendukung Kegiatan Pertanian; dan
 - b. Perkotaan Gisting, yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. Perkotaan Srikuncoro (Semaka), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung;
 - b. Perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian; dan
 - c. Tekad Kecamatan Pulau Panggung yang berfungsi Perdagangan.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu, Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan Kelumbayan, dan Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat.

Tabel I.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
1	Kawasan Lindung															
1.1	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	1 Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		2 Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		3 Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		4 Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		5 Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		6 Penegakan hukum	Dinas Kehutanan	xxxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/	Pemkab	Mengelola Lingkungan	Program Pengelolaan



NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		pemberantas an pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)	Dan Perkebunan Kabupaten										APBD Kab		Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		7 Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		8 Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		9 Mengendalika n perambahan hutan dan alih fungsi hutan yang berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung hutan yang bersangkutan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		10 Mengendalika n pembangunan fisik dan perkembanga n aktifitas	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan / Badan Penanggulang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		binaan pada kawasan rawan bencana terutama di patahan/ sesar Semangka	an Bencana Daerah/Dinas PU Kabupaten													
		11 Meningkatkan kemampuan daerah aliran sungai untuk melangsungkan daur hidrologinya agar kinerja jaringan irigasi dapat ditingkatkan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
1.2	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	1 Penetapan kawasan lindung dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung	Bappeda Kabupaten/ Dinas Kehutanan dan Perkebunan	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		2 Identifikasi dan klasifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG		
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
		3	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung	BPLHD Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)	
		4	Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulan gan banjir	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		5	Memelihara DAS Way Sekampung dan Way Semangka yang merupakan bagian dari DAS penting yang terdapat di Prov.Lampung	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
1.3	Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	1 Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam laut	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		2 Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan , membangun dan memberdayak an masyarakat sekitar Taman Nasional.	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten			xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		3 Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten			xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		4 Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran TNBBS (rencana aksi bersama)	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		5 Pemantauan dan evaluasi	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
1.4	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	1 Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		2 Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana agar, tersusunnya peta risiko bencana gempa bumi yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		3 Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, dengan cara Percepatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		Pembuatan Peta Dasar (Rupabumi) Skala Besar, Penyusunan Data Akurat, Informasi, dan Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana															
		4 Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang Terbangunnya a system pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan UU.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		5 Pengaturan pembangunan dan tata bangunan sehingga Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		6	Pengaturan pembangunan dan tata bangunan sehingga Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx					APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		7	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx					APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		8	Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan multi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		9	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana Peningkatan kesiapan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
1.5	Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya	1 Identifikasi dan pemetaan kawasan lindung lainnya	Dinas Kehutanan & SDA	xxx	xxx								APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		2 Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx							APBN/APBD Prov/APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		3 Pelaksanaan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx							APBN/APBD Prov/APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		4 Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/APBD Prov/APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		5 Pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/APBD Prov/APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		6	Pengamanan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		7	Pengamanan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
2	Kawasan Budidaya																
2.1	Pengembang an Kawasan Permukiman	1	Pengembanga n kawasan permukiman perdesaan	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		2	Pengembanga n kota kecil kawasan pusat pertumbuhan	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		3	Pengembang an sarana prasarana kawasan tertinggal	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		4	Pengembanga n dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan	Dinas PU Kabupaten				xxx	xxx	xxx	xxx			APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilavahan	Program Pengembangan Permukiman

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		perbatasan laut di Pulau Pisang (Kecamatan Pesisir Utara) dan Pulau Batu Kecil														
		5 Revitalisasi kawasan tradisional/b ersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		6 Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan
		7 Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		9	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan; Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan an perumahan swadaya dan Pengembangan an Kasiba/Lisib a.	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan
		10	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan; Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan an perumahan swadaya dan Pengembangan an Kasiba/ Lisiba.	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan
		11	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampung an nelayan. Kegiatan ini ditujukan	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembang an															
		12 Revitalisasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		13 Revitalisasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		bersejarah yang bernilai atau bermakna penting														
		14 Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
		15 Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Jawa dan Kuripan	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman
2.2	Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan rakyat	1 Pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat		xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		2 Pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		3	Pengembanga n Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing).										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		4	Pengembanga n Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing).										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		5	Pengembanga n tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
		6	Pengembanga n tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (HAYATI)
2.3	Pengemban gan kawasan pertanian	1	Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		potensial terutama di Pugung, Talang Padang, Kota Agung Timur, Kotaagung Barat, Wonosobo, Semaka													keagamaan	
		2 Peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3 Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		4 Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		5 Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan	Program Penyuluhan Pertanian

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen													keagamaan	
2.4	Pengemban gan Kawasan Perkebunan	1 Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung dan atau TNBBS		xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2 Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung dan atau TNBBS	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		3 Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain : kopi, kelapa dalam, kakao, dan lada											APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		4	Peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		5	Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/ kawasan yang diprogramkan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		6	Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.5	Pengembangan kawasan peternakan	1	Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		2	Pengembang an kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (<i>organic farm</i>)	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3	Pengembang an kawasan integrasi perternakan - perkebunan (kakao, lada, kopi)	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan /Dinas Kehutanan dan Perkebunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4	Pengembang an kawasan integrasi perternakan - perikanan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.6	Pengemban gan Kawasan Perikanan Dan Kelautan	1	Pengembang an perikanan tangkap laut dalam	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		2	Pengembang an perikanan tangkap laut dalam	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab/ Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD							
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG				
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031								
		3	Pengembang an sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		4	Pengembang an sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		5	Pengembang an sentra budidaya perikanan air tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten													xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		6	Pengembang an sentra budidaya perikanan air tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		7	Pengembang an kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Wonosobo	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		8	Pengembang an kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Wonosobo	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
2.7	Pengembang an Kawasan Pertambanga n	1 Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		2 Pengembangan pertambangan tertutup (open pit) pada kawasan hutan lindung	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Swasta	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		3 Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		4 Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		5 Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANG GUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAK SANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan														
		6 Rehabilitasi lahan pasca tambang	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		7 Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		8 Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
2.8	Pengemban gan Kawasan Industri Unggulan	1 Pengembanga n industri pengolahan hasil laut	Dinas Koperindag / Dinas Kelautan dan Perikanan / Dinas Kehutanan dan Perkebunan / Swasta	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	RTRW												PERUBAHAN RPJMD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		2 Pengembangan industri pengolahan hasil laut	Dinas Koperindag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3 Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing	Dinas Koperindag										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		4 Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing	Dinas Koperindag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2.9	Pengembangan Kawasan Pariwisata	1 Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS	Dinas Pariwisata / Dinas Kehutanan dan Perkebunan / Swasta	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		2 Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS	Dinas Pariwisata	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



NO	RTRW													PERUBAHAN RPJMD		
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
		3 Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya	Dinas Pariwisata										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Dalam konteks penataan ruang, Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 juga diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus, meliputi:

1) Kawasan Pemanfaatan Umum;

a. Zona Pelabuhan

- Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
 - Perairan disekitar Pelabuhan Kota Agung dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-2;
 - Pelabuhan Pengumpul, meliputi Pelabuhan Kota Agung dan Pelabuhan Batu Balai;
 - Pelabuhan Pengumpan, meliputi Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Tabuan, Pelabuhan Kelumbayan;
 - Rencana lokasi Terminal Khusus, meliputi Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Limau, Putih Doh Kecamatan Kelumbayan, Teluk Paku Kecamatan Kelumbayan, dan Teluk Umbar Kecamatan Kelumbayan;
- Sub Zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
 - PPP Kota Agung dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-2;
 - PPI Guring dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-7;
 - PPI Karang Anyar dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-8;
 - PPI Tegineneng dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-9;
 - PPI Badak dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-10;
 - PPI Putih Doh dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-11;
 - PPI Penyandingan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-12;

b. Zona Perikanan Tangkap

- Sub zona pelagis meliputi Perairan Teluk Semaka dengan kode sub zona KPU-PT-P-2

c. Zona Perikanan Budi Daya

- Sub zona budi daya laut meliputi Kecamatan Pematang Sawa yaitu Karang Bera dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-49); Kecamatan Cukuh Balak yaitu Teluk Tengor (KPU-BD-BL-50); Kecamatan Kelumbayan yaitu Teluk Umbar (KPU-BD-BL-51, KPU-BD-BL-52), Kelumbayan (KPU-BD-BL-53 sampai KPU-BD-BL-55);

d. Zona Industri

- Sub zona industri maritim meliputi: perairan Kota Agung Timur yang masuk dalam wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Kota Agung; perairan Kecamatan Limau dengan kode sub zona KPU-ID-MR-1; dan perairan Kecamatan Cukuh Balak dengan kode sub zona KPU-ID-MR-2;

2) Kawasan Konservasi;

a. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

- KKP Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Pemanfaatan meliputi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus dengan kode KKP-TWP-KT

b. Kawasan Suaka Alam

- Cagar alam laut Bukit Barisan Selatan dengan kode KSA-CAL-2 di Kecamatan Pematang Sawa

3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak ada yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus.

4) Alur Laut.

a. Alur Pelayaran

- Alur pelayaran internasional/nasional, meliputi alur pelayaran di Perairan Teluk Semaka yaitu dari Pelabuhan Kota Agung menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pematang Sawa dan Pulau Tabuhandengan kode (AL-AP-PI-1);

- Alur pelayaran regional, meliputi alur pelayaran Perairan Teluk Semaka yaitu Kelumbayan-Pulau Betuah dengan kode AL-AP-PR-1;
- Alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran di Teluk Semaka yaitu Kota Agung-Pematang Sawa (AL-AP-PL-5), Kota Agung Cukuh Balak (AL-AP-PL-6), Cukuh Balak-Pulau Tabuan (AL-AP-PL-7);
- b. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut
 - Rencana alur kabel PLN, meliputi Pulau Sawang Balak kode AL-APK-KL-3 (Pekon Doh Cukuh Balak-Pulau Sawang Balak) dengan kode AL-APK-KL-3;
- c. Migrasi Biota Laut
 - Alur migrasi penyu, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Bengkunat-Pulau Betuah-Belimbing-Pulau Tabuhan-Kelumbayan-Punduh Pidada-Padang Cermin-Katibung-Kalianda-Sebesi-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MP;
 - Alur migrasi mamalia laut, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Pulau Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MM.

1.3.6 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

Salah satu komitmen Indonesia dalam mensejahterakan rakyat dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan Presiden ini merupakan bentuk komitmen internasional negara Indonesia yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Terkait hal tersebut, dukungan pemerintah daerah mutlak diperlukan, dan dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Pengintegrasian TPB kedalam RPJMD bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Tabel I.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
				Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
1	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	1.2.1* Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	1. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan; 2. Kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha; 3. Penguatan jaringan dan program	-	Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata Sasaran : 1. Pendapatan Perkapita Masyarakat 2. Efektivitas dan efisiensi penanaman modal 3. Meningkatkan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1. Penguatan Tim Koordinasi Daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs; 2. Peningkatan kapasitas pemda dalam analisis perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan; 3. Pengembangan sistem data dan layanan 1 pintu untuk mensinergikan program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan; 4. Memperluas lapangan dan kesempatan kerja kepada masyarakat; 5. Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya; 6. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat; 7. Mengoptimalkan penataan tempat berusaha bagi usaha ekonomi kerakyatan melalui upaya revitalisasi pasar-pasar tradisional; 8. Pemantapan jaringan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan; 9. Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsive; 10. Peningkatan kapasitas Pemda dalam analisis perencanaan dan penganggaran untuk percepat penanggulangan kemiskinan; 11. Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran yang mendorong peningkatan keuangan inklusif; 12. Memperluas lapangan dan kesempatan kerja kepada masyarakat; 13. Mendorong kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan dan mentoring; 14. Pengembangan usaha sosial rintisan (social Entrepreneurs) untuk mengentaskan permasalahan sosial masyarakat; 15. Meningkatkan jalan mantap guna memperlancar distribusi barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah; 16. Koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat (vertikal) terkait dalam rangka pemutakhiran data kemiskinan;	1. Program pemberdayaan sosial; 2. Program perlindungan dan jaminan sosial; 3. Program pemberdayaan sosial; 4. Program pemncanaan dan pengembangan industri; 5. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan; 6. program pendidikan dan latihan perkoperasian; 7. Program pengembangan UMKM; 8. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 9. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 10. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; 11. Program penanggulangan bencana; 12. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 13. Program pengelolaan keanekaragaman hayati; 14. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 15. Program pengelolaan informasi, komunikasi publik; 16. Program pengelolaan aplikasi informatika; 17. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 18. Program kawasan permukiman; 19. Program pengembangan perwakilan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
				Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
							17. Pengembangan sistem data dan layanan 1 pintu untuk mensinerginya program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.	
		1.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 orang	1. Perluasan jaringan telekomunikasi pa da desa-desa pelosok; 2. Penguatan jaringan transportasi	1. Keterbatasan infrastruktur; 2. Potensi bencana yang cukup besar, seperti longsor gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran	Tujuan : Menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana Sasaran : 1. Penurunan tingkat kerentanan masyarakat miskin di pesisir, dataran tinggi dan perkotaan; 2. Peningkatan kemampuan tanggap bencana masyarakat; 3. Peningkatan Kompetensi Tim Tanggap Bencana di wilayah rawan bencana dan Satgas Bencana Daerah	1. Memperkuat satgas kebencanaan di wilayah pemerintah Kabupaten Tanggamus; 2. Memberikan peringatan dini bencana kepada seluruh masyarakat; 3. Memberikan edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri kepada masyarakat saat terjadi bencana, cata menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana; 4. Memberikan rambu atau tanda pada lokasi rawan bencana; 5. Menggalakan penanaman mangrove sebagai langkah penanggulangan bencana berbasis konservasi dengan menyandingkan opsi pemecah gelombang untuk mengurangi bencana akibat tsunami.	
2	Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1. Peningkatan mutu Sumber daya manusia; 2. Menggali potensi usaha; 3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain	Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah	Tujuan : Mewujudkan perekonomian masyarakat kuat dan berkembang Sasaran : 1. Pertumbuhan UMKM di berbagai sektor; 2. Stabilitas harga-harga komoditas di pasaran; 3. Terciptanya lapangan pekerjaan yang layak; 4. Peningkatan PDB perkapita	1. Meningkatkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dari berbagai sektor; 2. Memberikan pelatihan dan kursus kepada masyarakat tentang berbagai keterampilan; 3. Membuka peluang berusaha dengan UMKM-UMKM; 4. Memperkuat system keahlian melalui penataan kelembagaan, peningkatan kerjasama dengan industri dan skema pembiayaan pelatihan; 5. Menerapkan struktur skala upah yang lebih baik; 6. Meningkatkan pertumbuhan investasi padat karya	1. Program penelitian dan pengembangan daerah; 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan daerah; 3. Program perencanaan dan pembangunan industri; 4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan; 5. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional; 6. Program pendidikan dan latihan perkoperasian; 7. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; 8. Program pengembangan UMKM; 9. Program pemberdayaan UMKM; 10. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 11. Program pengembangan kebudayaan;

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
									12. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; 13. Program pemasaran pariwisata; 14. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
		10.1.1.(b)	PDB per kapita			Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga; Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;		1. Menggali komoditi unggulan di Kabupaten Tanggamus dari sektor perkebunan (Kopi, Pala, lada, durian dsb); 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata; 3. Melakukan pendampingan terhadap UMKM yang sudah ada dan memberikan dorongan untuk berdirinya UMKM dan ekonomi kreatif; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan- pelatihan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian.	1. Program pelatihan kerja dan produktifitas; 2. Program perekonomian dan pembangunan; 3. Program peempatan tenaga kerja; 4. Program pengelolaan perikanan tangkap; 5. Program pengelolaan perikanan budidaya; 6. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; 7. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 8. Program penyuluhan pertanian.
		8.1.1.(a)	Jumlah desa mandiri	Pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan fasilitas pariwisata		Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga; Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;	Tujuan : Mewujudkan terciptanya desa yang mandiri, tangguh dan berdaya saing Sasaran : 1. Tercapainya kemandirian desa dibidang lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui penguatan potensi desa; 2. Peningkatan jumlah desa yang memiliki fasilitas publik yang memadai dan efisien.	1. Menggali komoditi unggulan di Kabupaten Tanggamus dari sektor perkebunan (Kopi, Pala, lada, durian dsb); 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata; 3. Melakukan pendampingan terhadap UMKM yang sudah ada dan memberikan dorongan untuk berdirinya UMKM dan ekonomi kreatif; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan- pelatihan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian.	1. Program pengembangan kebudayaan; 2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; 3. Program pemasaran pariwisata; 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 5. Program penyelenggaraan jalan 6. Program pengembangan jalan konstruksi.

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
		8.9.1.*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Promosi pariwisata ke luar negeri melalui media online		Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;	Tujuan : Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Sasaran : 1. Promosi pariwisata interaktif secara masif berbasis media informasi; 2. Peningkatan fasilitas pariwisata yang unggul, layak, dan berdaya saing dengan mengedepankan kearifan lokal.	1. Mengambil langkah yang responsif dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga dapat semakin terkendali dan langkah pemulihan ekonomi dapat terus berjalan; 2. Percepatan vaksin, penguatan 3T (Terpencil, Tertinggal, Terbelakang), disiplin protocol kesehatan hingga pemberian perlindungan sosial sampai kasus terkendali; 3. Melaksanakan dan berperan serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat bermanfaat besar bagi masyarakat; 4. Melaksanakan dan berperan serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat bermanfaat besar bagi masyarakat; 5. Mengaktifkan Pokdarwis yang sudah ada dan menciptakan Pokdarwis- Pokdarwis baru.	1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 2. Program pengelolaan aplikasi informasi
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Promosi pariwisata ke luar negeri melalui media online		1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata; 2. Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata		1. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari berbagai destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus; 2. Peningkatan informasi produk pariwisata ke pasar dunia melalui media online; 3. Mendorong integrasi sektor swasta yang lebih besar pada industri pariwisata dengan memberikan fasilitas kemudahan investasi dan akses pasar; 4. Peningkatan relevansi produk pariwisata yang ditawarkan melalui media pemasaran sesuai dengan pengalaman actual wisatawan; 5. Pengembangan model partisipasi masyarakat berbasis nilai-nilai lokal untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi; 6. Peningkatan integrasi kelembagaan kepariwisataan sebagai kesatuan pengelolaan dengan destinasi wisata yang mampu bersaing di pasar dunia.	1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi public; 2. Program pengelolaan aplikasi informasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Promosi pariwisata melalui media online dan elektronik		Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata;		1. Melakukan sosialisasi peraturan kunjungan wisata dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19; 2. Menerapkan pengawasan ketat terhadap tempat- tempat wisata yang buka selama masa pandemic Covid- 19; 3. Menata tempat- tempat wisata sesuai dengan tatanan pada masa pandemi Covid-19; 4. Memberikan hiburan dan voucher menarik bagi pengunjung; 5. Melakukan promosi melalui media massa dan media elektronik.	1. Program perencanaan dan pembangunan industri; 2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan; 3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional; 4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian; 5. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; 6. Program pengembangan UMKM; 7. Program pemberdayaan UMKM
3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	1. Penguatan regulasi dan anggaran; 2. Peningkatan gizi anak dan ibu hamil; 3. Peningkatan layanan kesehatan; 4. Penerapan perilaku pola hidup sehat		Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas.	Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Sasaran : 1. Peningkatan proporsi anggaran kesehatan ibu dan anak; 2. Peningkatan Kompetensi Petugas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak; 3. Peningkatan kemandirian kesehatan dan gizi para ibu; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.	1. Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga profesional dibidang pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan kebersihan dan sanitasi ditingkat individu, keluarga dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat serta kepedulian terhadap kelangsungan perkembangan dini anak; 3. Pemberantasan penyakit menular dan meningkatkan cakupan imunisasi	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 3. Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman; 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 5. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; 6. Program hak anak (PHA); 7. Program perlindungan khusus anak; 8. Program pembinaan keluarga; berencana; 9. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga.
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup			Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas.		1. Meningkatkan fasilitas bersalin, tenaga profesional yang membantu proses kelahiran sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Tanggamus; 2. Meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil; 3. Meningkatkan pelayanan ibu dan neonatal berkesinambungan baik di fasilitas kesehatan negeri dan swasta	1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 4. Program pembinaan keluarga berencana; 5. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat;

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan(a) Filariasis dan (b) Kusta			Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas.	Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Sasaran : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat; 2. Peningkatan jumlah tenaga pelayanan kesehatan yang kompeten dan handal; 3. Peningkatan kapasitas unit pelayanan kesehatan di tingkat Pekon	1. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); 2. Sosialisasi dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 3. Peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, diagnose, penanganan penyakit dan pelayanan kesehatan; 4. Peningkatan penyediaan obat dan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan; 5. Pengendalian faktor resiko penyakit yang berfokus pada perluasan deteksi dini dan real time surveillance, serta penguatan keamanan kesehatan; 6. Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan; 7. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 4. Program pembinaan keluarga; berencana; 5. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 6. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga.
		3.4.1.(a)	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 tahun			Rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan dasar masyarakat:		1. Penguatan kebijakan dan regulasi kesehatan; 2. Penguatan pendidikan kesehatan di sekolah; 3. Penyuluhan tentang pendidikan kesehatan di masyarakat.	1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 3. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga; 5. Program perlindungan khusus anak
		3.4.1.(b)	Persentase Prevalensi Tekanan Darah Tinggi			Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas.		1. Pengembangan kawasan dan lingkungan sehat (kota sehat, perumahan sehat, pasar sehat, sekolah sehat, dll); 2. Sosialisasi perilaku hidup sehat; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, diagnose, penanganan penyakit, pengelolaan penyakit, rehabilitasi; 4. Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan; 5. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat; 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 3. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga; 5. Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman;

NO	TUJUAN	INDIKATOR	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
				Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
		3.7.1.(b)	Persentase Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern		Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas.	Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Sasaran : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; 2. Peningkatan ketersediaan layanan kontrasepsi modern di unit-unit layanan kesehatan ibu dan anak	1. Penguatan kebijakan kesehatan dan regulasi kesehatan; 2. Sosialisasi tentang program keluarga berencana dan wawasan tentang jenis kontrasepsi.	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 3. Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman; 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 5. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; 6. Program pembinaan keluarga; berencana; 7. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga.
		3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan		Masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki akreditasi utama, hanya 2 dari 23 Puskesmas	Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera Sasaran : Peningkatan kualitas dan kuantitas unit pelayanan kesehatan masyarakat	1. Penguatan kebijakan dan regulasi tentang keluarga berencana; 2. Melakukan sosialisasi tentang kehidupan yang sejahtera berbasis keluarga berencana; 3. Melakukan pendekatan sosial kepada tokoh agama dan pemangku adat; 4. Peningkatan pelayanan mengenai keluarga berencana.	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat; 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 3. Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman; 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 5. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; 6. Program pembinaan keluarga; berencana; 7. Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga.
4	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1. Pelaksanaan proses belajar mengajar melalui tatap muka maupun daring; 2. Penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat melalui perpustakaan keliling; 3. Pemberian edukasi untuk kembali	Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD dan SMP masih sangat rendah.	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Sasaran : 1. Peningkatan sumber daya manusia unggul, berkerakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien;	1. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah; 2. Memberikan bantuan pendidikan yang memadai bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu; 3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas keseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus; 4. Menambah tenaga pendidik yang berkualitas ke seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus; 5. Menyediakan fasilitas belajar mengajar di sekolah-sekolah; 6. Menyediakan layanan perpustakaan di setiap daerah; 7. Menumbuhkan budaya literasi di masyarakat terutama pada anak-anak usia sekolah.	1. Program pemberdayaan sosial; 2. Program perlindungan dan jaminan sosial;

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
				bersekolah; 4. Pendampingan pendidikan dan ketrampilan kerja; 5. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan			2. Peningkatan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan dan penelitian dibidang keguruan.		
		4.6.1(a)	Skenario persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata			1. Meningkatkan kualitas guru/pengajar dengan sertifikasi, pelatihan dan alokasi tunjangan; 2. Meningkatkan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang terbaik; 3. Memberikan fasilitas media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti; 4. Memberikan penempatan guru sesuai dengan latar belakang keilmuannya	
		4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata			1. Meningkatkan kualitas guru/pengajar dengan sertifikasi, pelatihan dan alokasi tunjangan; 2. Meningkatkan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang terbaik; 3. Memberikan fasilitas media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti; 4. Memberikan penempatan guru sesuai dengan latar belakang keilmuannya	
5	Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara	10.1.1.(a)	Proporsi Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	1. Inventarisasi Pekon; 2. Pembinaan Pekon; 3. Pengembangan Fasilitas jalan			Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Sasaran Peningkatan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien	1. Meningkatkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dari berbagai sektor; 2. Memberikan pelatihan dan kursus kepada masyarakat tentang berbagai keterampilan; 3. Membuka peluang berusaha dengan UMKM-UMKM; 4. Memperkuat system keahlian melalui penataan kelembagaan, peningkatan kerjasama dengan industri dan skema pembiayaan pelatihan; 5. Menerapkan struktur skala upah yang lebih baik;	1. Program pemberdayaan sosial; 2. Program perlindungan dan jaminan sosial;

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
		10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal diharapkan akan terus berkurang.	Pengembangan potensi Desa/ Pekon		1. Masih ada 28 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial; 2. Keterbatasan infrastruktur	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Sasaran : Peningkatan sumber daya manusia unggul, berkerakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien	1. Memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipasi, demokratis, aspiratif dan transparan; 2. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan investasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun system perekonomian pedesaan; 3. Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan; 4. Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industry, pertanian, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata perkebunan, serta peternakan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki desa; 5. Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang; 6. Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan	1. Program administrasi Pemerintah Desa; 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa; 4. Program kawasan permukiman; 5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 6. Program pengembangan permukiman; 7. Program penyelenggaraan jalan.
		10.1.1.(c)	jumlah desa mandiri	Penguatan anggaran dan pengembangan potensi desa		Keterbatasan infrastruktur		1. Memperkuat regulasi dan kebijakan tentang program desa mandiri; 2. Menyiapkan dukungan modal bagi atau asset utama seperti sumber daya local desa, tenaga kerja yang memiliki ketrampilan; 3. Memperkuat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintah desa	1. Program administrasi Pemerintah Desa; 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa; 4. Program kawasan permukiman; 5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 6. Program pengembangan permukiman; 7. Program penyelenggaraan jalan.

NO	TUJUAN	INDIKATOR		REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM PERUBAHAN RPJMD				
					Gambaran Umum	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah
6	Tujuan 13. Penanggulangan Perubahan Iklim	13.3.1(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1. Pelaksanaan program kampung iklim; 2. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah; 3. Mewajibkan sekolah untuk melaksanakan program Adiwiyata dan School My darling; 4. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Pekon	Terdapat kecamatan yang masuk dalam kelas resiko sangat rentan sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Sawa di Desa Teluk Brak, Kecamatan Ulu Belu di Desa Tanjung Baru, Sinar Banten dan Petay Kayu, dan Kecamatan Kalumbayan di Desa Pekok Unggak. Sedangkan di beberapa kecamatan lainnya memiliki rata-rata tingkat kerentanan dengan kelas resiko cukup rentan.	1. Potensi bencana yang cukup besar, seperti longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran; 2. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus	Tujuan : Mewujudkan masyarakat berketahanan terhadap perubahan iklim, meliputi adaptasi dan mitigasi Sasaran : 1. Terintegrasi pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kedalam kurikulum pembelajaran lembaga pendidikan formal dan informal. 2. Lembaga/komunitas masyarakat yang berperan aktif dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 3. Sinergitas pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1. Melaksanakan sosialisasi tentang masyarakat peduli lingkungan di tingkat Kecamatan; 2. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah tentang program sekolah Adiwiyata dan pelaksanaan program school my darling; 3. Sosialisasi dan pembinaan program kampung iklim ditingkat Pekon; 4. Mewajibkan muatan pendidikan berwawasan lingkungan masuk dalam kurikulum sekolah; 5. Mewajibkan muatan peduli lingkungan dalam program desa	1. Program perencanaan lingkungan hidup; 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 3. Program pengelolaan kehutanan; 4. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; 5. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; 6. Program pengelolaan persampahan; 7. Program pengelolaan pendidikan; 8. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 adalah:

- 1) Memperbaharui arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus pada periode 2018-2023;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan diwilayah Kabupaten Tanggamus;
- 5) Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 6) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 7) Sebagai instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

Sehubungan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 2) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat;
- 4) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 5) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, social dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisa, gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Uum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi dan statistik tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2013-2018, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018- 2023, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hasil-hasil rekomendasi dalam Perubahan KLHS RPJMD Kabupaten Tanggamus serta perkembangan penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

III. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta proyeksi keuangan daerah selama lima tahun.

IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan yang akandiperbaiki dan diselesaikan melalui pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.



IX. Penutup

Pada bagian ini dicantumkan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun terkait dengan pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

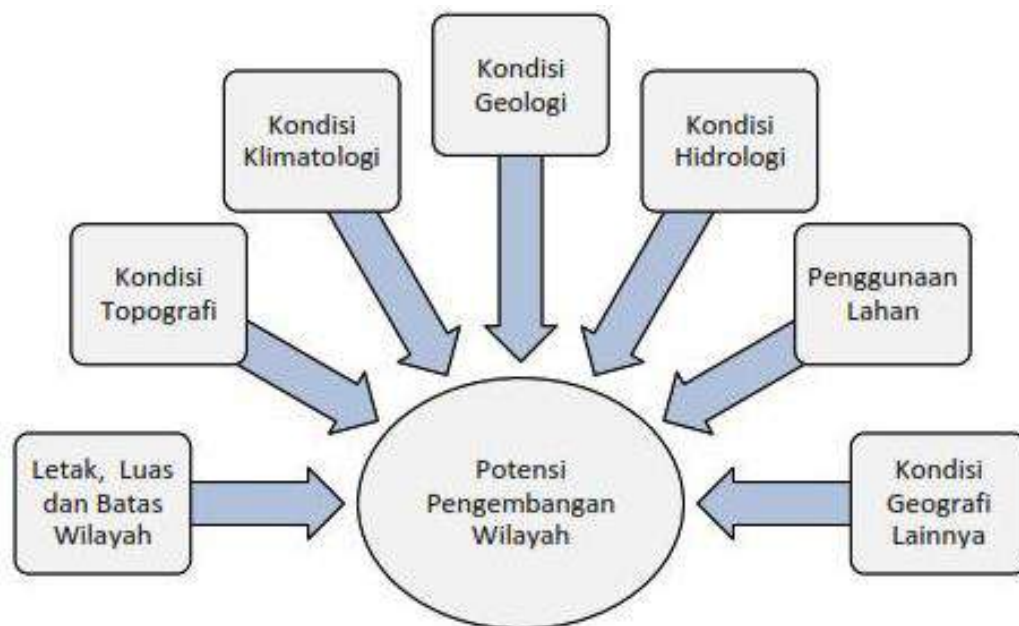


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Aspek ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, serta distribusi penduduk per Kecamatan.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

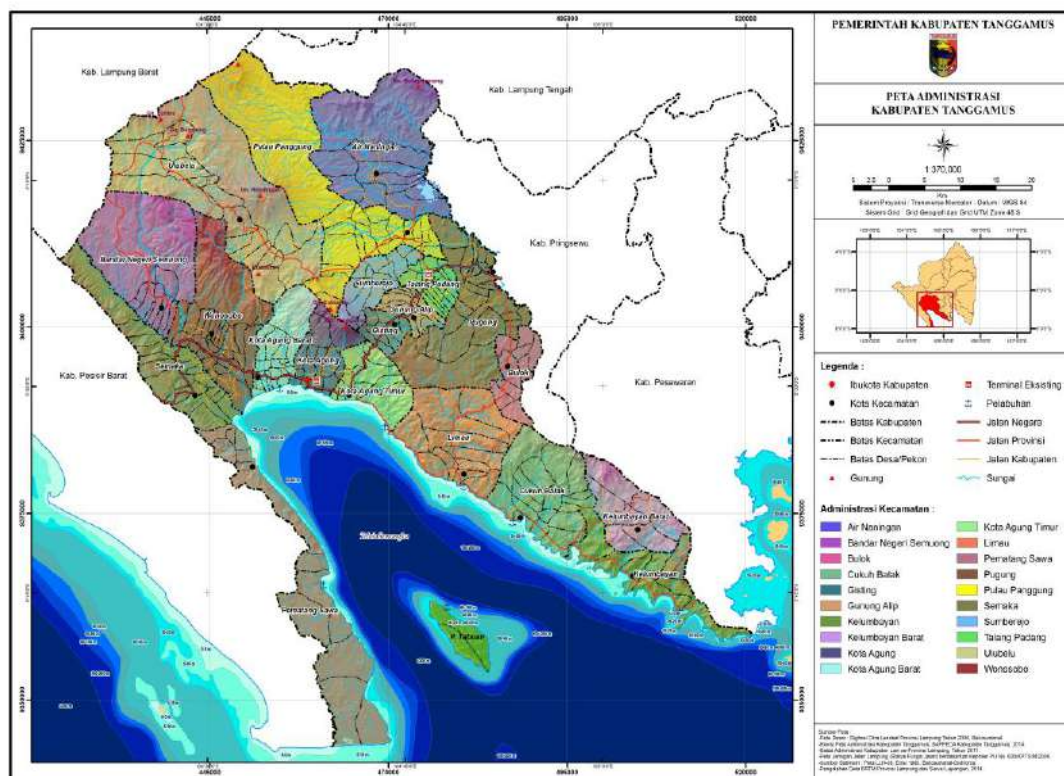
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.654,96 Km² yang terdiri dari daratan 2.855,46 Km² dan lautan 1.799,50 Km² yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2021

Wilayah Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemeritahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang disebut Marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung, 5 (lima) Marga tersebut adalah :

- 1) Marga Gunung Alip.
- 2) Marga Benawang.
- 3) Marga Belunguh.
- 4) Marga Pematang Sawa.
- 5) Marga Ngarip.

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu :

- 1) Marga Gunung Alip (Talang Padang).
- 2) Marga Benawang.
- 3) Marga Belunguh.
- 4) Marga Pematang Sawa.
- 5) Marga Ngarip.
- 6) Marga Negara Batin.

Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003, kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc. dan Bambang Kurniawan, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Sujadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008-2013 hasil Pilkada langsung yang pertama dilakukan di kabupaten ini. Kemudian sesuai hasil Pilkada kedua di Kabupaten Tanggamus tahun 2012, pada tanggal 15 Februari 2013 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017, Gubernur Lampung secara resmi melantik H. Samsul Hadi, M.Pd.I sebagai Bupati Tanggamus definitif sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maka Sekretaris Daerah Andi Wijaya, S.T., M.M. ditunjuk menjadi Plh. Bupati Tanggamus dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018, selanjutnya

Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Ir. Zainal Abidin, M.T. menjadi Penjabat Bupati Tanggamus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 21 September 2018.

Berdasarkan hasil Pemilukada Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Juni 2018 maka telah dilantik Kepala Daerah Terpilih Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan Hi. AM. Syafi'i, S.Ag. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 oleh Gubernur Lampung pada tanggal 20 September 2018 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 21 September 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahrkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan

pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209.63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170.90	3.67
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98.12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76.93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185.29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73.33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101.30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437.21	9.39
9	Ulu Belu	Ngarip	323.08	6.94
10	Air Naningan	Air Naningan	186.35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45.13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56.77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalam	32.53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25.68	0.55
15	Pugung	Rantau Tjang	232.40	4.99
16	Bulok	Sukamara	51.68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	133.76	2.87
18	Kelumbayan	Napal	121.09	2.60
19	Limau	Kuripan	240.61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	53.67	1.15
	LUAS DARATAN		2,855.46	
	LUAS LAUTAN		1,799.50	
	LUAS KABUPATEN TANGGAMUS		4,654.96	

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2021

Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2021

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104°18' BT – 105°12' BT dan 5°05' LS – 5°56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

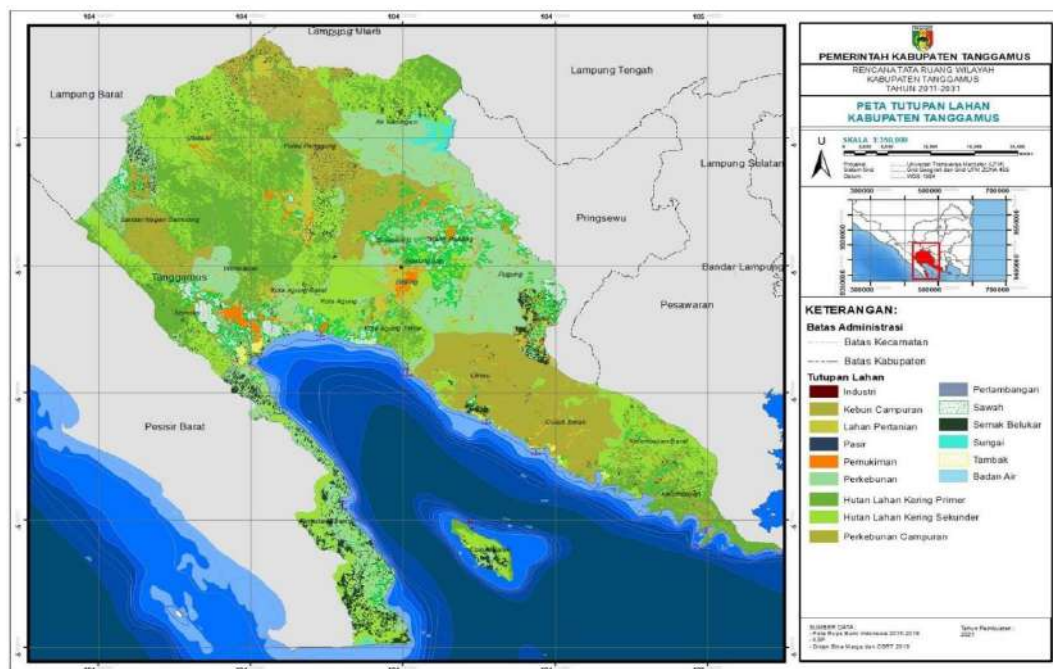
Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering/semak, semak belukar, tambak dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 62%. Sedangkan jenis tutupan lahan sawah memiliki prosentase 5% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan tambak sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Penutupan Lahan Tahun 2020 Di Kabupaten Tanggamus

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	287,17
2	Hutan lahan kering sekunder	28.331,60
3	Hutan mangrove sekunder	69,00
4	Perkebunan	485,48
5	Pemukiman	8.541,77
6	Pertambangan	71,74
7	Pertambangan	3.267,16
8	Pertanian lahan kering campur semak	226.626,97
9	Sawah	16.584,13
10	Semak belukar	6.783,44
11	Semak belukar rawa	140,28
12	Tambak	402,25
13	Tanah terbuka	206,15
14	Tubuh air	1.067,43
	Total Luas (Ha)	292.864,58

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021

Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021

2.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

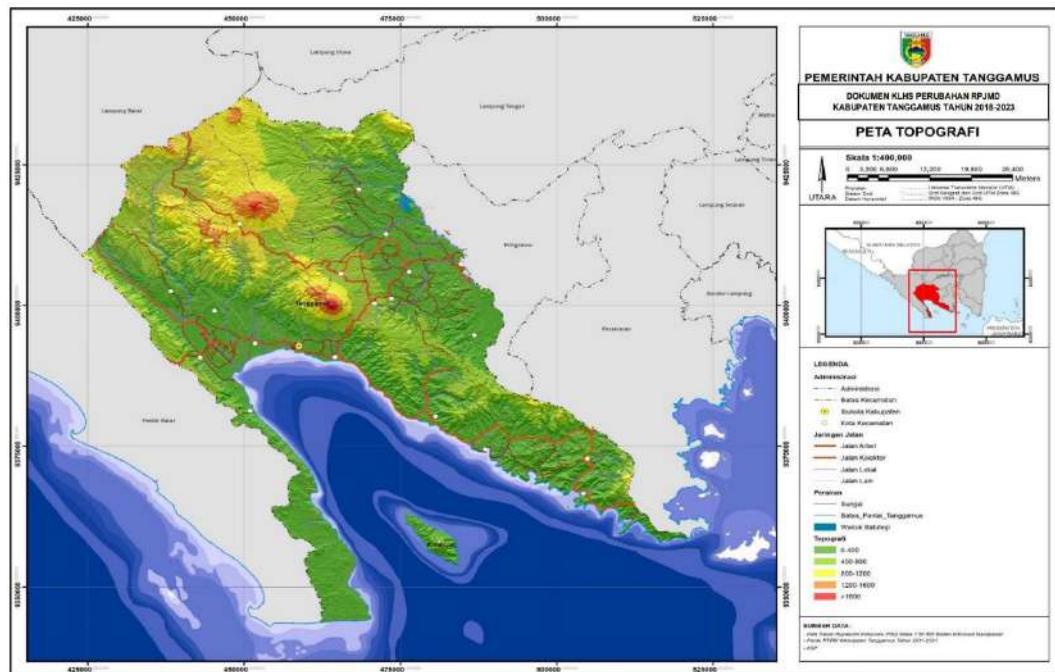
Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%

Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus



Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwartir berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwartir tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Panggung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

- 1) Klasifikasi menurut USDA (*United States Department of Agriculture*).
- 2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT).
- 3) Versi unit lahan menurut Report.

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
- 2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
- 3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
- 4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.
- 5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
- 6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Biji Besi

Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.

2) Mangan

Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral piroklorit dengan kadar Mn antara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.

3) Emas

Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

4) Galena

Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.

5) Pasir Besi

Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6) Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7) Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m³), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m³) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m³).

8) Andesit

Batu Andesit di Kabupaten Tanggamus tersebar merata di beberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Naningan (sumber daya tereka 2.000.000 m³), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m³), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m³), Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m³), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m³), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m³), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m³), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m³), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m³), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m³).

9) Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m³).

10) Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m³

11) Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12) Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13) Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di temui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14) Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m³ dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15) Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m³

16) Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m³) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17) Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

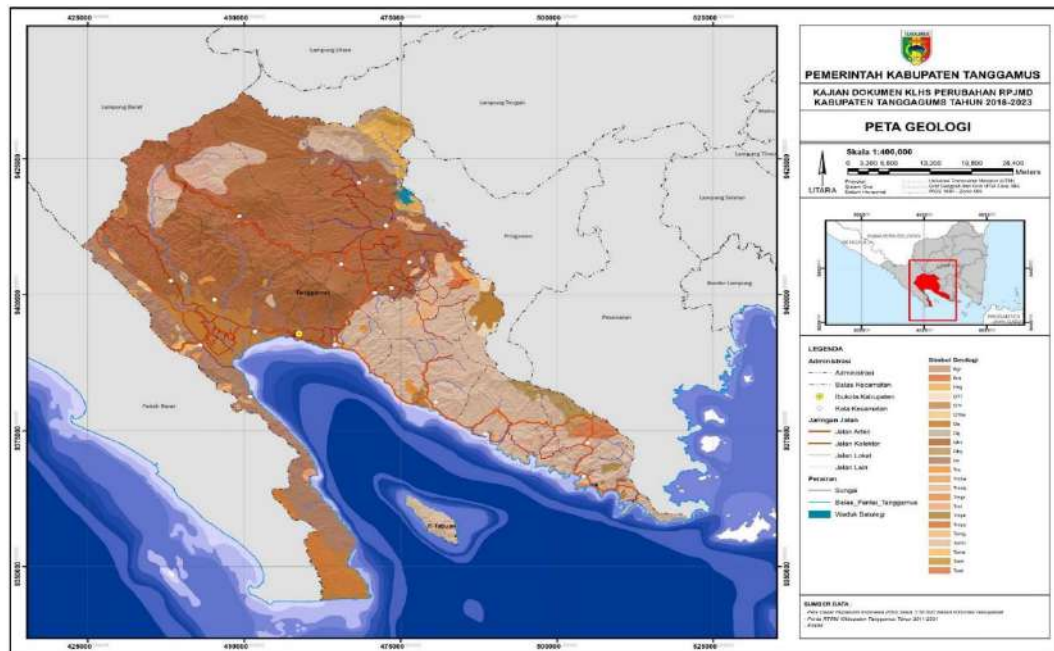
18) Marmer

Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m³).

19) Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus



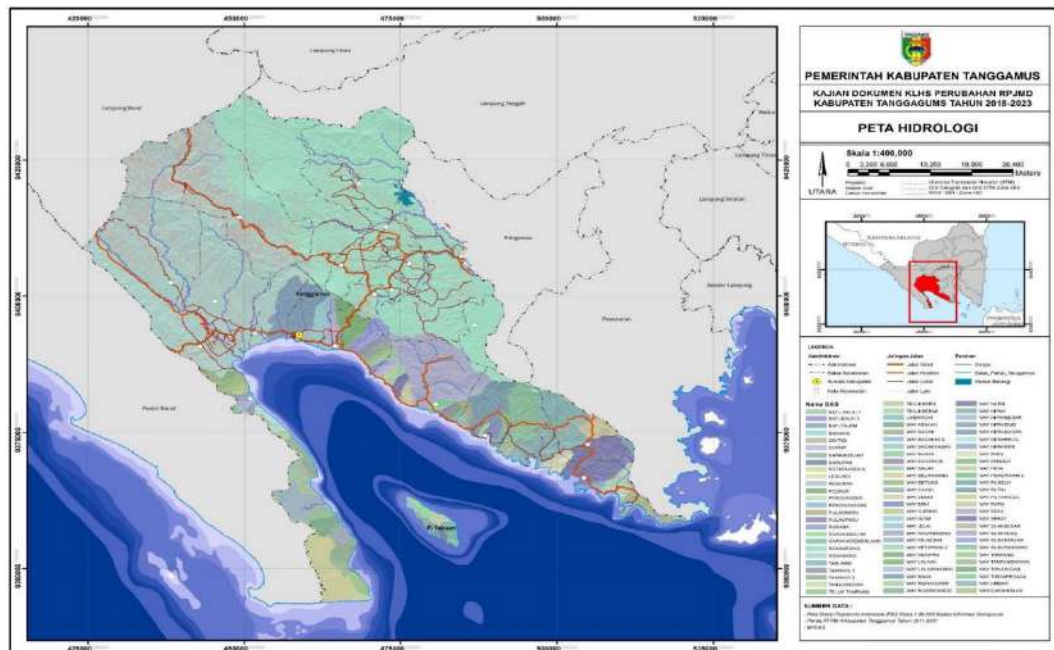
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 Km², yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengendalian banjir dan pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung adalah 479.252 Km².

Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanggamus, 2020

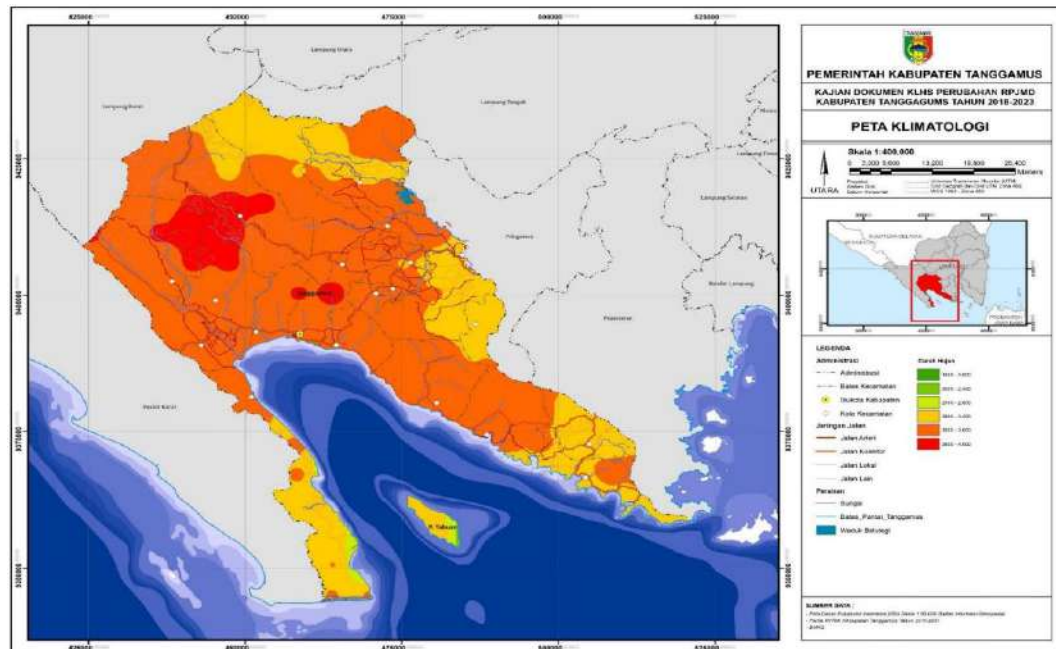
2.1.1.6 Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 °C (Derajat Celcius) sampai 30 °C pada ketinggian 20-60 m diatas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 °C.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu 80%-88%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun. Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian

besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B – 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanggamus, 2020

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya air ini akan menentukan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Penetapan daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengkonversi lahan-lahan yang tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung dan sawah beririgasi teknis.

Berdasarkan pada kondisi dan analisa potensi lahan serta bangunan maka daya tampung lahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun 2031 masih tercukupi. Luas daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di masa yang akan datang adalah 115.360 Ha atau 40%. Untuk lebih jelasnya ketersediaan dan daya tampung lahan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMU KIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
1	Wonosobo	20.963	218	3.183	11.295	6.267	5,4
2	Semaka	17.090	220	2.420	1.505	12.945	11,2
3	B. Negeri Semuong	9.812	113	-	-	9.699	8,4
4	Kota Agung	7.693	238	1.465	-	5.990	5,2
5	Pematang Sawa	18.529	110	1.298	-	17.121	14,8
6	Kota Agung Timur	7.333	116	3.358	2.013	1.846	1,6
7	Kota Agung Barat	10.130	115	2.917	3.765	3.333	2,9
8	Pulau Panggung	43.721	184	2.404	38.211	2.077	1,8
9	Air Naningan	32.308	162	-	29.562	2.584	2,2
10	Ulu Belu	18.635	229	1.200	15.203	2.003	1,7
11	Talang Padang	4.513	270	2.000	2.013	230	0,2
12	Sumberejo	5.677	188	1.388	-	4.101	3,6
13	Gisting	3.253	211	793	-	2.249	1,9
14	Gunung Alip	2.568	116	2.100	-	352	0,3
15	Pugung	23.240	336	3.544	15.156	4.204	3,6
16	Bulok	5.168	125	-	-	5.043	4,4
17	Cukuh Balak	13.376	142	1.425	11.546	263	0,2
18	Kelumbayan	12.108,60	70	1.223	4.054	6.762	5,9
19	Limau	24.061	122	953	-	22.986	19,9
20	Kelumbayan Barat	5.367,40	62	-	-	5.306	4,6
	JUMLAH	285.546	3.347	31.671	134.324	116.204	100

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

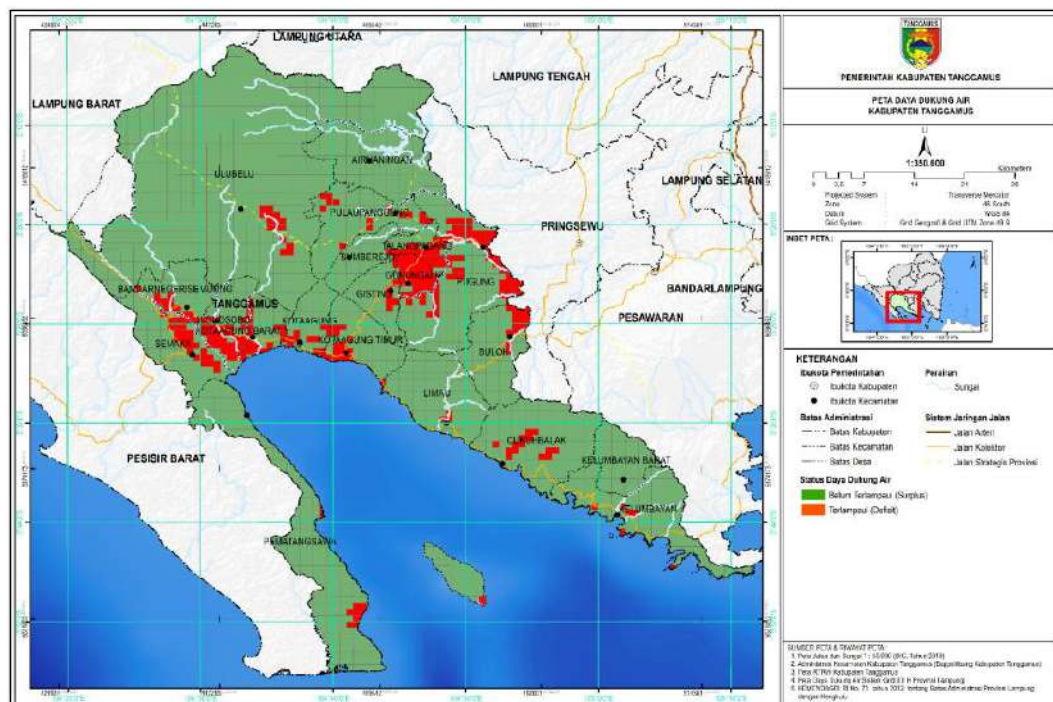
Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2031 adalah untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebesar 30% dari luas wilayah menjadi prioritas dalam pengalokasiannya. Untuk kawasan budidaya terdiri atas kebutuhan pengembangan perumahan seluas 5.185 Ha dan pengembangan prasarana dan sarana seluas 3.486 Ha.

Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031

NO	JENIS KEGIATAN	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)	KETERANGAN
I	Daya Tampung	116.204	
II	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan Lindung	85.664	Dari luas wilayah 30%
2	Kawasan Budidaya		
	- Perumahan	5.185	
	- Prasarana	2.324	Dari luas perumahan 30%
	- Sarana	1.162	Dari luas perumahan 20%
III	Jumlah (1+2)	94.335	
IV	Cadangan (I – (1+2))	21.869	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

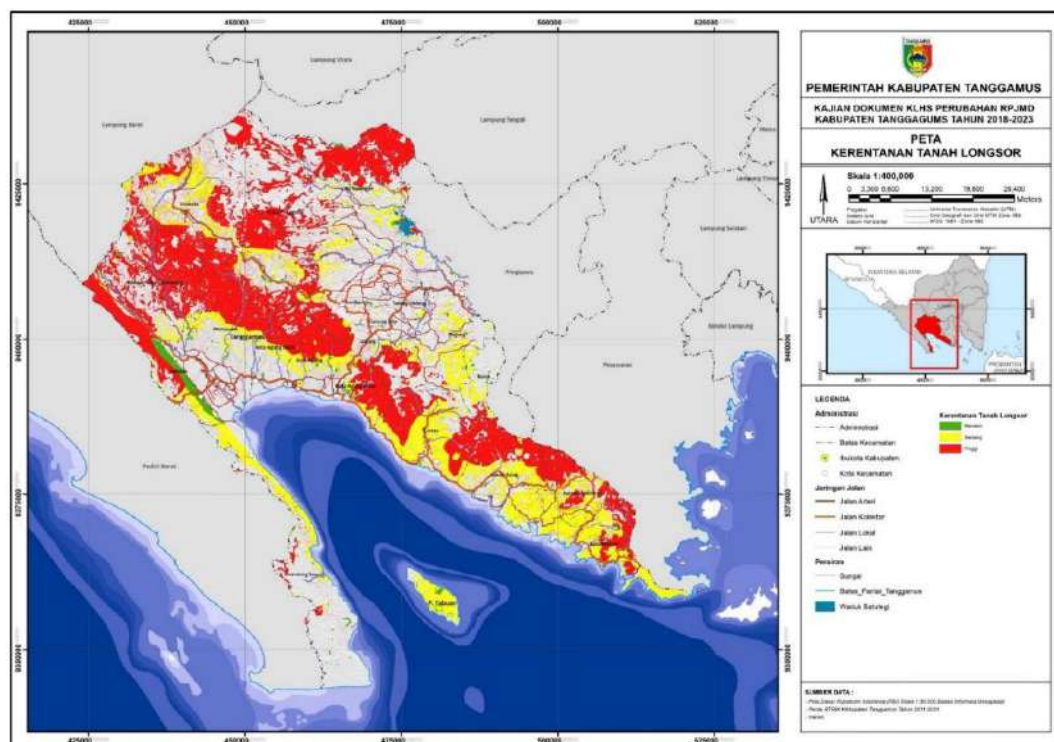
Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung

serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Dibawah ini adalah jenis bencana alam dan perkiraan daerah yang terkena dampak bencana tersebut.

2.1.2.1 Bencana Longsor dan Pergerakan Tanah

Merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, dan atau material lain yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Umumnya longsor yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debrisavalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Topogafi alam Kabupaten Tanggamus lebih banyak berkarakter pegunungan dan perbukitan dengan struktur tanah yang rata-rata labil, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki banyak daerah rawan bencana pergerakan tanah. Kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor/pergerakan tanah antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, Ulu Belu, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bulok, dan Air Naningan, Gisting.

Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus

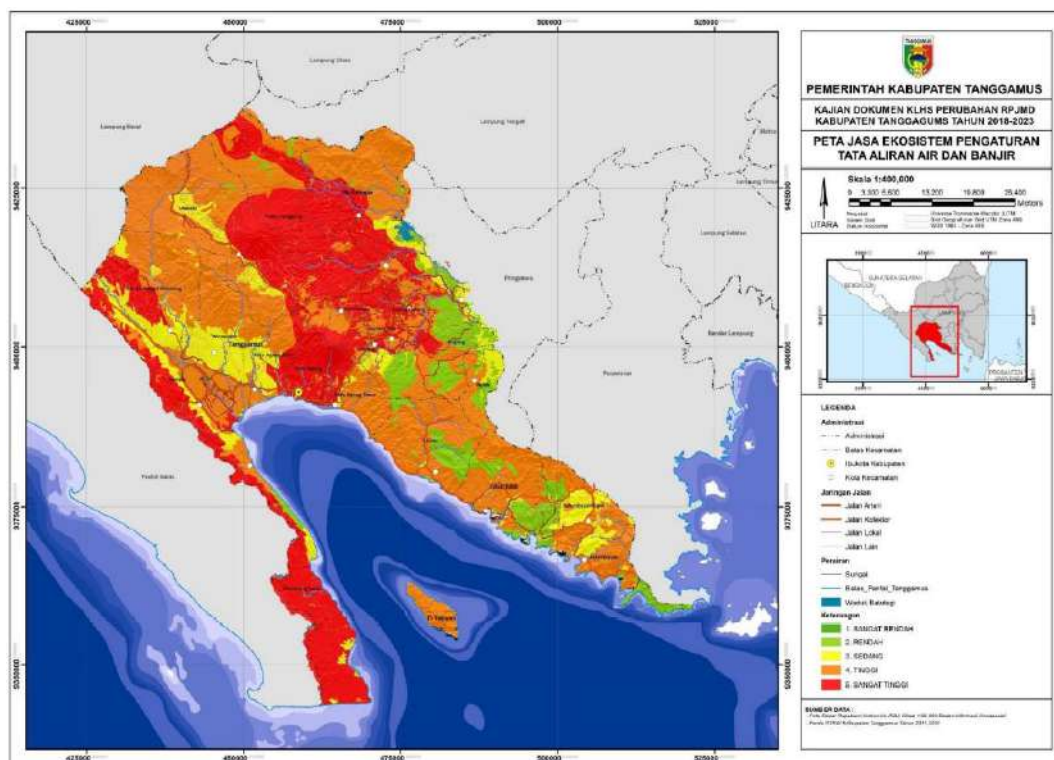


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2.2 Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun makin meningkat, baik luasan areal terdampaknya maupun frekuensi terjadinya. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut antarlain adalah maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, perilaku tidak tertib masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat, pesatnya pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Daerah potensial banjir di Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau, untuk Tahun 2018 yang sering terjadi banjir yaitu di daerah Semaka dan Bandar Negeri Semuong yang mengakibatkan putusnya jalan Nasional.

Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus

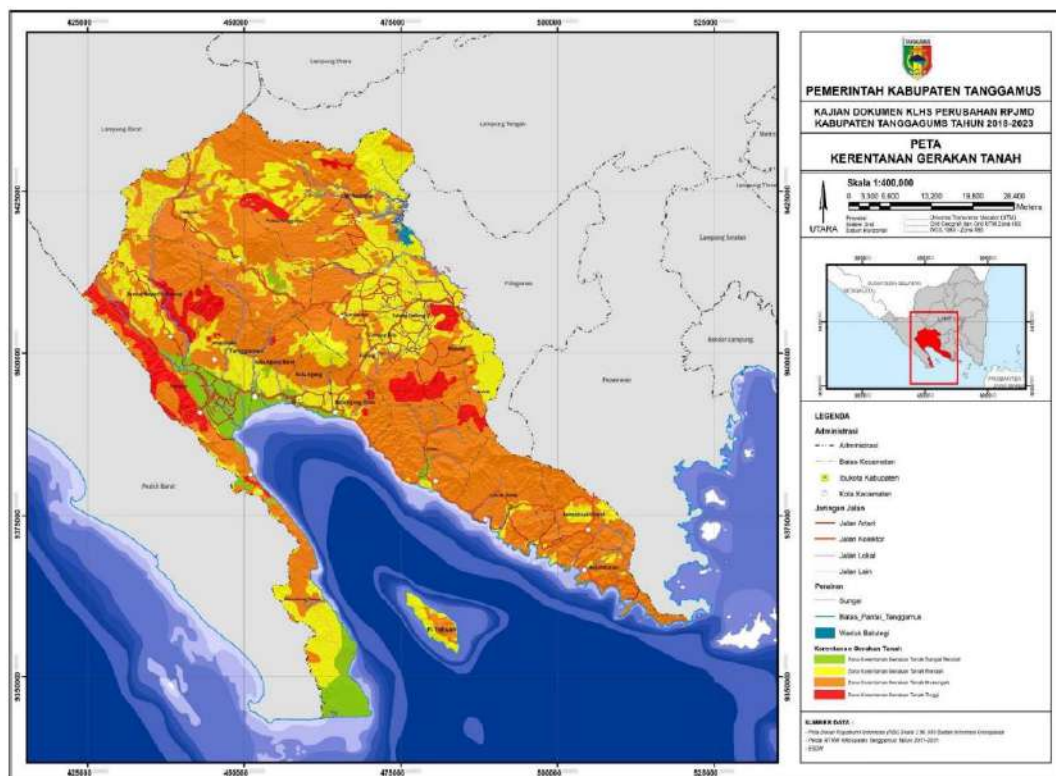


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2.3 Gempa Bumi

Gempa bumi disebabkan oleh baik aktivitas kegunung apian (*vulkanik*) maupun akibat dari tumbukan beberapa lempeng bumi, ataupun reruntuhan batuan(*tektonik*). Kabupaten Tanggamus juga tidak luput dari kerawanan gempa bumi karena dilewati oleh patahan/sesar Semangko. Beberapa kecamatan yang terlewati oleh sesar ini adalah Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, Wonosobo, Pematang Sawa, dan Kota Agung Barat. Daerah lain yang juga potensial akan terjadinya bencana gempa bumi adalah Ulu Belu, Kota Agung Barat, Kota Agung, Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan.

Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus



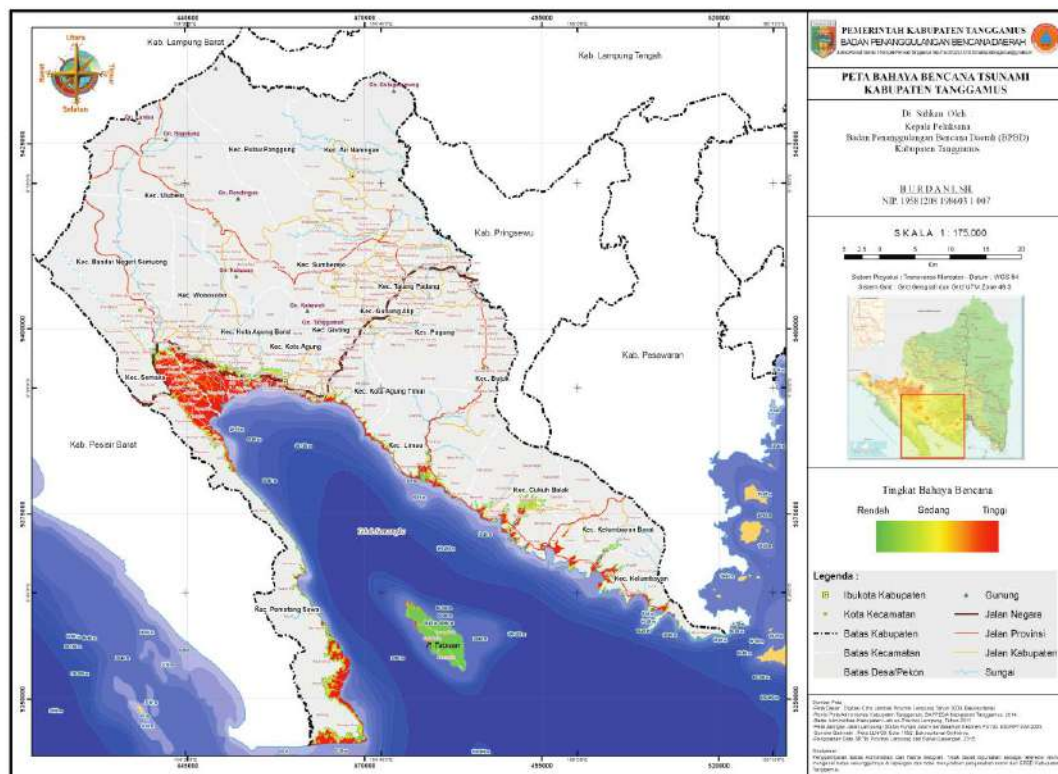
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2.4 Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut dengan periode panjang yang menghantam daratan dan disebabkan adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif ini sendiri dipicu oleh beberapa sebab antarlain seperti gempa bumi dasar laut, dan erupsi vulkanik/gunung meletus, longsor dan hantaman material dengan volume besar ke laut.

Tsunami besar yang pernah menghantam daerah pesisir Kabupaten Tanggamus adalah ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana tsunami adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus



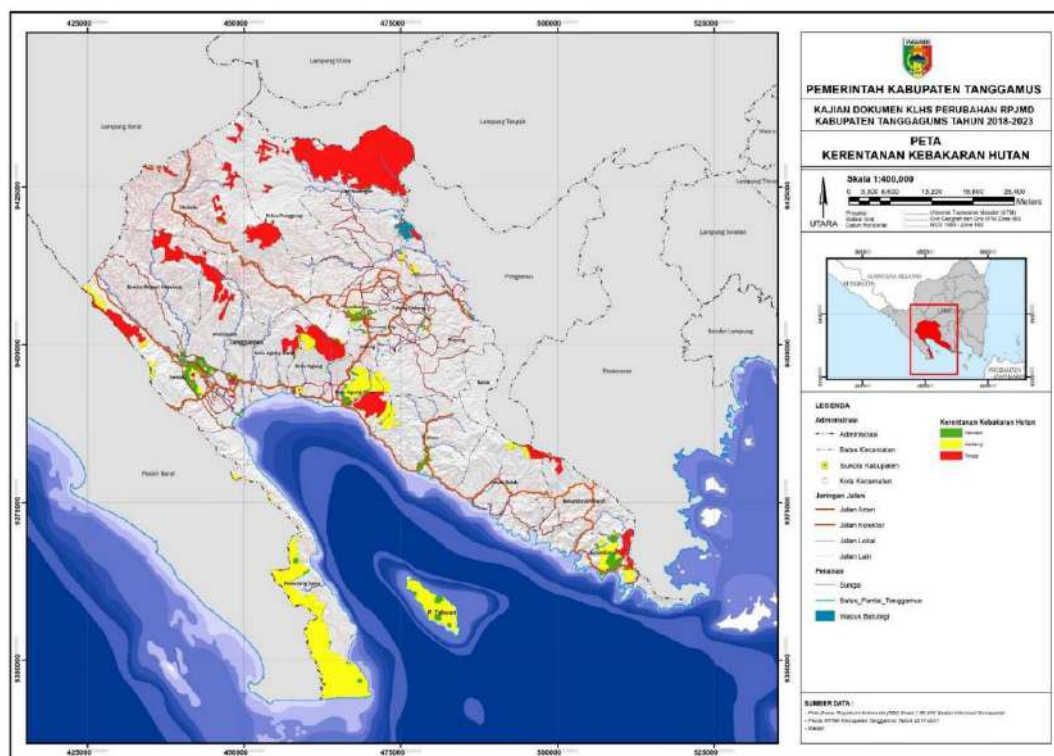
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2.5 Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran yang mungkin menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah bencana kebakaran hutan dan bangunan. Untuk kebakaran hutan, potensi pencetus kebakaran paling mungkin disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari lahan kritis/bongkor berisi semak/alang-alang yang berada di sekitar hutan. Untuk bencana kebakaran bangunan/rumah, daerah yang paling potensial terjadi kebakaran adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pola tata letak bangunan yang rapat. Hal ini bisa terlihat di kecamatan perkotaan seperti Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, juga di kecamatan-kecamatan padat seperti Wonosobo dan Kota Agung Barat.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan kebakaran hutan lindung dengan kelas resiko 1 yaitu rendah. Kemudian tingkat kerentanan kebakaran terhadap hutan alam dengan kelas resiko 2 yaitu sedang dan hutan bakau dengan kelas resiko 1 yaitu rendah.

Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2.6 Bencana Gelombang Tinggi Air Laut

Potensi bencana gelombang tinggi air laut yang terjadi adalah akibat gelombang pasang laut yang menyebabkan beberapa wilayah sekitarnya mengalami gangguan akibat arus pasang laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang laut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hanya beberapa kecamatan yang mengalami gelombang pasang laut, yaitu Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka serta Pematang Sawa.

2.1.3 Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebanyak 645.807 jiwa. Dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah 139 jiwa per km².

Tabel II.6. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK			KEPADATAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Wonosobo	209.63	21.677	19.961	41,638	198.63
2	Semaka	170.9	20.581	19.258	39,839	233.11
3	Bandar Negeri Semuong	98.12	9.105	8.326	17,431	177.65
4	Kota Agung	76.93	24.504	23.050	47,554	618.15
5	Pematang Sawa	185.29	9.589	8.397	17,986	97.07
6	Kota Agung Timur	73.33	11.094	10.673	21,767	296.84
7	Kota Agung Barat	101.3	12.053	10.983	23,036	227.40
8	Pulau Panggung	437.21	20.892	19.766	40,658	92.99
9	Ulu Belu	323.08	22.985	21.196	44,181	136.75
10	Air Naningan	186.35	16.394	15.113	31,507	169.07
11	Talang Padang	45.13	27.471	26.286	53,757	1,191.16
12	Sumberejo	56.77	18.646	17.722	36,368	640.62
13	Gisting	32.53	22.299	21.122	43,421	1,334.80
14	Gunung Alip	25.68	11.510	10.832	22,342	870.02
15	Pugung	232.4	34.569	32.189	66,758	287.25
16	Bulok	51.68	12.551	11.797	24,348	471.13
17	Cukuh Balak	133.76	13.069	11.992	25,061	187.36
18	Kelumbayan	121.09	6.513	5.829	12,342	101.92
19	Limau	240.61	11.390	10.462	21,852	90.82
20	Kelumbayan Barat	53.67	7.250	6.711	13,961	260.13
	JUMLAH	2,855.46	334.142	311665	645,807	138.74

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting dengan kepadatan 1.335 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Limau dengan kepadatan sebesar 91 jiwa/Km².

2.1.4 Potensi Sumber Daya

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
- 2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunt Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
- 3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
 - a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tjiang - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi.
 - b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi terdiri dari Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;

Tabel II.7. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	196,528			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri
2	Wonosobo	PKL	• Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
3	Talang Padang	PKLp	• Perdagangan dan Jasa • Pertanian • Pendukung Kegiatan Pertanian
4	Gisting	PKLp	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian
5	Sri Kuncoro Kecamatan Semaka	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Kawasan Lindung
6	Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
7	Pulau Panggung	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
8	Ngarip Kecamatan Ulu Belu	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
9	Margoyoso Kecamatan Sumberejo	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
10	Sukamara Kecamatan Bulok	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
11	Kuripan Kecamatan Limau	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
12	Napal Kecamatan Kelumbayan	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
13	Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Wilayah perdesaan sebagai hinterland kawasan perkotaan dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Untuk kebutuhan yang lebih besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Tanggamus.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan,

Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

2.1.4.1 Kawasan Hutan Rakyat

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Ha merupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

2.1.4.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut dan saat ini sedang dilakukan updating dengan cara pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tabel II.9. Luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	2.471	
2	Bandar Negeri Semuong	785	
3	Wonosobo	1.244	
4	Kota Agung Barat	1.165	
5	Kota Agung	519	
6	Kota Agung Timur	1.390	
7	Gisting	399	
8	Gunung Alip	1.095	
9	Talang Padang	926	
10	Sumberejo	685	
11	Pulau Panggung	1.105	

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
12	Air Naningan	305	
13	Limau	365	
14	Cukuh Balak	720	
15	Bulok	1.271	
16	Kelumbayan	510	
17	Kelumbayan Barat	335	
18	Ulu Belu	475	
19	Pematang Sawa	1.072	
20	Pugung	1.853	
	Jumlah	18.690	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luas PLP2B, ditetapkan luas lahan cadangan PLP2B seluas 4.390 Ha.

Tabel II.10. Luas Lahan Cadangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	583	
2	Bandar Negeri Semuong	165	
3	Wonosobo	340	
4	Kota Agung Barat	250	
5	Kota Agung	250	
6	Kota Agung Timur	500	
7	Gisting	100	
8	Gunung Alip	235	
9	Talang Padang	230	
10	Sumberejo	148	
11	Pulau Panggung	275	
12	Air Naningan	56	
13	Limau	28	
14	Cukuh Balak	127	
15	Bulok	274	
16	Kelumbayan	127	
17	Kelumbayan Barat	70	
18	Ulu Belu	108	
19	Pematang Sawa	96	
20	Pugung	428	
	Jumlah	4.390	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 686/SK-PG-03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, maka sesuai data informasi geospasial lahan baku sawah Kabupaten Tanggamus seluas 16.842,67 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II.11. Luas Baku Sawah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	1,992.7	
2	Bandar Negeri Semuong	638.7	
3	Wonosobo	1,804.0	
4	Kota Agung Barat	802.5	
5	Kota Agung	491.0	
6	Kota Agung Timur	833.2	
7	Gisting	509.8	
8	Gunung Alip	1,149.5	
9	Talang Padang	980.2	
10	Sumberejo	735.2	
11	Pulau Panggung	1,033.5	
12	Air Naningan	241.7	
13	Limau	194.7	
14	Cukuh Balak	671.2	
15	Bulok	804.1	
16	Kelumbayan	453.8	
17	Kelumbayan Barat	307.3	
18	Ulu Belu	1,001.8	
19	Pematang Sawa	415.4	
20	Pugung	1,782.2	
	Jumlah	16,842.4	

Sumber : Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 2021

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Holtikultura

Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan.

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

e) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil

diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Panggung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah, bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

2.1.4.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2021 yaitu perikanan laut sebanyak 5.704 rumah tangga dan perairan umum sejumlah 212 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga sedangkan untuk perairan umum yaitu Kecamatan Air Naningan dengan 212 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus mencapai 27.573,54 ton mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 27.072,37 ton, sedangkan untuk produksi perairan umum mencapai 318,95 ton yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 313,33 ton. Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak dari 10.880,23 ton pada tahun 2020 menjadi 10.942,73 ton pada tahun 2021.

Jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebanyak 2.805 rumah tangga yang terdiri dari perikanan budidaya tambak (202 rumah tangga), dan kolam (2.603 rumah tangga). Produksi perikanan budidaya sebesar 4.799,52 ton yang terdiri atas produksi perikanan tambak sebesar 2.401,59 ton dan kolam 2.397,93 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar pada tahun 2021 terdapat di Kecamatan Kota Agung dengan 682,69 ton dan kolam terdapat di Kecamatan Pugung dengan 1.126,97 ton. Jumlah perahu/kapal pada tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor (135 perahu), perahu motor tempel (1.415 perahu) dan kapal motor (291 perahu).

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembung, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan Talang Padang yang didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

Gambar II.15. Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.4.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus.

b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara

Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan.

c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi

Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel II.12. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu...
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Naningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.4.5 Kawasan Peruntukan Industri

Industri di Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Industrir Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa jenis, yaitu industri pangan, kerajinan umum, kimia bahan bangunan, jasa, logam dan industry pengolahan lainnya. Nilai investasi paling besar terserap pada kegiatan konveksi dengan tingginya nilai investai tersebut tentunya diharapkan sektor industri tersebut dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Untuk kedepannya perlu pemantauan terhadap sektor-sektor industri yangmemiliki nilai investasi paling tinggi, sehingga kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh sektor industri dapat terus berjalan dengan baik.

Industri pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah 841 industri, mulai dari industri perkebunan, hingga kehutanan. Jenis industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus adalah industri pengolahan kebutuhan pokok, dan sisanya adalah industri kehutanan yang berkaitan dengan kebutuhan peralatanrumah tangga. Industri yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanggamus adalah industri anyaman bambu dengan jumlah 598 unit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 27

Kawasan Industri yang ada dibagi menjadi 9 Kawasan Industri Prioritas Nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan, pada Pulau Sumatera terdapat 10 KI dan 4 KEK, dimana Kawasan Industri Tanggamus (KIT) menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.

Gambar II.16. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI, 2021

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tanggamus atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertahanan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- a) Kawasan peruntukan industri besar, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.
- b) Kawasan peruntukan industri sedang, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
- c) Kawasan peruntukan industri kecil, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

2.1.4.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umumnya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel II.13. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec. Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.14. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Naningan
2	Dam Margo Tirto	Lands Baw Kec Gisting

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.15. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kecamatan Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec.Air Naningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.16. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Ke. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
12	Pulau Tanjungan	Air Naningan Kec. Air Naningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Naningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Naningan

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.17. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	VIP	Gisting Bawah Kec. Gisting
5	Villa Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec.Kota Agung

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.18. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalam	Karangbrak	Pematang Sawa

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.19. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.4.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman perdesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki

keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

2.1.4.8 Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang.

Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah “Terwujudnya Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat”

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi

Rencana ruang dalam bumi meliputi :

1. Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
2. Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
3. Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Tabel II.20. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,226,035.95	45.09	4,361,549.97	44.24	4,465,070.14	43.13	4,597,712.02	42.29	4,497,690.50	42.12
2	Pertambangan dan Penggalian	659,621.03	7.04	702,475.14	7.13	728,896.14	7.03	753,753.82	6.93	765,976.37	7.17

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
3	Industri Pengolahan	634,123.74	6.77	649,406.50	6.59	681,369.50	6.58	701,748.43	6.45	672,048.44	6.29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,157.37	0.07	7,393.76	0.07	7,999.76	0.08	8,926.88	0.08	9,277.40	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,084.40	0.11	10,791.16	0.11	11,359.16	0.11	11,808.77	0.11	12,928.81	0.12
6	Konstruksi	570,876.24	6.09	643,422.49	6.53	705,912.49	6.82	765,353.57	7.04	724,923.98	6.79
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	922,064.16	9.8	978,667.29	9.93	1,063,223.29	10.27	1,153,774.28	10.61	1,067,900.49	10.00
8	Transportasi dan Pergudangan	457,552.20	4.88	487,169.43	4.94	518,036.43	5.00	550,141.63	5.06	535,508.85	5.01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	146,720.20	1.57	159,923.79	1.62	176,879.79	1.71	190,636.24	1.75	182,411.28	1.71
10	Informasi dan Komunikasi	315,977.52	3.37	351,336.90	3.56	382,814.90	3.70	414,888.37	3.82	455,741.01	4.27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,230.24	1.89	183,853.56	1.86	189,563.56	1.83	196,404.88	1.81	202,299.84	1.89
12	Real Estate	276,249.34	2.95	292,363.50	2.97	309,477.66	2.99	330,095.29	3.04	319,097.31	2.99
13	Jasa Perusahaan	7,471.36	0.08	7,891.27	0.08	8,341.27	0.08	8,608.21	0.08	8,494.93	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	381,617.19	4.07	403,101.32	4.09	429,699.32	4.15	452,089.48	4.16	469,695.44	4.40
15	Jasa Pendidikan	363,189.96	3.88	387,179.88	3.93	423,350.89	4.09	465,073.41	4.28	476,849.83	4.47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,512.85	1.23	121,858.75	1.24	130,255.75	1.26	138,846.63	1.28	153,550.40	1.44
17	Jasa Lainnya	101,488.46	1.08	110,259.04	1.12	120,849.04	1.17	132,240.36	1.22	124,925.82	1.17
	PDRB Dengan Migas	9,371,994.22		9,858,643.75		10,352,099.08		10,872,102.25		10,679,320.71	
	PDRB Tanpa Migas	9,021,390.22		9,496,659.92		9,991,348.25		10,499,313.41		10,310,164.37	

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mencapai Rp.10,679,320.71 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.10,872,102.25 hal ini dikarenakan dampak dari pandemi *Covid-19*, dari Kontribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 42.12% sedangkan kontribusi yang paling rendah berasal dari Jasa Perusahaan yang hanya sebesar 0.08%.

Tabel II.21. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,416,726.73	43.94	5,792,575.12	43.18	6,185,476.39	42.62	6,507,735.22	41.79	6,606,092.04	42.51
2	Pertambangan dan Penggalian	813,537.41	6.60	918,423.10	6.85	1,015,251.87	6.99	1,064,145.83	6.83	982,784.04	6.32
3	Industri Pengolahan	901,803.20	7.32	956,954.34	7.13	1,026,053.03	7.07	1,077,214.02	6.92	1,049,428.40	6.75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,547.81	0.06	10,020.71	0.07	10,951.02	0.08	12,447.54	0.08	12,828.44	0.08

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,022.90	0.11	15,806.15	0.12	17,019.15	0.12	17,810.46	0.11	19,585.38	0.13
6	Konstruksi	748,257.85	6.07	870,144.40	6.49	968,594.40	6.67	1,066,144.35	6.85	1,008,958.00	6.49
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,144,082.20	9.28	1,252,217.36	9.33	1,390,278.36	9.58	1,577,114.94	10.13	1,501,364.24	9.66
8	Transportasi dan Pergudangan	649,188.15	5.27	702,916.29	5.24	748,799.29	5.16	798,316.63	5.13	793,004.91	5.10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229,595.08	1.86	250,537.04	1.87	280,686.04	1.93	308,703.44	1.98	296,661.06	1.91
10	Informasi dan Komunikasi	435,001.32	3.53	487,272.49	3.63	533,328.49	3.67	581,222.98	3.73	638,181.19	4.11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	245,710.94	1.99	265,549.92	1.98	280,920.08	1.94	296,737.07	1.91	305,101.73	1.96
12	Real Estate	345,189.31	2.80	380,220.11	2.83	412,100.00	2.84	479,895.30	3.08	464,004.33	2.99
13	Jasa Perusahaan	10,971.60	0.09	11,822.13	0.09	12,669.66	0.09	13,190.21	0.08	13,444.75	0.09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580,515.75	4.71	644,423.81	4.80	692,721.87	4.77	734,802.25	4.72	768,861.67	4.95
15	Jasa Pendidikan	491,277.45	3.99	530,828.32	3.96	585,429.19	4.03	646,332.95	4.15	680,154.42	4.38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158,431.25	1.29	171,458.30	1.28	184,875.34	1.27	201,249.41	1.29	223,503.53	1.44
17	Jasa Lainnya	136,443.59	1.11	153,870.67	1.15	169,297.76	1.17	187,994.15	1.21	176,791.73	1.14
	PDRB Dengan Migas	12,328,302.55	100	13,414,930.28	100	14,514,451.95	100	15,571,056.75	100	15,540,749.86	100.00
	PDRB Tanpa Migas	11,962,849.27	97.04	13,009,202.97	96.98	14,059,150.61	96.86	15,098,043.48	96.96	15,196,912.35	97.79

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp.15,540,749.86 jauh lebih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.15,571,056.75 hal tersebut sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang mulai melanda dunia di awal tahun 2020. Kontribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 41,51% sedangkan kontribusi yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,08%.

Tabel II.22. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.419.924,72	68,30	9.175.236,99	68,40	10,053,520.36	69,27	10,927,434.14	70,18	11,062,912.28	71,19
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	161,945.54	1,31	183.594,11	1,37	224,120.11	1,54	249,612.66	1,60	242,934.12	1,56
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.416.893,73	11,49	1.521.109,82	11,34	1,589,275.63	10,95	1,665,140.96	10,69	1,663,294.65	10,70

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.042.430,91	24,68	3.331.166,77	24,83	3,685,878.78	25,39	3,979,236.64	25,56	3,876,632.58	24,94
5	Perubahan Inventori	45.786,25	0,37	41.831,73	0,31	43.152,96	0,30	3,722.11	0,02	51,851.53	0,33
6	Net Ekspor	-758.978,58	-6,16	-838.009,14	-6,25	-1,081,495.90	-7,45	-1,254,089.76	-8,05	-1,356,875.30	-8,73
	PDRB PENGELUARAN	12.328.002,55	100,00	13.414.930,28	100,00	14,514,451.95	100,00	15,571,056.75	100,00	15,540,749.86	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Sedangkan untuk PDRB atas harga berlaku menurut Pengeluaran pada tahun 2020 mencapai Rp.15,540,749.86 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.15,571,056.75 Hal tersebut juga sebagai imbas dari pandemi *Covid-19*. Kontribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.19% sedangkan kontribusi yang paling rendah berasal dari Net Ekspor sebesar -8,73%.

Tabel II.23. Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.315.075,96	4,70	6.649.835,24	5,30	7 020 753,63	5,58	7 377 852,75	5,09	7 293 312,99	-1,15
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	117.447,06	6,57	126.712,11	7,89	147 814,11	16,65	162 451,87	9,90	155 852,39	-4,06
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	977.214,36	3,12	1.001.804,20	2,52	1 022 248,20	2,04	1 051 487,01	2,86	1 037 022,63	-1,38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2.395.086,43	7,78	2.519.954,23	5,21	2 700 153,23	7,15	2 807 384,90	3,97	2 668 592,74	-4,94
5	Perubahan Inventori	13.882,38	-	14.337,43	-	14 683,43	-	-549,64	-	18 027,99	-
6	Net Ekspor	-6.687.683,41	-	453.999,45	-	-553 553,51	-	-526 524,65	-	-493 488,04	-
	PDRB PENGELUARAN	9.371.994,22	5,18	9.858.643,75	5,19	10 352 099,08	5,01	10 872 102,25	5,02	10 679 320,71	-1,77

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19* pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 yang mencapai Rp.10,679,320.71 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.10,872,102.25 Kontribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu -1,15 sedangkan kontribusi Pengeluaran yang paling rendah berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -4,94.

Tabel II.24. Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.94	45.09	43.18	44.24	42,62	43.13	41,79	42.29	42,51	42.12
2	Pertambangan dan Penggalan	6.60	7.04	6.85	7.13	6.99	7.03	6.83	6.93	6,32	7.17
3	Industri Pengolahan	7.32	6.77	7.13	6.59	7.07	6.58	6,92	6.45	6,75	6.29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0,13	0.12
6	Konstruksi	6.07	6.09	6.49	6.53	6.67	6.82	6.85	7.04	6,49	6.79
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.28	9.8	9.33	9.93	9.58	10.27	10,13	10.61	9,66	10.00
8	Transportasi dan Pergudangan	5.27	4.88	5.24	4.94	5,16	5.00	5,13	5.06	5,10	5.01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.86	1.57	1.87	1.62%	1,93	1.71	1,98	1.75	1,91	1.71
10	Informasi dan Komunikasi	3.53	3.37	3.63	3.56	3,67	3.70	3,73	3.82	4,11	4.27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.99	1.89	1.98	1.86	1,94	1.83	1,91	1.81	1,96	1.89
12	Real Estate	2.80	2.95	2.83	2.97	2,84	2.99	3,08	3.04	2,99	2.99
13	Jasa Perusahaan	0.09	0.08	0.09	0.08	0,09	0.08	0,08	0.08	0,09	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.71	4.07	4.80	4.09	4,77	4.15	4,72	4.16	4,95	4.40
15	Jasa Pendidikan	3.99	3.88	3.96	3.93	4,03	4.09	4,15	4.28	4,38	4.47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.29	1.23	1.28	1.24	1,27	1.26	1,29	1.28	1,44	1.44
17	Jasa Lainnya	1.11	1.08	1.15	1.12	1,17	1.17	1,21	1.22	1,14	1.17
	PDRB Dengan Migas	100,00	5,18	100,00	5,19	100,00	5,01	100,00	5,02	100,00	-1,77
	PDRB Tanpa Migas	97,04	5,30	96,98	5,27	96,86	5,21	96,96	5,08	97,79	-1,80

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Perkembangan kontribusi sektor PDRB dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif pada beberapa sektor sedangkan pada beberapa sektor yang lain mengalami perubahan yang tidak signifikan.

Tabel II.25. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,63	3,21	2,37	2,97	-2,18
2	Pertambangan dan Penggalan	4,26	6,50	3,62	3,55	1,62

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
		%	%	%	%	%
3	Industri Pengolahan	8,88	2,41	4,92	2,99	-4,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,45	20,08	8,20	11,59	3,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	7,01	5,26	3,96	9,48
6	Konstruksi	8,85	12,71	9,71	8,42	-5,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,95	6,14	8,46	8,52	-7,44
8	Transportasi dan Pergudangan	6,30	6,47	6,34	6,20	-2,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,39	9,00	10,60	7,78	-4,31
10	Informasi dan Komunikasi	11,14	11,19	8,96	8,38	9,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,92	3,74	3,11	3,61	3,00
12	Real Estate	5,45	5,83	5,85	6,66	-3,33
13	Jasa Perusahaan	7,16	5,62	5,70	3,20	-1,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,92	5,63	6,60	5,21	3,89
15	Jasa Pendidikan	6,34	6,61	9,34	9,86	2,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	5,49	6,89	6,60	10,59
17	Jasa Lainnya	5,35	8,64	9,60	9,43	-5,53
	PDRB Dengan Migas	5,18	5,19	5,01	5,02	-1,77
	PDRB Tanpa Migas	5,30	5,27	5,21	5,08	-1,80

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.26. Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus (persen), 2016-2020

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	PERTUMBUHAN				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
		%	%	%	%	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,12	3,48	3,77	3,43	2,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,98	5,08	4,65	1,34	1,45
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,47	4,72	2,39	1,86	1,28
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2,20	4,06	3,26	3,84	2,49
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB PENGELUARAN	5,30	3,45	3,04	2,15	1,61

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

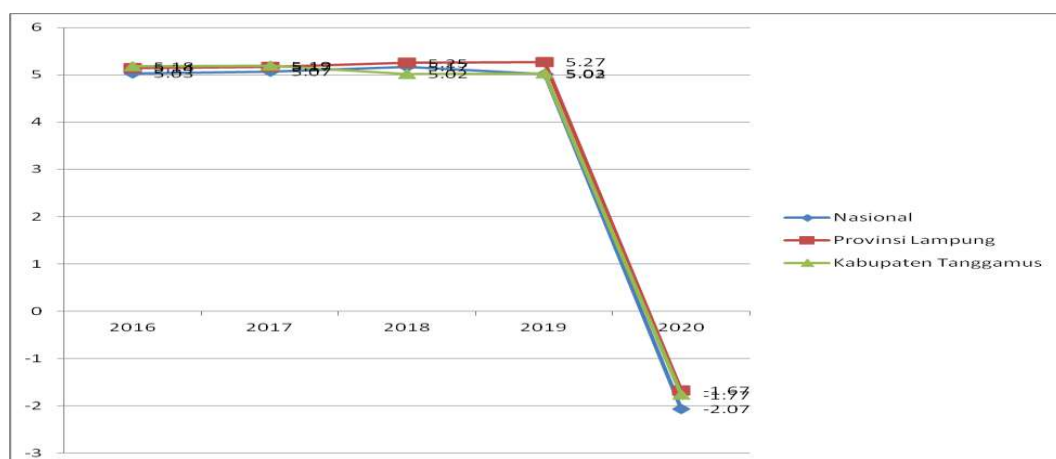
Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat disimpulkan perekonomian Kabupaten Tanggamus mengalami kontraksi sebesar -1,77%. Bila diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2020 telah mencapai Rp.15,540,749.86 angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan PDRB tahun 2019 yang nilainya hanya sebesar Rp.15,571,056.75

sedangkan jika dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 mencapai Rp.10,679,320.71 menurun dari tahun 2019 yang sebesar Rp.10,872,102.25 hal tersebut terjadi seiring dengan adanya pandemi *Covid-19* sehingga Produk Domestik Regional Bruto pada Tahun 2020 mengalami penurunan.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

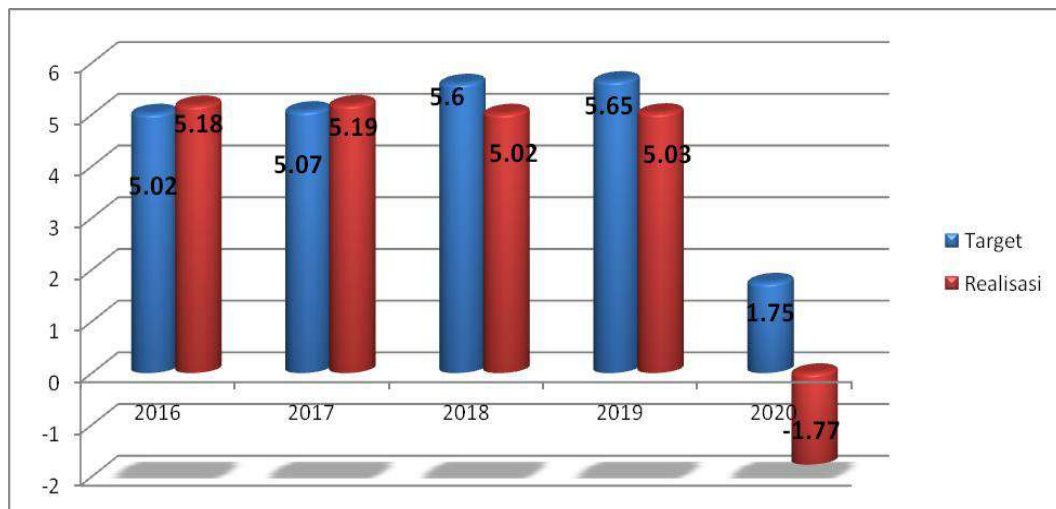
Pandemi *Covid-19* mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi *Covid-19* ditemukan di Provinsi Wuhan-Tiongkok, Bank Dunia mencatatkan setidaknya hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian, pandemi yang belum mereda menjadi momok yang menyebabkan semua perekonomian negara tumbang, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gambar II.17. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Gambar II.18. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2016-2020



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2021

Pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren positif, yang mana pada tahun tersebut pelaksanaan pembangunan melampaui target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Namun sejak tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tidak mencapai target yang ditentukan. Terlebih pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang signifikan sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,77%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,03%, sedangkan ekonomi Provinsi Lampung terkontraksi -1,67% dan Nasional sebesar -2,07%.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Selama tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%, angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas disektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% ditahun 2016, maka

tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi Nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi.

Tabel II.27. Nilai Inflasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	11,52	4,09	4,70	4,05	5,31	3,71	2,51

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2017

Keterangan : Mulai Tahun 2017 BPS Kabupaten Tanggamus tidak lagi melakukan perhitungan inflasi.

2.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Tanggamus rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel II.28. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	23,404,088.00	23,614,681.00	24,714,990.00
Tanggamus	26,034,307.00	24,224,635.00	25,297,765.00
Lampung Selatan	44,129,169.00	41,704,922.00	43,307,952.00
Lampung Timur	39,797,485.00	36,710,498.00	38,323,275.00
Lampung Tengah	55,368,656.00	48,861,769.00	50,315,555.00
Lampung Utara	38,512,596.00	37,549,879.00	39,212,125.00
Way Kanan	31,022,091.00	29,594,040.00	30,746,033.00
Tulang Bawang	51,065,626.00	53,691,359.00	56,118,778.00
Pesawaran	36,433,510.00	34,047,403.00	34,965,125.00
Pringsewu	27,851,928.00	27,563,217.00	28,666,813.00
Mesuji	51,934,466.00	45,812,389.00	47,414,096.00
Tulang Bawang Barat	41,859,787.00	39,971,513.00	41,571,981.00
Pesisir Barat	30,246,494.00	28,889,489.00	30,062,936.00
Bandar Lampung	56,217,749.00	50,753,356.00	51,903,009.00
Metro	37,683,219.00	37,361,032.00	38,737,510.00
Provinsi Lampung	42,172,315.00	39,346,531.00	40,950,417.00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tabel II.29. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN
	2015	19,394,133.00	-
1	2016	21,241,150.00	9.52
2	2017	22,868,022.00	7.66
3	2018	24,535,780.00	7.29
4	2019	26,034,307.00	6.11
5	2020	24,224,635.00	- 6.95
6	2021	25,297,765.00	4.43

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.5 Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- $0.3 \leq \text{Gini Rasio} \leq 0.5$: artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Tabel II.30. Nilai Gini Rasio Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

WILAYAH	GINI RASIO		
	2018	2019	2020
Kabupaten Tanggamus	0.289	0.314	0.293

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Perkembangan gini rasio Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun

2019 gini rasio Kabupaten Tanggamus sebesar 0.314 (ketimpangan sedang) dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0.293 (ketimpangan rendah).

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Regional

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Regional antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam katagori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel II.31. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	WILAYAH	2019
1	Kabupaten Lampung Barat	0,45
2	Kabupaten Tanggamus	0,58
3	Kabupaten Lampung Selatan	0,04
4	Kabupaten Lampung Timur	0,50
5	Kabupaten Lampung Tengah	1,93
6	Kabupaten Lampung Utara	0,49
7	Kabupaten Way Kanan	0,34
8	Kabupaten Tulang Bawang	0,25
9	Kabupaten Pesawaran	0,15
10	Kabupaten Pringsewu	0,40
11	Kabupaten Mesuji	0,16
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,02
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,02
14	Kota Bandar Lampung	0,53
15	Kota Metro	0,09

Sumber : BPS, Data Diolah Hasil Analisis Kajian Resha Moniyana dan Ahmad Dhea Pratama, Universitas Lampung, 2021

2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis karena sudah ada sejak peradaban kuno, karena sifatnya sangat dinamis dan memerlukan penanganan dengan pendekatan inklusif untuk mencapai kesamaan persepsi diantara *stakeholder*. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penanganannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategys* melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Di Kabupaten Tanggamus sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.67/41/08/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggunlagn Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 sebanyak 81.340 jiwa, angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 yang hanya mencapai 70.370 jiwa.

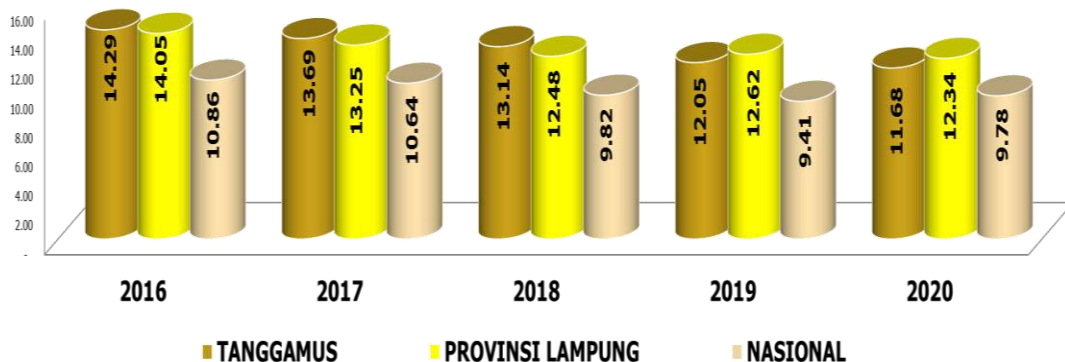
Tabel II.32. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus (ribu) Tahun 2016-2020

WILAYAH	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tanggamus	81,34	77,53	73,77	71,90	70,37

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2021

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 sebesar 14.29% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2019 yang hanya mencapai 12,05 % dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 11.68%.

Gambar II.19. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPS, Bappeda Provinsi Lampung, Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.33. Persentase Penduduk Miskin 2016-2020 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Kode Kab./Kota	Kabupaten/ Kota	2016	Peringkat Kemiskinan	2017	Peringkat Kemiskinan	2018	Peringkat Kemiskinan	2019	Peringkat Kemiskinan	2020	Peringkat Kemiskinan
1801	Lampung Barat	14,36	8	14,32	6	13,54	6	12,92	7	12,52	7
1802	Tanggamus	14,58	7	13,25	8	12,48	9	12,05	8	11,68	9
1803	Lampung Selatan	16,25	4	15,16	5	14,86	5	14,31	5	14,08	5
1804	Lampung Timur	16,98	3	16,35	3	15,76	3	15,24	2	14,62	3
1805	Lampung Tengah	13,08	9	12,90	9	12,62	8	12,03	9	11,82	8
1806	Lampung Utara	22,92	1	21,55	1	20,85	1	19,90	1	19,30	1
1807	Way Kanan	14,69	6	14,06	7	13,52	7	13,07	6	12,90	6
1808	Tulangbawang	10,20	11	10,09	11	9,70	11	9,35	11	9,33	11
1809	Pesawaran	17,68	2	16,48	2	15,97	2	15,19	3	14,76	2
1810	Pringsewu	11,73	10	11,30	10	10,50	10	10,15	10	9,97	10
1811	Mesuji	8,00	14	7,66	15	7,55	15	7,47	15	7,33	15
1812	Tulang Bawang Barat	7,99	15	8,11	14	8,10	14	7,75	14	7,39	14
1813	Pesisir Barat	15,91	5	15,61	4	14,98	4	14,48	4	14,29	4
1871	Kota Bandar Lampung	10,15	12	9,94	12	9,04	13	8,71	12	8,81	12
1872	Kota Metro	10,15	13	9,89	13	9,14	12	8,68	13	8,47	13
	Lampung	14,29		13,69		13,14		12,62		12,34	

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jikat tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode 2019-2020, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.38.404,- yaitu dari Rp.359.580,- per kapita per bulan menjadi Rp.397.984,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan belum mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di daerah B. Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel II.34. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanggamus	2.01	1.81	2.36	1.24	1.36

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.35. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanggamus	0.43	0.35	0.62	0.21	0.24

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada Human Development Report pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif. Selama lima tahun terakhir ini nilai IPM Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 64,61 dan kemudian terus meningkat menjadi 66,42 pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah, angka IPM Nasional pada tahun 2020 mencapai 71,94 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 69,69.

Gambar II.20. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020



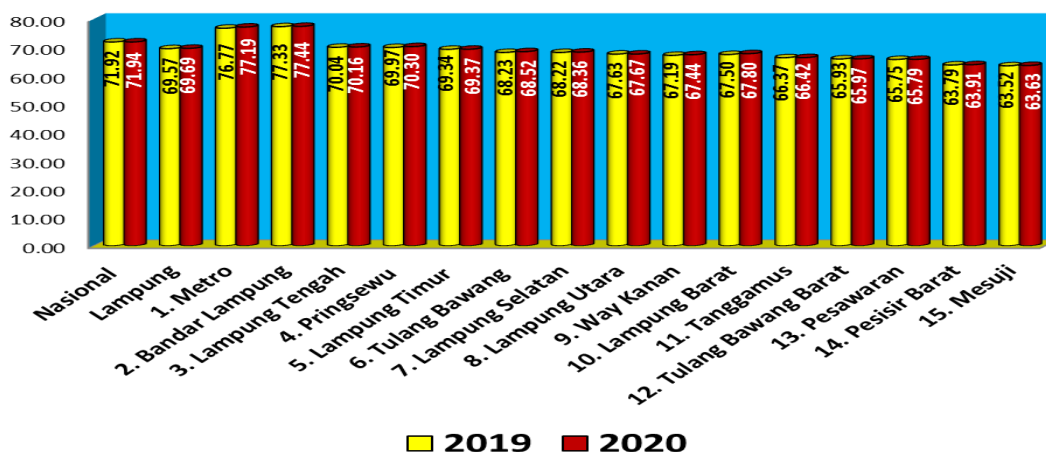
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram diatas baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan IPM Kabupaten Tanggamus dari 2019 ke 2020 adalah sebesar 1 persen sedangkan Provinsi Lampung sebesar 0,17 persen. Kemudian peningkatan IPM yang dicapai secara nasional lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung yakni sebesar 0,027 persen. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2016, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2019 cenderung semakin maju dari IPM Provinsi Lampung maupun Nasional.

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2020, bersama 15 kabupaten lainnya di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori sedang dengan perkembangan yang cukup baik. Masing-masing kabupaten mengalami peningkatan IPM paling rendah sebesar 0,14 dan paling tinggi meningkat 0,55. Sedangkan yang memiliki status pembangunan manusia berkategori tinggi adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Diantara 15 kabupaten/kota di provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung yang tercatat memiliki nilai IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan IPM sebesar 63,63. Kabupaten Tanggamus sendiri, dengan IPM sebesar 66,42, merupakan kabupaten dengan nilai IPM terbesar ke-11. Tercatat memiliki IPM tertinggi di tahun 2020 yakni sebesar 77,44.

Gambar II.21. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pembangunan manusia yang terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan, penghitungan dilakukan berdasarkan dua ukuran yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada dimensi kesehatan digunakan Angka Harapan hidup (AHH). Adapun pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah pengeluaran perkapita penduduk.

Tabel II.36. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN (%) 2019-2020
1	Bandar Lampung	75.34	75.98	76.63	77.33	77.44	0.14
2	Metro	75.45	75.87	76.22	76.77	77.19	0.55
	INDONESIA	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94	0.03
3	Lampung Tengah	68.33	68.95	69.73	70.04	70.16	0.17
4	Pringsewu	68.26	68.61	69.42	69.97	70.3	0.47
5	Lampung Timur	67.88	68.05	69.04	69.34	69.37	0.04
	LAMPUNG	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	0.17
6	Tulang Bawang	66.74	67.07	67.7	68.23	68.52	0.43
7	Lampung Selatan	66.19	66.95	67.68	68.22	68.36	0.21
8	Lampung Utara	65.95	66.58	67.17	67.63	67.67	0.06
9	Way Kanan	65.74	65.97	66.63	67.19	67.44	0.37
10	Lampung Barat	65.45	66.06	66.74	67.50	67.80	0.44
11	TANGGAMUS	64.41	64.94	65.67	66.37	66.42	0.08
12	Tulang Bawang Barat	63.77	64.58	65.30	65.93	65.97	0.06
13	Pesawaran	63.47	64.43	64.97	65.75	65.79	0.06
14	Pesisir Barat	61.50	62.20	62.96	63.79	63.91	0.19
15	Mesuji	60.72	61.87	62.88	63.52	63.63	0.17

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif. Selama lima tahun terakhir ini nilai IPM Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 IPM Kabupaten

Tanggamus mencapai 64,41 kemudian pada 2019 menjadi 66,37 dan terus meningkat menjadi 66,42 pada tahun 2020. Namun jikadibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah. Angka IPM Nasional pada tahun 2020 mencapai 71,94 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 69,69.

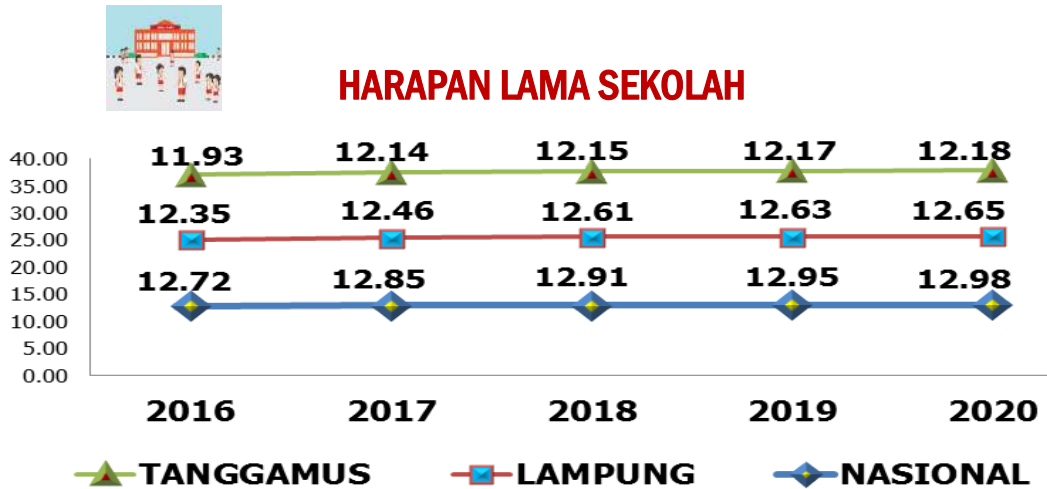
2.2.1.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2020 adalah sebesar 12,18 tahun Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung dan Nasional sebesar 12,65. Angka HLS Lampung ini hanya sedikit dibawah rata-rata nasional yang mencapai 12,98 tahun. Dengan demikian baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional harapan untuk bersekolah sudah sampai pada tingkat selesai SLTA.

Perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus dari tahun 2016 ke tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2016 HLS Kabupaten Tanggamus masih 11,93 dan pada tahun 2020 telah mencapai 12,18 tahun. Dengan kata lain HLS Kabupaten Tanggamus meningkat 2,10 tahun.

Sebagaimana pula terlihat pada gambar,HLS Kabupaten Tanggamus semakin menyusul ketertinggalan dengan HLS Provinsi Lampung. Hal ini menjadi indikasi perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus yang meningkat lebih tinggi dari pada HLS Provinsi Lampung. Dalam periode ini memang HLS Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 0,027 tahun. Gambar II.13 menunjukkan adanya perkebang antara HLS Kabupaten Tanggamus dan HLS Provinsi Lampung dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi pacuan untuk terus meningkatkan HLS KabupatenTanggamus.

Gambar II.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

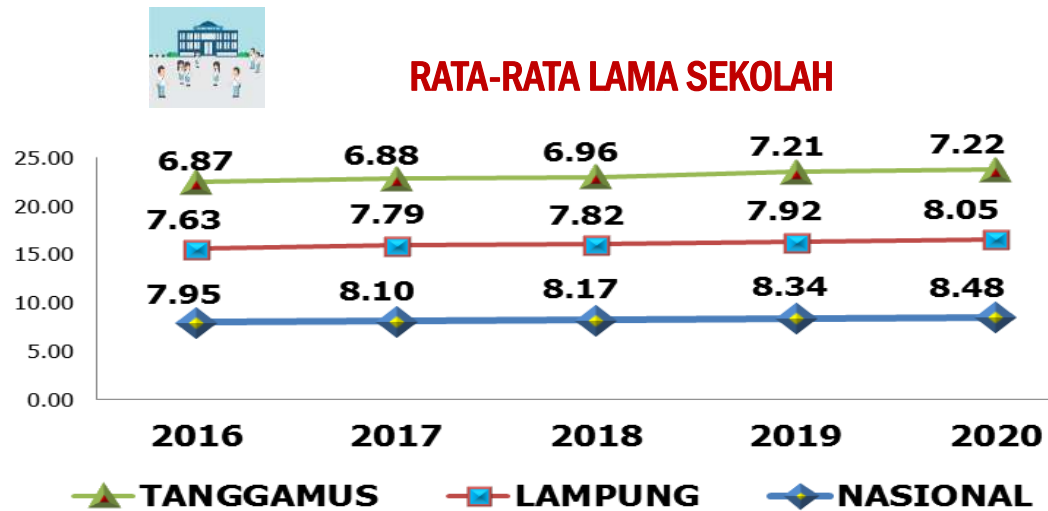


Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.10 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2020 baru mencapai 7,22 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,05 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kondisi ini sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

Gambar II.23. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.11 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2018-2020, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami penurunan. AMH pada tahun 2018 sebesar 97,95% dan tahun 2020 turun menjadi 96,84%.

Tabel II.37. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

Wilayah	Angka Melek Huruf (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanggamus	95.90	96.67	97,95	97,00	96,84

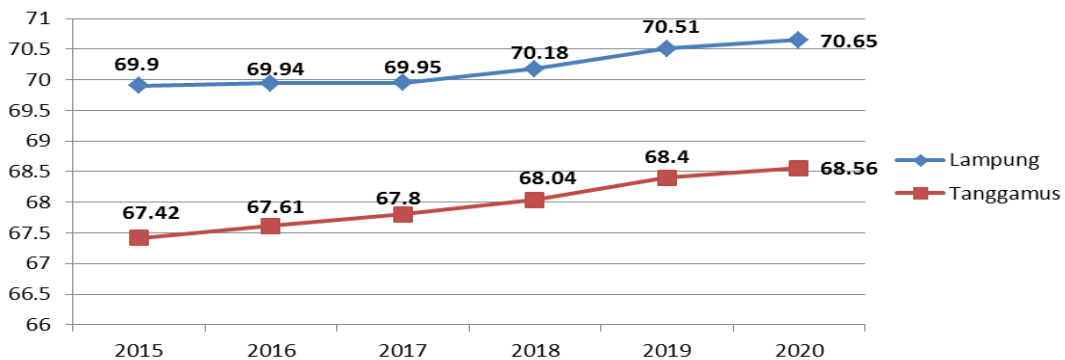
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.12 Angka Harapan Hidup (AHH)

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat" dengan Indikator tujuan "Persentase Peningkatan Angka Harapan Hidup sebesar 0,2 %". Indikator Angka Harapan Hidup adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus dibanding dengan capaian AHH Provinsi Lampung pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

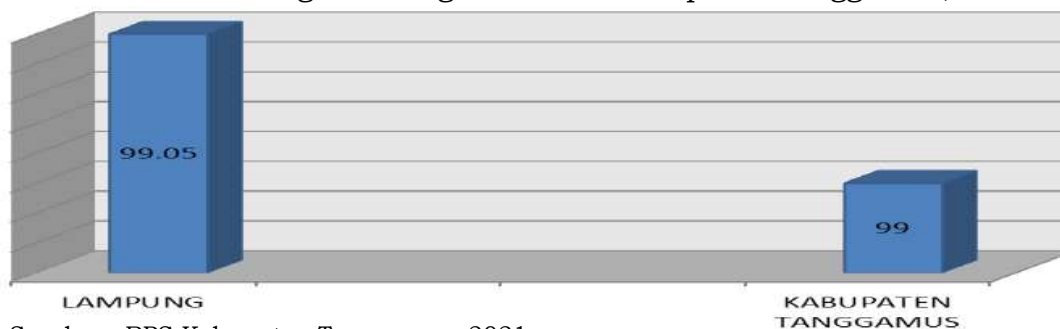
Gambar II.24. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Tanggamus masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan AHH penduduk kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Kondisi ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesehatan lainnya seperti berikut ini.

Gambar II.25 Persentase Penolong Proses Kelahiran Terakhir yang Ditangani Tenaga Medis di Kabupaten Tanggamus, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.13 Balita Gizi Buruk

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Pada tahun 2014 dari 46.704 balita ditimbang, sebanyak 228 balita (0,49%) masuk dalam gizi lebih, 43.599 balita (94,29%) masuk dalam

kategori gizi baik, 2.434 balita (5,21%) masuk dalam gizi kurang dan 7 balita (0,01%) masuk dalam gizi buruk. Pada tahun 2015 dari 44.424 Balita gizi lebih 162 balita (0,35%), gizi baik 43.429 balita (94,66%), gizi kurang 2.279 balita (4,97%), gizi buruk 2 balita (0,02%).

Pada tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Tanggamus ditemukan 7 kasus gizi buruk, 2 diantaranya meninggal dunia dikarenakan adanya penyakit penyerta. Sedangkan penderita gizi buruk yang lain dapat disembuhkan dengan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan yang bersumber dari dana APBD dan bantuan operasional kesehatan. Seluruh penderita gizi buruk mendapatkan penanganan (100%) sesuai target SPM. Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus dan 2020 Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus ditemukan 2 Kasus Gizi Buruk.

Tabel II.38. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Balita Gizi Buruk	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021.

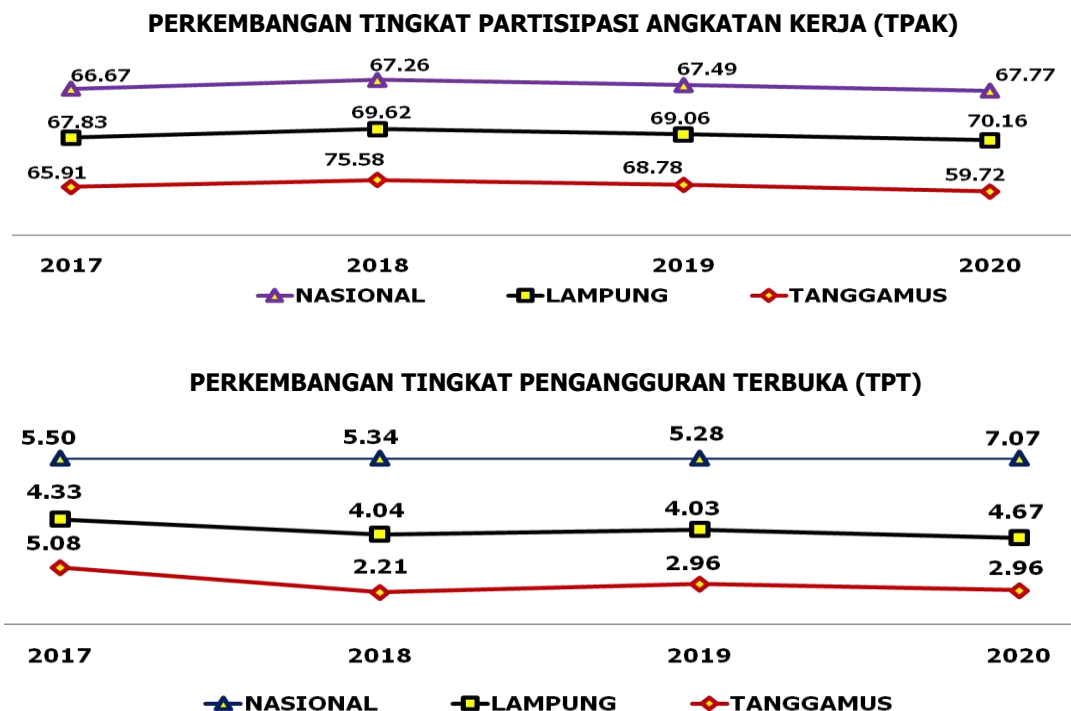
2.2.1.14 Partisipasi Angkatan Kerja

Sedangkan dari sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanggamus pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Berdasarkan data Sakernas BPS, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 adalah sebesar 2,96 persen menurun dari tahun 2017 yang sebesar 5,08 persen.

Terjadinya pandemi *Covid-19* yang bersifat global, membawa dampak buruk pada perekonomian dan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan pekerja yang bersifat masal, hal ini terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka pada Provinsi Lampung dan Nasional. Namun Tingkat pengangguran Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2020 sebesar 2,96 persen, tetap dibanding tahun sebelumnya. Hal

ini karena mayoritas Pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, sehingga tidak terlalu terdampak dengan pengurangan pekerja.

Gambar II.26. Komparasi TPAK dan TPT Antara Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Meskipun Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tanggamuscenderung tetap, akan tetapi jika dilihat dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja, mengalami penurunan yang tadinya 68,78 persen ditahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 59,72 persen. Penurunan inibisa saja disebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yangtidak bekerja karena WFH atau menjalani isolasi di masa PandemiCovid-19.

2.2.1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel II.39. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	WILAYAH	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Tanggamus	73.30	73.47	77.14	75,27	70,93

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.16 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami

peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan sebagian besar realisasi PAD tidak tercapai.

Tabel II.40. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	1.910%	3.510%	4.652%	5.431%	4,831%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.17 Opini BPK

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.41. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2021

2.2.1.18 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan yaitu :

1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang Pemantapan Ketahanan Pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.

2) Distribusi dan Harga Pangan.

Dalam rangka mengendalikan tingkat harga pangan pokok terutama beras dipasaran, maka diadakan kegiatan diantaranya pemberian dana talangan P-LDPM (Pengutan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang dibiayai oleh Dekonsentrasi. Adapun tujuan pengucuran dana tersebut adalah :

- a) Memperkuat modal usaha gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelola (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan).
- b) Untuk dapat mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi petani anggotanya dan tersedianya cadangan pangan disaat menghadapi musim paceklik (kemarau panjang) serta tercapainya stabilitas harga ditempat petani saat panen raya.
- c) Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan melakukan musyawarah rencana kegiatan bersama anggota kelompoknya, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, pemasaran sesuai rencana, kebutuhan anggota, kebutuhan pasar serta mempunyai nilai tambah bagi khususnya unit usaha gapoktan yang mengelolanya.
- d) Memperluas jaringan kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.

3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Guna mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, yaitu berperan pada Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan Pangan, Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka Pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan dan prefensi pangan masyarakat, maka telah melaksanakan Program Penanganan Keamanan Pangan Segar, dengan cara Uji Residu Pestisida Terhadap Pangan Segar.

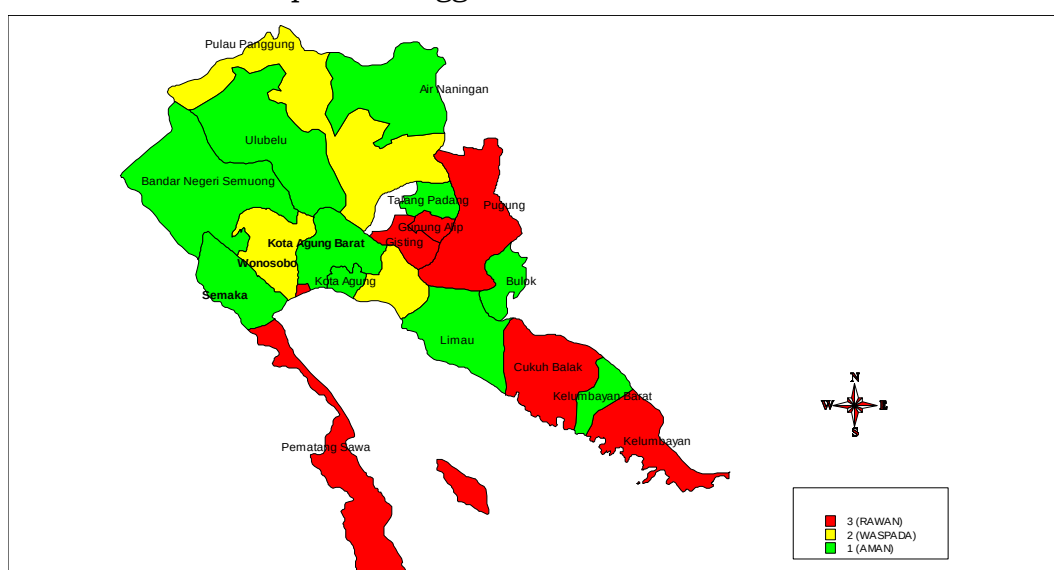
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengenali dan

mengetahui sumber pangan yang ada di wilayahnya atau di sekitarnya. Pemamfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaaman, ternak dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KWT antara lain:

- a) Mekar sari I, Pekon Negeri Agung
 - b) Melati, Pekon Sinar Petir
 - c) Bunga Lestari, Pekon Campang
 - d) Sebabangan, Pekon Banjar Manis
 - e) Ayu Lestari, Pekon Gisting Bawah
 - f) Lestari II, Pekon Way Jaha
 - g) Mawar, Pekon Kemuning
 - h) Kartini, Pekon Argopeni
 - i) Mekar Jaya, Pekon Dadapan
 - j) Sri Lestari, Pekon Wonoharjo
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan

Daerah rawan pangan di Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada KK miskin diatas 30%, daerah rawan pangan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Gambar II.27. Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Daerah yang mengalami Rawan Pangan antara lain Gisting, Gunung Alip, Pugung, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Pematang Sawa. Langkah antisipasi Kerawanan Pangan Transien (Akibat Bencana) dengan Cadangan Pangan yaitu :

- 1) Akan dialokasikan Cadangan Pangan Kabupaten sesuai kewajiban penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten sebanyak 100 Ton.
- 2) Model pengelolaan cadangan pangan ini akan dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Lampung sebagai gudang cadangan pangan daerah dengan lokasi gudang yang terdekat dengan Kabupaten Tanggamus.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.42. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	12,2%	10%	10,5%	35,0 %	28,85%
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	70%	58%	61%	2,0 %	2,70%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 sebesar 28,85% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 35,0% hal tersebut diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan belajar tatap muka termasuk pada Pendidikan Anak Usia Dini.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak

usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang TK dan SD pada tahun 2020 sebesar 50,17%, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 59,79%. Demikian pula Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 1,51% dari tahun sebelumnya.

Tabel II.43. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/PAUD	18.23%	15.00%	15.75%	59,79 %	50,17%
2	SD	97.05%	91.98%	92.43%	98,58 %	95,91%
3	SMP	70.75%	93.00%	61.12%	88,37 %	86,86%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel II.44. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	118.2%	97.23%	102.1%	94,93 %	95,47%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 sebesar 95,47%, mengalami peningkatan sebesar 0,54% dari tahun 2019.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. TargetAngka Partisipasi Murni (APM) Nasional

adalah 100% untuk semua jenjang pendidikan. APM Kabupaten Tanggamus untuk jenjang SD pada tahun 2020 mencapai 87,11%, mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 sebesar 87,70%. Demikian pula untuk jenjang SMP, APM mengalami penurunan dari 61,12% pada tahun 2019 menjadi 60,82% pada tahun 2020.

Tabel II.45. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/PAUD	18.2%	15.00%	15.8%	59,79 %	40,00%
2	SD	92.3%	81.01%	79.8%	87,70 %	87,11%
3	SMP	90,06%	79.00%	34,70%	61,12 %	60,82%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup Kabupaten Tanggamus dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.46. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	94.5%	90%	94.5%	98,58%	95,90%
2	SMP	55.0%	46%	48.0%	88,00%	86,85%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

6) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dinyatakan dalam persentase. Rumus APtS adalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang. Angka putus sekolah yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 terdapat pada jenjang SMP sebesar 25 orang sedangkan putus sekolah terkecil pada jenjang SD sebesar 16 orang sehingga jumlah putus sekolah dikdasmen menjadi sebesar 41 orang.

7) Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu tahun 2017 kondisi ruang kelas pendidikan dasar dengan kondisi baik mengalami penurunan 7,46% menjadi 52,54% dan mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi 66,59%.

Tabel II.47. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	60%	52,54%	54%	66,86%	66,59%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2016-2019, ketersediaan jumlah ketersediaan sekolah SD tidak ada penambahan sekolah. Sedangkan jumlah ketersediaan sekolah untuk SMP dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 39,30%.

Tabel II.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Dasar	4%	4%	4%	4%	66,28%
2	Pendidikan Menengah Pertama	18%	15%	16%	16%	39,30%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Tanggamus adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel II.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:20	1:20	1:12	1:13
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:28	1:28	1:22	1:21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 Rasio Guru/Murid maupun Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2020 mengalami perbaikan dengan rasio masing-masing 1:13 dan 1:21.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Tabel II.50. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Guru/Murid	1:30	1:30	1:20	1:11	1:12
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:32	1:25	1:28	1:29	1:28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 Rasio Guru/Murid tidak mengalami perubahan, namun mengalami perbaikan sejak tahun 2018 sehingga menjadi 1:12 pada tahun 2020. Sedangkan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017 mengalami perbaikan hingga pada tahun 2020 dengan rasio 1:28.

2.3.1.2 Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi sangat berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi yang baru lahir. Penyebab langsung kematian bayi baru lahir adalah infeksi serta bayi baru lahir dengan berat rendah. Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat ekonomi

yang masih rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung gizi ibu hamil. Perkembangan AKB pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya fluktuatif, terlihat bahwa pada tahun 2015 tercatat 27 kasus kematian bayi yang terdiri atas 15 kasus kematian bayi laki-laki dan 12 kasus kematian bayi perempuan. Dari 12.732 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 1,96 per 1.000 KH. Sedangkan pada Tahun 2016 angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Tanggamus per 1000 kelahiran hidup mencapai 16 per 1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) 2,7 Per 1.000 Kelahiran hidup Tahun 2019. Kematian bayi adalah kematian pada anak usia 1-11 bulan. Sedangkan angka kematian bayi di Tahun 2020 sebesar 1,0 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target Renstra capaian telah memenuhi target, dan jika dibandingkan dengan target nasional 24 per 1.000 kelahiran hidup (sumber : LKIP Dinas Kesehatan 2020). Angka kematian bayi menurun cukup signifikan dari 1,96 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi hanya 1,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Begitu pula Angka Kematian Balita mengalami penurunan yang signifikan dari 7,23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 hingga mencapai 1,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Tabel II.51. Cakupan AKB dan AKBa Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2020

URAIAN	TAHUN						2020
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Kematian Bayi	25	27	16	6	9	30	11
Jumlah Kematian Balita	92	96	75	74	74	74	14
Jumlah Kelahiran Hidup	12.732	12.784	11.084	11.200	10.423	11.136	10.992
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	1,96/1.000 KH	2,1/1.000 KH	1,4/1.000 KH	0,5/1.000 KH	0,8/1.000 KH	2,7/1.000 KH	1,0/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (KH)	7,23/1.000 KH	7,51/1.000 KH	6,77/1.000 KH	6,61/1.000 KH	6,6/1.000 KH	6,6/1.000 KH	1,3/1.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

2) Angka Kematian Ibu

Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan, dimana hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain pelatihan dukun bayi, pengembangan Puskesmas, pengembangan klinik kesehatan ibu dan anak, pembangunan rumah sakit, pondok bersalin desa (polindes) dan posyandu, penempatan bidan di desa, gerakan masyarakat untuk menyelamatkan ibu hamil dan bersalin, *Audit Maternal Perinatal* (AMP) dan pengadaan alat kesehatan berupa bidan KIT serta monitoring pelaksanaan kegiatan KIA dan pemasangan stiker ibu hamil.

Angka kematian ibu menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2015 sebanyak 125,2 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016, angka kematian ibu mengalami penurunan yakni 99 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di kabupaten Tanggamus tahun 2020 sebesar 8 per 100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 27 per 100.000 kelahiran hidup. Dibanding target (100 per 100.000 kelahiran hidup), capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus menurun. Terlebih jika dibanding dengan capaian nasional (306 per 100.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Tanggamus bisa dikatakan cukup berhasil dalam penanganan AKI. Angka Kematian Ibu menurun sangat signifikan dari 157,1 per 100.000 pada tahun 2014 kelahiran hidup menjadi 8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Tabel II.52. Cakupan AKI Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2020

URAIAN	TAHUN						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Ibu	20	16	11	8	12	3	9
Jumlah Kelahiran Hidup	12.732	12.784	11.084	11.200	10.423	11.136	10.992
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (KH)	157,08/100.000 KH	125,2/100.000 KH	99,2/100.000 KH	71,4/100.000 KH	115/100.000 KH	27/100.000 KH	82/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

3) Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus

Pada tahun 2020 Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati sebanyak 822 Orang. Sedangkan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis pada tahun 2020 sebanyak 787 Orang atau sekitar 95,7%.

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular seksual yang mempunyai dampak sosial sangat berat bagi penderitanya, karena dimasyarakat orang mengidap penyakit HIV/AIDS (ODHA) cenderungnya terkucilkan sebab itu penemuan penderita penyakit HIV/AIDS sangat sulit sekali.

Pada tahun 2020 kasus HIV/AIDS sebanyak 9 kasus, terdiri atas 9 orang laki-laki. Kematian akibat AIDS sebanyak 1 kasus. Sedangkan untuk penyakit kusta pada tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus ditemukan 2 kasus baru kusta dimana 0 kasus kusta kering (pausi basiler/PB) dan 2 kasus kusta basatri (Multi Basiler/MB). Penemuan kasus baru kusta termasuk sulit karena masih banyak penderita yang memilih bersembunyi oleh keluarga, hal ini disebabkan adanya anggapan di masyarakat bahwa kusta adalah penyakit keturunan atau kutukan.

Penyakit malaria di kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh kondisi geografis dimana masih banyak tempat perindukan nyamuk penular malaria, disamping itu pencegahan dan penanggulangannya malaria belum dilaksanakan secara komprehensi. Konfirmasi terhadap penderita dengan klinis malaria (suspek) yang berkunjung ke sarana pelayanan program malaria, konfirmasi dilakukan secara mikroskopis dan rapid diagnost test (RDT). Pada tahun 2020 dari 131 suspek yang dilakukan pemeriksaan sediaan darah, hanya temuan 2 penderita yang dinyatakan positif malaria yaitu dari puskesmas Putih Doh.

Pada tahun 2019 Kasus DBD mencapai 257 dan meninggal 1 orang Penyakit DBD di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh masih adanya daerah Endemi DBD, dan faktor mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi

sehingga menjadi salah satu penyebab utama penularan DBD, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 167 Kasus DBD dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian.

Tabel II.53. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020

No.	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	TB-Paru	412	729	725	822
2	HIV-AIDS	7	37	43	31
3	Kusta	7	16	-	4
4	Malaria	1	-	8	2
5	DBD	40	108	257	167
6	Hipertensi	38.294	12.336	33.894	24.220

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

4) Rasio Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang dilakukan melalui penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat

pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor pekon, kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran.

Tabel II.54. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	672	672	672	686	689	690
2	Jumlah balita	57.459	56.243	55.504	54.742	53.966	44.445
3	Rasio per 100 balita	1,20	1,20	1,20	1,25	1,28	1,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.55. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH BALITA	RASIO
1	Wonosobo	33	2638	1,25
2	Bandar Negeri Semuong	15	1790	0,84
3	Semaka	34	2721	1,25
4	Kota Agung	41	1.244	3,30
5	Pematang Sawa	20	3.601	0,56
6	Kota Agung Timur	27	1.274	2,12
7	Kota Agung Barat	22	1.409	1,56
8	Pulau Panggung	44	1.228	3,58
9	Air Naningan	31	3.197	0,97
10	Ulu Belu	51	1.597	3,19
11	Talang Padang	68	3.352	2,03
12	Sumberrejo	33	2617	1,26
13	Gisting	48	2.971	1,62
14	Gunung Alip	24	1.147	2,09
15	Pugung	88	4620	1,90
16	Bulok	29	1.715	1,69
17	Cukuh Balak	29	1.846	1,57
18	Kelumbayan	20	709	2,82
19	Kelumbayan Barat	12	1.298	0,92
20	Limau	21	1.654	1,27
	Jumlah	690	44.445	1,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2020

Rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2014 adalah 1,14 kemudian meningkat menjadi 1,20 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus cenderung konstan.

b. Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Tabel II.56. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	23	23	23	23	23	24	24
2	Jumlah Klinik	10	16	16	16	18	16	17
3	Jumlah Pustu	54	54	54	55	54	54	54
4	Jumlah Penduduk	567.172	573.629	580.383	586.624	592.603	598.299	603.706
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	1:24.659,6	1:24.940,4	1:25.234,0	1:25.505,4	1:25.765,3	1:24.929,1	1:25.154,4
6	Rasio Klinik per Jumlah Penduduk	1:56.717,2	1:35.851,8	1:36.273,9	1:36.664,0	1:32.922,4	1:37.393,7	1:35.512,1
7	Rasio Pustu per Jumlah Penduduk	1:10.503,2	1:10.622,8	1:10.747,8	1:10.665,9	1:10.974,1	1:11.079,6	1:11.179,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.57. Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSTU
1	Wonosobo	35.005	2	2
2	Bandar Negeri Semuong	20.313	1	1
3	Semaka	35.848	2	4
4	Kota Agung	43.858	1	1
5	Pematang Sawa	17.435	1	2
6	Kota Agung Timur	20.301	1	1
7	Kota Agung Barat	26.489	1	1
8	Pulau Panggung	36.832	1	3
9	Air Naningan	32.783	1	4
10	Ulu Belu	49.170	1	6
11	Talang Padang	45.293	1	2
12	Sumberrejo	33.885	2	3
13	Gisting	41.114	1	2
14	Gunung Alip	18.469	1	2
15	Pugung	54.492	2	4
16	Bulok	22.055	1	4
17	Cukuh Balak	24.291	1	5

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSTU
18	Kelumbayan	10.920	1	2
19	Kelumbayan Barat	17.174	1	2
20	Limau	17.979	1	3
	Jumlah	603.706	24	54

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tanggamus cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah Puskesmas dan Pustu. Berbeda halnya dengan rasio klinik terhadap jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel II.58. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
I.	Puskesmas Rawat Jalan	
	1. Puskesmas Wonosobo	Madya
	2. Puskesmas Sudimoro	Madya
	3. Puskesmas Kota Agung	Utama
	4. Puskesmas Pasar Simpang	Utama
	5. Puskesmas Negara Batin	Utama
	6. Puskesmas Kedaloman	Madya

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
II.	Puskesmas Rawat Inap	
	1. Puskesmas Putihdoh	Madya
	2. Puskesmas Antabrak	Madya
	3. Puskesmas Talang Padang	Utama
	4. Puskesmas Gisting	Madya
	5. Puskesmas Ngarip	Madya
	6. Puskesmas Siring Betik	Madya
	7. Puskesmas Air Naningan	Madya
	8. Puskesmas Sukaraja	Madya
	9. Puskesmas Kelumbayan	Madya
	10. Puskesmas Kelumbayan Barat	Madya
	11. Puskesmas Bulok Sukamara	Madya
	12. Puskesmas Sumanda	Madya
	13. Puskesmas Rantau Tijing	Madya
	14. Puskesmas Pulau Panggung	Madya
	15. Puskesmas Margoyoso	Madya
	16. Puskesmas Sanggi	Madya
	17. Puskesmas Way Nipah	Dasar

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2020, terdapat 4 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Utama, 18 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Madya dan 1 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Dasar.

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh dibagi pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.59. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2014-2020 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN						2020
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	567.172	573.172	580.383	586.624	592.603	598.299	603.706
7	Rasio per Jumlah Penduduk	1:283.586	1:286.814	1:290.191	1:293.312	1:296.301	1:299.149	1:301.853

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Kabupaten Tanggamus terdapat dua Rumah Sakit yang terdiri atas satu Rumah Sakit Pemerintah dan satu Rumah Sakit Swasta, angka Rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1:301.853 yang artinya satu Rumah Sakit melayani kurang lebih 301.853 Jiwa, idealnya satu Rumah Sakit melayani 100.000 Penduduk sehingga Kabupaten Tanggamus dengan penduduk sebesar 603.706 jiwa membutuhkan enam Rumah Sakit atau membutuhkan empat Rumah Sakit.

5) Rasio Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata serta kualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.60. Jumlah Dokter Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Laki-laki	19	20	22	22	31	34	35
2	Jumlah Dokter Perempuan	30	33	36	36	39	46	40
3	Jumlah Dokter	49	53	59	59	70	80	75
4	Jumlah Penduduk	567.172	573.629	580.383	586.624	592.603	598.299	603.706
5	Rasio Per Jumlah Penduduk	1:11574,94	1:10823,19	1:9837	1:9942,78	1:8465,76	1:7478,74	1:8049,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.61. Jumlah Dokter Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH DOKTER LAKI-LAKI	JUMLAH DOKTER PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER	JUMLAH PENDUDUK
1	Wonosobo	0	2	2	35.005
2	Bandar Negeri Semuong	1	0	1	20.313
3	Semaka	1	1	2	35.848
4	Kota Agung	12	7	19	43.858
5	Pematang Sawa	2	0	2	17.435
6	Kota Agung Timur	0	2	2	20.301
7	Kota Agung Barat	0	1	1	26.489
8	Pulau Panggung	0	3	3	36.832
9	Air Naningan	2	1	3	32.783
10	Ulu Belu	1	2	3	49.170
11	Talang Padang	1	3	4	45.293
12	Sumberrejo	2	2	4	33.885
13	Gisting	8	1	9	41.114
14	Gunung Alip	1	0	1	18.469
15	Pugung	1	6	7	54.492
16	Bulok	0	3	3	22.055
17	Cukuh Balak	1	1	2	24.291
18	Kelumbayan	0	2	2	10.920
19	Kelumbayan Barat	0	2	2	17.174
20	Limau	2	1	3	17.979
	Jumlah	35	40	75	603.706

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan

kesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga medis.

Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga medis di Kabupaten Tanggamus dari Tahun 2014-2020 semakin membaik. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.62. Jumlah Tenaga Medis Dokter Spesialis, Umum, Gigi Tahun 2014-2020 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis	49	53	41	68	95	80	75
2	Jumlah Penduduk	567.172	567.172	580.383	586.624	592.603	598.299	603.706
3	Rasio per Jumlah Penduduk	1:11.574,9	1:10.701,4	1:14.155,7	1:8.626,8	1:6.237,9	1:7.478,7	1:8.049,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.63. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN					
		2015 (orang)	2016 (orang)	2017 (orang)	2018 (orang)	2019 (orang)	2020 (orang)
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	2	2
2	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3	3
3	Spesialis Anak	2	2	2	2	2	2
4	Spesialis Bedah	1	1	1	1	1	1
5	Spesialis Anastesi	0	0	1	1	1	1
6	Spesialis Radiologi	1	1	1	1	1	1
7	Spesialis Orthopedi	1	1	1	1	1	1
8	Spesialis Paru	0	0	0	1	1	1
9	Spesialis Patologi	0	0	0	0	1	1

Sumber : RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.64. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TENAGA MEDIS
1	Wonosobo	35.005	2
2	Bandar Negeri Semuong	20.313	1
3	Semaka	35.848	2
4	Kota Agung	43.858	2
5	Pematang Sawa	17.435	2
6	Kota Agung Timur	20.301	19
7	Kota Agung Barat	26.489	1
8	Pulau Panggung	36.832	3
9	Air Naningan	32.783	3
10	Ulu Belu	49.170	3
11	Talang Padang	45.293	2
12	Sumberrejo	33.885	4
13	Gisting	41.114	11
14	Gunung Alip	18.469	1
15	Pugung	54.492	7
16	Bulok	22.055	3
17	Cukuh Balak	24.291	2
18	Kelumbayan	10.920	2
19	Kelumbayan Barat	17.174	2
20	Limau	17.979	3
	Jumlah	603.706	75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

6) Analisis Ketercukupan Fasilitas Kesehatan

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Berikut analisis ketercukupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020

Tabel II.65. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Dokter Umum	1 : 2.500	1:11.837	Kurang
2	Dokter Spesialis	1 : 16.000	1 : 46.439	Kurang
3	Rumah Sakit	>1	>1	Cukup
4	Puskesmas	1 : 16.000	1 : 25.154	Kurang
5	Puskesmas Pembantu	1 : 1.500	1 : 11.179	Kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

7) Prevalensi Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 maka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 terjadi peningkatan Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk sehingga diperlukan kegiatan **intervensi spesifik** di bidang kesehatan yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif pendek dan kegiatan **intervensi sensitif** yang merupakan berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dalam mendukung penyelesaian masalah Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu melaksanakan Gerakan Bersama Atasi Pendek (*Stunting*) Tanggamus (Gebrak Tanggamus) yang melibatkan seluruh sector dalam mengatasi masalah tersebut.

Tabel II.66. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)/Riskesdas Tahun 2017-2019

TAHUN	WILAYAH	MASALAH GIZI BALITA				KATEGORI
		UNDERWEIGHT	STUNTING	WASTING	GEMUK	
2017	Tanggamus	19,20%	37,30%	6,80%	3,10%	Akut Kronis
2018	Tanggamus	15,50%	29,87%	2,40%	3,10%	Akut Kronis
2019	Tanggamus	2,13%	27,39%	1,29%	0,66%	Akut Kronis
2021	Tanggamus	14,20%	25,00%	5,70%	0,66%	Akut Kronis

Sumber : SSGI, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Khusus indikator persentase balita gizi buruk ini sangat erat kaitannya dengan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus sebagaimana tertera dalam Tabel berikut :

Tabel II.67 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus

TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
2018	53.892	2.089	4,87
2019	49.873	1.675	3,80
2020	43.430	2.019	5,18

Sumber : LKj Kabupaten Tanggamus 2021

8) Penanganan Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, jenis baru *coronavirus* yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)**.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *Covid-19*, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *Covid-19*. Seseorang juga bisa terinfeksi *Covid-19* ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah

merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Tabel II.68. Kasus *Covid-19* Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 Sampai Dengan 27 Desember 2021

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	Tanggamus	2.549	2.408	139	94,46	5,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Jumlah Kasus *Covid-19* Kabupaten Tanggamus pada sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 27 Desember 2021 sebanyak 2.549 orang dengan tingkat kesembuhan 94,46% dan tingkat kematian 5,45%.

Tabel II.69. Sasaran dan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan 27 Desember 2021

KATEGORI SUDAH DIVAKSIN	SASARAN	DOSIS 1	%	DOSIS 2	%
SDM KESEHATAN	1.650	2.065	125,15	1.972	119,52
PETUGAS PUBLIK	28.917	24.760	85,62	22.188	76,73
LANSIA	51.521	28.896	56,09	10.982	21,32
REMAJA	62.939	48.775	77,50	18.383	29,21
MASYARAKAT UMUM	326.695	223.068	68,28	95.429	29,21
JUMLAH	471.722	327.773	69,48	148.968	31,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

Pencapaian vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 untuk dosis pertama mencapai 69,48%, dosis kedua 31,58% dari total sasaran.

Secara umum, terdapat beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* ini, khususnya perekonomian rakyat yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya program *physical distancing* yang

menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi, UMKM hingga sektor jasa. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penanganan *Covid-19* adalah :

1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan protokol *Covid-19* untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi;
2. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran belanja dan *refocusing* belanja untuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum. Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.70. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus

NO	KEADAAN JALAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baik (Km)	358,78	405,05	426,93	255,09	468,91
2	Sedang (Km)	233,82	199,96	197,92	249,07	226,00
3	Rusak Ringan (Km)	355,74	242,33	237,58	122,76	541,00
4	Rusak Berat (Km)	358,83	492,03	476,94	712,45	103,46

NO	KEADAAN JALAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah (Km)	1.307,17	1.339,37	1.339,37	1.339,37	1.339,37
	Jalan Mantap (Km)	592,6	605,01	624,85	504,16	694,91
	Persentase Jalan Mantap	45,33%	45,17%	46,65%	37,64%	51,88%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.71. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KEADAAN JEMBATAN	TAHUN	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baik	39	25
2	Sedang	55	49
3	Rusak Ringan	41	63
4	Rusak Berat	27	11
	Jumlah	162	148

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

2) Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (*divert maintenance*), kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggunya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Sampai dengan Tahun 2020, terdata panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus adalah sepanjang 192.165,4 meter yang terdiri dari irigasi primer sepanjang 174.143,8 meter dan irigasi sekunder

sepanjang 18.021,6 meter. Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang kondisi jalan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.72. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 dan 2020

RINCIAN	VOLUME		SATUAN
	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Infrastruktur Irigasi			
1. Bendung	110	110	Buah
2. Intake	213	213	Buah
3. Free Intake	50	50	Buah
4. Saluran Primer	142.995,76	174.143,8	Meter
5. Saluran Sekunder	15.179,15	18.021,6	Meter
II. Bangunan Pelengkap			
1. Bangunan Bagi	387	387	Buah
2. Bangunan Sadap	682	682	Buah
3. Bangunan Bagi Sadap	572	572	Buah
4. Talang	26	26	Buah
5. Bangunan Terjun	213	213	Buah
6. Bangunan Pelimpah	28	28	Buah
7. Jembatan Orang	138	138	Buah
8. Gorong-Gorong	225	225	Buah
III. Kondisi Jaringan Irigasi			
1. Baik	51.097,34	50.958	Meter
2. Rusak Ringan	48.185,44	59.295	Meter
3. Rusak Sedang	35.924,85	49.319	Meter
4. Rusak Berat	22.967,28	34.569	Meter
5. Jumlah Panjang Jaringan Irigasi	158.174,91	194.140	Meter

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam aspek penyediaan sarana pemukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Tanggamus. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan pemukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar pemukiman khususnya kawasan pemukiman padat, maka harus ditempuhdengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas lingkungan pemukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar pemukiman yang ada di lingkungannya. Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang perkembangan capaian indikator perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.73. Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	49,8%	52,0%	54,1%	56,25%	58,7%
2	Rasio permukiman layak huni	67,8%	70,0%	75,0%	76,7%	78,0%
3	Persentase pemukiman yang tertata	67,8%	70,0%	73,0%	74,0%	75,0%
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	57,8%	60,0%	63,0%	65,0%	67,0%
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	69,8%	72,0%	73,0%	70,1%	67,0%
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	52,7%	60,0%	55,0%	51,0%	50,0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dan Keberadaan ancaman terorisme, konflik SARA di Kabupaten Tanggamus disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.74. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	84%	80%	85%	70%	80%
2	Keberadaan ancaman terorisme, konflik SARA	0%	0%	0%	25%	0%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

2.3.1.6 Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus hingga saat ini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel II.75. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang ditangani	70%	75%	86%	96,21%
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	65%	73%	75%	78%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa

pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara umum mengingat kompleksnya permasalahan ini. Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Kabupaten Tanggamus bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.76. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Tanggamus

NO	JENIS PMKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	10	10	10	7	0	Bidang Rehsos
2	Anak Telantar (AT)	100	73	73	67	300	Bidang Rehsos
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3	3	3	3	32	Bidang Rehsos
4	Anak Jalanan	40	26	26	23	0	Bidang Rehsos
5	Anak Dengan Kesabailitan (ADK)	76	77	77	70	0	Bidang Rehsos
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	8	18	18	18	0	Bidang Rehsos
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	3	10	10	10	0	Bidang Rehsos
8	Lanjut Usia Terlantar	715	37501	37501	27,912	1806	Bidang Rehsos
9	Penyandang Disabilitas	200	208	208	4,090	744	Bidang Rehsos
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
11	Gelandangan	10	8	8	5	1	Bidang Rehsos
12	Pengemis	1	1	1	2	0	Bidang Rehsos
13	Pemulung	1	2	2	2	0	Bidang Rehsos
14	Kelompok Minoritas	1	1	1	1	0	Bidang Rehsos
15	Berkas warga Binaan Lembaga Permasalahatar	2	1	1	1	0	Bidang Rehsos
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	1	2	2	5	0	Bidang Rehsos
18	Korban Trafiking	4	4	4	0	0	Bidang Rehsos
19	Korban Tindak Kekerasan	10	18	18	10	0	Bidang Bansos

NO	JENIS PMKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	50	50	50	50	0	Bidang Pemberdayaan
21	Korban Bencana alam	673	675	675	151	603	Bidang Bansos
22	Korban Bencana Sosial	1	1	1	7	69	Bidang Bansos
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	150	113	113	113	0	Bidang Pemberdayaan
24	Fakir Miskin	10,389	10,393	82,041	86,153	82,675	Bidang Pengembangan
25	Komunitas Adat terpencil	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	60	60	60	100	Bidang Pemberdayaan
	Jumlah Jiwa	12,448	49,255	120,903	118,760	86,330	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.2 Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Berikut capaian kinerja urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2020. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2020.

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari Kerja	4.220	4.758	4.007	3.031

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	94,92%	95,50%	95,90%	59.72%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	100%	0%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100 %	100%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 sebanyak 4.220 orang meningkat menjadi 4.758 orang pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4.007 orang (2019) dan 3.031 orang (2020). Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 94,92% dan terus meningkat hingga mencapai 95,90% pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,72%. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020 adalah 0%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan refocusing APBD sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan pelaksanaannya menjadi terhambat.

Sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Tanggamus menghadapi permasalahan mengatasi pengaguran yang ada di Kabupaten Tanggamus, sementara ini pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus melakukan kegiatan pelatihan kerja untuk masyarakat yang berpotensi untuk bekerja.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai

lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang. Berikut perkembangan capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.78. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	INDIKATOR	Jumlah Kasus		
		2018	2019	2020
1	Kekerasan Terhadap Anak	34	23	22
2	Kekerasan Terhadap Perempuan	16	10	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.79. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perempuan yang meningkat pendapatannya dalam keluarga	46%	48%	51%	62,1%	87,73%
2	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	80%	85%	100%	100%	100%
3	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	44,34 %	44,34 %	47%	51,84%	53,63
4	Nilai Layak Anak	373	437	647	729,90	776
5	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	73%	77%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa Persentase perempuan yang meningkat pendapatannya dalam keluarga tahun 2016 sebesar 46% meningkat menjadi 87,73% di tahun 2020. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah meningkat menjadi 53,63% pada tahun 2020. Nilai Layak Anak pada tahun 2016 sebesar 373 dan meningkat tajam pada tahun 2020 mencapai 776. Sedangkan persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) meningkat menjadi 100% pada tahun 2020.

2.3.2.3 Pangan

Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa. Pemenuhan hak atas pangan menurut amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan daerah merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang selalu meningkat dirasakan sangat perlu memperhatikan stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.80. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	106.313	147.689	201.846	366.248	225.338
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	86%	85%	88%	105%	141%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama selalu meningkat setiap tahun, peningkatan yang sangat signifikan terjadi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 225.338 ton. Peningkatan ini merupakan dampak dari dilaksanakannya Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi yang dimulai sejak tahun 2016. Sedangkan terkait dengan persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita pada tahun 2016 sebesar 86% dan terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 85%. Selanjutnya sejak tahun 2018 persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita meningkat menjadi 141% pada tahun 2020.

2.3.2.4 Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa

tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.81. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	40,75%	50%	58%	62%	65%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KabupatenTanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2016 sebesar 40,75% dan terus meningkat hingga mencapai 65% ditahun 2020.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibu kota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan *Dannish International Development Agency* (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI (*Environmental Performance Index*).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Selain IKLH, pengendalian lingkungan hidup juga dititikberatkan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Berikut capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.82. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	-	-	Ada	-	-
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	66,5	66,5	66,5	62,5	63,73
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	58	59	60	50	53,33
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0-50	83,11
7	Hasil Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan .	30	30	30	30	53,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup KabupatenTanggamus, 2021

Berdasarkan data diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus masuk kedalam klasifikasi kurang.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Perkembangan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk	50,26%	58,76%	61,35%	62,88%	66,17%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	3,40%	7,81 %	3,60%	32,78%	29,08%
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,61%	0,75 %	0,89%	10,99%	20,11%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	71,45%	78,39 %	84,71%	86,71%	91,81%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	81,90%	84,62%	95,04%	103,37%	92,72%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 44,61%. Rasio ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 66,17% pada tahun 2020.

Demikian pula halnya dengan rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah maupun cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang setiap tahun mengalami trend positif (meningkat). Sedangkan untuk cakupan penerbitan akte kelahiran terlihat fluktuatif, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 ini yaitu sebesar 92,72%.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan

masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepadapihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perkembangan capaian urudan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM)	58%	60%	65%	70%	85%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68%	70%	78%	85%	90%
3	Persentase LSM aktif	66%	70%	75%	78%	-
4	Persentase LPM Berprestasi	57%	60%	78%	80%	-
5	Persentase PKK aktif	66%	70%	75%	85%	90%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	60%	65%	75%	78%	80%

Sumber:Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator terkait pemberdayaan masyarakat dan desa semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran

Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk itu pendirian BUM Desa harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).

Tabel II.85. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan 20 Januari 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUM-DES MENURUT JENIS USAHA					
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH
1	Air Naningan	6	2				8
2	Bulok	3		1		1	5
3	Bandar Negeri Semuong	1					1
4	Cukuh Balak	1	2				3
5	Gisting	5	2			1	8
6	Gunung Alip	2	1		2		5
7	Kota Agung Timur	4				1	5
8	Kelumbayan	2					2
9	Kelumbayan Barat	2	2				4
10	Kota Agung	3					3
11	Kotaagung Barat	4	2				6

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUM-DES MENURUT JENIS USAHA					
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH
12	Pugung	5					5
13	Pematang Sawa	2					2
14	Pulau Panggung	4	1				5
15	Semaka	21	1				22
16	Sumberejo	9	1				10
17	Talang Padang	11	1				12
18	Wonosobo	10	1				11
19	Limau	2			1		3
20	Ulu Belu	1					1
	JUMLAH	98	16	1	3	3	121

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, peningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Capaian kinerja pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.86. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	28,4 %	2,72 %	2,5 %	2,4%
2	Persentase akseptor KB MKJP	25,2 %	28,12 %	30,9 %	33.95%
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	34,21 %	34, 1%	32,09%	13,11%

Sumber : Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2020

2.3.2.9 Perhubungan

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam Kabupaten Tanggamus, maka penyediaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperlancar arus barang, jasa dan orang.

Sistem transportasi haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi mantap, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas barang, penumpang dan jasa termasuk informasi antar kecamatan maupun antar daerah. Capaian kinerja perhubungan Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah Pelabuhan Udara	0	0	0	0	0
3	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	52%	70%	73%	4,3%	21,13%
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	2.350	1.300	1.350	1.450	1.570

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2020 jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 6 buah/lokasi.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2016 persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 52% dan menurun tajam menjadi 21,13% pada tahun 2020. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama tahun 2016 sebanyak 2.350 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1.300, namun kembali mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.570.

Sedangkan terkait dengan perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88. Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALULINTAS	2018	2019	2020	2021
1	Rambu Lalu Lintas	5,098	5,196	5,196	5,196
2	Marka Jalan	1,051	1,051	1,051	1,051
3	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	16	23	23	23
4	Alat Penerangan Jalan	1,388	1,561	1,655	1,678
5	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	1.500 M ²	1.500 M ²	1.500 M ²	1.500 M ²
6	Terminal Penumpang (Tipe C)	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Perkembangan capaian indikator komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.89. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	58%	60%	63%	24%	26%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	68%	70%	75%	63%	66%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Tanggamus memiliki trend positif. Pada tahun 2016 cakupan KIM hanya sebesar 58% dan meningkat menjadi 63% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa cakupan wilayah yang *tercoverage* oleh layanan telekomunikasi di Kabupaten Tanggamus semakin luas.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah. UMKM aktif adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha. Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar.

Perkembangan capaian indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.90. Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	40,00%	40,48%	40,91%	42,73	50,73%
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	46,60%	50,74%	53,75%	96,27	96,27%
3	Persentase BPR/LKM aktif	80,00%	80,95%	81,82%	3,73	3,73%
4	Jumlah UKM	1583	1636	1596	1321	1228
5	Persentase UKM yang memiliki Penunjang Usaha	15%	18%	20%	20%	30%
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,67%	99,69%	99,71%	98,61%	99,01%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2021

Dari tabel di atas, persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren yang positif. Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 mencapai 40,00% dan terus meningkat hingga mencapai 50,73% pada tahun 2020. Demikian pula terjadi pada Persentase UKM non BPR/LKM aktif terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Untuk BPR/LKM aktif sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis menjadi 3,73%. Sedangkan persentase untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2016 sebesar 99,67% terjadi penurunan menjadi 99,65% pada tahun 2015. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 99,71%. Sedangkan tahun 2019 terjadi penurunan kembali yaitu menjadi 98,61% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 99,01%.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal. Capaian kinerja penanaman modal Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.91. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	14	13	13
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	8.450.569.360.181	8.595.606.321.616,83	9.116.433.203.156	9.640.761.422.393,30
3	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN	4%	1.72%	6.06%	5.75%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Jumlah investor berskala nasional maupun daya serap tenaga kerja menunjukkan peningkatan. Demikian pula halnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2017 Rp.8.450.569.360.181 dan nilai investasi ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai Rp.9.640.761.422.393,30.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.92. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,25%	35%	40%	42%	52%
2	Cakupan pembinaan olahraga	48%	60%	78%	78%	80%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2021

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus. Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang. Sedangkan dari segi cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tanggamus sebesar 48% dan meningkat hingga 80% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Tanggamus terhadap jumlah cabang olahraga yang terdaftar semakin banyak.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga di kalangan masyarakat Kabupaten Tanggamus maka saat ini Kabupaten Tanggamus sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B yang berada di Kecamatan Kota Agung.

Gambar II.28 Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.2.14 Statistik

Pengembangan statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut capaian indikator statistik Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.93. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2021

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2016-2020 telah terpenuhi. Diharapkan keberadaan dua dokumen tersebut dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

2.3.2.15 Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan pada industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi. Capaian indikator persandian Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.94. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	8%	8%	10%	10%	12%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional. Berikut perkembangan capaian indikator kebudayaan Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.95. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	0

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66%	66%	66%	67%	67%
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya.

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Berikut perkembangan capaian indikator perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.

Tabel II.96. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	7.025	5.340	7.771	7.136	4.992

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1.180	1.200	1.500	1.595	1.632
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.000	1.660	1.607	2.465	7.230
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5%	6%	6%	6%	6%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2016 mencapai 7025 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi 7136 orang. Namun pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan menjadi 4.992.

Demikian pula halnya dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah koleksi judul buku perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan.

Setelah ditetapkan sebagai Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.56/34/08/2020 dan sebagai Kabupaten Penerima Manfaat Transportasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2675/1/PPM.00.00/III/2020 tentang Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka dalam rangka mendukung Program Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus melaksanakan program literasi dan program *Smart Village* yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan pada 5 (lima) pekon yaitu:

1. Perpustakaan Rumah Baca Berlian Pekon Kanoman Kecamatan Semaka.
2. Perpustakaan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat.
3. Perpustakaan Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang.
4. Perpustakaan Jalosi Sanak Negeri Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan.
5. Perpustakaan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting.

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub system sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perubahan paradigm perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi :

1. Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.
2. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.
3. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan namun keberadaan perpustakaan sendiri sudahlah menjadi makerspace atau tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).
4. Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumberdaya informasi yang ada

diperpustakaan sudahlah bukan menjadi barang yang sulit karena perpustakaan bias melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungnya.

5. Merubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (Konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

2.3.2.18 Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pengelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis

tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara. Berikut ini disajikan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan kondisi SDM kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel II.97. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20%	25%	30%	40%	40%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	1	1	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan.

Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus. Perkembangan capaian indikator pariwisata Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.98. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	73%	75%	75%	120%	17%
2	Lama kunjungan Wisata	190 hari	193 hari	200 hari	240 hari	35 hari
3	PAD Sektor Pariwisata	0%	0.008%	0.132%	0,11%	0,014%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2016 sebesar 73% dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi *Covid-19* dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat sehingga mempunyai imbas penurunan secara signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Demikian pula dengan lama kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata juga mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak pandemi *Covid-19*.

2.3.3.2 Partanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Ketersediaan pangan daerah merupakan salah satu perhatian pemerintah demi terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus. Perkembangan capaian indikator pertanian Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.99. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	43,94%	43,07 %	43,01 %	33,85%	42,51%
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	55,90%	56,20%	57,50%	57,31%	55,87%
3	Cakupan bina kelompok petani	54%	59%	60%	65,00%	65%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 43,94% dan terus menurun hingga hanya mencapai 33,85% di tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya kontribusi sektor lain terhadap PDRB. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian/perkebunan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 42,51%. Pada tahun 2016 produktivitas padi sebesar 55,90% dan terus meningkat hingga mencapai 57,50% pada tahun 2018 dan terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 57,31% dan 55,87%. Sedangkan cakupan bina kelompok tani terus meningkat setiap tahunnya. Yang mana pada tahun 2016 cakupan bina kelompok petani sebesar 54% dan meningkat menjadi 65,00% pada tahun 2019 dan 2020.

2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan: geologi, mineral dan batubara, energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus. Perkembangan capaian indikator energi dan sumber daya mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.100. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga Pengguna listrik	76.9 %	79.4 %	89.6 %	95.3%	96.88%
2	Rasio ketersediaan daya listrik	77.1 %	79.55 %	89.75 %	95,60%	95.65

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 76,9% dan terus meningkat hingga mencapai angka 96,88% di tahun 2020. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Demikian pula halnya dengan rasio ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 rasio daya listrik adalah 77,1% dan pada tahun 2020 rasionya mencapai 95,65%.

2.3.3.4 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Majunya sistem perdagangan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efisien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Perkembangan Capaian Indikator Perdagangan di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.101. Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
1	Ekspor Bersih Perdagangan	17,61%	17,73%	17,82%	16,82%
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	8,97%	9,66%	10,42%	11,38%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan sebesar 17,61% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 17,82% pada tahun 2018, akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 16,82%. Ekspor bersih perdagangan adalah jumlah nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Demikian pula dengan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.3.3.5 Perindustrian

Pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi tidak terlepas dari peranan bidang industri. Oleh sebab itu pembangunan bidang industri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada di daerah serta mengembangkan potensi lokal.

Pembangunan bidang industri di Kabupaten Tanggamus diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, di samping itu terus mengupayakan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan sektor ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu karena masih terbatasnya modal usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah maka perlu mengupayakan kemitraan, baik melalui BUMN maupun dengan bank penyanggah dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah. Berikut capaian indikator perindustrian Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.102. Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	10,33%	10,61%	11,76%	12,50%	13,10%
2	Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	3%	3%	4%	4%	4%
3	Jumlah industri besar	4	4	4	4	4
4	Persentase Pengusaha Industri Kecil yang telah mengikuti Pelatihan	15%	17%	17%	19%	20%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2021

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah keseluruhan kelompok pengrajin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebesar 10,33% dan terus meningkat hingga mencapai 13,10% pada tahun 2020.

Dari sisi pertumbuhan industri pengolahan masih tergolong cukup rendah, yakni sebesar 4% pada tahun 2020. Demikian pula halnya dengan pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 hal tersebut karena terbatasnya anggaran pelatihan.

2.3.3.6 Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Perkembangan indikator transmigrasi Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.103. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Transmigran Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	15 kk	5 kk	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak pernah dilaksanakan transmigrasi secara swakarsa. Transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang merupakan program dari pemerintah. Tingkat keikutsertaan transmigrasi di Kabupaten Tanggamus fluktuatif. Pada tahun 2016 masyarakat yang mengikuti program ini sebanyak 15 KK, pada tahun 2017 terdapat 5 KK yang mengikuti program transmigrasi sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini.

2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus. Capaian indikator kelautan dan perikanan Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	31.726,80	31.402,78	33.000	32.031,21	32.671,84
2	Cakupan bina kelompok nelayan	35%	22%	24%	26%	28%
3	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	64%	50%	54%	57%	60%
4	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	90	75	85	86%	87%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

2.3.4 Fokus Urusan Layanan Penunjang

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	69 %	70 %	70%	72%	72%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2021

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2028-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah Jumlah Program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 penjabaran mencapai persentase sebesar 100%. Demikian pula dengan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100 persen. Sedangkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW pada tahun 2016 adalah sebesar 69% dan terus meningkat hingga mencapai 72% pada tahun 2020.

2.3.4.2 Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Tabel II.106. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	3,39%	0.30 %	0,98%	0,94%	2,70%
3	Persentase program yang tidak terlaksana	0 %	0 %	0 %	0%	0%
4	Persentase belanja pendidikan(20%)	13,05%	33,34%	32,33%	30,35%	43,31%
5	Persentase belanja kesehatan(10%)	3,60%	8,49%	9,38%	9,94%	15,85%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	44,55% : 55,45%	39,02 % : 60,98 %	36,48 % : 63,52 %	38,65% : 61,35%	36,99% : 63,01%
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	80%	80%	100%	100%	100%
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

Sejak tahun 2016-2020 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak (WTP) 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2016, Kabupaten Tanggamus memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tanggamus dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,39%. Dalam hal pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan (terlaksana 100%).

Persentase belanja pendidikan selama tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuasi dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 43,31%. Sedangkan persentase belanja kesehatan pada tahun 2016 sebesar 3,6% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 15,85%.

Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Sedangkan bagi hasil

kabupaten/kota dan desa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 cenderung konstan yakni sebesar 80% sedangkan sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 mencapai 100%. Dalam hal penetapan APBD, Pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu melaksanakannya secara tepat waktu.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran langsung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.107. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	2017	2018	2019
		2016			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	60%	65%	53%	45%
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	65%	68%	50%	13,86%
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	40 ASN	40 ASN	38 ASN	30 ASN

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2016	2017	2018	2019
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu padainstansi pemerintah	863	1.023	1.320	2.370

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2020

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020, posisi Kabupaten Tanggamus berada pada posisi 12 dari 415 Kabupaten dengan nilai 7.107 dengan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif, capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi peringkat 8 dengan skor indeks 62,32 pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.

Terkait Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), berdasarkan Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2020, Kabupaten Tanggamus mendapatkan Nilai 1,850556774 (predikat SEDANG) angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 2,429 (predikat SEDANG) PADA TAHUN 2021. Penilaian IDSD ini terdiri dari Indeks Dimensi, Indeks Pilar dan Indeks Aspek. Berikut penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Tabel II.108. Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Indeks Dimensi Tahun 2020

NO.	DIMENSI	INDEKS
1	Tata Kelola Pemerintahan	2,50
2	Keamanan dan Ketertiban	2,50
3	Infrastruktur Transportasi	0,50
4	Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	1,00
5	Kuangan Daerah	3,75
6	Stabilitas Ekonomi	2,71
7	Kesehatan	3,00
8	Pendidikan	1,67
9	Keterampilan	1,00

NO.	DIMENSI	INDEKS
10	Kompetisi Dalam Negeri	1,25
11	Pajak dan Retribusi	3,00
12	Stabilitas Pasar	0
13	Ketenagakerjaan	5,00
14	Kapasitas Tenaga Kerja	1,00
15	Akses Keuangan	0,17
16	Ukuran Pasar	3,00
17	Regulasi	0
18	Kewirausahaan	0
19	Interaksi dan Keberagaman	0,83
20	Penelitiandan Pengembangan (R&D)	0,11
21	Komersialisasi	0,67
22	Telematika	4,00
23	Teknologi	2,00

Sumber : Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Tabel II.109. Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Indeks Pilar Tahun 2020

NO.	PILAR	INDEKS
1	Kelembagaan	2,50
2	Infrastruktur	0,75
3	Perekonomian Daerah	3,23
4	Kesehatan	3,00
5	Pendidikan dan Keterampilan	1,33
6	Efisiensi Pasar Produk	1,42
7	Ketenagakerjaan	3,00
8	Akses Keuangan	0,17
9	Ukuran Pasar	3,00
10	Dinamika Bisnis	0,00
11	Kapasitas Inovasi	0,54
12	Kesiapan Teknologi	3,00

Sumber : Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Tabel II.110. Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus berdasarkan Indeks Aspek Tahun 2020

NO.	ASPEK	INDEKS
1	Faktor Penguat/ <i>Enabling Environment</i>	2,16071
2	Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i>	2,16667
3	Faktor Pasar/ <i>Market</i>	1,89583
4	Ekosistem Inovasi	1,17901

Sumber : Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus memperoleh nilai 2,429 Atau predikat berdaya saing SEDANG. Adapun Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.111. Hasil Penilaian IDSD Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Aspek Yang Dinilai Tahun 2021

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Aspek Ekosistem Inovasi	1,568
2	Aspek Penguat	2,254
3	Aspek Sumber Daya Manusia	3,438
4	Aspek Pasar	2,458
	Nilai Indeks	2,429
	Predikat	SEDANG

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021

Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 juga berhasil mendapatkan apresiasi Top 99 Inovasi Terbaik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan program “Senja Indah Sejahtera yang Menjadi Impian dan Asa Di Akhir Hayat”. Inovasi ini merupakan program layanan kesehatan yang dikhususkan bagi para Lanjut Usia, yaitu berupa layanan *Home Care*, dimana petugas kesehatan yang mendatangi para Lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Kinerja penelitian dan pengembangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.112. Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	70%	75 %	79%	80%	83%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	67%	68%	70%	72%	75%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2020

Sedangkan dalam penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menunjukan indikator yang terus meningkat capaiannya dari tahun 2016-2020.

Tabel II.113. Perkembangan Indikator Penerapan SIDa Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	75%	65 %	69%	73%	76%
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	65%	66%	68%	71%	74%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2021

Terkait dengan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Kabupaten Tanggamus saat belum menyusun dan akan disusun pada periode RPJMD berikutnya termasuk juga dengan Rencana Prioritas Penelitian (RPP).

Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan Riset serta Pengendali Mutu Riset dan Pelaksana Riset untuk Kabupaten Tanggamus belum dibentuk.

Untuk jumlah SDM Peneliti berupa jabatan fungsional penelitian, saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 1 orang peneliti sedangkan untuk jabatan fungsional perencana berjumlah 34 orang.

Untuk Indikator Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Kabupaten Tanggamus belum melakukan pengukuran dan akan dilaksanakan pada tahun mendatang, sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018-2020, Kabupaten Tanggamys selalu mendapatkan kategori baik dengan klaster sedang.

Tabel II.114. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1	IPKD	72,9389	67,8997	77,2524
2	Kategori	Baik	Baik	Baik
3	Klaster	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, 2021

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai peningaktan IPKD dan IID antara lain yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen penganggaran harus benar-benar mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
- 2) Memastikan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan anggaran untuk mendukung program prioritas;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang akuntabel dan keterbukaan publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Mengotimalkan penyerapan anggaran dengan memaksimalkan peran tim percepatan penyerapan anggaran dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
- 5) Menjaga kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan pembinaan dan pendampingan dari APIP, BPKP dan BPK;

- 7) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan inovasi daerah;
- 8) Melaksanakan program satu inovasi satu pekon.

2.3.4.5 Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kinerja pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.115. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	TEMUAN	STATUS		
			S	DP	B
1	2016	84	31	48	5
2	2017	102	22	69	11
3	2018	126	59	47	20
4	2019	94	38	41	15
5	2020	134	67	49	18
	JUMLAH	540	217	254	69

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.116. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	94,10%	88,81%	84,49%	83,8%	86,57%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan selama tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi, tindak lanjut yang paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 83,8%, sedangkan tindak lanjut temuan tertinggi dilakukan pada tahun 2016 sebesar 94,10%.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) merupakan salah satu instrumen pengawasan di Daerah, berikut disajikan data formasi Auditor dan PPUPD di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Tabel II.117. Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN HASIL ANALISA BEBAN KERJA	KEKURANGAN
	AUDITOR			
1	Utama	0	4	4
2	Madya	2	12	10
3	Muda	10	12	2
4	Pertama	1	24	23
5	Terampil	1	1	0
	Total	14	53	39
	PPUPD			
1	Utama	0	4	4
2	Madya	17	12	0
3	Muda	9	12	3
4	Pertama	0	20	20
	Total	26	48	27

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa saat ini terdapat 40 jabatan fungsional yang sudah terisi terdiri dari 14 orang auditor dan 26 orang PPUPD. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, masih diperlukan sejumlah 39 orang auditor dan 27 orang PPUPD.

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.118. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program -Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setoran DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

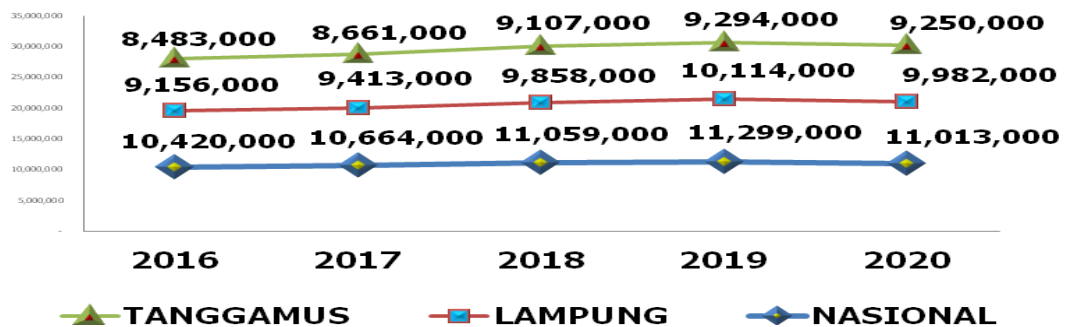
Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019 yaitu Rp. 9.294.000.00,- mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.250.000.00,-

Gambar II.29. Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (I_t) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (I_b). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.119. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cukuh Balak	196.11	143.88	195.87	165.74	46.83
2	Pugung	64.19	140.22	76.99	64.23	71.17
3	Talang Padang	121.73	140.12	181.57	174.03	77.09
4	Pulau Panggung	102.97	133.20	122.00	146.62	81.28
5	Kota Agung	356.55	141.37	221.26	204.41	39.50
6	Wonosobo	110.44	133.39	144.50	153.30	93.24
7	Kelumbayan	309.71	136.74	297.54	189.99	54.58
8	Sumberejo	156.45	138.79	200.77	181.71	37.72
9	Ulu Belu	305.02	130.61	413.17	303.41	32.62
10	Pematang Sawa	164.47	148.97	115.44	102.01	41.52
11	Semaka	44.56	143.23	53.89	60.25	95.65
12	Gisting	295.45	142.41	361.05	403.58	66.23
13	Kota Agung Timur	94.89	139.84	105.78	92.60	178.75
14	Kota Agung Barat	111.93	132.72	102.84	124.48	123.45
15	Air Naningan	514.75	136.31	698.23	442.22	23.77
16	Limau	483.63	135.26	555.50	404.24	17.00
17	Gunung Alip	138.26	138.62	120.80	103.30	125.51
18	Bandar Negeri Semong	180.97	135.34	120.16	181.02	69.06
19	Bulok	102.80	138.59	95.73	124.25	119.01
20	Kelumbayan Barat	522.05	136.21	496.99	275.97	47.57
	Jumlah Rata-Rata	139.58	140.72	147.14	140.10	71.09

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan nilai NTP lebih besar dari 100 (surplus). Namun pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan menjadi 71,09 (defisit), hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak pada

sektor ekonomi, disamping hal tersebut diakibatkan juga oleh penyusutan luas baku sawah dari semula 23.080 Ha menjadi 16.843 Ha, adanya perbaikan jaringan irigasi oleh Dinas PUPR pada kegiatan IPDMIP di 14 DI, proses pembangunan/rehabilitasi jaringan tersebut berbentukaran dengan jadwal tanam padi sehingga berpengaruh terhadap luas tanam padi dan berakibat pada luas panen, oleh karena itu perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas PUPR sebagai pelaksana pekerjaan fisik irigasi dengan Dinas KPTPH selaku pengguna air irigasi di tingkat lapangan serta melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas bagi Kecamatan yang NTP nya masih jauh dibawah 100 dengan memperhatikan potensi yang ada pada kecamatan tersebut.

2.4.3 Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.120. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	WILAYAH	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Tanggamus	37 %	35 %	13 %	12%	11%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif. Namun sejak tahun 2018, angka kriminalitas menurun secara signifikan dari tahun 2017 (35%) menjadi 11 % pada tahun 2020.

2.4.4 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk

65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel II.121. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
1	Kabupaten Tanggamus	51,03	50,31	47,84	46,67	46,31	46,08	45,96

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun. Apabila pada tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 51,03% maka pada tahun 2022 menjadi 45,96%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Kabupaten Tanggamus mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2014 pada saat RK di bawah 50%. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan.

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data diatas maka dengan nilai RK tahun 2022 sebesar 45,96 berarti setiap 100 penduduk angkatan kerja (produktif) menanggung sebanyak 45 penduduk usia non produktif.



Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.122. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.1	Layanan Urusan Pemerinatahan Wajib Pelayanan Dasar										
A	Pendidikan										
1	Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat.	31,5%	33,1%	34,7%	36,5%	30%	31,5%	59,8%	40%	65%	<
B	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	57,1%	63,3%	65,1%	69,8%	72,0%	73,0%	75,4%	80,0%	100%	<
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	52,1%	57,3%	63,5%	65,7%	70,0%	75,0%	75,0%	76,0%	70%	>
3	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	53,7%	58,0%	61,6%	63,8%	70,0%	75,0%	77,0%	78,0%	100%	<
C	Sosial										
1	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	44%	50%	58%	64%	70%	78%	88%	89%	80%	>
2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	34%	40%	48%	54%	60%	78%	100%	100%	80%	>
1.2	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
A	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	15,64%	20,75%	25,5%	30,28%	35%	40%	35,01 %	38,43 %	50%	<
2	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	45,70%	40,35%	35,78%	30,75%	25%	20%	19,7 %	18,76 %	0%	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50,27%	55,58%	60,75%	65,87%	70%	75%	78 %	89 %	100%	<
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT diRumah Sakit	50,80%	55,35%	60,89%	65,80%	70%	75%	81 %	97 %	100%	<
5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu.	40,78%	45,57%	50,37%	55,76%	60%	65%	67 %	69 %	100%	<
6	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50,56%	55,47%	60,43%	65,17%	70%	75%	80 %	85 %	100%	<
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,41%	55,34%	60,43%	65,23%	70%	75%	78 %	81 %	100%	<
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	48,65%	51,32%	54,11%	57,97%	60%	63%	65 %	80 %	100%	<
B	Lingkungan Hidup										
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	30%	30%	30%	30%	60%	78%	80%	40%	100%	<
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	4	4	4	4	3	3	1	4	4	=
3	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
4	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH danPUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
5	Jumlah perusahaan/kegiatan industri yang memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL)	5	5	5	7	17	17	6	4	17	<
C Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	100%	<
2	Persentase Posyandu aktif	53%	54%	56%	59%	60%	70%	75%	80%	100%	<
3	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	53%	55%	60%	67%	70%	75%	75%	80%	100%	<
D Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	59,71%	63,22%	67,54%	71,21%	75%	79%	71 %	69 %	100%	<
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	35%	45%	55%	65%	75%	85%	86 %	88 %	100%	<
3	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	2	2	2	3	1	2	3	=
4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	6	7	7	8	8	8	8	8	=
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal,non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	15	20	25	30	35	40	40	40	40	=
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CR bagi perempuan menikah usia 15-49	35,22%	45,32%	55,33%	65,17%	75%	85%	74 %	77 %	100%	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	85,35%	80,11%	75,23%	70,89%	65%	60%	0,003 %	0,002 %	0%	>
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	84,23%	80,11%	75,23%	70,89%	65%	60%	42 %	37 %	0%	>
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	84,23%	80,11%	75,23%	70,89%	65%	60%	14,17 %	13,71 %	0%	>
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,47%	17,91%	19,44%	30,45%	35%	40%	32 %	34,26 %	100%	<
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	25,87%	35,41%	45,24%	55,22%	65%	75%	75,72 %	76,83 %	100%	<
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	50,33%	55,22%	60,65%	65,72%	70%	75%	63 %	48,20 %	100%	<
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	59,61%	63,94%	67,24%	71,43%	75%	79%	65 %	71,17 %	100%	<
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	25,34%	35,54%	45,51%	55,11%	65%	75%	39 %	40,70 %	100%	<
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	50,17%	55,17%	60,33%	65,97%	70%	75%	76 %	76,5 %	100%	<
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	40,22%	45,87%	50,22%	55,23%	60%	65%	65 %	65 %	100%	<
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	38,33%	46,12%	54,12%	62,64%	70%	78%	79 %	80%	100%	<
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50,17%	55,75%	60,62%	65,11%	70%	75%	77 %	78 %	100%	<
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	40,11%	45,13%	50,11%	55,23%	60%	78%	78 %	79 %	100%	<
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	50,97%	55,11%	60,25%	65,11%	70%	75%	75 %	77 %	100%	<
21	Persentase Faskesdan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	20,47%	30,57%	40,51%	50,51%	60%	70%	72 %	73%	100%	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	25,87%	35,36%	45,22%	55,14%	65%	75%	76 %	77 %	100%	<
23	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	80,73%	75,71%	70,33%	65,13%	60%	55%	53 %	51 %	0%	>
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50,13%	55,14%	60,22%	65,41%	70%	75%	77 %	78 %	100%	<
25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	68,34%	69,17%	70,11%	71,87%	72%	73%	75 %	76 %	100%	<
26	Rata-rata usia kawin pertama wanita	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun	19 tahun	19 tahun	19 tahun	20 tahun	<
27	Persentase Pembiayaan ProgramKepen- dudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,54 %	0,61 %	0,54 %	0,61 %	0,54 %	0,61 %	0,59 %	0,62 %	0,5%	>
1.3	Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan										
A	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	73 Hari	76 Hari	80 Hari	83 Hari	88 Hari	70 Hari	89 Hari	89 Hari	100 Hari	<
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1146	1088	1401	877	816	1204	876	821	1204	<

Sumber : Perangkat Daerah Terkait, 2021

2.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pada Sub Bab khusus Standar Pelayanan Minimal ini akan diuraikan terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa realisasi SPM yang telah dicapai pada tahun 2019-2020 serta target yang akan dicapai pada tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 6 jenis SPM yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

2.5.1 Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel II.123. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
1	IP-1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SD dan SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	491	Pemukiman	492	491	100%	100%	TERCAPAI	491	491	491
1.1	IP-1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Pemukiman	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
1.2	IP-1.2	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Pemukiman	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.														
2	IP-2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	491	Sekolah	492	491	100%	100%	TERCAPAI	491	491	491
2.1	IP-2.1	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 28 orang.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
2.2	IP-2.2	Untuk setiap rombongan belajar SD tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
2.3	IP-2.3	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 32 orang.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82
2.4	IP-2.4	Untuk setiap rombongan belajar SMP tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82
3	IP-3	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 peserta	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.														
3.1	IP-3.1	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 peserta didik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	39	45	47%	54,87%	Belum Tercapai, Karna masih ada 37 Sekolah yang belum tersedia/Bl m Lengkap parasarana LAB IPA.	45	45	45
3.2	IP-3.2	Di setiap SMP tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	39	45	47%	54,87%	Belum Tercapai Karena masih ada Sekolah yang belum memiliki prasarana LAB IPA/masih 37 Sekolah yang belum memiliki peralatan praktek LAB IPA	45	45	45
4	IP-4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	491	Sekolah	389	409	95.11%	100%	TERCAPAI	409	409	409



NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.														
4.1	IP-4.1	Di setiap SD tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	389	409	95.11%	100%	TERCAPAI	409	409	409
4.2	IP-4.2	Di setiap SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	80	82	96%	100%	TERCAPAI	82	82	82
4.3	IP-4.3	Di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	77	82	92.78%	100%	TERCAPAI	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
5	IP-5	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 9 (sembilan) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
5.1	IP-5.1	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
5.2	IP-5.2	Di setiap SD memiliki 9 (Sembilan) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
6	IP-6	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran (11	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	78	82	93.97%	100%	TERCAPAI Apabila di tambah dengan guru Honorer/Non PNS, namun	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		mata pelajaran), dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (7 rumpun).											belum tercapai apabila status guru hanya PNS.			
7	IP-7	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
7.1	IP-7.1	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
7.2	IP-7.2	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
8	IP-8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100.00%	TERCAPAI	82	82	82
8.1	IP-8.1	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih).	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100.00%	TERCAPAI	82	82	82
8.2	IP-8.2	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		guru telah memiliki sertifikat pendidik.														
9	IP-9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82
10	IP-10	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Kepala Sekolah	396	409	96.82%	100%	TERCAPAI	82	82	82
11	IP-11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Kepala Sekolah	82	82	98.79%	100%	TERCAPAI	82	82	82

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
12	IP-12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD & SMP	100%	Kabupaten/Kota											
	IP-12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/Kota	34	47	Pengawas	34	47	100%	100%	TERCAPAI	47	47	47
13	IP-13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	SD & SMP	100%	Kabupaten/Kota	1	1	Kabupaten	1	1	100%	100%	TERCAPAI	1	1	1

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL		SATUAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN %		KESIMPULAN	TARGET		
						2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
14	IP-14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	491	Sekolah								
14.1	IP-14.1	Jumlah SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	409	Sekolah	409	409	100%	100%	TERCAPAI	409	409	409
14.2	IP-14.2	Jumlah SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	82	Sekolah	83	82	100%	100%	TERCAPAI	82	82	82

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.124. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 dan 2020

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								KESIMPULAN	TARGET		
				TARGET		KELOMPOK LAYANAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)		2021		2022	2023	
				2019	2020		2019	2020	2019	2020					
1	Peserta Didik	1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)		32132	Kab/Kota		16121	59.79%	50,17%	Belum tercapai, dikarenakan anak usia dini banyak yang tidak bersekolah PAUD	32132	32132	32132	
		1.2	Angka Partisipasi Murni (APM)		32132	Kab/Kota		12853	59.79%	40,00%	Belum tercapai, dikarenakan masih banyaknya anak usia 4-6 tahun yang tidak menempuh Pendidikan PAUD	32132	32132	32132	
2.	Ketenagaan	2.1	Kepala PAUD + Guru a. Berpendidikan D.IV/S.1	1493	1316	Kab/Kota	650	561	43.54%	43.00%	Belum tercapai dikarenakan masih kurangnya kepala paud dan tenaga pendidik yang berijazah D.IV/S1	1316	1316	1316	
			b. Memiliki Sertifikat Pendidik	1493	1316	Kab/Kota	1093	71	73.21%	5.00%	Belum tercapai, dikarenakan masih ada nya kepala PAUD dan tenaga pendidik PAUD yang belum memiliki sertifikat pendidik	1316	1316	1316	
		2.2	Rasio Guru dengan anak didik	15	15	Kab/Kota	8	12	53%	80.00%	Belum tercapai, dikarenakan rasio guru dan murid masih dibawah standarisasi pendidikan PAUD, lebih banyak guru dibandingkan peserta didik	15	15	15	
3.	Sarana Prasarana	3.1	Halaman bermain	481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487	
		3.2	Bangunan/Gedung	481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487	

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL							TARGET			
				TARGET		KELOMPOK LAYANAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)					KESIMPULAN
				2019	2020		2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
		3.3	Alat bermain/alat peraga	1093	1093	Kab/Kota	1093	1093	100%	100%	Tercapai	1093	1093	1093
		3.4	Buku perpustakaan untuk guru	1493	1493	Kab/Kota	1493	1493	100%	100%	Tercapai	1493	1493	1493
		3.5	Buku perpustakaan untuk anak: a. Jumlah Buku Gambar yg dimiliki	12725	12853	Kab/Kota	12725	12853	100%	100%	Tercapai	12853	12853	12853
			b. Jumlah Alat Mewarnai yg dimiliki	12725	12853	Kab/Kota	12725	12853	100%	100%	Tercapai	12853	12853	12853
		3.6	Alat bermain/ Perabot PAUD	351	487	Kab/Kota	351	351	73%	73%	Belum Tercapai, dikarenakan masih adanya lembaga PAUD yang belum memiliki alat bermain/perabot PAUD	487	487	487
		4.	Organisasi	4.1	Struktur	481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487
4.2	Personalia			481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487
4.3	Uraian Tugas			481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487
5.	Pembiayaan	5.1	Anggaran pemerintah	481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487
		5.2	Anggaran swadaya	90	487	Kab/Kota	90	91	19%	19%	Belum Tercapai, dikarenakan masih banyaknya lembaga PAUD yang tidak memiliki Anggaran Swadaya	487	487	487
		5.3	Pengelolaan dana Pendidikan	481	487	Kab/Kota	481	487	100%	100%	Tercapai	487	487	487
6.	Manajemen Sekolah	6.1	Tingkat kehadiran Kepala PAUD + Guru	1493	1493	Kab/Kota	1493	1493	100%	100%	Tercapai	1493	1493	1493
		6.2	Tingkat kehadiran anak didik	12725	12853	Kab/Kota	12725	12853	100%	100%	Tercapai	12853	12853	12853



NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL							TARGET			
				TARGET		KELOMPOK LAYANAN	CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)		KESIMPULAN	TARGET		
				2019	2020		2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023
		6.3	Kinerja sekolah (Akreditasi)	481	487	Kab/Kota	82	94	17%	19%	Belum Tercapai, dikarenakan masih banyaknya lembaga PAUD yang belum terakreditasi.	487	487	487
7.	Peran serta Masyarakat	7.1	Dukungan komite sekolah	481	481	Kab/Kota	481	481	100%	100%	Tercapai	481	481	481
		7.2	Perhatian orang tua	12725	12853	Kab/Kota	12725	12853	100%	100%	Tercapai	12853	12853	12853
		7.3	Peran serta orang tua	12725	12853	Kab/Kota	12725	12853	100%	100%	Tercapai	12853	12853	12853
		7.4	Peran serta tokoh masyarakat	100	100	Kab/Kota	100	100	100%	100%	Tercapai	100	100	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.125. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019-2023

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								TARGET			
				ADA/TDK		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)					KESIMPULAN
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kurikulum	1.1	Ketersediaan Kurikulum Dokumen 1 , 2 dan 3	ADA	ADA	9 (*1)	20	9	20	100%	100,00%	Tercapai	2020	2020	2020
		1.2	Keterlaksanaan Kurikulum a. Dokumen standar kompetensi kelulusan	ADA	ADA	27 (*3)	60 (*3)	17	42	63%	64,00%	Belum Tercapai, dikarenakan jumlah maksimal 3 dokumen per lembaga sehingga target 60 dokumen, sementara capaiannya hanya 42 dokumen	20	20	20
			b. Efektifitas kegiatan pembelajaran	ADA	ADA	216(*24)	526 (*24)	158	385	73%	72,91%	Belum Tercapai, dikarenakan dari target 526 (24 per lembaga) capaian nya hanya 385	60 (*3)	60 (*3)	60 (*3)
			c. Dokumen Penilaian	ADA	ADA	27 (*3)	60 (*3)	25	61	93%	92,42%	Belum Tercapai, dikarenakan per lembaga wajib memiliki minimal 3 dokumen sehingga target SPM 66 Dokumen, sementara capaian SPM 61 Dokumen.	526 (*24)	526 (*24)	526 (*24)

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								KESIMPULAN	TARGET		
				ADA/TDK		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)			2021	2022	2023
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
		1.3	Persentasi daya serap Kurikulum Nasional	ADA	ADA	135 (*15)	330 (*15)	111	271	82%	82,12%	Belum Tercapai, dikarenakan target SPM 330 (15/lembaga) sementara capaian hanya 271 kurikulum nasional.	60 (*3)	60 (*3)	60 (*3)
2	Ketenagaan	2.1	Ketua Lembaga Berpendidikan D.IV/S.1	ADA	ADA	9 (*1)	20	6	20	67%	100%	Tercapai	330 (*15)	330 (*15)	330 (*15)
		2.2	Tutor / Istruktur Berpendidikan Akta IV/ D.IV /S.1	ADA	ADA	180 (*20)	640 (*20)	95	32	75%	5%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki minimal 20 tutor / Istruktur Berpendidikan Akta IV/ D.IV /S.1 sehingga target SPM 640 tutor / Istruktur, sementara capaian SPM hanya 32 tutor	20	20	20
		2.3	Tenaga Kependidikan (Operator, Tata Usaha, dan Penjaga): Pendidikan SMA/ Sederajat	ADA	ADA	27 (*3)	60 (*3)	27	20	100%	33%	Belum tercapai karena lembaga hanya memiliki Operator sedangkan tata usaha dan penjaga tidak ada	640 (*20)	640 (*20)	640 (*20)

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								KESIMPULAN	TARGET		
				ADA/TKD		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)			2021	2022	2023
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
3	Sarana Prasarana	3.1	Laboratorium	ADA	TIDAK ADA	9(*1)	20	5	0	60%	0%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki 1 Lab seharga target SPM 0 Lab, sementara capaian SPM hanya 0% Lab	60 (*3)	60 (*3)	60 (*3)
		3.2	Bangunan/Gedung	ADA	ADA	54(*6)	120 (*6)	33	83	61%	69,16%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki 6 bangunan /gedung, target 120 bangunan/gedung sementara capaian SPM hanya 83 bangunan/Gedung	20	20	20
		3.3	Alat bermain/alat peraga pendidikan	ADA	ADA	279 (*31)	620 (*31)	154	341	55%	55%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki minimal 31 alat peraga disetiap lembaganya masing masing sehingga target SPM 620 alat peraga, sementara capaian SPM hanya 341 alat peraga	120 (*6)	120 (*6)	120 (*6)

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								TARGET			
				ADA/TDK		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)		KESIMPULAN			
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
		3.4	Buku perpustakaan untuk Tutor/Istruktur	ADA	ADA	837 (*93)	1860 (*93)	605	1339	72%	71,98%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki minimal 93 buku, total target SPM 1860 buku, sedangkan capaian SPM hanya 1339 buku	620 (*31)	620 (*31)	620 (*31)
		3.5	Buku untuk anak: a. Jumlah Buku Modul yg dimiliki	ADA	ADA	5580 (*620)	12400 (*620)	3285	7316	59%	59,00%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memiliki minimal 620 buku modul, sehingga target SPM 12400 buku modul. Sedangkan capaian SPM hanya 7316 buku modul	1860 (*93)	1860 (*93)	1860 (*93)
			b. Jumlah Perlengkap an Belajar (Buku Tulis)	ADA	ADA	5580 (*620)	12400 (*620)	4290	9548	77%	77%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memiliki minimal 620 buku modul, sehingga target SPM 12400 buku Tulis. Sedangkan capaian SPM hanya 9548 buku tulis	12400 (*620)	12400 (*620)	12400 (*620)

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								KESIMPULAN	TARGET		
				ADA/TKD		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)			2021	2022	2023
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
		3.6	Peralatan	ADA	ADA	90 (*10)	200 (*10)	53	118	59%	59%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memiliki 10 peralatan, sehingga total peralatan dari 20 lembaga berjumlah 200 peralatan yang menjadi target SPM, sementara capaian SPM hanya 118 peralatan.	12400 (*620)	12400 (*620)	12400 (*620)
4	Organisasi	4.1	Struktur	ADA	ADA	27 (*3)	60 (*3)	27	60	100%	100%	Tercapai	200 (*10)	200 (*10)	200 (*10)
		4.2	Personalia	ADA	ADA	9 (*1)	20	9	20	100%	100%	Tercapai	60 (*3)	60 (*3)	60 (*3)
		4.3	Uraian Tugas	ADA	ADA	1 (*1)	20 (*1)	1	20	100%	100%	Tercapai	20	20	20
5	Pembiayaan	5.1	Anggaran pemerintah	ADA	ADA	1.059.100.000	2.891.700.000	1.059.100.000	2.891.700.000	100%	100%	Tercapai	20 (*1)	20 (*1)	20 (*1)
		5.2	Anggaran swadaya	TIDAK ADA	TIDAK ADA	-	-	-	-	0%	0%	Tidak ada nilai SPM karena tidak memiliki Anggaran Swadaya sehingga tidak ada target dan capaian SPM	2.891.700.000	2.891.700.000	2.891.700.000
		5.3	Pengelolaan dana Pendidikan	ADA	ADA	1.065.100.000	2.891.700.000	1.065.100.000	2.891.700.000	100%	100%	Tercapai	-	-	-
6	Manajemen Lembaga	6.1	Tingkat kehadiran Ketua Lembaga	ADA	ADA	18 (*2)	40 (*2)	18	40	100%	100%	Tercapai	2.891.700.000	2.891.700.000	2.891.700.000
		6.2	Tingkat kehadiran Tutor/ instruktur	ADA	ADA	18 (*2)	40 (*2)	18	40	100%	100%	Tercapai	40 (*2)	40 (*2)	40 (*2)

NO	KOMPONEN SPM	IP	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL								TARGET			
				ADA/TKD		TARGET		CAPAIAN SPM		CAPAIAN (%)					KESIMPULAN
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
		6.3	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lain	ADA	ADA	18 (*2)	40 (*2)	18	40	100%	100%	Tercapai	40 (*2)	40 (*2)	40 (*2)
		6.4	Tingkat kehadiran Warga Belajar	ADA	ADA	18 (*2)	40 (*2)	18	40	100%	100%	Tercapai	40 (*2)	40 (*2)	40 (*2)
		6.5	Kinerja Lembaga (Akreditasi)	ADA	ADA	9 (*1)	20	9	9	100%	45%	Belum tercapai dikarenakan masih ada 11 lembaga PKBM yang belum terakreditasi	40 (*2)	40 (*2)	40 (*2)
		6.6	Pengawasan	ADA	ADA	18 (*2)	40 (*2)	18	40	100%	100%	Tercapai	20	20	20
		7	Peran serta Masyarakat	7.1	Dukungan komite Lembaga	ADA	ADA	9 (*1)	9 (*1)	9	9	100%	100%	Tercapai	40 (*2)
		7.2	Perhatian orang tua	ADA	ADA	9 (*1)	9 (*1)	9	9	100%	100%	Tercapai	9 (*1)	9 (*1)	9 (*1)
		7.3	Peran serta orang tua	ADA	ADA	9 (*1)	9 (*1)	9	9	100%	100%	Tercapai	9 (*1)	9 (*1)	9 (*1)
		7.4	Peran serta tokoh masyarakat	ADA	ADA	9 (*1)	9 (*1)	9	9	100%	100%	Tercapai	9 (*1)	9 (*1)	9 (*1)
		7.5	Peran serta dunia usaha	ADA	ADA	9 (*1)	9 (*1)	9	9	100%	100%	Tercapai	9 (*1)	9 (*1)	9 (*1)

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2021

2.5.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel II.126. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	PENERIMA LAYANAN						TARGET		
			SASARAN		DILAYANI		%				
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	11.800	11.602	11.601	10.788	98	93	11.602	11.602	11.602
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	11.263	11.074	10.966	10.423	97	94	11.074	11.074	11.074
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	11.136	10.547	10.843	10.116	97	96	10.547	10.547	10.547
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	43.570	42.952	40.729	37.534	93	87	42.952	42.952	42.952
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94.835	90.899	94.835	29.724	100	33	90.899	90.899	90.899
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	376.480	342.572	174.815	186.064	46	54	342.572	342.572	342.572
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 th ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	45.274	56.794	41.012	42.838	91	75	56.794	56.794	56.794
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	43.242	43.874	33.894	29.651	78	68	43.874	43.874	43.874
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.535	3586	3.624	3189	102	89	3586	3586	3586
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	1.017	1147	973	964	96	84	1147	1147	1147
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	10.497	10.508	6.433	6339	61	60	10.508	10.508	10.508
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	10.035	14.413	9.419	9486	63	66	14.413	14.413	14.413

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021



2.5.3 Target dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel II.127. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		TARGET		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	770	804	770	804	100%	100%	810	820	830
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	700	150	700	150	100%	100%	160	170	180

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

Tabel II.128. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		TARGET		
			2019	2020	2019	2021	2021	2021	2021	2022	2023
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	40	50	40	50	100%	100%	50	45	50
2	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	1880	10	1880	10	100%	100%	10	5	10

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2021

2.5.4 Target dan Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketentrraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas tiga Sub Urusan yaitu, Sub Urusan Bencana Daerah, Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Bencana Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Kebakaran Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel II.129. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET		REALISASI		TARGET		
			2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan Dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan Dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan Dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanggamus, 2021

2.5.5 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2019-2023

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel II.130. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		TARGET		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	15	744	15	744	100%	100%	746	748	750
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	40	300	40	300	100%	100%	302	304	306
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	30	1806	30	1806	100%	100%	1808	1810	1812
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial diluar panti	0	1	0	1	0	100%	1	1	1
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	120	500	120	672	100%	134%	502	504	506

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2021

2.6 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dari SDGs adalah, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan dan kesejahteraan;
4. Kualitas pendidikan yang baik;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Akses ke energi yang terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi;
9. Inovasi dan infrastruktur;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Pembangunan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mencegah dampak perubahan iklim;
14. Menjaga sumberdaya laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian dan keadilan; dan
17. Revitalisasi kemitraan global.



SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.131. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR SOSIAL													
TUJUAN : 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan													
1	Tersusunnya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	%	0	100	Naik	100	100	-	100	100	100	100	100
2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	%	14.05	13.14	Turun	1.44	-1.05	-1	12.00	10.52	11.31	10.94	10.84
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	2.01	1.81	Turun	0.1	-0.2	-	1.61	1.41	1.21	1.01	0.81
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.43	0.35	Turun	0	-0.08	-	0.27	0.19	0.11	0.03	0
5	Pendampingan Program perlindungan sosial	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
6	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat miskin	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
7	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	%	8.23	8.50	Naik	11,74	0.27	-	8.77	9.04	9.31	9.58	9.85
8	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89	89	Naik	89.00	0	-	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	44	45	Naik	57.00	1	-	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	1	1	Naik	1.00	0	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	91	91	Naik	91.00	0	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
12	Rasio Bayi berakute kelahiran	%	35	35.64	Naik	43.3	0.64	-	36.27	36.91	37.55	38.19	38.82



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
13	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	per 100000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Desa Sigap Bencana	5	10	Naik	70	5	-	15	20	25	30	35
15	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
16	Berkurangnya Wilayah Rawan Banjir	Kecamatan	3	2	Turun	0	-1	-	1	0	0	0	0
TUJUAN : 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan													
1	Prevalensi Kasus Gizi Buruk	%	1	1	Turun	0	0	3.2	0	0	0	0	0
2	Rasio Ahli Gizi per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	0.03	0.03	Naik	0.03	0	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	N/A	100.00	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
4	Luas areal lahan sawah (Ha)	Hektar	23080	23080	Naik	23080	0	-	23080	23080	23080	23080	23080
5	Luasan panen tanaman padi (sawah/ladang)	Hektar	24884	24884	Naik	24884	0	-	24884	24884	24884	24884	24884
6	Luasan panen tanaman jagung dan kedelai (Ha)	Hektar	3615	3977	Naik	8318	362	-	4338	4700	5061	5423	5784
7	Luasan panen tanaman ubi kayu dan ubi jalar (Ha)	Hektar	618	607	Naik	717	11	-	596	607	618	629	640
8	Luasan panen tanaman sayuran (Ha)	Hektar	485	534	Naik	1119	49	-	582	631	679	728	776
9	Produksi ikan budidaya (ton)	Ton	17732	19370	Naik	39026	1638	-	21008	22646	24284	25922	27560



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN : 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	%	39.3	30	Turun	0	-9	-6	20.70	11.40	2.10	0.00	0.00
2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	%	93	94	Naik	100	1	1.2	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
3	Angka Kematian Bayi (0-1 th) per 1000 KH	Kasus	11.50	11.00	Turun	1.5	-1	-2.2	10.50	10.00	9.50	9.00	8.5
4	Angka Kematian Balita (0-5 Th) per 1000 KH	Kasus	5	5	Turun	0	0	-1	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun	%	0	0	Turun	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Malaria per 1.000 orang	API per 1000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
7	Angka Kesakitan DBD	Jumlah	398	358	Turun	0	-40	-	318	278	238	198	158
8	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	0	0	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	49	55	Naik	100	6	3.36	61.00	67.00	73.00	79.00	85.00
10	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	Puskesmas	1 : 24641	1 : 24641	Naik	1:1600 0	0	-	3 : 24641	2 : 24641	1 : 24641	0 : 24641	1 : 24641
11	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
12	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Dokter/ 100.000 penduduk	7.24	7.42	Naik	9.58	0	-	7.60	7.78	7.96	8.14	8.32
13	Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 penduduk	Apoteker/ 100.000 penduduk	2.76	2.83	Naik	3.66	0	-	2.89	2.96	3.03	3.10	3.17

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
14	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	Perawat/ 100.000 penduduk	49.45	50.69	Naik	63.87	1	-	51.92	53.16	54.40	55.63	56.87
15	Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	Bidan/ 100.000 penduduk	90.46	90.46	Naik	90.46	0	-	90.46	90.46	90.46	90.46	90.46
TUJUAN : 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua													
1	APK SD/MI	%	97.05	92.43	Naik	97.75	0.10	0.584	97.05	97.05	97.05	97.05	97.05
2	APM SD/MI	%	99.05	79.8	Naik	100	0.05	-	83.7	87.9	92.3	96.9	98.0
3	APK SMP/MTS	%	93.00	61.12	Naik	98.35	0.05	0.058	64.18	67.38	70.75	74.29	78.01
4	APM SMP/MTS	%	90.06	34.7	Naik	44.55	0.05	-	36.4	38.2	40.1	42.1	44.2
5	Rasio Guru/Murid (SD)	%	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 20	-1	-	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
6	Rasio Guru/Murid (SMP)	-	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 30	0	-	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	46.5	47.5	Naik	59.5	1	5.94	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5
8	Angka Melek Huruf	%	95.90	97.22	Naik	100	1	-	98.19	98.69	98.78	99.28	99.78
TUJUAN : 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38.50	39	Naik	39.1	0.01	-	39.01	39.01	39.02	39.02	39.03
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	20	-	30	0	-	20	20	20	30	30
3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah KDRT	Kasus	4	4	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR EKONOMI													
TUJUAN : 7. Menjamin Akses Energi Bersih dan Terjangkau													
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	68.5	89.60	Naik	100	3.43	4.935	95.3	96.1	97.0	97.5	98.0
2	Rasio elektrifikasi perdesaan	%	95	96	Naik	100	1	0.8	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0
TUJUAN : 8. Meningkatkan Pertumbuhan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
1	Laju Pertumbuhan PDRB	%	5.18	5.02	Naik	7.58	0.26	-	5.20	5.25	3.20	4.00	4.05
2	PDRB Perkapita (Berlaku)	Juta Rp	21.24	24492707	Naik	28140000	-	-	26025543	25742248	26763352	27512154	28600000
3	PDRB atas harga Konstan	Juta Rp	9021365.22	17468860	Naik	11953308.7	225534.1	-	18171687	17689605	18367170	19413240	20500000
4	Persentase Kontribusi sub sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.86	1.91	Naik	2.49	0.05	1.22	1.95	2.00	2.05	2.09	2.14
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68.46	75.67	Naik	90.7	1.71	-	75.88	76.00	76.59	61.28	78.73
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.72	2.21	Turun	1.22	-0.14	-0.02	2.22	2.22	2.95	2.90	2.89
7	Jumlah Bank yang beroperasi di Kab Tanggamus	Unit	-	-	Naik	-	0	-	-	-	-	-	-
TUJUAN : 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	27.45	46.65	Naik	100	5.49	8	37.64	51.88	51.10	51.50	52.00
2	Jalan Kondisi Terpelihara (%)	%	75	75	Naik	100	0	5	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6.82	6.97	Naik	7.33	0.07	-	7.00	7.03	7.06	7.09	7.12
4	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	8.88	8.97	Naik	10,04	0.09	-	9.06	9.15	9.24	9.32	9.41



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan	%	75.40	79.17	Naik	99	3.77	-	82.94	86.71	90.48	94.25	98.02
TUJUAN :10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara													
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	58	54	Turun	0	-4	-	50	46	42	38	34
2	Jumlah desa mandiri	Desa	30	34	Naik	299	4	-	38	42	46	50	54
3	Gini Rasio	Nilai	0,405	0,378	Turun	0,250	-0,027	-	0,359	0,349	0,344	0,339	0,338
PILAR LINGKUNGAN													
TUJUAN : 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua													
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	65	66.63	Naik	83.30	1.63	3.33	68.26	69.89	71.52	73.15	74.78
2	Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	%	52.70	55	Naik	100.00	2.3	9	57.30	59.60	61.90	64.20	66.50
3	Penangan Limbah	%	NA	10	Naik	100.00	10	18	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
TUJUAN :11. Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
1	Luas Kawasan Kumuh	%	25	23.75	Turun	0	-1.25	-4.75	22.50	21.25	20.00	18.75	17.5
2	Persentase sampah yang dapat diangkut	%	69	70.67	Naik	65.83	1.67	-0.97	72.34	74.01	75.68	77.35	79.02
PILAR HUKUM													
TUJUAN :16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh													
1	Jumlah kasus kejahatan	Kasus	284	281	Turun	0	-3	-56.2	278	275	272	269	266
2	Persentase kasus kejahatan yang tertangani	%	48.5	53.35	Naik	45	4.85	-1.67	58.20	63.05	67.90	72.75	77.60
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	Naik	WTP	0	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
4	Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	CC	CC	Naik	A	0	-	B	B	BB	BB	BB
5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	64.00	67.20	Naik	85.00	3.2	3.56	70.40	73.60	76.80	80.00	83.20

Sumber : Analisis Data Diolah, 2021

BAB III

GAMBARAN

KEUANGAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2023, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis terhadap potensi, kapasitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus dalam mendanai pembangunan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola/*trend* pengelolaan keuangan, digunakan analisis *timeseries* terhadap data lima tahun terakhir. Adapun yang dimaksud dengan analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan yaitu prakiraan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah pada kurun waktu tahun 2013-2017 masih berpedoman pada ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya secara teknis pengelolaan keuangan pada Tahun 2013-2017 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perkembangan Pelaksanaan APBD Tahun 2013-2017 yang merupakan kinerja keuangan masa lalu yaitu pada periode RPJMD sebelumnya sebagai salah satu referensi dalam penentuan kerangka pendanaan periode RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	922,127,399,614.09	1,100,730,018,358.38	1,363,943,169,618.61	1,686,278,262,398.50	1,644,677,952,614.94	12.27
1.1	Pendapatan Asli Daerah	20,000,000,000.00	33,633,817,917.10	32,733,817,917.10	31,211,917,784.46	130,090,600,528.73	45.43
1.1.1	Pajak Daerah	6,516,513,385.00	12,920,351,130.75	11,057,130,849.65	11,057,130,849.65	17,893,638,306.00	22.39
1.1.2	Retribusi Daerah	2,272,894,600.00	4,802,316,250.00	3,409,871,250.00	3,005,871,250.00	6,053,721,100.00	21.64
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,176,248,394.60	5,209,764,856.10	5,444,981,100.64	4,502,530,968.00	5,719,184,809.64	12.48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,034,343,620.40	10,701,385,680.25	12,821,834,716.81	12,646,384,716.81	100,424,056,313.09	65.72
1.2	Dana Perimbangan	721,647,926,891.00	804,564,839,992.00	903,714,486,673.27	1,230,518,643,674.00	1,141,551,420,404.00	9.61
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49,651,621,891.00	50,620,823,992.00	57,554,888,673.27	44,257,942,674.00	56,181,326,404.00	2.50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	600,816,655,000.00	669,512,156,000.00	698,708,398,000.00	789,442,526,000.00	775,574,559,000.00	5.24
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	71,179,650,000.00	84,431,860,000.00	147,451,200,000.00	396,818,175,000.00	309,795,535,000.00	34.20
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	180,479,472,723.09	262,531,360,449.28	427,494,865,028.24	424,547,700,940.04	373,035,931,682.21	15.63
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	3,101,549,000.00	-	(100.00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,744,187,500.00	53,489,153,413.00	73,726,610,618.00	84,709,409,042.05	113,891,125,609.21	21.65
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14,749,756,223.09	34,909,616,536.28	76,468,029,427.24	114,488,714,397.99	-	(100.00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-	-	-	(100.00)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	112,985,529,000.00	154,132,590,500.00	277,300,224,983.00	222,248,028,500.00	259,144,806,073.00	18.06
2	BELANJA	975,487,403,060.33	1,121,325,857,789.38	1,344,895,373,267.96	1,641,177,375,539.26	1,641,654,412,883.70	10.97
2.1	Belanja Tidak Langsung	532,607,205,174.25	578,714,215,771.07	713,686,551,440.74	910,059,179,966.01	1,001,013,484,884.89	13.45

NO	URAIAN	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1.1	Belanja Pegawai	488,513,012,174.25	528,552,521,346.07	590,095,790,348.36	663,370,650,985.01	633,950,407,215.99	5.35
2.1.3	Belanja Subsidi	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	(100.00)
2.1.4	Belanja Hibah	16,458,351,820.00	21,172,796,425.00	24,410,081,300.00	30,452,193,150.00	35,835,827,663.10	16.84
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,160,981,180.00	2,825,000,000.00	3,559,996,000.00	2,219,983,292.00	297,465,528.90	(37.67)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	1,259,715,537.30	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	21,224,860,000.00	21,828,743,000.00	92,848,061,782.38	211,160,493,210.00	327,050,446,929.60	72.80
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	561,256,025.00	772,622,010.00	855,859,329.00	772,622,010.00	8.32
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	3,523,898,975.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,847,000,000.00	(9.25)
2.2.	Belanja Langsung	442,880,197,886.08	542,611,642,018.31	631,208,821,827.22	731,118,195,573.25	640,640,927,998.81	7.66
2.2.1	Belanja Pegawai	36,276,936,300.00	40,824,195,750.00	49,012,050,000.00	75,135,122,000.00	107,080,654,008.00	24.17
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154,924,173,595.09	192,094,713,803.43	255,559,659,177.22	296,267,558,736.29	260,152,338,708.08	10.92
2.2.3	Belanja Modal	251,679,087,990.99	309,692,732,464.88	326,637,112,650.00	359,715,514,836.96	273,407,935,282.73	1.67
3	PEMBIAYAAN	53,360,003,446.24	20,595,839,431.00	(19,047,796,350.65)	(45,100,886,859.24)	(3,023,539,731.24)	(156.32)
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	69,465,049,062.24	62,289,808,086.80	48,578,640,885.60	71,750,102,977.76	4,853,123,172.76	(41.27)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	39,430,830,047.12	8,566,626,312.81	7,467,105,566.83	19,750,102,977.76	4,853,123,172.76	(34.23)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30,034,219,015.12	37,065,480,083.99	41,111,535,318.77	52,000,000,000.00	-	(100.00)
3.1.8	Sisa Dana Sertifikasi Guru Tahun 2010-2013	-	16,657,701,690.00	-	-	-	(100.00)



NO	URAIAN	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16,105,045,616.00	41,693,968,655.80	67,626,437,236.25	116,850,989,837.00	7,876,662,904.00	(13.33)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah	1,100,000,000.00	2,000,000,000.00	500,000,000.00	3,401,549,000.00	-	(100.00)
3.2.4	Hutang Retensi dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	113,449,440,837.00	-	(100.00)
3.2.5	Pembayaran Hutang Pajak	-	-	-	-	7,876,662,904.00	-
3.2.6	Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan dan Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga	15,005,045,616.00	23,036,266,965.80	65,370,005,094.00	-	-	(100.00)
3.2.7	Kurang Bayar Sertifikasi Guru Tahun 2010-2013	-	16,657,701,690.00	-	-	-	(100.00)
3.2.12	Pembayaran Hutang Upah Pungut	-	-	219,320,821.25	-	-	(100.00)
3.2.13	Pembayaran Hutang Pajak Penerangan Lampu Jalan	-	-	602,024,722.00	-	-	(100.00)
3.2.14	Pembayaran Hutang Pada Partai Politik	-	-	8,997,299.00	-	-	(100.00)
3.2.15	Pembayaran Hutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	-	926,089,300.00	-	-	(100.00)

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Komponen Pendapatan Daerah antara lain meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Tanggamus meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.

2) Pendapatan Transfer, meliputi:

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

- i. Dana Bagi Hasil Pajak
- ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
- iii. Dana Alokasi Umum
- iv. Dana Alokasi Khusus

b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

- i. Dana Penyesuaian

- c) Transfer Pemerintah Provinsi
 - i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah
 - b) Pendapatan Lainnya

Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) selalu mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhannya sekitar 12,27 persen per tahun, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pos pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pos Pendapatan Asli Daerah rata-rata 45,43 persen pertahun. Namun tingginya kenaikan dan pertumbuhan pos PAD lebih disebabkan kenaikan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah karena masuknya penerimaan dari dana yang sebelumnya tidak termasuk dalam penerimaan ini seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 2) Dana Perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 9,61 persen pertahun, dengan peningkatan terbesar pada Dana Alokasi Khusus rata-rata sebesar 34,20 persen pertahun.
- 3) Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah sekitar 15,63 persen pertahun;

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Ke Daerah (Dana Perimbangan) merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu rata-rata 71,48 persen pertahun.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata 24,83 persen pertahun; dan
- 3) PAD memberikan kontribusi sebesar 3,69 persen pertahun.

Secara lebih rinci, pos pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata 52,61 persen pertahun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 15,03 persen pertahun, dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sekitar 3,84 persen pertahun.

Tingginya kontribusi Dana Perimbangan (DAU+DAK) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Tanggamus dalam posisi yang rendah.

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

NO	PENDAPATAN DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2013	922,127,399,614.09	883,820,290,853.32	95.85
2	2014	1,100,730,018,358.38	1,023,925,099,097.02	93.02
3	2015	1,363,943,169,618.61	1,231,542,207,448.97	90.29
4	2016	1,686,278,262,398.50	1,451,799,162,933.06	86.09
5	2017	1,644,677,952,614.94	1,565,897,169,141.63	95.21
			Rata-Rata	92.09

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata tercapai 92,09%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2016 sekitar 86,09%, dan tertinggi pada tahun 2013 mencapai 95,85%.

Dalam penerimaan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi yang penting untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Tingkat pencapaian penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2013	20,000,000,000.00	22,017,449,900.32	110.09
2	2014	33,633,817,917.10	22,488,697,780.02	66.86
3	2015	32,733,817,917.10	21,979,172,077.59	67.15
4	2016	31,211,917,784.46	23,712,889,208.06	75.97
5	2017	130,090,600,528.73	56,177,617,871.86	43.18
Rata-Rata				72.65

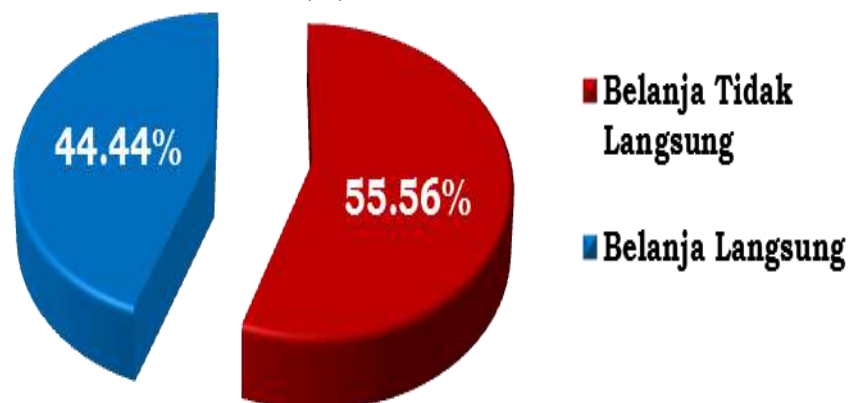
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2013-2017 mengalami fluktuatif, rata-rata capaian perolehan PAD adalah 72,65% pertahun.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, kinerja belanja daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan belanja daerah rata-rata 10,97 persen pertahun.

Gambar III.1 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

Porsi anggaran Belanja Daerah selama 2013-2017 didominasi untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata 55,56 persen pertahun sedangkan untuk Belanja Langsung sekitar 44,44 persen pertahun.

Dalam pos pengeluaran Belanja Tidak Langsung yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa mencapai 72,80 persen pertahun, sedangkan Belanja Pegawai sekitar 5,35 persen pertahun. Kebutuhan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanggamus baik dalam Belanja Tidak Langsung maupun dalam Belanja Langsung rata-rata 29,52 persen pertahun.

Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus, pada periode 2013-2017 dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2013-2017 rata-rata mencapai 10,97 persen pertahun;
- 2) Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,45 % per tahun;
- 3) Belanja Langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,66 persen pertahun;

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

NO	BELANJA DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2013	975,487,403,060.33	899,020,850,775.63	92.16
2	2014	1,121,325,857,789.38	993,881,456,252.00	88.63
3	2015	1,344,895,373,267.96	1,151,913,068,001.79	85.65
4	2016	1,641,177,375,539.26	1,358,575,195,294.02	82.78
5	2017	1,641,654,412,883.70	1,547,099,699,352.39	94.24
	Rata-Rata			88.69

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata tercapai 88,69%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2016 sekitar 82,78%, dan tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 94,24%.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2013	53,360,003,446.24	23,767,186,215.12	44.54
2	2014	20,595,839,431.00	(22,576,537,278.19)	(109.62)
3	2015	(19,047,796,350.65)	(59,879,036,469.42)	314.36
4	2016	(45,100,886,859.24)	(96,281,736,926.24)	213.48
5	2017	(3,023,539,731.24)	(2,582,712,708.24)	85.42
	Rata-Rata			109.64

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017

Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata mencapai 109,64%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014 sekitar - 109,62%, dan tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 314,36%.

3.1.2. Neraca Daerah

3.1.2.1 Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sebagaimana mestinya, jumlah aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013-2016.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 98,79 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Secara keseluruhan, ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2016 adalah sebesar 3,01 persen.

3.1.2.1 Analisis Rasio Keuangan

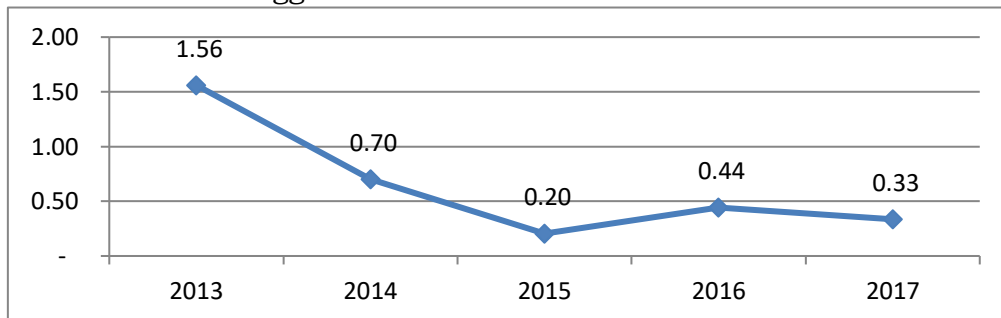
3.1.2.1.1 Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

1) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar atau *Current Ratio* adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan secara likuiditas pemerintah daerah. Rasio Lancar ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. Rasio Lancar (*current ratio*) Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Gambar III.2 Perkembangan Rasio Lancar Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017



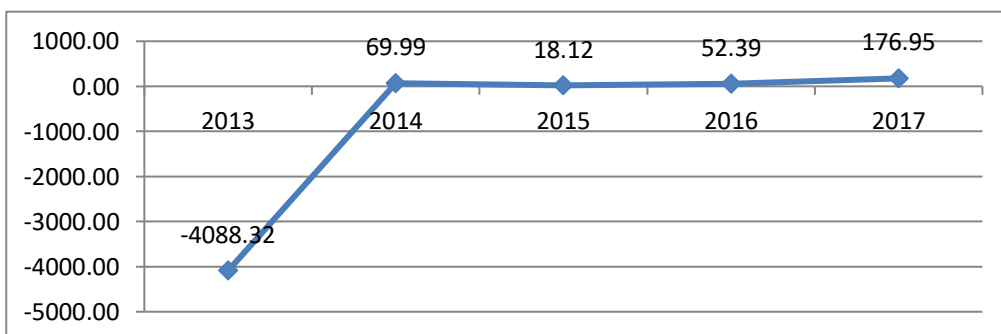
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2013-2017

Dari grafik di atas menunjukkan Rasio Lancar Kabupaten Tanggamus menunjukkan trend penurunan dan menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik, artinya kemampuan kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus kurang memiliki kemampuan untuk menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

2) Rasio Cair (*quick ratio*)

Rasio Cair adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Yang termasuk sebagai Aset Cepat (*Quick Asset*) adalah Aktiva Lancar atau Aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya. Secara umum, rasio di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, sedangkan rasio di bawah 100% persen menunjukkan hasil sebaliknya.

Gambar III.3 Perkembangan Rasio Cair (Quick Ratio) Keuangan Kabupaten Tanggamus 2013-2017 (%)



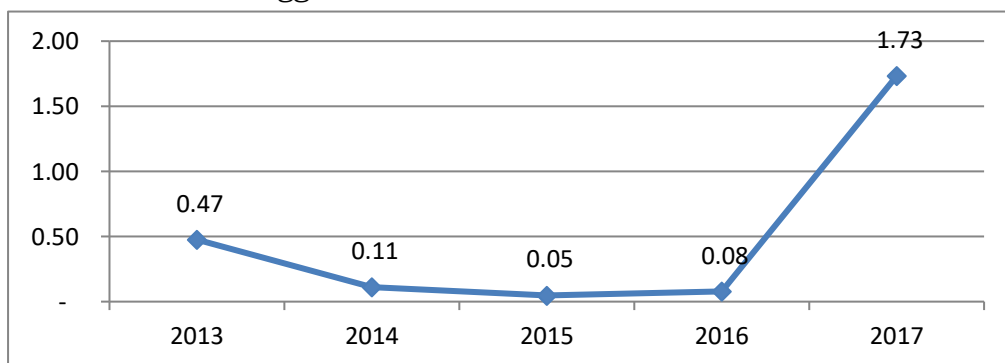
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2013-2017

Rasio Cair Kabupaten Tanggamus periode tahun 2014-2017 sudah menunjukkan kinerja yang baik karena menunjukkan angka positif (lancar), dibandingkan tahun 2013. Artinya setiap Rp.1,- kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal 177 kali pada tahun 2017.

3) Rasio Kas

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan Pemda Tanggamus dalam membayar hutang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek (piutang) yang dimiliki.

Gambar III.4 Perkembangan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2017



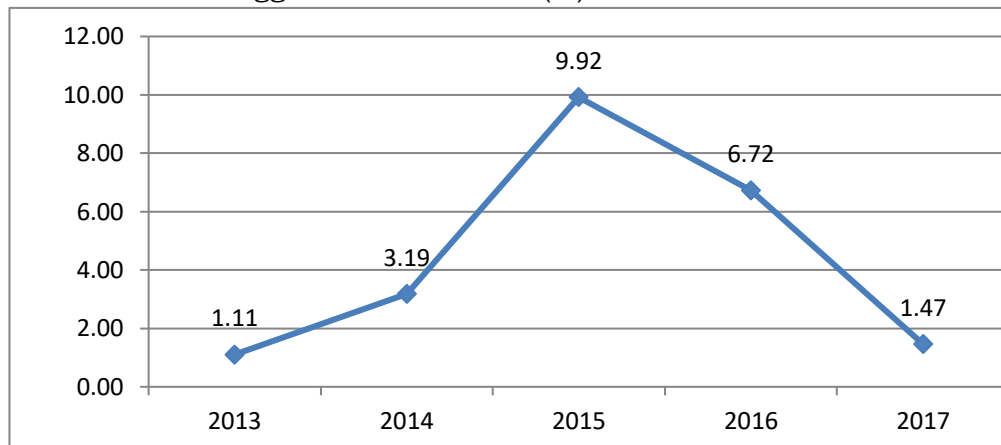
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2013-2017

Analisis dari grafik di atas menunjukkan kemampuan kas ditambah piutang Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menunjukkan peningkatan di tahun 2017.

4) Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset

Rasio Kewajiban terhadap Total Aset menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanggamus membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Dalam pengertian tidak mengandalkan hutang dari pihak lain. Rasio yang semakin kecil menunjukkan hasil yang baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan daerah. Perkembangan rasio kewajiban terhadap total aset (*debt ratio*) Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Gambar III.5 Perkembangan Debt Ratio Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2013-2016 (%)



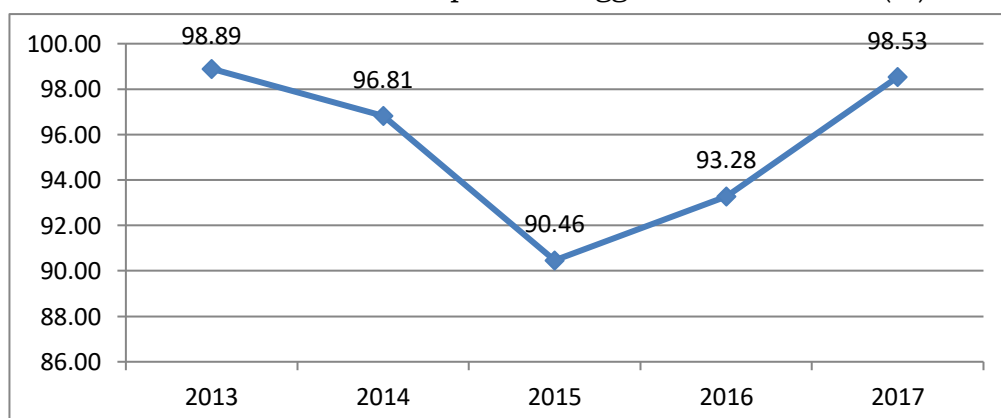
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2013-2017

Analisis rasio ini berdasarkan grafik di atas bahwa lebih dari 90 persen pendanaan pembangunan adalah bersumber dari kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri.

5) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri dalam membiayai pembangunan. Hasil dari rasio ini yang mendekati angka 100% menunjukkan kondisi yang sangat baik oleh kemampuan sendiri.

Gambar III.6 Perkembangan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2013-2016 (%)



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2013-2017

Analisis rasio ini berdasarkan grafik di atas merupakan kebalikan dari Gambar III.6. bahwa hampir 100% dana pembangunan bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, hanya pada tahun 2015 ada peningkatan dana dari luar untuk membantu keuangan Kabupaten Tanggamus.

Tabel III.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	ASET	3.09
1.1	ASET LANCAR	(2.15)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	(3.12)
1.1.2	Kas di Bendaharan Penerimaan	-
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	(100.00)
1.1.4	Kas di BLUD	11.91
1.1.5	Kas di Bendahara Dana BOS	214.44
1.1.6	Setara Kas	-
1.1.7	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	(18.66)
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	-
1.1.9	Piutang Pendapatan	(4.82)
1.1.10	Piutang Lainnya	(9.03)
1.1.11	Penyisihan Piutang Pajak	39.10
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	7.83
1.1.13	Persediaan	12.31
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	3.23
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(100.00)
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	4.55
1.3	ASET TETAP	3.17
1.3.1	Tanah	(2.84)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	3.04
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.94
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.63
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	13.51
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(48.20)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	12.97
1.4	DANA CADANGAN	-
1.4.1	Dana Cadangan	-

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1.5	ASET LAINNYA	9.71
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0.55
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(100.00)
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	-
1.5.4	Aset Lain-lain	9.99
	JUMLAH ASET DAERAH	3.09
2	KEWAJIBAN	(37.09)
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(37.09)
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.80
2.1.4	Utang Bunga	-
2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
2.1.6	Pendapatan Diterima Dimuka	-
2.1.7	Utang Beban	(0.25)
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	(37.82)
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
3	EKUITAS	4.97
3.1	EKUITAS	4.97
3.1.1	Ekuitas	4.97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.09

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2013-2017 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan dana masyarakat dan mitra.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2013-2017, memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kasumum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2013-2017 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah

pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

- b) Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - c) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - d) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil;
 - e) Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembagakeuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
 - f) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upayameningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - g) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 2) Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerahdari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagiandalam dana perimbangan;
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Lampung, Dana Penyesuaian, dan Dana Bantuan Keuanganyaitu dengan meningkatkankoordinasidengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2013-2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2013-2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2016 yang baru mencapai sebesar 64,41 sehingga diperlukan perencanaan kegiatankegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- 4) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- 5) Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat untuk lebih percepatan penurunan angka kemiskinan yang masih mencapai 12,48%;
- 6) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 8) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 9) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah rata-rata provinsi diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
- 10) Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
- 11) Pengembangan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mempercepat pengentasan desa tertinggal yang hingga tahun 2017 masih terdapat 58 desa tertinggal;

- 12) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 13) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
- 14) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
- 15) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- f) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g) Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2013-2017 adalah:

- a) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2013-2017 adalah:

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD.
- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Tanggamus dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

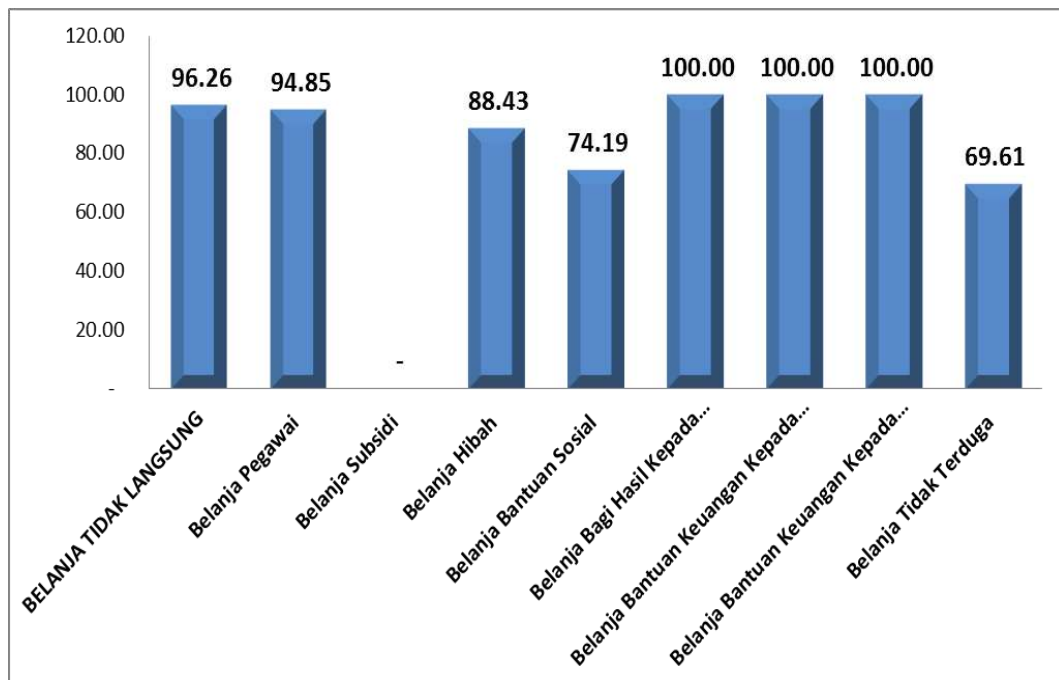
Tabel III.7 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
2	BELANJA	85.65	82.78	94.24
2.1	Belanja Tidak Langsung	93.57	89.45	96.26
2.1.1	Belanja Pegawai	92.76	86.16	94.85
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	97.61	86.38	88.43
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	76.24	84.39	74.19
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	100.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	100.00	99.95	100.00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	89.23	100.00	100.00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	18.42	117.79	69.61
2.2.	Belanja Langsung	76.69	74.48	91.09
2.2.1	Belanja Pegawai	95.86	89.28	96.99
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.23	84.21	88.76
2.2.3	Belanja Modal	67.14	63.38	90.98

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Dalam aspek Belanja Tidak Langsung, dalam kurun tiga tahun terakhir proporsi realisasi terhadap anggaran belanja tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 94,24% sedangkan untuk Belanja Langsung yang tertinggi juga dicapai pada tahun 2017 dengan angka sebesar 91,09%.

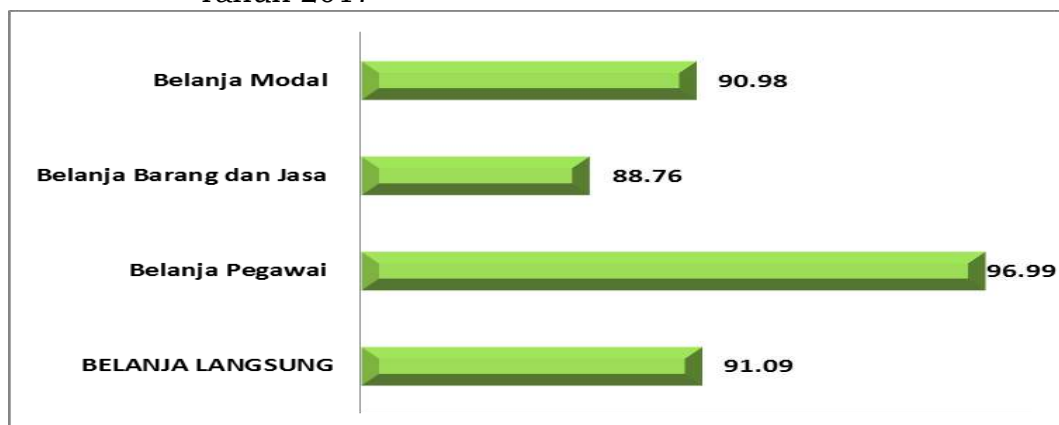
Gambar III.7 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Per Komponen Tahun 2017



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017

Jika ditinjau per komponen, dalam Belanja Tidak Langsung proporsi realisasi terbesar adalah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mencapai 100% dan proporsi realisasi terbesar kedua adalah Belanja Pegawai yang mencapai 94,85%.

Gambar III.8 Proporsi Realisasi Belanja Langsung Per Komponen Tahun 2017



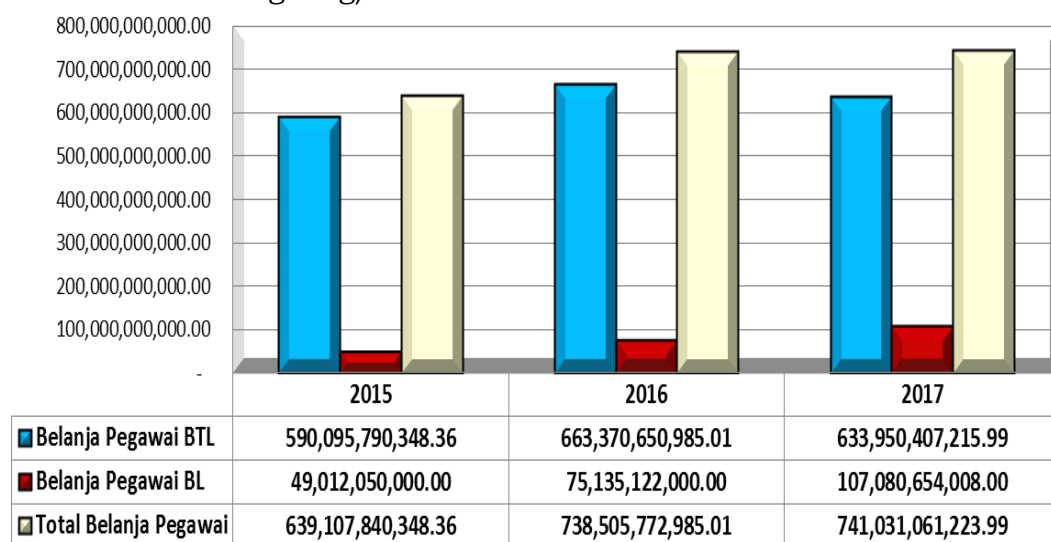
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017

Sedangkan untuk Belanja Langsung, proporsi realisasi terbesar yaitu Belanja Pegawai mencapai 96,99% dan urutan kedua yaitu Belanja Modal yang mencapai 90,98% serta yang terakhir yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar 88,76%

3.2.1.2 Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat keterserapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2015-2017 yaitu:

Gambar III.9 Proporsi Anggaran Belanja Pegawai (Tidak Langsung dan Langsung) Tahun 2015-2017



Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Belanja Pegawai ada penambahan sekitar Rp.101.923.220.875,63 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung ada penambahan sebesar Rp.43.854.616.867,63;
- 2) Belanja Pegawai pada Belanja Langsung ada penambahan tahun sebesar Rp.58.068.604.008,00

Tabel III.8 Analisis Proporsi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2015	639,107,840,348.36	1,412,521,810,504.21	45.25
2	Tahun Anggaran 2016	738,505,772,985.01	1,758,028,365,376.26	42.01
3	Tahun Anggaran 2017	741,031,061,223.99	1,649,531,075,787.70	44.92

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Dari tabel III.8 terlihat bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 relatif menurun, hal ini disebabkan peningkatan total pengeluaran lebih tinggi daripada peningkatan total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat meliputi pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, belanja jasa dan operasional kantor.

Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat berada dalam komponen belanja langsung, maupun belanja tidak langsung.

Tabel III.9 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	Rata- Rata Pertum- buhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	640,903,018,312.03	783,482,118,339.50	930,364,808,545.00	13.23
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	389,606,687,488.00	432,183,218,043.00	389,076,154,059.00	(0.05)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	154,840,594,755.00	135,271,380,342.50	206,457,983,580.00	10.06
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2,568,000,000.00	3,702,000,000.00	5,118,200,000.00	25.85
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	350,289,595.68	416,543,415.00	629,686,440.00	21.59
5	Belanja Bunga	-	-	-	-
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	1,259,715,527.00	100.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	92,848,061,782.35	211,053,117,210.00	327,050,446,929.00	52.15
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	689,384,691.00	855,859,329.00	772,622,010.00	3.87
B	Belanja Langsung	46,985,019,000.00	67,081,852,000.00	103,858,849,451.00	30.27
1	Belanja Pegawai	46,985,019,000.00	67,081,852,000.00	103,858,849,451.00	30.27
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67,346,142,036.25	116,031,839,904.00	7,876,662,904.00	(51.10)
1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah	500,000,000.00	3,401,547,816.00	-	(100.00)

NO	URAIAN	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	Rata- Rata Pertum- buhan (%)
2	Hutang Retensi dan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	-	112,630,292,088.00	-	-
3	Pembayaran Hutang Pajak	-	-	7,876,662,904.00	100.00
4	Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan dan Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga	66,846,142,036.25	-	-	(100.00)
5	Kurang Bayar Sertifikasi Guru Tahun 2010-2013	-	-	-	-
6	Pembayaran Hutang Upah Pungut	-	-	-	-
7	Pembayaran Hutang Pajak Penerangan Lampu Jalan	-	-	-	-
8	Pembayaran Hutang Pada Partai Politik	-	-	-	-
9	Pembayaran Hutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	755,234,179,348.28	966,595,810,243.50	1,042,100,320,900.00	11.33

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanggamus tiga tahun terakhir, dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung yang sifatnya wajib dan mengikat dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,23%. Pengeluaran ini didominasi oleh belanja pegawai yang antara lain meliputi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH.

Adapun untuk komponen Belanja Langsung, dalam kurun tiga tahun terakhir rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung yang bersifat wajib mengikat yaitu sebesar 30,27%. Komponen belanja ini adalah belanja pegawai antara lain berupa honorarium PNS dan Non PNS, Uang Lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS.

Secara keseluruhan, pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 11,33%. Informasi detail mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanggamus disajikan pada tabel 3.11 diatas.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus.

Defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil, komposisi penutup Defisit Riil Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu Tahun 2015- 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,231,542,207,448.97	1,451,799,162,933.06	1,565,897,169,141.63
	Dikurangi Realisasi :			
2	Belanja Daerah	1,151,913,068,001.79	1,358,575,195,294.02	1,547,099,699,352.39
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67,346,142,036.25	116,031,839,904.00	7,876,662,904.00
	Defisit Riil	12,282,997,410.93	(22,807,872,264.96)	10,920,806,885.24

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Berdasarkan data diatas, selama kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Tanggamus mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2016 menjadi terjadi defisit riil yang negatif yaitu sebesar -Rp.22.807.872.264,96 sedangkan kondisi yang terbaik yaitu pada tahun 2015 dan 2017 yang menunjukkan angka yang positif yaitu Rp.12.282.997.410,93 pada tahun 2015 serta pada tahun 2017 sebesar Rp.10.920.806.885,24

Tabel III.11 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,231,542,207,448.97	1,451,799,162,933.06	1,565,897,169,141.63
	Dikurangi Realisasi :			
2	Belanja Daerah	1,151,913,068,001.79	1,358,575,195,294.02	1,547,099,699,352.39
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67,346,142,036.25	116,031,839,904.00	7,876,662,904.00
A	Defisit Riil	12,282,997,410.93	(22,807,872,264.96)	10,920,806,885.24
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	7,467,105,566.83	19,750,102,977.76	(3,057,769,287.20)
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	7,467,105,566.83	19,750,102,977.76	(3,057,769,287.20)

NO	URAIAN	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	19,750,102,977.76	(3,057,769,287.20)	7,863,037,598.04

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Tabel III.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	Proporsi Dari Total Defisit Riil		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	60.79	(86.59)	(28.00)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Tabel III.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	7,467,105,566.83	100.00	19,750,102,977.76	100.00	(3,057,769,287.20)	100.00
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selama tiga tahun terakhir rata-rata berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan tahun 2018-2023 perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1 Proyeksi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Tanggamus dalam sisa anggaran perencanaan lima tahun kedepan, dilakukan proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Proyeksi disusun dengan menarik tren perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir periode yang lalu yaitu tahun 2013-2017 dan tren tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap tren pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus lima tahun kedepan.

Di dalam penyusunan proyeksi ini, memperhitungkan asumsi terjadinya gejolak perekonomian akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020. Dengan demikian, terdapat hasil proyeksi yang sedikit berfluktuasi. Informasi detail mengenai hasil proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel III.14 dan Tabel III.15.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah, tampak terjadi peningkatan pendapatan, karena APBD 2018, 2019 dan 2020 sudah ditetapkan dan berjalan. Pada tahun 2018 total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus bernilai Rp.1.536.957.134.296,44 dan di akhir periode yaitu tahun 2023 diprediksi pendapatan daerah mencapai Rp.1.870.941.910.400,00.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana daerah dan menggali obyek-obyek yang baru guna menambah penerimaan daerah, secara singkat upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (*multikanal*) dan tempat lainnya.
- Melakukan penambahan gerai pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kerja sama dengan terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah

- Membangun sistem informasi pajak daerah yang terkonsolidasi.
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
- Membangun sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
- Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
- Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
- Melakukan perluasan basis pajak daerah
 - 1) Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel.
 - 2) Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan.
 - 3) Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan pemerintah menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
 - 4) Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

2) Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- Akan menerapkan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- Akan menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.

- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b) Peningkatan *Law Enforcement*
 - Menerapkan Perda tentang Retribusi Daerah, terdapat beberapa Perda yang baru ditetapkan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - Akan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.
 - c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
 - Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah.
 - Melakukan pembaharuan system pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
 - d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
 - e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4) Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), serta perolehan DAU) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus fisik dan Non fisik).

5) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai dana transfer kedaerah seperti alokasi dana desa, dan jaminan kesehatan nasional dan lainnya.

Dari segi belanja, pada tahun 2018 total belanja Kabupaten Tanggamus terealisasi sebesar Rp.1.527.711.794.512,80 dan diakhir periode tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.869.941.910.400,00 serta untuk menjaga kesehatan keuangan diproyeksikan antara Pendapatan dan Belanja terjadi surplus sehingga Pemerintah Kabupaten Tanggamus bisa memanfaatkannya untuk bentuk penambahan penyertaan modal baik di Bank Lampung atau pada BUMD.

Tabel III.14 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus

KODE REKENING	URAIAN	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN	1,631,619,474,036.93	1,536,957,134,296.44	1,792,040,255,121.27	1,711,964,522,615.11	1,757,062,983,559.00	1,634,262,482,308.40
1.1	Pendapatan Asli Daerah	75,901,363,793.95	61,714,421,073.25	97,328,147,574.94	76,050,778,580.12	100,965,303,213.28	76,828,494,694.47
1.1.1	Pajak Daerah	22,743,715,740.49	17,670,433,156.50	33,988,873,118.23	20,571,076,171.75	35,668,045,917.08	22,111,991,792.80
1.1.2	Retribusi Daerah	4,438,300,000.00	3,134,686,147.18	4,531,630,000.00	1,536,190,315.50	4,890,815,000.00	2,157,871,695.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,984,379,451.55	3,883,833,523.90	4,184,379,400.00	4,283,144,634.66	4,900,000,000.00	4,454,087,951.43
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,734,968,601.91	37,025,468,245.67	54,623,265,056.71	49,660,367,458.21	55,506,442,296.20	48,104,543,255.24
1.2	Dana Perimbangan	1,073,793,422,199.00	1,074,909,696,931.00	1,146,214,708,816.00	1,131,249,311,788.00	1,086,546,887,197.00	1,080,168,166,694.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,527,622,000.00	54,321,891,758.00	68,155,007,342.00	49,790,495,103.00	63,940,797,131.00	50,592,282,459.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	778,605,786,000.00	778,605,786,000.00	798,148,818,000.00	802,326,253,000.00	725,176,840,000.00	718,696,624,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	239,660,014,199.00	241,982,019,173.00	279,910,883,474.00	279,132,563,685.00	297,429,250,066.00	310,879,260,235.00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	481,924,688,043.98	400,333,016,292.19	548,497,398,730.33	504,664,432,246.99	569,550,793,148.72	477,265,820,919.93
1.3.1	Pendapatan Hibah	62,189,200,000.00	61,417,480,000.00	61,485,000,000.00	94,499,444,112.00	77,968,245,647.00	77,010,275,593.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134,769,351,029.98	66,034,927,998.19	165,158,294,432.33	96,009,633,885.99	130,056,803,965.14	79,130,592,199.93
1.3.6	Pendapatan Lainnya	284,966,137,014.00	272,880,608,294.00	321,854,104,298.00	314,155,354,249.00	361,525,743,536.58	321,124,953,127.00
2	BELANJA	1,647,834,231,117.93	1,527,711,794,512.80	1,814,735,408,301.66	1,678,742,417,518.67	1,807,630,524,556.50	1,648,643,730,414.86
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,046,754,626,769.75	988,364,067,342.00	1,093,735,542,157.37	1,029,913,807,908.45	1,123,455,801,352.07	1,038,820,486,516.46

KODE REKENING	URAIAN	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.1.1	Belanja Pegawai	621,511,902,108.20	571,588,271,590.00	654,019,543,025.57	595,604,313,782.45	634,226,563,270.38	571,727,253,090.46
2.1.4	Belanja Hibah	87,470,781,277.55	80,480,172,979.00	50,986,340,300.00	46,013,658,600.00	56,695,259,450.00	49,698,135,200.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	287,000,000.00	282,000,000.00	1,022,622,010.00	957,863,719.00	1,022,622,010.00	958,833,090.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,718,201,574.00	2,709,109,154.00	3,904,146,821.80	3,904,146,807.00	5,132,723,782.49	5,132,723,782.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	331,994,119,800.00	330,638,976,121.00	382,649,390,000.00	382,649,390,000.00	378,900,441,142.20	374,651,395,392.00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772,622,010.00	722,126,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,943,410,808.00	1,153,500,000.00	784,435,000.00	47,478,191,697.00	36,652,145,962.00
2.2.	Belanja Langsung	601,079,604,348.18	539,347,727,170.80	720,999,866,144.29	648,828,609,610.22	684,174,723,204.43	609,823,243,898.40
2.2.1	Belanja Pegawai	103,690,171,791.00	99,371,378,132.00	92,103,433,062.00	87,071,154,462.00	95,094,257,500.00	90,745,126,430.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292,918,534,060.80	267,687,656,163.80	346,191,904,029.29	320,064,754,118.22	359,034,802,361.16	310,570,886,093.17
2.2.3	Belanja Modal	204,470,898,496.38	172,288,692,875.00	282,704,529,053.00	241,692,701,030.00	230,045,663,343.27	208,507,231,375.23
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16,214,757,081.00)	9,245,339,783.64	(22,695,153,180.39)	33,222,105,096.44	(50,567,540,997.50)	(14,381,248,106.46)
3	PEMBIAYAAN	16,214,757,081.00	16,149,813,396.75	22,695,153,180.39	22,446,885,901.06	50,567,540,997.50	52,872,361,319.11
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16,214,757,081.00	16,149,813,396.75	25,395,153,180.39	25,146,885,901.06	55,668,990,997.50	55,672,361,319.11
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16,214,757,081.00	16,149,813,396.75	25,395,153,180.39	25,146,885,901.06	55,668,990,997.50	55,672,361,319.11



KODE REKENING	URAIAN	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	5,101,450,000.00	2,800,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	5,101,450,000.00	2,800,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	16,214,757,081.00	16,149,813,396.75	22,695,153,180.39	22,446,885,901.06	50,567,540,997.50	52,872,361,319.11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	25,395,153,180.39	0.00	55,668,990,997.50	0.00	38,491,113,212.65

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

Tabel III.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Tanggamus

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	0.43%	1,854,943,611,446.00	1,855,697,496,585.00	1,870,941,910,400.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.44%	124,540,693,327.00	128,010,364,540.00	138,457,248,445.00
4.1.01	Pajak Daerah;	-36.96%	50,437,031,841.00	50,881,773,077.00	20,046,287,778.00
4.1.02	Retribusi Daerah;	-12.39%	4,876,630,000.00	7,126,630,000.00	3,742,908,002.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	-4.95%	6,784,379,400.00	7,851,691,019.00	6,129,714,546.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	31.84%	62,442,652,086.00	62,150,270,444.00	108,538,338,119.00
4.2	Pendapatan Transfer	1.03%	1,529,330,169,853.00	1,610,018,632,045.00	1,560,943,972,207.00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.43%	1,369,011,459,083.00	1,443,228,264,912.00	1,436,469,878,027.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.52%	1,078,560,138,083.00	1,181,839,964,912.00	1,178,189,747,027.00
4.2.01.01	Dana Transfer Umum	6.03%	774,770,885,131.00	783,742,860,000.00	871,047,525,027.00
4.2.01.01.01	DBH	41.28%	63,053,025,131.00	71,828,211,000.00	125,854,288,027.00
4.2.01.01.02	DAU	2.32%	711,717,860,000.00	711,914,649,000.00	745,193,237,000.00
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus	0.55%	303,789,252,952.00	398,097,104,912.00	307,142,222,000.00
4.2.01.01.03	DAK Fisik	-33.24%	127,840,251,000.00	134,713,963,912.00	56,969,805,000.00
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	19.24%	175,949,001,952.00	263,383,141,000.00	250,172,417,000.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	100.00%	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	-5.70%	290,451,321,000.00	261,388,300,000.00	258,280,131,000.00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	-11.89%	160,318,710,770.00	166,790,367,133.00	124,474,094,180.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-11.89%	160,318,710,770.00	166,790,367,133.00	124,474,094,180.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00%	0.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-7.64%	201,072,748,266.00	117,668,500,000.00	171,540,689,748.00
4.3.01	Hibah	-100.00%	51,048,983,000.00	49,668,500,000.00	0.00
4.3.02	Dana Darurat	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.93%	150,023,765,266.00	68,000,000,000.00	171,540,689,748.00
5	BELANJA DAERAH	-2.97%	1,986,334,724,658.65	1,930,197,496,585.00	1,869,941,910,400.00
5.1	Belanja Operasi	0.13%	1,252,096,797,748.65	1,271,405,939,729.00	1,255,333,221,737.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.49%	659,990,820,680.70	662,852,766,063.00	693,307,022,049.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-4.94%	539,908,869,602.95	549,938,014,577.00	487,909,032,915.00
5.1.03	Belanja Bunga	100.00%	0.00	5,500,000,000.00	5,070,000,000.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	14.96%	52,197,107,465.00	52,470,159,089.00	68,978,166,773.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00%	0.00	645,000,000.00	69,000,000.00
5.2	Belanja Modal	-15.68%	336,490,392,325.00	296,228,130,424.00	239,248,505,997.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-49.69%	7,230,000,000.00	8,200,000,000.00	1,830,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-3.51%	43,724,780,430.00	49,890,176,532.00	40,705,956,924.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.59%	62,154,096,784.00	64,187,487,865.00	66,700,322,159.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-29.47%	217,292,220,727.00	169,652,276,027.00	108,079,296,914.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	89.79%	6,089,294,384.00	4,298,190,000.00	21,932,930,000.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	-20.08%	14,089,803,986.00	17,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-20.08%	14,089,803,986.00	17,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	-2.28%	383,657,730,599.00	345,563,426,432.00	366,360,182,666.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-22.97%	6,221,961,185.00	5,800,840,318.00	3,691,889,224.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-1.98%	377,435,769,414.00	339,762,586,114.00	362,668,293,442.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.40%	(131,391,113,212.65)	(74,500,000,000.00)	1,000,000,000.00

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-69.01%	131,391,113,212.65	74,500,000,000.00	(1,000,000,000.00)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-100.00%	133,491,113,212.65	95,000,000,000.00	0.00
6.1.01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	-100.00%	38,491,113,212.65	0.00	0.00
6.1.02	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.03	<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.04	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	-100.00%	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	0.00
6.1.05	<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.06	<i>Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-30.99%	2,100,000,000.00	20,500,000,000.00	1,000,000,000.00
6.2.01	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	0.00%	0.00	1,500,000,000.00	0.00
6.2.02	<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	-30.99%	2,100,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
6.2.03	<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</i>	100.00%	0.00	19,000,000,000.00	0.00
6.2.04	<i>Pemberian Pinjaman Daerah</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2.05	<i>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	0.00%	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00%	0.00	0.00	0.00

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

Pada Tabel III.15 diatas terdapat proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Penerimaan Pinjaman Daerah sebagai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 diajukan Pinjaman Daerah sebesar Rp.95.000.000.000,00 ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebagai salah satu *Special Mission Vehicles (SMV)* di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Pinjaman Daerah tersebut belum terealisasi pada tahun 2021 dan prosesnya berlanjut sampai dengan tahun 2022.

Tabel III.16 Paket Kebijakan Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

No.	Paket Kebijakan	Sasaran Kebijakan Program	Dampak/Hasil Kebijakan	Keluaran
1	Paket Kebijakan Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Pengurangan Disparitas Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Mengoptimalkan penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan terutama pada lintas-lintas strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan baik daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi
2	Paket Kebijakan Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Pemenuhan Perumahan/ Pemukiman Rakyat yang Memiliki Akses Sanitasi dan Air Bersih serta Tersedianya Fasilitas Ruang Publik	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
3	Paket Kebijakan Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Percepatan Pemenuhan Akses Prasarana-Sarana Layanan Dasar Pendidikan Menuju Tanggamus Cerdas	Meningkatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu dan tidak membebani masyarakat

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021



Tabel III.17 Pekerjaan Yang Pembiayaannya Dari Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021-2022

NO	UNIT PENANGGUNGJAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				86,067,000,000.00
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			7,400,008,579.00
			1 Pembangunan Bronjong Sungai Margomulyo Kecamatan Air Naningan	200,000,177.00	
			2 Pembangunan Bronjong Sungai Way Umbar Kecamatan Kelumbayan	600,006,440.00	
			3 Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Way Semuong Kecamatan Bandar Negeri Semuong	4,500,000,376.00	
			4 Pemasangan Bronjong Way Jelay Kecamatan Kotaagung	400,000,353.00	
			5 Pembangunan Beronjong Sungai Way Sukaraja Kecamatan Semaka	400,000,353.00	
			6 Pembangunan Bronjong Dusun Banding Agung Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka	700,000,350.00	
			7 Pembangunan Bronjong Lokasi Lubuk Kalam Way Susuk Kecamatan Kelumbayan	200,000,177.00	
			8 Pembangunan Bronjong Sungai Dusun Pengandaran Way Kubu Langka Kecamatan Cukuh Balak	400,000,353.00	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			2,100,000,000.00
			1 Optimalisasi Fasilitas Air Bersih Pekon Batu Keramat Kecamatan Kotaagung Timur	400,000,000.00	
			2 Optimalisasi Fasilitas Air Bersih Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok	700,000,000.00	



NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			3 Pembangunan Fasilitas Air Minum Pekon Kayu Hubi Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			4 Pembangunan SPAM Pekon Darussalam Kecamatan Gunung Alip	300,000,000.00	
			5 Pembangunan SPAM Pekon Pardasuka Kecamatan Kota Agung	300,000,000.00	
			6 Pembuatan Sumur Bor Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			1,157,000,000.00
			1 Pembangunan Gorong-Gorong/Box Culved Datar Lebuay - Jembatan Gantung Kecamatan Air Naningan	195,000,000.00	
			2 Pembuatan Gorong-Gorong/Box Culved Pekon Dadi Mulyo Kecamatan Wonosobo	195,000,000.00	
			3 Pembuatan Gorong-Gorong Ruas Gedung - Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak	134,000,000.00	
			4 Pembuatan Talud Penahan Badan Jalan Pangkul - Dadirejo Kecamatan Wonosobo	99,000,000.00	
			5 Pembuatan Talud Penahan Badan Jalan Ruas Ilahan - Karang Sari Kecamatan Pulau Panggung	99,000,000.00	
			6 Pembuatan Talud Penahan Badan Jalan Ruas Sukaraja - Kanoman Kecamatan Semaka	135,000,000.00	
			7 Perbaikan Bahu Jalan/Saluran Drainase Ruas Jalan Banjar Negeri - Penangunan Kecamatan Gunung Alip	100,000,000.00	
			8 Rehap Siring Pasangan Jalan Sidoharjo - Napal Kecamatan Kelumbayan	200,000,000.00	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan			29,500,000,000.00
			1 Pembangunan Jalan Dusun Kurung Kamar ke Sidomukti Pekon Antar Brak Kecamatan Limau	200,000,000.00	
			2 Pembangunan Jalan Dusun Suka Banjar Pekon Kuripan Kecamatan Limau	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			3 Pembangunan Jalan Lanjutan Dusun Cong Kanan - Batu Kibau Pekon Ampai Kecamatan Limau	400,000,000.00	
			4 Pembangunan Jalan Menuju TPI Pekon Way Khilau Kecamatan Cukuh Balak	200,000,000.00	
			5 Pembangunan Jalan Pekon Banjar Manis Telung Kuya Menuju Pekon Tanjung Betuah (Lanjutan) Kecamatan Cukuh Balak	300,000,000.00	
			6 Pembangunan Jalan Pekon Tanjung Berisi Penghubung Pekon Antar Brak ke Tanjung Siom Kecamatan Limau	200,000,000.00	
			7 Pembangunan Jalan Pengandaran - Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak	200,000,000.00	
			8 Pembangunan Jalan Penghubung Pedukuhan Way Bolok Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak	200,000,000.00	
			9 Pembangunan Jalan Sinar Madang Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau	200,000,000.00	
			10 Pembangunan Rabat Beton Dusun Picung Pekon Lengkokai Kecamatan Kelumbayan Barat	200,000,000.00	
			11 Peningkatan Jalan Dusun Purwosari Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat	200,000,000.00	
			12 Peningkatan Jalan Dusun Sukabandung - Dusun Limbungan Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan	200,000,000.00	
			13 Peningkatan Jalan Dusun Suka Jadi Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	200,000,000.00	
			14 Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Sawah Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak	200,000,000.00	
			15 Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Limau	400,000,000.00	
			16 Peningkatan Jalan Menuju SMAN 1 Kelumbayan Barat Kecamatan Kelumbayan Barat	150,000,000.00	
			17 Peningkatan Jalan Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan	200,000,000.00	
			18 Peningkatan Jalan Poros Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			19 Pelebaran Jalan Lapangan Tangsi ke Sinar Banten Kecamatan Talang Padang	300,000,000.00	
			20 Pelebaran Ruas Jalan Sinar Banten - Kali Bening Kecamatan Talang Padang	1,000,000,000.00	
			21 Pembangunan Drainase Jalan Banjar Negeri Arah Ciherang Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			22 Pembangunan Jalan Arah Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Mutaqin Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			23 Pembangunan Jalan Banjar Agung Ilir - Tiuh Memon Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			24 Pembangunan Jalan Cucian Mobil Tanjung Ratu - Pondok Pesantren Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			25 Pembangunan Jalan Djamal menuju Balai Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting	400,000,000.00	
			26 Pembangunan Jalan Lingkar Pekon Sukarama - Tangkit Serdang Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			27 Pembangunan Jalan Menuju Pekon Talang Lebar Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			28 Pembangunan Jalan Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang	100,000,000.00	
			29 Pembangunan Jalan Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok	200,000,000.00	
			30 Pembangunan Jalan Penghubung Pekon Sinar Banten - Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang	300,000,000.00	
			31 Pembangunan Jalan Penghubung Way Halom - Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang	350,000,000.00	
			32 Pembangunan Jalan Pertanian Pekon Gisting Bawah Blok 12 Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			33 Pembangunan Jalan Raya Taman Sari Pekon Sukaagung Barat Kecamatan Bulok	300,000,000.00	
			34 Pembangunan Jalan Ringgung - Kebumen Kecamatan Pugung	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			35 Pembangunan Jalan SMKN 1 Pugung Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			36 Pembangunan Jalan SMPN 1 Pugung Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			37 Pembangunan Jalan Way Napal Rantau Tjang Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			38 Pembangunan Rabat Beton Dusun Merabung III Pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			39 Pembangunan Rabat Beton Dusun Tanjung Sari Pekon Tium Memon Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			40 Pembangunan Rabat Beton Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			41 Pembentukan Badan Jalan Dusun I Pekon Sidokaton Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			42 Pemeliharaan Berkala Jalan Mes Pemda ke Arah Masjid Lanbaw Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			43 Peningkatan Jalan Air Nanah atau Sinabang Kecamatan Bulok	200,000,000.00	
			44 Peningkatan Jalan Banjar Muda, Sukajadi, Sir Buana Kecamatan Bulok	300,000,000.00	
			45 Peningkatan Jalan Blok 11 Depan SD 1 Gisting Atas Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			46 Peningkatan Jalan Blok 16 Arah SD 4 Gisting Atas Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			47 Peningkatan Jalan Blok 22 Gang Gereja Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			48 Peningkatan Jalan Blok 24 Kecamatan Gisting	300,000,000.00	
			49 Peningkatan Jalan Blok 9 Gang Satiyem Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting	300,000,000.00	
			50 Peningkatan Jalan Campang Way Handak Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			51 Peningkatan Jalan Depan GSG Talang Padang Kecamatan Talang Padang	150,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			52 Peningkatan Jalan Dusun Banjar Harapan Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok	200,000,000.00	
			53 Peningkatan Jalan Dusun Campang 3 Pekon Campang Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			54 Peningkatan Jalan Dusun Gistang Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			55 Peningkatan Jalan Dusun Kolonis Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			56 Peningkatan Jalan Dusun Paneongan Pekon Sukarama Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			57 Peningkatan Jalan Dusun Suka Wangi Pekon Pungkut (Lanjutan) Kecamatan Pugung	150,000,000.00	
			58 Peningkatan Jalan Dusun Surian Pasir Pekon Sukamulya Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			59 Peningkatan Jalan Dusun Way Jura Pekon Suka Mulya Menuju Gunung Kasih Kota Jawa Kecamatan Pugung	150,000,000.00	
			60 Peningkatan Jalan Gang Nandang Pekon Tanjung Kemala (Lanjutan) Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			61 Peningkatan Jalan Hi. Baheram Dusun III Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			62 Peningkatan Jalan Inpres Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			63 Peningkatan Jalan Jalan Campang (Mbah Malekon) Kecamatan Gisting	300,000,000.00	
			64 Peningkatan Jalan Karya Tani Dusun I Blok 5 Gisting Bawah Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			65 Peningkatan Jalan KH. Dahlan Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			66 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			67 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Way Pring Kecamatan Gisting	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			68 Peningkatan Jalan Masjid AT-TAQWA Dusun 5 Blok 33 Gisting Bawah Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			69 Peningkatan Jalan Mekar Jaya Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			70 Peningkatan Jalan Menuju SMK Talang Padang Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang	150,000,000.00	
			71 Peningkatan Jalan Merabung menuju Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			72 Peningkatan Jalan Merabung menuju Sukamerindu Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			73 Peningkatan Jalan M. Idris Dusun II Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			74 Peningkatan Jalan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok	300,000,000.00	
			75 Peningkatan Jalan Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang	700,000,000.00	
			76 Peningkatan Jalan Pekon Tanjung Heran Menuju Dusun Tanjung Rindu Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			77 Peningkatan Jalan Pekon Way Halom Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			78 Peningkatan Jalan Pendidikan Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang	150,000,000.00	
			79 Peningkatan Jalan Poros Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			80 Peningkatan Jalan Qurota A'yun Dusun IA Gisting Bawah Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			81 Peningkatan Jalan Salam Dusun VI Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip	200,000,000.00	
			82 Peningkatan Jalan Samping SD 1 Dusun Campang 2 Pekon Campang Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			83 Peningkatan Jalan s.d Latasir Nabang Bayur - Pamarayan Kecamatan Bulok	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			84 Peningkatan Jalan Singosari Menuju Rupit Kecamatan Talang Padang	200,000,000.00	
			85 Peningkatan Jalan Singosari - Pucung Kecamatan Talang Padang	150,000,000.00	
			86 Peningkatan Jalan Sukaraya - Karang Agot Pekon Sukamara Kecamatan Bulok	200,000,000.00	
			87 Peningkatan Jalan Tani Makmur Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			88 Peningkatan Jalan Tanjung Agung - Umbul Komering Neglasari Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			89 Peningkatan Jalan TK Aisyiyah Pekon Campang Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			90 Peningkatan Jalan Way Napal Pekon Rantau Tijang Menuju Umbul Baru Kecamatan Pugung	200,000,000.00	
			91 Perbaikan Jalan Blok 17 ke Blok 19 Kecamatan Gisting	200,000,000.00	
			92 Rehab Oprit Jembatan Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan	200,000,000.00	
			93 Pembangunan Drainase Jalan Gondang Blok IV (Depan Pasar Datarajan) Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			94 Pembangunan Drainase Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			95 Penataan Drainase Pasar Margoyoso Kecamatan Sumberejo	700,000,000.00	
			96 Pembangunan Jalan Dusun Air Putih Pekon Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung	400,000,000.00	
			97 Pembangunan Jalan Dusun Bungur Jaya Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan	200,000,000.00	
			98 Pembangunan Jalan Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan	300,000,000.00	
			99 Pembangunan Jalan Pekon Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			100 Pembangunan Jalan Sidorejo menuju Dusun Talang Tangkit Pekon Batu Bedil Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	
			101 Pembangunan Jalan SMP Bina Utama Blok III Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			102 Peningkatan Jalan Dusun Gunung Batu Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo	200,000,000.00	
			103 Peningkatan Jalan Dusun Segering Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan	150,000,000.00	
			104 Peningkatan Jalan Dusun Srigerning II, Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan	200,000,000.00	
			105 Peningkatan Jalan Dusun Talang Bandung Pekon Margo Mulyo Kecamatan Air Naningan	150,000,000.00	
			106 Peningkatan Jalan Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo	400,000,000.00	
			107 Peningkatan Jalan Gunung Sari - Sinar Banten Kecamatan Ulu Belu	500,000,000.00	
			108 Peningkatan Jalan Lapangan Pekon Sumber Mulyo (Kebon Baru) Kecamatan Sumberejo	200,000,000.00	
			109 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			110 Peningkatan Jalan Lingkungan Pekon Sidorejo (Jalan KKN) Kecamatan Sumberejo	200,000,000.00	
			111 Peningkatan Jalan Magkula Dusun Wijimulyo Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			112 Peningkatan Jalan Makam Menuju Polsek Sumberejo Kecamatan Sumberejo	500,000,000.00	
			113 Peningkatan Jalan Masjid - Lapangan Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo	150,000,000.00	
			114 Peningkatan Jalan Mawar Sidorejo Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			115 Peningkatan Jalan Pekon Ilahan menuju Batu Bedil Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			116 Peningkatan Jalan Pekon Karang Rejo - Kampung Tengah Kecamatan Ulu Belu	300,000,000.00	
			117 Peningkatan Jalan Pekon Karang Sari Kecamatan Air Naningan	200,000,000.00	
			118 Peningkatan Jalan Pekon Labu Kombang Menuju Lembah Pelangi Kecamatan Ulu Belu	200,000,000.00	
			119 Peningkatan Jalan Pekon Margomulyo Kecamatan Air Naningan	200,000,000.00	
			120 Peningkatan Jalan Pekon Pagar Alam menuju Ngarip Pekon Pagar Alam Kecamatan Ulu Belu	500,000,000.00	
			121 Peningkatan Jalan Pekon Penantian Menuju Bangun Jaya Kecamatan Ulu Belu	150,000,000.00	
			122 Peningkatan Jalan Pekon Sumber Mulya Menuju Dusun Pulau Apus Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	
			123 Peningkatan Jalan Pekon Tegal Rejo Menuju Lembah Pelangi Kecamatan Ulu Belu	400,000,000.00	
			124 Peningkatan Jalan Penantian - Tangkit Petai Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	
			125 Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Pekon Argomulyo Kecamatan Sumberejo	200,000,000.00	
		Pembangunan Jalan			21,620,845,870.00
			1 Pelebaran dan Perbaikan Jalan Kampung Baru - Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur	483,762,500.00	
			2 Peningkatan Jalan Banjar Negoro - Jembatan Gotong Royong (Kanoman) Kecamatan Wonosobo	956,200,000.00	
			3 Peningkatan Jalan Sumur Pitu - Sampang Turus Kecamatan Wonosobo	997,500,000.00	
			4 Peningkatan Jalan Wonosobo - Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo	1,349,548,050.00	
			5 Peningkatan Ruas Jalan Way Isom - Campang Tiga Kecamatan Kota Agung Timur	1,070,650,000.00	
			6 Peningkatan s.d Lapen Jalan Betung - Way Nipah Kecamatan Pematang Sawah	941,415,875.00	

NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			7 Peningkatan Jalan dengan Rigid (Ruas 414) Jalan Gedung - Kaca Marga (Dego) Kecamatan Cukuh Balak	1,330,000,000.00	
			8 Peningkatan Jalan Pekon Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat	480,723,000.00	
			9 Peningkatan Jalan s.d Lapen Ruas Jalan Sinar Petir - Tanjung Siom (Tanjung Siom Antar Brak) Kecamatan Limau	1,201,807,500.00	
			10 Peningkatan Jalan s.d Rigid Pavement (Ruas 429) Jalan Sukajaya - Salong Kecamatan Kelumbayan	1,330,000,000.00	
			11 Recontruksi Ruas Jalan Ruas Lengkukai - Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat	3,500,000,000.00	
			12 Peningkatan Jalan Dusun Sridadi - Pekon Way Manak (Lingk. Pasar Babakan) Kecamatan Pugung	613,500,000.00	
			13 Peningkatan Jalan Ruas Gunung Kasih - Dusun Cempaka Kecamatan Pugung	962,687,375.00	
			14 Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Kemala - Hilian Baji Kecamatan Pugung	858,900,000.00	
			15 Peningkatan Jalan Simpang Kebumen - Merabung (Ruas Banjar Agung Udik) Kecamatan Pugung	822,396,250.00	
			16 Peningkatan Kayu Hubi - Sumanda Kecamatan Pugung (Lanjutan)	774,020,000.00	
			17 Pemeliharaan Berkala Ruas Simpang Kanan - Margoyoso Kecamatan Sumberejo	2,499,664,200.00	
			18 Peningkatan Jalan s.d Onderlaag Jalan Dadapan - Argopeni (Sailing) Kecamatan Sumberejo	999,640,000.00	
			19 Perbaikan Oprit Jembatan Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung	448,431,120.00	
		Rehabilitasi Jalan			15,812,433,857.00
			1 Pembangunan Rigid Pavement Ruas Jalan Sanggi - Antar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong	3,990,000,000.00	
			2 Pembukaan Badan Jalan Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan	864,975,000.00	
			3 Pemeliharaan Berkala Jalan Banjar Manis - Simpang Kanan Kecamatan Gisting	3,377,648,790.00	



NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
			4 Pemeliharaan Berkala Ruas 141 Jalan Mess Pemda - Landbaw Kecamatan Gisting	1,000,005,000.00	
			5 Pemeliharaan Ruas Jalan Tanjung Kemala - (Batas Pringsewu) Kecamatan Pugung	896,845,950.00	
			6 Peningkatan Jalan Menuju Pekon Pesanguan Kecamatan Pematang Sawa	746,000,000.00	
			7 Peningkatan Jalan Benteng Jaya - Pedukuhan Teratas Lamuran Kecamatan Kota Agung	803,685,000.00	
			8 Peningkatan Jalan Dadapan - Wonoharjo Kecamatan Sumberejo	1,000,000,000.00	
			9 Peningkatan Jalan Margodadi - Sumbermulyo Kecamatan Sumberejo	417,400,000.00	
			10 Peningkatan Jalan (Ruas 283) Way Harong - Batu Kapal Kecamatan Air Naningan	1,227,000,000.00	
			11 Peningkatan Jalan Ruas 405 Tegineneng - Dusun Binjai Kecamatan Limau	742,874,117.00	
			12 Peningkatan Jalan Sidoharjo - Serkung Pete Ruas 433 Kecamatan Kelumbayan Barat	746,000,000.00	
		Pembangunan Jembatan			8,476,711,694.00
			1 Pembangunan Jembatan Pekon Umbar Kecamatan Klumbayan	2,893,201,062.00	
			2 Pembangunan Jembatan Antar Pekon Campang Way Handak - Pekon Way Pring Kecamatan Pugung/Gunung Alip	2,239,897,596.00	
			3 Pembangunan Jembatan Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang	559,974,398.00	
			4 Pembangunan Jembatan Way Paku II Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan	2,783,638,638.00	



NO	UNIT PENANGGUNGJAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
2	Dinas Pendidikan				8,933,000,000.00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (Sekolah Dasar)			3,480,000,000.00
			1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong	400,000,000.00	
			2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Batu Patah (Kelas Jauh Dusun Serkung Biji Asri) Kecamatan Kelumbayan Barat	600,000,000.00	
			3 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Sumber Mulya Kecamatan Pulau Panggung	380,000,000.00	
			4 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur	170,000,000.00	
			5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Tanjung Jaya Kecamatan Limau	360,000,000.00	
			6 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Way Halom Kecamatan Talang Padang	170,000,000.00	
			7 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Ngarip Kecamatan Ulu Belu	360,000,000.00	
			8 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong	340,000,000.00	
			9 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Rantau Tijang Kecamatan Pugung	360,000,000.00	
			10 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Sedayu Kecamatan Semaka	340,000,000.00	
		Pembangunan Ruang Perpustakaan (Sekolah Dasar)			200,000,000.00
			1 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 1 Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung	200,000,000.00	
		Pembangunan Ruang Kantor (Sekolah Dasar)			200,000,000.00
			1 Pembangunan Ruang Kantor SDN 1 Karang Agung Kecamatan Semaka	200,000,000.00	



NO	UNIT PENANGGUNGJAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
		Pembangunan Toilet/ Jamban (Sekolah Dasar)			140,000,000.00
			1 Pembangunan Toilet/Jamban SDN 3 Talang Padang Kecamatan Talang Padang	140,000,000.00	
		Rehabilitasi Ruang Kelas (Sekolah Dasar)			2,055,000,000.00
			1 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Paku Kecamatan Kelumbayan	420,000,000.00	
			2 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Sinar Bangun Kecamatan Bandar Negeri Semuong	360,000,000.00	
			3 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Tanjung Siom Kecamatan Limau	375,000,000.00	
			4 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Umbar Kecamatan Kelumbayan	420,000,000.00	
			5 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang	480,000,000.00	
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (Sekolah Dasar)			130,000,000.00
			1 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 1 Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur	130,000,000.00	
		Pengadaan Meubelair Ruang Kelas (Sekolah Dasar)			816,000,000.00
			1 Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD	756,000,000.00	
			2 Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan SD	60,000,000.00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (Sekolah Menengah Pertama)			200,000,000.00
			1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Air Naningan	200,000,000.00	
		Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (Sekolah Menengah Pertama)			350,000,000.00
			1 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP PGRI 1 Semaka	350,000,000.00	



NO	UNIT PENANGGUNG-JAWAB	JUDUL KAK/ USULAN KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PAGU	
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (Sekolah Menengah Pertama)			230,000,000.00
			1 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Air Naningan	230,000,000.00	
		Pengadaan Meubelair Ruang Kelas (Sekolah Menengah Pertama)			812,000,000.00
			1 Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMP	812,000,000.00	
		Kegiatan Penunjang			320,000,000.00
			1 Konsultan Perencanaan Pembangunan SD APBD 2021	190,000,000.00	
			2 Konsultasi Pengawasan Pembangunan SD APBD 2021	130,000,000.00	
		JUMLAH			95,000,000,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 akan difokuskan Pemulihan Ekonomi dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Nasional, penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dampaknya serta peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan menggenjot PDRB, peningkatan PDRB ini akan diupayakan melalui berbagai aspek, yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah, yang bersumber dari potensi keuangan/pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai cara berikut.
 - a) Optimalisasi PAD terutama dengan mendorong penerimaan pada pos terkait bidang jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran;
 - b) Peningkatan transparansi objek pajak;
 - c) Memberikan insentif pajak daerah untuk peningkatan penerimaan pajak daerah;
 - d) Pendataan ulang wajib pajak secara akurat dan aktual;
 - e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer;
 - f) Mengaktualisasi data kekayaan alam untuk penghitungan dana bagi hasil yang lebih akurat;
 - g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Selain optimalisasi pendapatan, terdapat pula kebijakan belanja sebagai berikut.

- a) Peningkatan efisiensi belanja dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik;
- b) Menekan belanja pegawai dengan tidak menambah jumlah aparatur pemerintah di Kabupaten Tanggamus;

Sedangkan pada pembiayaan daerah perlu dilakukan peninjauan secara terukur sehingga dapat terwujud penganggaran yang seimbang.

- 2) Investasi, yang bersumber dari investasi asing dan investasi dalam negeri.

Peningkatan investasi ini dilakukan melalui upaya berikut:

- a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, yaitu dengan mempermudah perijinan dan memberlakukan sistem insentif bagi usaha yang sejalan dengan rencana pemerintah dan sistem disinsentif bagi usaha yang bertentangan dengan arahan pemerintah/ mencemari lingkungan.
 - b) Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Tanggamus, infrastruktur air limbah, dll. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diandalkan efektif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanggamus.
 - c) Pengembangan inovasi daerah, terutama dengan mengembangkan perekonomian kreatif di Kabupaten Tanggamus.
 - d) Penerapan teknologi dengan cara meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
- 3) Selain untuk konsumsi rumah tangga sendiri, yaitu dengan cara mendorong pembelanjaan di Kabupaten Tanggamus, dikembangkan berbagai komoditi perkebunan dan hortikultura yang dapat mensupply daerah lain terutama kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Pringsewu dan Ibukota Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Jalur Lintas Barat dapat dioptimalkan sebagai jalur distribusi utama hasil komoditi perkebunan dan hortikultura.

Sedangkan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel III.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1,536,957,134,296.44	1,711,964,522,615.11	1,634,262,482,308.40	1,854,943,611,446.00	1,855,697,496,585.00	1,870,941,910,400.00
2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16,149,813,396.75	25,146,885,901.06	55,672,361,319.11	133,491,113,212.65	95,000,000,000.00	0.00
	Total penerimaan	1,553,106,947,693.19	1,737,111,408,516.17	1,689,934,843,627.51	1,988,434,724,658.65	1,950,697,496,585.00	1,870,941,910,400.00
	Dikurangi :						
1	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00	2,100,000,000.00	20,500,000,000.00	1,000,000,000.00
2	Belanja Pegawai	670,959,649,722.00	682,675,468,244.45	662,472,379,520.46	659,990,820,680.70	662,852,766,063.00	693,307,022,049.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	882,147,297,971.19	1,051,735,940,271.72	1,024,662,464,107.05	1,326,343,903,977.95	1,267,344,730,522.00	1,176,634,888,351.00

Sumber : Perubahan APBD 2018-2020 dan Proyeksi 2021-2023 (data diolah)

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 dan 2023 adalah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang merupakan kewajiban adanya Pinjaman Daerah yang telah direncanakan sejak tahun 2021, Pembentukan Dana Cadangan sebagai persiapan pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kapasitas riil dialokasikan kedalam tiga prioritas yaitu prioritas pertama untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan mendesak.



Tabel III.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	882,147,297,971.19	1,051,735,940,271.72	1,024,662,464,107.05	1,326,343,903,977.95	1,267,344,730,522.00	1,176,634,888,351.00
2	Prioritas I	333,348,085,275.00	386,553,536,807.00	379,784,119,174.00	383,657,730,599.00	345,563,426,432.00	366,360,182,666.00
3	Prioritas II	439,976,349,038.80	561,757,455,148.22	519,078,117,468.40	876,399,261,927.95	846,166,145,001.00	727,157,538,912.00
4	Prioritas III	108,822,863,657.39	103,424,948,316.50	125,800,227,464.65	66,286,911,451.00	75,615,159,089.00	83,117,166,773.00

Sumber : Perubahan APBD 2018-2020 dan Proyeksi 2021-2023 (data diolah)

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja Prioritas I yang diarahkan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat, yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Pekon;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Pekon

Belanja Prioritas II diarahkan untuk mendanai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah berupa :

- 1) Mengimplementasikan program unggulan yang menjadi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Tahun 2018 (55 Rencana Aksi De-Sa ASIK);
- 2) Melaksanakan pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul);
- 3) Menambah dan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur daerah;
- 4) Meningkatkan perekonomian daerah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 6) Meningkatkan daya saing daerah;
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan belanja Prioritas III diarahkan untuk mendanai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, yaitu :

- 1) Belanja Hibah;
- 2) Belanja Bantuan Sosial;
- 3) Belanja Tidak Terduga.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berupaya dalam meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) salah satunya melalui skema penganggaran pelaksanaan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang terdiri atas 6 jenis bidang SPM yaitu Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial.



Tabel III.20 Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	BIDANG SPM	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan	23,012,179,460.00	87,963,065,283.00	125,741,132,008.00	157,906,003,163.00	148,608,951,311.00	259,299,844,491.00
2	Kesehatan	56,696,361,271.34	93,438,403,308.64	139,868,542,879.60	80,527,445,419.00	57,049,305,172.00	62,627,210,040.00
3	Pekerjaan Umum	99,920,945,954.00	159,305,690,587.00	110,004,905,131.23	163,240,199,902.00	140,159,066,373.00	206,430,000,000.00
4	Perumahan Rakyat	1,103,712,131.00	2,619,105,750.00	2,554,088,000.00	57,303,206,031.00	53,726,764,962.00	60,340,000,000.00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3,432,749,044.00	1,497,972,612.00	12,161,594,596.00	24,741,075,359.00	14,597,925,457.00	16,735,080,357.50
6	Sosial	1,337,619,768.00	2,637,204,923.00	2,242,687,194.00	3,368,322,060.00	2,250,363,260.00	3,815,000,000.00

Sumber : Analisis dan data diolah, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN

DAN

ISU STRATEGIS DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dari analisis berbagai permasalahan dari urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang telah diidentifikasi serta hasil telaah terhadap gambaran umum dan kondisi eksisting daerah. Permasalahan dan isu strategis daerah selanjutnya akan coba dijawab dengan visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih.

Permasalahan dan isu strategis secara implementatif akan ditangani dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, baik secara sektoral, lintas sektor, bahkan lintas wilayah yang membutuhkan kerjasama dengan daerah sekitar dan provinsi.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Permasalahan pendidikan yang masih ditemui di Kabupaten Tanggamus meliputi:

- 1) Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus masih rendah (7,22 tahun), berarti tingkat pendidikan hanya sampai dengan kelas 1 SMP (Kelas 7). Dengan kondisi seperti ini, Kabupaten Tanggamus menduduki peringkat ke-14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- 2) Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 masih sangat rendah sebesar 28,85%.
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) masih rendah, untuk jenjang TK dan SD pada tahun 2020 sebesar 50,17%, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 59,79%. Demikian pula Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 1,51% dari tahun sebelumnya;
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang TK/PAUD masih rendah, hanya sebesar 40% di tahun 2020. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan;
- 5) Belum meratanya akses pendidikan;
- 6) Belum optimalnya mutu pendidikan;
- 7) Belum optimalnya tata kelola pendidikan.

B. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Tanggamus yaitu:

- 1) Masih rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 rasio Puskesmas per satuan penduduk sebesar 0,79, Klinik 0,16 dan Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,53;
- 2) Rendahnya rasio sarana kesehatan di kecamatan-kecamatan yang jumlah penduduknya banyak (<1);
- 3) Rasio Ketersediaan Rumah Sakit semakin menurun hanya 0,33 (per 100.000 penduduk);
- 4) Rasio ketersediaan tenaga medis (dokter) terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah, yakni 8,44 Per 100,000 Penduduk;

- 5) Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanggamus sebesar 68,56 (2020) masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung 70,65 (2020);
- 6) Sampai dengan tahun 2020, Masih terdapat Puskesmas yang terakreditasi Dasar dari 23 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tanggamus yakni Puskesmas Way Nipah;
- 7) Masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2021 berada pada angka 25%.
- 8) Pencapaian vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus belum optimal, sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 untuk dosis pertama baru mencapai 69,48%, dan dosis kedua 31,58% dari total sasaran.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tanggamus diuraikan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur jalan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan. Sedangkan kondisi jalan Kabupaten Tanggamus dalam kondisi baik hanya sekitar 35,01 persen;
- 2) Kondisi baik jaringan irigasi baru mencapai 50.958 meter atau sebesar 26,25 persen di tahun 2020 dan masih terdapat sekitar 59.295 meter (30,54%) irigasi dalam kondisi rusak ringan, 49.319 meter (25,40%) irigasi dalam kondisi rusak sedang dan 34.569 meter (17,81%) irigasi dalam kondisi rusak berat. Hal ini disebabkan karena umur jaringan irigasi yang sudah tua dan rentannya kejadian bencana alam di Kabupaten Tanggamus;

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pembangunan pada bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kabupaten Tanggamus antara lain :

- 1) Rasio rumah dengan kategori layak huni masyarakat baru mencapai 58,7%;
- 2) Masih luasnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan hingga mencapai 67% di tahun 2020;
- 3) Masih tingginya Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di tahun 2020 yaitu sebesar 50%.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan pembangunan pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terdapatnya pelanggaran terhadap K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang belum terselesaikan, pada tahun 2020 terdapat 20% pelanggaran yang belum dapat diselesaikan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat.

F. Sosial

Permasalahan pembangunan pada bidang sosial di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 seperti anak telantar (300 orang), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (32 orang) dan lanjut usia terlantar (1806 orang).
- 2) Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih tingginya penyandang disabilitas sebanyak 744 orang.
- 4) Disamping permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan lain seperti belum optimalnya penanganan bencana sosial, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan social, masih rentan terhadap konflik social, dll.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada bidang tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, mengalami penurunan yang tadinya 68,78 persen ditahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 59,72 persen. Penurunan ini bisa saja disebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja karena (WFH) atau menjalani isolasi di masa Pandemi *Covid-19*;
- 2) Kesempatan kerja terbatas;
- 3) Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- 4) Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
- 5) Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding perdesaan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah, baru mencapai 32% pada tahun 2018;
- 2) Masih terjadinya kasus KDRT walaupun terjadi penurunan selama tahun 2013-2018;
- 3) Belum semua perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum.

C. Pangan

Permasalahan pembangunan pada bidang pangan di Kabupaten Tanggamus yakni :

- 1) Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius. Daerah rawan pangan di Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada KK miskin masih diatas 30%;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari;

- 3) Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- 4) Belum optimalnya sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan;
- 5) Belum terciptanya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- 6) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan;
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan local.

D. Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2016 sebesar 40,75% dan terus meningkat hingga mencapai 65% ditahun 2020. Permasalahan pertanahan adalah terkait surat atau bukti kepemilikan atas tanah. Penanganan masalah pertanahan ini membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

E. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus, yaitu sebesar 63,76;
- 2) Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Tanggamus, yaitu hanya 1 lokasi;
- 3) Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu;
- 4) Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
- 5) Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL);

- 6) Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah rawan bencana alam: Pematang Sawa, Semaka, Kelumbayan, dan Kota Agung Timur. Sedangkan wilayah rawan Kebakaran Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, Wonosobo dan Kota Agung Barat;

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Pemenuhan hak kependudukan masih belum optimal, hal tersebut ditandai dengan masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki KTP, hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 66,17% artinya masih terdapat 33,83% penduduk >17 tahun yang belum memiliki KTP;
- 2) Masih rendahnya rasio bayi berakte kelahiran yaitu 29,08%;
- 3) Rendahnya rasio pasangan berakte nikah, yakni hanya 20,11%;
- 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Masih terdapat 6 desa/pekon yang masih berstatus desa tertinggal;
- 2) Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanggamus, yaitu :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB;
- 2) Kurangnya pembinaan masyarakat mengenai penguatan keluarga sejahtera sebagai basis ketahanan sosial masyarakat;
- 3) Menurunnya cakupan peserta KB aktif.

I. Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada bidang perhubungan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Kurang optimalnya fasilitas perlengkapan jalan, seperti rambu-rambu jalan, penerangan jalan, dll;
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- 3) Masih rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan;

J. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan baru mencapai 26%. Artinya masih terdapat 74% yang belum memiliki KIM;
- 2) Cakupan layanan Telekomunikasi baru mencapai 66%. Artinya belum semua wilayah di Kabupaten Tanggamus tercovererage layanan telekomunikasi;
- 3) Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum dilaksanakan secara optimal;
- 4) Belum adanya standar keamanan informasi;
- 5) Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Koperasi aktif masih belum optimal, baru mencapai 50,73%. Hal ini disebabkan lemahnya kelembagaan koperasi dan akses pelaku usaha koperasi dalam memasuki pasar;
- 2) Persentase BPR/LKM aktif masih rendah (3,73%);
- 3) Terjadinya penurunan pelaku UKM. Pada tahun 2017 UKM di Kabupaten Tanggamus berjumlah 1636, namun terus mengalami penurunan hingga berjumlah 1228 pada tahun 2020;

- 4) Masih rendahnya UKM yang memiliki penunjang usaha. Pada tahun 2020 UKM yang memiliki penunjang usaha baru mencapai 30%;
- 5) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya;
- 6) Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya;
- 7) Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar;
- 8) Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga.

L. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada bidang penanaman modal di Kabupaten Tanggamus yakni :

- 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) masih sedikit, baru berjumlah 13 investor di tahun 2020;
- 2) Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat/para pelaku usaha untuk membuat izin atas bangunan maupun izin tempat usaha yang dimiliki.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan pada bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Rendahnya Persentase organisasi pemuda yang aktif, baru mencapai 52% di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang;
- 2) Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja di Kabupaten Tanggamus;
- 3) Minimnya pencapaian prestasi olahraga;

N. Statistik

Permasalahan pembangunan pada bidang Statistik di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan;

- 2) Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat;
- 3) Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan.

O. Persandian

Permasalahan pembangunan pada bidang persandian di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, baru mencapai 12% pada tahun 2020;
- 2) Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*);
- 3) Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas.

P. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan pada bidang kebudayaan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Rendahnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, yakni hanya 1 (satu) di tahun 2020;
- 2) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- 3) Kurang optimalnya promosi budaya lokal Kabupaten Tanggamus.

Q. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada bidang perpustakaan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Minimnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. Sampai dengan tahun 2020, jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat hanya sebesar 6%;
- 2) Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dari 7136 pengunjung pada tahun 2019, menjadi 4992 pengunjung pada tahun 2020;
- 3) Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah masih relatif sedikit.

R. Kearsipan

Permasalahan pembangunan pada bidang kearsipan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) SDM pengelola kearsipan masih sangat terbatas;
- 2) Pengelolaan arsip Perangkat Daerah atau pencipta arsip belum tertib;
- 3) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 hanya sebesar 40%;
- 4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada bidang pariwisata di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) PAD sektor pariwisata Kabupaten Tanggamus masih sangat kecil, hanya sebesar 0,014% pada tahun 2020. Padahal Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata yang sangat baik;
- 2) Jumlah kunjungan wisatawan (17% di tahun 2020) dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- 3) Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- 4) Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala minimnya sarana promosi yang tepat;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata;
- 6) Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.

B. Pertanian

Permasalahan pembangunan pada bidang pertanian di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami sedikit peningkatan dari 33,85% pada tahun 2019 menjadi 42,51% di tahun 2020. Namun peningkatan tersebut masih lebih rendah dari tahun 2016-2018;

- 2) Terjadi penurunan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dari 57,31% pada tahun 2019 menjadi 55,87% di tahun 2020;
- 3) Adanya penurunan luas lahan pertanian akibat peralihan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, ditunjang penurunan tingkat kesuburan tanah;
- 4) Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil produk pertanian;
- 5) Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan.

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan pada bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik;
- 2) Belum meratanya akses terhadap layanan listrik;
- 3) Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.

D. Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada bidang perdagangan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas. Hal ini terlihat dari ekspor bersih perdagangan yang rendah, hanya sebesar 16.82% di tahun 2019;
- 2) Pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal masih belum optimal;
- 3) Cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal masih sangat rendah, yakni sebesar 11.38%. Hal ini berimbas pada terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusah mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas;
- 4) Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada sehingga belum

memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat.

E. Perindustrian

Permasalahan pembangunan pada bidang perindustrian di Kabupaten Tanggamus antara lain :

- 1) Masih rendahnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, yaitu sebesar 6,29% di tahun 2020;
- 2) Kelompok pengrajin yang memperoleh bantuan binaan dari Pemerintah Daerah masih rendah, yakni 13,10% di tahun 2020;
- 3) Pertumbuhan industri pengolahan masih tergolong cukup rendah, yakni sebesar 4% pada tahun 2020
- 4) Pangsa pasar produk industri pengolahan daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas, sebagian besar masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Kabupaten Tanggamus;
- 5) Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah dan masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha. Pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 yang diakibatkan terbatasnya alokasi anggaran pelatihan;
- 6) Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah.

F. Transmigrasi

Permasalahan pembangunan pada bidang transmigrasi di Kabupaten Tanggamus yakni :

- 1) Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah;
- 2) Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.

G. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Cakupan bina kelompok nelayan masih sangat rendah, hanya

sebesar 28% pada tahun 2020;

- 2) Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan kapasitasnya masih rendah;
- 3) Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

4.1.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pembangunan pada bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Rencana pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanggamus;
- 2) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar dokumen perencanaan pembangunan antara pusat-daerah dan provinsi-kabupaten belum optimal;
- 3) Kualitas dan kuantitas SDM Perencana belum memadai;
- 4) Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

B. Keuangan

Permasalahan pembangunan pada bidang keuangan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan;
- 2) Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Tingkat pertumbuhan belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung yang berdampak pada tingkat belanja modal;
- 4) Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih rendah, baru mencapai 50%. Idealnya setiap pejabat struktural sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan yang diemban;
- 2) Belum optimalnya manajemen informasi sistem kepegawaian yang ada disetiap OPD;
- 3) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

D. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan pada bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Belum semua rencana kelitbangan yang dapat diimplementasikan dalam dokumen perencanaan;
- 2) Pemanfaatan hasil kelitbangan belum optimal;
- 3) Masih kurangnya inovasi daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun *stakeholders* lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan.
- 4) Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah masih terbatas;
- 5) Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah masih sangat minim;
- 6) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Kelitbangan, sampai dengan tahun 2021 baru terdapat 1 orang jabatan fungsional peneliti.

E. Pengawasan

Permasalahan pembangunan pada bidang pengawasan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar 12,80%;
- 2) Masih terbatasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) yang saat ini baru berjumlah 40 personil sehingga masih kekurangan 66 personil.

F. Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan pembangunan pada fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik di daerah;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal.

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan diatas, maka pada sub bab ini akan dilakukan perumusan isu strategis Kabupaten Tanggamus lima tahun kedepan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi diprediksi akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu strategis Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 4) Merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak;
- 5) Memiliki dampak yang besar dan luas bagi daerah dan masyarakat jika tidak segera ditangani;
- 6) Merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang; dan
- 7) Memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh beberapa isu strategis di Kabupaten Tanggamus, yaitu:

- 1) Munculnya pandemi *Covid-19* sejak bulan Maret 2020 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan

global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi *Covid-19* juga telah mengubah semua prioritas pembangunan yang mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran;

- 2) Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus di tahun 2020 masih cukup tinggi yaitu 11,68 persen, meskipun berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung 12,76 persen tapi masih di atas rata-rata nasional 9,78 persen;
- 3) Secara geografis Kabupaten Tanggamus berada di Wilayah Bagian Barat Provinsi Lampung yang dalam strategi kluster pembangunan regional diproyeksikan sebagai wilayah yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata, namun dalam implementasinya antara Pemkab dan Pemprov belum terjadi koordinasi dan sinergisitas yang terpadu;
- 4) Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dalam kondisi baik hanya 35,01 persen sehingga menghambat arus dan mobilisasi orang dan barang sehingga memperlambat percepatan pembangunan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dan desa;
- 5) Rendahnya rasio ketersediaan prasarana kesehatan dasar masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu < 1) per satuan penduduk;
- 6) Masih terdapat 6 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial;
- 7) Kabupaten Tanggamus merupakan satu dari lima daerah di Provinsi Lampung yang masuk dalam Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Industri (WPPI) sebagaimana disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan masuknya rencana pembangunan Kawasan Industri Tanggamus (KIT).
- 8) Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti longsor, gempa bumi, tsunami; banjir, dan kebakaran;

- 9) Belum terintegrasinya kebijakan dan implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanggamus untuk lebih berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.
- 10) Lemahnya SDM Aparatur Pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan pekon yang akan menjadi sentral pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Tanggamus;
- 11) Rencana pembangunan Kawasan Industri Pertahanan di Kabupaten Tanggamus oleh Kementerian Pertahanan.
- 12) Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 terdapat beberapa isu strategis sebagai berikut:

A. Pilar Sosial

- a) Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi;
- b) Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas;
- c) Rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan dasar masyarakat;
- d) Masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki akreditasi utama, hanya 2 dari 24 Puskesmas;
- e) Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD dan SMP masih sangat rendah;
- f) Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata;
- g) Pada tahun 2021 masih terdapat 6 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

B. Pilar Ekonomi

- a) Keterbatasan infrastruktur;
- b) Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah;
- c) Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga;
- d) Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;

- e) Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata;
- g) Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.

C. Pilar Lingkungan

- a) Potensi bencana yang cukup besar, seperti longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran;
- b) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus.

Menindaklanjuti isu-isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan prioritas pembangunan. Keterkaitan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Identifikasi Isu Strategis Daerah dan Prioritas Pembangunan

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Munculnya pandemi <i>Covid-19</i> sejak bulan Maret 2020 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi <i>Covid-19</i> juga telah mengubah semua prioritas pembangunan yang mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis berupa <i>realokasi</i> dan <i>refocussing</i> anggaran;	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi yaitu 11,68 persen, meskipun berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung 12,76 persen tapi masih di atas rata-rata nasional 9,78 persen	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
3. Secara geografis Kabupaten Tanggamus berada di Wilayah Bagian Barat Provinsi Lampung yang dalam strategi kluster pembangunan regional diproyeksikan sebagai wilayah yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata, namun dalam implementasinya antara Pemkab dan Pemprov belum terjadi koordinasi dan sinergisitas yang terpadu	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan
4. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dalam kondisi baik hanya 35,01 persen sehingga menghambat arus dan mobilisasi	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
orang dan barang sehingga memperlambat percepatan pembangunan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dan desa	
5. Rendahnya rasio ketersediaan prasarana kesehatan dasar masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu < 1) per satuan penduduk	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Masih terdapat 6 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor: infrastruktur, ekonomi, dan sosial	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
7. Kabupaten Tanggamus masuk dalam lima daerah di Provinsi Lampung yang masuk dalam Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Industri (WPPI) sebagai disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan masuknya rencana pembangunan Kawasan Industri Tanggamus (KIT), namun realisasi dan perkembangannya belum sesuai yang diharapkan	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
8. Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti: longsor, gempa bumi, tsunami; banjir, dan kebakaran	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
9. Belum terintegrasinya kebijakan dan implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanggamus untuk lebih berdaya saing di tingkat regional maupun nasional	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan
10. Lemahnya SDM Aparatur Pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan pekon yang akan menjadi sentral pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Tanggamus	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
11. Rencana pembangunan Kawasan Industri Pertahanan di Kabupaten Tanggamus oleh Kementerian Pertahanan.	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
12. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023	
A. Pilar Sosial	
a) Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi;	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
b) Masih sedikitnya tenaga medis (dokter) yang tersedia Puskesmas;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
c) Rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan dasar masyarakat;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
d) Masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki akreditasi utama, hanya 2 dari 24 Puskesmas;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
e) Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD dan SMP masih sangat rendah;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
f) Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
g) Pada tahun 2021 masih terdapat 6 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
B. Pilar Ekonomi	
a) Keterbatasan infrastruktur;	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
b) Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah;	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
c) Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga;	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
d) Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas
e) Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan
f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata;	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan
g) Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan
C. Pilar Lingkungan	
a) Potensi bencana yang cukup besar, seperti longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran;	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
b) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus.	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Sumber : Hasil analisis, 2021

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem pembangunan yang lebih luas, sehingga dalam implementasinya pembangunan satu daerah tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah lain disekitarnya. Keterkaitan antar daerah terjadi hampir dalam seluruh aspek pembangunan, baik itu dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pelayanan publik. Pada wilayah-wilayah perbatasan, sering kali terjadi persoalan yang penanganannya



perlu melibatkan beberapa Kabupaten/Kota seperti persoalan banjir, persampahan, dan transportasi. Sebagai implikasinya maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Kerjasama tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas, tetapi juga penting untuk membangun simbiosis mutualisme dalam optimalisasi pembangunan daerah.

BAB V

VISI, MISI

TUJUAN DAN SASARAN

• VISI •

Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera

• MISI •

- 1**



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas
- 2**



Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing
- 3**



Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika
- 4**



Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 5**



Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata
- 6**



Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

5.1. VISI

- 1) Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
- 2) Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
“Rakyat Lampung Berjaya” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya saing, Sejahtera)
- 3) Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025
“Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”

4) Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

“Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”

Visi RPJMD Kabupaten Tanggamus merupakan kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023.

Visi ini memuat lima kata kunci yaitu tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Visi ini merupakan cita-cita dan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023.

Masyarakat yang **tangguh** adalah masyarakat yang kuat, andal, dan pantang menyerah. Tangguh memberikan motivasi dalam melaksanakan hal-hal yang besar untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik.

Masyarakat yang **agamis** adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran beragama sehingga tingkat ketaatan pada ajaran agama makin baik serta memiliki rasa toleransi antar umat beragama.

Mandiri memiliki arti bahwa Kabupaten Tanggamus harus mampu menjalankan pembangunan daerah secara mandiri yang ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki serta pendapatan daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah.

Unggul mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih ulet daripada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun regional. Keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, sains, dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum).

Masyarakat yang **sejahtera** adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Tabel V.1 Penyusunan Penjelasan Visi

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera	Tangguh	Masyarakat yang kuat, handal, dan pantang menyerah. Tangguh memberikan motivasi dalam melaksanakan hal-hal yang besar untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik.
	Agamis	Kondisi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang memiliki karakter nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
	Unggul	Kondisi Kabupaten Tanggamus yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif dan masyarakat yang memiliki kemampuan daya saing dalam konteks sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.
	Sejahtera	Kondisi Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Sumber : Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

5.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2018-2023, yaitu:

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas

Misi ini adalah upaya untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

Gambar V.1 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing

Misi ini adalah upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Gambar V.2 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

3) Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesenjangan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk mewujudkan pekon yang tangguh sehingga dapat menjadi basis pembangunan sosial dan ekonomi berbasis kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, kemitraan, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam suasana yang harmonis, religius, aman, tertib dan tentram.

Gambar V.3 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

4) Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, menjamin ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian dan perikanan melalui dukungan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gambar V.4 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

5) Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah yang berkualitas guna memperlancar mobilitas dan percepatan pembangunan yang merata. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

Gambar V.5 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

6) Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan Sektor Pariwisata yang dapat menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, kebhinekaan budaya, dan apresiasi karya seni masyarakat.

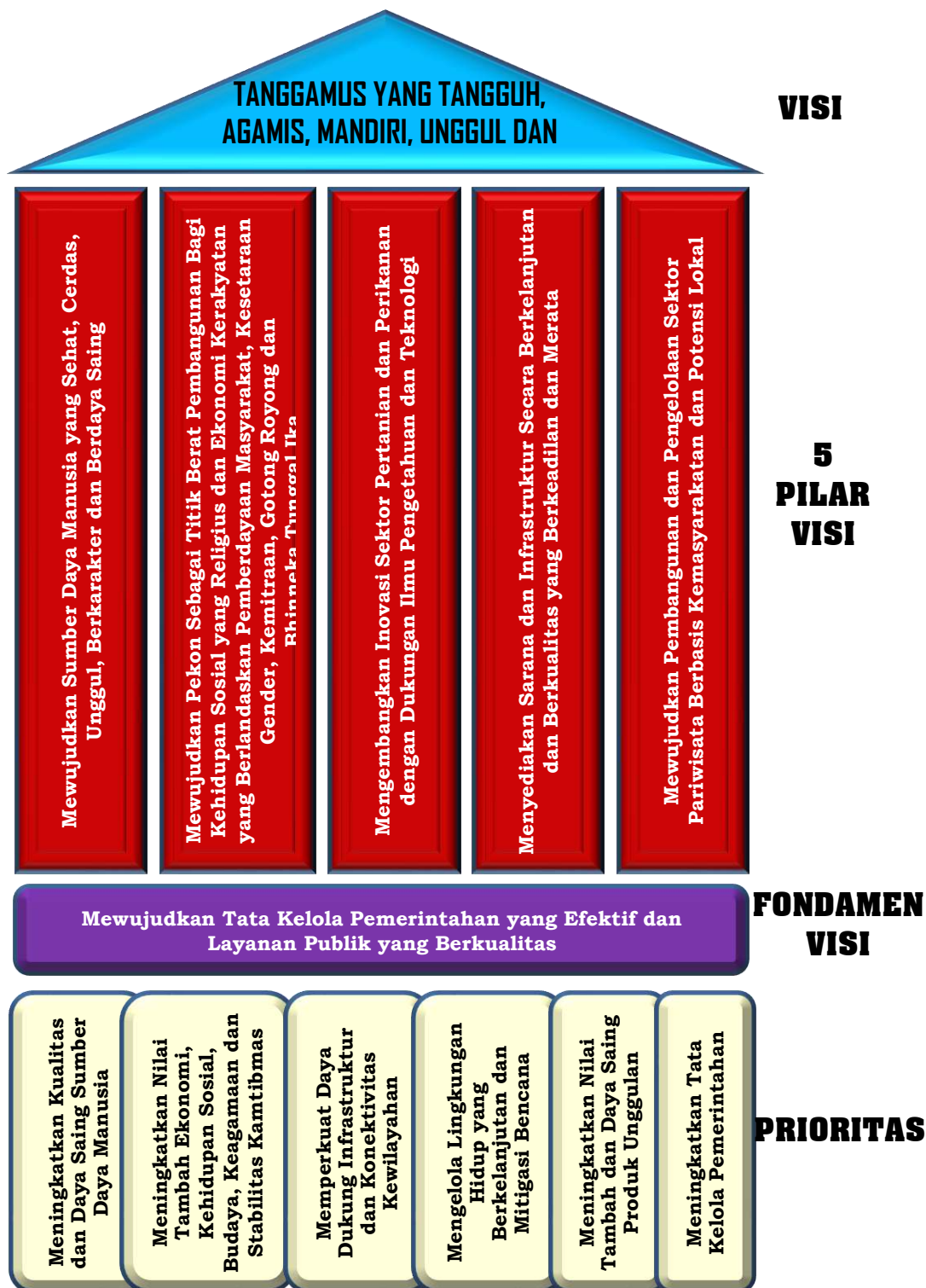
Gambar V.6 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

Dari uraian dan *logical frame* (kerangka pikir) visi dan misi maka secara visual digambarkan Bangun Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

Gambar V.7 Bangun Visi, Misi, dan Prioritas



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

Sebagai penggerak utama (*prime mover*) pelaksanaan misi yaitu Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan untuk menjalankan hal tersebut terdapat enam prioritas pembangunan yang menjadi *concern* Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan misi sehingga mampu mencapai visi yang telah ditetapkan, keenam prioritas pembangunan tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- 4) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
- 5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan; dan
- 6) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Tabel V.2 Interkoneksi Visi, Misi dengan Isu-Isu Strategis Daerah

Isu Strategis	VISI “Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”
1. Munculnya pandemi <i>Covid-19</i> sejak bulan Maret 2020 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi <i>Covid-19</i> juga telah mengubah semua prioritas pembangunan yang mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan <i>refocussing anggaran</i>;	MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing MISI 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesenjangan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi yaitu 11,68 persen, meskipun berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung 12,76 persen tapi masih di atas rata-rata nasional 9,78 persen	MISI 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesenjangan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika MISI 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Secara geografis Kabupaten Tanggamus berada di Wilayah Bagian Barat Provinsi Lampung yang dalam strategi kluster pembangunan regional diproyeksikan sebagai wilayah yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata, namun dalam implementasinya antara Pemkab dan Pemprov belum terjadi koordinasi dan sinergisitas yang terpadu	MISI 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata

Isu Strategis	VISI “Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”
4. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dalam kondisi baik hanya 35,01 persen sehingga menghambat arus dan mobilisasi orang dan barang sehingga memperlambat percepatan pembangunan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dan desa	MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata
5. Tingginya persentase kerusakan prasarana pendidikan dasar yang akan berakibat pada keterbatasan daya tampung dan berkurangnya kualitas proses pembelajaran	MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing
6. Rendahnya rasio ketersediaan prasarana kesehatan dasar masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu < 1) per satuan penduduk	MISI 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing
7. Masih terdapat 6 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor: infrastruktur, ekonomi, dan sosial	MISI 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesenjangan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata
8. Kabupaten Tanggamus masuk dalam lima daerah di Provinsi Lampung yang masuk dalam Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Industri (WPPI) sebagai disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan masuknya rencana pembangunan Kawasan Industri Tanggamus (KIT), namun realisasi dan perkembangannya belum sesuai yang diharapkan	MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata
9. Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti: longsor, gempa bumi, tsunami; banjir, dan kebakaran	MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata



Isu Strategis	VISI “Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”
10. Belum terintegrasinya kebijakan dan implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanggamus untuk lebih berdaya saing di tingkat regional maupun nasional	MISI 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika MISI 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi MISI 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal
11. Lemahnya SDM Aparatur Pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan pekon yang akan menjadi sentral pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Tanggamus	MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas MISI 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika
12. Kabupaten Tanggamus sebagai wilayah pertahanan strategis nasional	MISI 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata

Sumber : Analisis data diolah, 2021

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penerapan visi dan misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, yakni adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi *Covid-19* ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Covid-19*, Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi *Covid-19*, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan penyesuaian target

indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis di Kabupaten Tanggamus, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian dari 9 (sembilan) tujuan dengan 16 (enam belas) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran berubah menjadi 8 (delapan) tujuan dengan 13 (tiga belas) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran.

Tujuan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka merespon perubahan keadaan terkini tersebut diatas yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 4) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas;
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender;
- 6) Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan;
- 7) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan;
- 8) Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal.

Perubahan yang terjadi terhadap tujuan dan sasaran tergambar pada Tabel V.3 sedangkan penetapan indikator dan target kinerja tujuan sebagaimana tercantum pada Tabel V.4

Tabel V.3 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	MISI	RPJMD AWAL										PERUBAHAN RPJMD				
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	
						2017	2018	2019	TAR GET	REALI SASI						
1	Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	T.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi IT.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja IT.3 Opini BPK Terhadap LKPD IT.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah S.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja IS.2 Opini BPK Terhadap LKPD IS.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC WTP 73.47	CC WTP 77.14	B WTP 75.00	B WTP 85.05	B WTP 70.93	T.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah S.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja IS.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah IS.3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat yang menggambarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja; dan 5. Capaian Kinerja. BMD = B1+B2+B3+B4+B5+B6 IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah D.1 = Buremi Revisi Anggaran D.2 = Pengukuran Anggaran Berbasis Data APBD D.3 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D.4 = Perencanaan Anggaran D.5 = Efisiensi Keuangan Daerah D.6 = Opini BPK Total Nilai Penunjang Per-Umur $SNM = \frac{\sum \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Tertimbang}}$ $SNM = SNM \text{ (Unit Pelanggaran) } \times 25$ SNM = Survey Kepuasan Masyarakat NN = Indeks Kepuasan Masyarakat	
2	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	T.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.5 Indeks Pembangunan Manusia	S.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan S.4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.4 Angka Harapan Hidup IS.5 Indeks Pendidikan IS.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	67.80 0.54 6.88	68.04 0.56 6.96	68.40 0.59 7.21	70.48 0.59 7.00	68.56 0.67 7.22	T.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.2 Indeks Pembangunan Manusia	S.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan S.4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.4 Angka Harapan Hidup IS.5 Angka Harapan Lama Sekolah IS.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup dengan menggunakan paket program Mortpak dengan data estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan $HLIS = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ HLIS = Harapan Lama Sekolah pada Umur i di Tahun t Ei = Jumlah Pendidikan Usia i yang Bersekolah pada Tahun t Pi = Jumlah Pendidikan Usia i pada Tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor Koreksi Pendidikan $RLS = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Jumlah Sekolah pada Tahun } i}{\text{Jumlah Sekolah pada Tahun } t}$ RLS = Rata-Rata Lama Sekolah RLS Sekolah = Jumlah Pendidikan i di Tahun t n = Jumlah Pendidikan (i = 1, 2, 3, ..., n)	

NO	MISI	RPJMD AWAL									PERUBAHAN RPJMD				
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
						2017	2018	2019	TAR GET	REALI SASI					
3	Misi 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Religius	IT.6 Persentase Angka Kemiskinan	S.5 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.7 Persentase Angka Kemiskinan	13.69	13.14	12.05	10.52	11.68	T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IT.3 Angka Kemiskinan	S.5 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	IS. 7 Angka Kemiskinan	$P_g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{x_i - y_i}{x} \right]^2$ P_g = Angka Kemiskinan n = 0 x = Garis Kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk yang Berada Di bawah Garis Kemiskinan ($y_1, y_2, \dots, y_n$) q = Banyaknya Penduduk yang Berada Di bawah Garis Kemiskinan n = Jumlah Penduduk
			IT.7 Tingkat Pengangguran Terbuka		IS.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	5.08	2.21	2.96	2.22	2.96				IS. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$ TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
			IT.8 Indeks Rasa Aman	S.6 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius	IS.9 Indeks Rasa Aman	0.45	0.49	0.75	0.50	0.91			S.6 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius	IS. 9 Indeks Rasa Aman	Tingkat rasa aman masyarakat di lingkungan tempat tinggal
					IS. 10 Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	13.65	13.50	18.60	12.84	13.26				IS. 10 Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$PMKS = \frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ PMKS = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
				S.7 Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	IS. 12 Indeks Gini	0.297	0.378	0.359	0.237	0.349		IT.4 Indeks Gini	S.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS. 11 Indeks Gini	$G_i = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i+1})$ G_i = Gini Ratio P_i = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk Pada Kelas ke-i Q_i = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i
		T.4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	IT.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi	S.8 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	IS. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.19	5.02	5.03	5.25	-1.77	T.4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	IT.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	S.8 Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	IS. 12 Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	$PDRB \text{ Perkapita Tahun } n = \frac{PDRB \text{ Perkapita Tahun } n}{PDRB \text{ Perkapita Tahun } n-1} \times 100\%$ $PDRB \text{ Perkapita}$ = Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita
					IS. 14 Pertumbuhan Sektor Industri Olahan Dalam PDRB	2.41	4.92	2.99	7.03	-4.23					
					IS. 15 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB	20.08	8.20	11.59	7.52	3.93					
				S.9 Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	IS. 16 Nilai Investasi PMA dan PMDN	8.40 T	8.50 T	9.16 T	9.50 T	9.561 T					

NO	MISI	RPJMD AWAL										PERUBAHAN RPJMD				
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	
						2017	2018	2019	TARGET	REALISASI						
		T.5 Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Anak	IT. 10 Indeks Desa Membangun (IDM)	S.10 Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IS. 17 Indeks Desa Membangun (IDM)	0.5618	0.6900	0.6270	0.7100	0.6600	T.5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	IT.6 Indeks Desa Membangun	S.9 Meningkatnya Pekon Maju	IS. 13 Persentase Pekon Maju	$PPM = \frac{\text{Jumlah Pekon Maju Berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah Seluruh Pekon}} \times 100\%$ $PPM = \text{Persentase Pekon Maju}$	
			IT. 11 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	S.11 Meningkatnya Pemberdayaan n Gender dan Perlindungan Anak	IS. 18 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.17	90.25	91.14	90.45	91.13		IT.7 Indeks Pembangunan Gender	S.10 Meningkatnya Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS. 14 Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{1}{3} (\text{IPG} + \text{IDM} + \text{Lin} + \text{Dok})$ $IDG = \text{Indeks Pemberdayaan Gender}$ $\text{IPG} = \text{Indeks Keterwakilan di Perwakilan}$ $\text{IDM} = \text{Indeks Pengambilan Keputusan}$ $\text{Lin Dok} = \text{Indeks Distribusi Pendapatan}$	
			IT. 12 Level Kabupaten Layak Anak		IS. 19 Level Kabupaten Layak Anak	0.00	0.00	72.90	77.00	72.90				IS. 15 Nilai Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak yang meliputi : 1. Penguatan Kelembagaan; dan 2. Klaster Hak Asuh (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus)	
4	Misi 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT. 13 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	S.12 Meningkatnya Daya Saing dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan	IS. 20 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	3.21	2.37	2.97	3.50	-2.18	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.8 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	S.11 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS. 16 Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_1}{I_2} \times 100\%$ $NTP = \text{Nilai Tukar Petani}$ $I_1 = \text{Indeks Harga yang Diterima Petani}$ $I_2 = \text{Indeks Harga yang Dibayar Petani}$	
				S.13 Meningkatnya Ketahanan Pangan	IS. 21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73.32	74.11	83.85	76.00	73.65				IS. 17 Skor Pola Pangan Harapan	$PPH = \frac{\text{Jumlah Proporsi Energi dari Kelompok Pangan}}{\text{Skor Pola Pangan Harapan}}$ $PPH = \text{Skor Pola Pangan Harapan}$	

NO	MISI	RPJMD AWAL										PERUBAHAN RPJMD									
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL						
						2017	2018	2019	TAR GET	REALI SASI											
5	Misi 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	T.7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah	IT. 14 Persentase Pekon yang Terhubung dengan Pusat Ekonomi Dengan Jalan Dalam Kondisi Baik	S.14 Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	IS. 22 Persentase Pekon yang Terhubung dengan Pusat Ekonomi Dengan Jalan Dalam Kondisi Baik	60.00	65.00	70.00	75.00	80.93	T.7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	IT.9 Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	S.12 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	IS. 18 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	$KJ = \frac{\text{Jumlah Panjang Jalan (Kondisi Baik + Sedang)}}{\text{Total Panjang Jaringan Jalan}} \times 100 \%$ KJ = Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten						
			IT. 15 Ratio Elektrifikasi	S.15 Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	IS. 23 Luas Lahan yang Teraliri Irigasi	8.289,67	8.289,67	8.290	8.482,47	14.928			S.13 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah	IS. 19 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	$I_{aw} = (0,50)X + (0,50)Y$ $X = 1 \times f$ $Y = 0,12a + 0,20b + 0,07c + 0,06d + 0,55e$ I _{aw} = Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah X = Capaian Infrastruktur Dasar Pengelolaan Sumber Daya Air Y = Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya a = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak" b = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak" c = Capaian Kinerja "Jumlah Kawasan Kumuh" d = Capaian Kinerja "Rumah Tidak Layak Huni" e = Capaian Kinerja "Kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang" f = Capaian Kinerja "Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2"						
					IS. 24 Ratio Elektrifikasi	79.40	89.60	96.75	96.10	96.98											
					IS. 25 Persentase Pekon yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi yang Baik	65.19	75.28	90.63	80.00	87.95											
					IS. 26 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	60.00	63.00	69.98	67.00	49.00											
			IS. 27 Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Permukiman yang Sehat (Sanitasi Layak)	58.00	60.00	56.85	64.00	59.52													
			IS. 28 Rasio Rumah Layak Huni	52.00	54.00	54.72	62.00	87.04					S.14 Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	IS. 20 Rasio Elektrifikasi	$RE = \frac{a+b}{c} \times 100 \%$ RE = Rasio Elektrifikasi a = Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Berlistrik dari PLN b = Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Berlistrik dari Non PLN c = Jumlah Total Rumah Tangga						

NO	MISI	RPJMD AWAL										PERUBAHAN RPJMD				
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	
						2017	2018	2019	TAR GET	REALI SASI						
													IT. 10 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	S.15 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	IS. 21 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$E_{\text{Ecek}} = \frac{E_{\text{tahun } n} - E_{\text{tahun } n-1}}{E_{\text{tahun } n-1}} \times 100 \%$ $E = A \times EF$ $E_{\text{cek}} = \text{Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca}$ $E = \text{Jumlah Emisi}$ $A = \text{Data Aktivitas (Jumlah Bahan-Bahan Penghasil Emisi)}$ $EF = \text{Faktor Emisi}$
		T.8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	IT. 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.16 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IS. 29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.67	55.27	62.50	66.50	63.76		IT. 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.16 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IS. 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (50\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times INTL)$ $IKLH = \text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup}$ $IKA = \text{Indeks Kualitas Air}$ $IKU = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $INTL = \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}$	
				S.17 Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana	IS. 30 Persentase Resiko Bencana pada Kawasan Rawan Bencana (KRB)	48.00	50.00	21.78	60.00	42.34		IT. 12 Indeks Risiko Bencana	S.17 Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	IS. 23 Indeks Risiko Bencana	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ $Risiko (risk) = \text{Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi.}$ $Bahaya/ Ancaman (hazard) = \text{Suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.}$ $Kerentanan = \text{Suatu kondisi yang (vulnerability) ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazard).}$	

NO	MISI	RPJMD AWAL										PERUBAHAN RPJMD									
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL						
						2017	2018	2019	TARGET	REALISASI											
6	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	T.9 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT. 17 Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata Dalam PDRB	S.18 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS. 31 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	8.00	10.00	23.50	18.00	-83.00	T.8 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT. 13 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	S.18 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS. 24 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$PPKW = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1} \times 100 \%$ PPKW = Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik						

Sumber : Analisis data diolah, 2021

Tabel V.4 Indikator Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN															
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	T.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Penilaian	CC	CC	C	B	CC	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	T.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.2 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	65.50	65.67	66.37	66.37	67.06	66.42	67.61	68.16	68.72	66.48	66.57	67.85	
3	Misi 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IT.3 Angka Kemiskinan	Persen	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	9.91	9.33	8.79	11.60	11.00	10.80	
			IT.4 Indeks Gini	Angka	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.220	0.205	0.190	0.292	0.264	0.263	
		T.4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	IT.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.02	5.02	5.20	5.03	5.25	-1.77	5.28	5.30	5.32	2.75	3.50	4.05	
			T.5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	IT.6 Indeks Desa Membangun	Skor	0.6900	0.6900	0.7000	0.6108	0.7100	0.6583	0.7200	0.7300	0.7400	0.6700	0.6800	0.6900
				IT.7 Indeks Pembangunan Gender	Angka	90.25	90.25	90.35	91.14	90.45	91.13	90.55	90.65	90.75	91.14	91.15	91.16
4	Misi 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.8 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	Persen	3.40	2.37	3.48	2.97	3.50	-2.18	3.52	3.55	3.58	1.50	1.75	2.00	
5	Misi 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	T.7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	IT.9 Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	Persen	-	63.30	-	63.05	-	68.32	-	-	-	68.37	69.67	71.67	
			IT.10 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00	
			IT.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	55.27	55.27	66.00	62.50	66.50	63.76	67.00	67.50	68.00	64.27	64.92	65.56	
			IT.12 Indeks Risiko Bencana	Angka	-	135.86	-	132.25	-	129.73	-	-	-	128.00	125.00	120.00	



NO	MISI	TUJUAN														
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023
6	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	T.8 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT.13 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	Persen	10.60	10.60	11.00	7.78	12.00	-4.31	13.00	14.00	15.00	1.25	1.50	2.00

Sumber : Analisis data diolah, 2021

Mengacu kepada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) *Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, dengan sasaran :*
 - a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- 2) *Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, dengan sasaran :*
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan;
 - b) Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
- 3) *Misi 3 : Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan sasaran :*
 - a) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
 - b) Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius;
 - c) Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
 - d) Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk;
 - e) Meningkatnya Pekon Maju;
 - f) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) *Misi 4 : Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan sasaran :*

- a) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan.
- 5) *Misi 5 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata, dengan sasaran :*
- a) Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten;
 - b) Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah;
 - c) Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi;
 - d) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca;
 - e) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - f) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.
- 6) *Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal, dengan sasaran :*
- a) Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal.

Target indikator kinerja sasaran Tahun 2021-2023 juga mengalami penyesuaian, penyesuaian target sasaran RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro Nasional, Provinsi Lampung dan kemampuan Kabupaten Tanggamus dengan adanya pandemi *Covid-19*. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Kabupaten Tanggamus berdasarkan publikasi BPS. Sedangkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel V.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

Visi : Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR	
								2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
								Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	T.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.1 Indeks Reformasi Birokrasi	B	S.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian	CC	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	
						IS.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	-	-	72.9389	-	67.8997	-	77.2524	-	-	-	80.0000	82.0000	85.0000	85.0000	
					S.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IS.3 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	73.47	77.14	77.14	81.00	75.00	85.05	70.93	89.30	93.77	95.64	72.00	85.00	87.00	87.00	
2	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	T.2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.2 Indeks Pembangunan Manusia	67.85	S.3 Meningkatkan Derajat Kesehatan	IS.4 Angka Harapan Hidup	Tahun	67.80	67.85	68.04	69.10	68.40	70.48	68.56	71.89	73.33	74.80	68.60	68.65	68.70	68.70	
					S.4 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	IS.5 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.14	-	12.15	-	12.17	-	12.18	-	-	-	12.19	12.20	12.25	12.25	
					IS.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.88	6.90	6.96	6.95	7.21	7.00	7.22	7.10	7.20	7.30	7.23	7.34	7.35	7.35		

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR
								2017	2018		2019		2020		Terget Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan			
								Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
3	Misi 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	T.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	IT.3 Angka Kemiskinan	10.80	S.5 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	IS.7 Angka Kemiskinan	Persen	13.69	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	9.91	9.33	8.79	11.60	11.00	10.80	10.80
						IS.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.08	2.23	2.21	2.22	2.96	2.22	2.96	2.21	2.20	2.00	2.95	3.75	3.00	3.00
					S.6 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius	IS.9 Indeks Rasa Aman	Angka	0.45	0.49	0.49	0.49	0.75	0.50	0.91	0.51	0.52	0.53	0.92	0.93	0.94	0.94
						IS.10 Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	13.65	13.50	13.50	13.29	13.29	12.84	13.26	12.67	12.34	12.31	13.40	13.34	13.10	13.10
				IT.4 Indeks Gini	0.290	S.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.11 Indeks Gini	Angka	0.395	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.220	0.205	0.190	0.292	0.264	0.263
		T.4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	IT.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.05	S.8 Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	IS.12 Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Persen	7.66	-	7.29	-	6.11	-	(6.95)	-	-	-	4.00	4.50	5.00	5.00

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR
								2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan			
								Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
		T.5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	IT.6 Indeks Desa Membangun	0.6900	S.9 Meningkatnya Pekon Maju	IS. 13 Persentase Pekon Maju	Persen	2.01	-	2.34	-	8.03	-	13.04	-	-	-	17.06	18.06	19.06	19.06
			IT.7 Indeks Pembangunan an Gender	91.16	S.10 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS. 14 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69.77	-	69.90	-	56.97	-	56.80	-	-	-	56.85	67.00	67.50	67.50
						IS. 15 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	-	-	-	75.00	-	77.00	-	79.00	81.00	83.00	565.00	567.00	570.00	570.00
4	Misi 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.8 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	2.00	S.11 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS. 16 Nilai Tukar Petani	Angka	140.72	-	147.14	-	140.10	-	71.09	-	-	-	88.03	91.34	97.06	97.06
						IS. 17 Skor Pola Pangan Harapan	Angka	73.32	74.11	74.11	75.00	83.85	76.00	73.65	77.00	78.00	79.00	83.40	83.55	83.60	83.60
5	Misi 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	T.7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	IT.9 Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	71.67	S.12 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	IS. 18 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	45.17	-	46.65	-	37.64	-	51.88	-	-	-	51.10	51.50	52.00	52.00
						S.13 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	52.00	-	53.65	-	54.77	-	56.10	-	-	-	57.00	60.00	65.00	65.00
						S.14 Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	Persen	79.40	89.60	89.60	95.30	96.75	96.10	96.98	97.00	98.00	99.00	97.00	97.50	98.00	98.00

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR
								2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan			
								Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
			IT. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.00	S.15 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	IS. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00	7.00
			IT. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.56	S.16 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IS. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	52.67	55.27	55.27	66.00	62.50	66.50	63.76	67.00	67.50	68.00	64.27	64.92	65.56	65.56
			IT. Indeks Risiko Bencana	120.00	S.17 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS. Indeks Risiko Bencana	Angka	141.00	-	135.86	-	132.25	-	129.73	-	-	-	128.00	125.00	120.00	120.00
6	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	T.8 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT. Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	2.00	S.18 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00	10.00	10.00	14.00	23.50	18.00	(83.00)	22.00	24.00	28.00	20.00	25.00	30.00	30.00

Sumber : Analisis data diolah, 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Tanggamus, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Tanggamus untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2018-2023 sebagai periodisasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 juga harus selaras dengan periodisasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat dengan arah kebijakan yaitu “Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik”.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah internal atau eksternal. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT digambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar VI.1 Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal dan Internal Kabupaten Tanggamus

	KEUNTUNGAN	KEKURANGAN
INTERNAL	STRENGTH - Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, kesejahteraan masyarakat, sumberdaya manusia yang unggul dan agamis serta infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan; - Kabupaten Tanggamus sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional sebagai pengembangan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa; - Memiliki jumlah aparatur dan organisasi perangkat daerah yang dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.	WEAKNESSES - Tata kelola pemerintahan yang belum efektif; - Aset daerah belum terkelola dengan baik; - Belum optimalnya sektor usaha/perekonomian yang dapat menekan angka kemiskinan dan kesenjangan; - Belum mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat; - Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan); - Masih terbatasnya sarpras dan Infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.
EKSTERNAL	OPPORTUNITIES - Peningkatan konektivitas daerah dengan adanya jalur Sumatera wilayah Barat; - Adanya kerjasama dan bantuan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian; - Potensi kekayaan alam pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat setempat; - Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang belum termanfaatkan secara optimal.	THREATS - Pengaruh pandemi <i>Covid-19</i> bukan hanya pada sektor kesehatan tapi berpengaruh juga pada kehidupan sosial dan ekonomi; - Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras ilegal; - Ancaman bahaya laten radikalisme dan terorisme; - Pengaruh negatif dari media sosial yang kurang terkontrol; - Degradasi lingkungan dan <i>climate change</i>; - Bonus Demografi (<i>middle income trap</i>).

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi-strategi yang terbagi ke dalam empat kuadran sebagai berikut :

Tabel VI.1 Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Strategi S-O	Strategi W-O
• Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Unggulan dan Pengembangan Investasi.	• Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. • Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan. • Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar. • Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi Pada Potensi Daerah serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan. • Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Kestabilan dan Kesiambungan Penyediaan Pangan. • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan. • Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni dalam rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata.
Strategi S-T	Strategi W-T
• Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah.	• Peningkatan Bantuan Sosial dan Daya Saing Ketenagakerjaan Dalam Bentuk Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintahan. • Pengurangan Kesenjangan yang Berorientasi Pada Pro-Equity dan Pro-Growth Melalui Penguatan Interkonektivitas Spasial. • Sinergisitas Percepatan Program Pengentasan Pekon Tertinggal dan Peningkatan Pekon Maju. • Pemberdayaan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan serta Penghapusan Tindak Kekerasan dan Eksploitasi Anak. • Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Penataan Kawasan serta Lingkungan Permukiman Sesuai RTRW. • Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan. • Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim. • Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. • Peningkatkan Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana.

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Tanggamus untuk periode pembangunan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) ST.1 Penguatan tata kelola keuangan, dan aset daerah serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 2) ST.2 Pengembangan sistem pemerintahan yang integratif melalui inovasi daerah dan reformasi birokrasi disemua level pemerintahan
- 3) ST.3 Pembangunan generasi yang handal melalui jaminan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar;
- 4) ST.4 Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada potensi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan;
- 5) ST.5 Peningkatan bantuan sosial dan daya saing ketenagakerjaan dalam bentuk kemitraan (*partnership*) dengan dunia usaha dan lembaga pemerintahan;
- 6) ST.6 Peningkatan kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga stabilitas sosial masyarakat yang religius dan politik daerah;
- 7) ST.7 Pengurangan kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity* dan *pro-growth* melalui penguatan interkonektivitas spasial;
- 8) ST.8 Percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif sektor unggulan dan pengembangan investasi;
- 9) ST.9 Sinergisitas percepatan program pengentasan pekon tertinggal dan peningkatan pekon maju;
- 10) ST.10 Pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan serta penghapusan tindak kekerasan dan eksploitasi anak;
- 11) ST.11 Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan serta peningkatan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan;
- 12) ST.12 Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan;
- 13) ST.13 Peningkatan infrastruktur dasar wilayah dan penataan kawasan serta lingkungan permukiman sesuai RTRW;

- 14) ST.14 Pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan;
- 15) ST.15 Pelestarian keanekaragaman hayati dan adaptasi perubahan iklim;
- 16) ST.16 Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 17) ST.17 Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- 18) ST.18 Peningkatan kualitas tata kelola pariwisata serta apresiasi dan kreativitas masyarakat terhadap nilai budaya dan seni dalam rangka menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata;

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Adapun hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi adalah sebagaimana tabel VI.2 berikut:

Tabel VI.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

VISI : Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
MISI 1 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas		
T.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	ST.1 Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
		S.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	ST.2 Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan
MISI 2 :	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing		
T.2	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.3 Meningkatkan Derajat Kesehatan	ST.3 Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar
		S.4 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	ST.4 Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi Pada Potensi Daerah serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan
MISI 3 :	Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika		
T.3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	S.5 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	ST.5 Peningkatan Bantuan Sosial dan Daya Saing Ketenagakerjaan Dalam Bentuk Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintahan
		S.6 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Harmonis, Tertib, Tenram, Aman dan Religius	ST.6 Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah
		S.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	ST.7 Pengurangan Kesenjangan yang Berorientasi Pada Pro-Equity dan Pro-Growth Melalui Penguatan Interkonektivitas Spasial



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
T.4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	S.8	Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	ST.8	Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Unggulan dan Pengembangan Investasi
T.5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	S.9	Meningkatnya Pekon Maju	ST.9	Sinergisitas Percepatan Program Pengentasan Pekon Tertinggal dan Peningkatan Pekon Maju
		S.10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ST.10	Pemberdayaan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan serta Penghapusan Tindak Kekerasan dan Eksploitasi Anak
MISI 4 : Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
T.6	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	S.11	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	ST.11	Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Kestabilan dan Kesenambungan Penyediaan Pangan
MISI 5 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata					
T.7	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	S.12	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	ST.12	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Penunjang Perekonomian Melalui Kemitraan (Partnership) Pembiayaan Pembangunan
		S.13	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah	ST.13	Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Penataan Kawasan serta Lingkungan Permukiman Sesuai RTRW
		S.14	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	ST.14	Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
		S.15	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	ST.15	Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim
		S.16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	ST.16	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		S.17	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	ST.17	Peningkatan Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana
MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal					
T.8	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	S.18	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	ST.18	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni Dalam Rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata

Sumber : Analisis data diolah, 2021

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama 5 tahun yang terhubung dengan arah kebijakan tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk rangkaian cerita yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Dalam penyusunan arah kebijakan perlu dipertimbangkan urgensi dari suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan delapan belas strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel VI.3 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Penataan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pengelolaan Aset Daerah				
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Menuju Tanggamus Emas			
	Percepatan Pemenuhan Akses Prasarana-Sarana Layanan Dasar Pendidikan Menuju Tanggamus Cerdas			
	Penyempurnaan Program Perlindungan Sosial, Peningkatan Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Pelayanan Dasar dan Pelatihan <i>Soft-Skill</i> Menuju Tenaga Kerja yang Berdaya Saing Tinggi			
	Pengurangan PMKS Melalui Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Sosial dan Pengembangan Forum Kerjasama Lintas Budaya, Agama dan Adat Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Agar Tidak Terjadi Konflik Sosial			
	Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru yang Berorientasi Pada Sinergisitas Kewilayahan			
	Pengembangan Produk Unggulan, Jiwa Kewirausahaan dan Sistem Pemasaran Terpadu Produk UMKM serta Promosi dan Kerjasama Investasi			
		Pengembangan Kawasan Perdesaan Melalui Konsep <i>Smart Pekon</i>		



ARAH KEBIJAKAN				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Bidang Sosial, Ekonomi dan Politik serta Penghapusan Kekerasan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang baik Jasmani maupun Rohani secara Optimal				
Penguatan Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Kebijakan yang Afirmatif Terhadap Penyediaan Bibit Unggul dan Pupuk, Kestabilan Harga, Sistem Pemasaran dan Penguatan Daya Saing Produk Unggulan serta Menjaga Kemandirian Pangan dengan Swasembada Komoditas Pangan				
Mengurangi <i>Disparitas</i> Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh				
	Pemenuhan Perumahan/Pemukiman Rakyat yang Memiliki Akses Sanitasi dan Air Bersih serta Tersedianya Fasilitas Ruang Publik			
	Memperkuat Koordinasi Antar Struktur Kelembagaan dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan			
	Penguatan Komitmen dan Implementasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Aktivitas Sehari-hari			
	Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan Kritis serta Gerakan Merdeka dari Sampah			
	Peningkatan Dukungan Pemerintah Dalam Pencegahan/Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana			
		Penguatan <i>Regional Branding</i> " <i>Majestic Tanggamus</i> ", " <i>Pesona Wisata Ratu</i> " dan Peningkatan Event Pariwisata (<i>Tanggamus Festival</i>) serta Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata dalam bentuk Penyusunan <i>Site Plan</i> dan <i>Detail Engineering Design</i> Kawasan Destinasi Wisata Unggulan.		

Sumber : Analisis data diolah, 2021

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai bentuk untuk mewujudkan perencanaan yang implementatif, sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Baik strategi maupun arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang terangkum dalam kebijakan umum daerah.

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah.

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018-2020 merupakan program pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selanjutnya mulai tahun 2021 program-program tersebut tidak berlaku lagi.

Pada tahun 2021-2023, program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan program pembangunan yang berlaku secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

HALAMAN VI - 14

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	10,692,976,813.00	WTP	11,720,513,619.00	WTP	12,084,406,686.00	WTP	34,497,897,118.00	Inspektorat Daerah	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	76	387,996,800.00	77	495,655,000.00	78	1,343,606,600.00	78	2,227,258,400.00	Inspektorat Daerah		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Matutias Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	1,328,487,377.90	45	2,186,620,000.00	48	495,655,000.00	48	4,010,762,377.90	Inspektorat Daerah		
4	1	4.0.1.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan gaji dan tunjangan	45 Orang	45	19,411,254,060.11	45	18,184,171,344.00	45	19,414,688,844.32	45	18,429,674,318.00	45	18,877,231,685.64	45	17,898,178,818.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	135	54,512,024,480.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	46 Orang	46	3,861,896,925.00	46	3,649,465,170.00	46	4,291,890,572.20	46	3,887,394,558.00	46	3,976,398,365.12	46	3,633,315,772.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	138	11,170,175,500.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100	13,801,249,842.00	100	12,260,674,379.00	100	14,229,190,460.00	100	12,935,897,758.00	100	17,017,793,438.00	100	16,302,045,937.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	41,498,618,074.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	567,400,000.00	100	532,048,000.00	100	3,806,150,000.00	100	3,467,362,000.00	100	1,043,617,600.00	100	958,350,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	4,957,760,900.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100	565,650,000.00	100	534,975,000.00	100	946,250,000.00	100	895,575,000.00	100	654,250,000.00	100	641,290,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	2,071,840,000.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100	1,871,230,000.00	100	1,802,424,254.00	100	2,506,678,000.00	100	2,472,646,968.00	100	1,652,700,500.00	100	1,648,676,178.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	5,923,747,400.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	100 %	100	71,008,100.00	100	62,446,200.00	100	30,130,000.00	100	28,025,000.00	100	35,010,300.00	100	34,395,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	124,866,400.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0 %	-	0.00	-	0.00	100	30,000,000.00	100	29,935,000.00	100	43,010,000.00	100	30,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	60,185,000.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100 %	100	21,153,675,000.00	100	20,383,063,273.00	100	20,273,161,000.00	100	19,996,050,424.00	100	26,318,034,900.00	100	25,324,170,798.05	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,703,284,495.05	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.16	Program peningkatan pelayanan kedisman kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedisman kepala daerah/wakil kepala daerah	100 %	100	183,670,000.00	100	183,427,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	183,427,500.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.0.1.28	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100 %	100	405,520,000.00	100	394,782,354.00	100	527,000,000.00	100	511,383,500.00	100	408,874,100.00	100	391,335,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	1,297,500,854.00	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	1	4.0.1	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	-	0.00	100	310,000,000.00	100	300,685,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	300,685,000.00	Sekretariat DPRD	
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	83,618,228,527.00	100	94,795,898,626.00	100	89,546,850,954.00	100	267,960,978,107.00	Sekretariat DPRD			
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,392,664,400.00	100	11,617,952,500.00	100	10,977,009,988.00	100	35,987,626,888.00	Sekretariat DPRD			
4	01	4.0.1	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	85	Orang	150	9,802,824,947.38	85	9,042,879,771.00	160	10,532,248,875.08	85	9,844,291,147.00	163	10,709,633,540.71	84	10,130,267,109.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	84	29,017,438,027.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan Baik	100	%	100	30,518,514,000.00	92	28,046,607,499.00	100	28,537,224,721.00	94	26,693,787,449.30	100	21,164,112,044.80	89	18,748,204,032.50	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,488,598,980.80	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	03	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase peningkatan disiplin aparat	100	%	100	58,500,000.00	97	56,784,000.00	100	501,500,000.00	100	499,800,000.00	100	388,425,000.00	98	381,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	937,784,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	-	0.00	-	0.00	100	429,559,668.00	100	428,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	428,100,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
4	01	4.0.1	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	100	%	100	467,565,000.00	69	324,726,093.00	100	339,521,100.00	93	316,718,400.00	100	477,303,725.00	80	381,383,375.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,022,827,868.00	Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	07	Program Pengelolaan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PEMDA	Persentase Pengelolaan, Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PEMDA	100	%	100	7,392,220,000.00	92	6,794,121,633.00	100	9,768,543,000.00	66	6,474,859,428.50	100	4,757,773,300.00	100	4,737,427,591.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,006,408,652.50	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Terhadap Pelayanan PEMDA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Terhadap Pelayanan PEMDA	100	%	100	945,000.00	-	0.00	100	38,059,096.00	18	6,820,000.00	100	23,326,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,820,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	16	Program peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%	100	1,736,717,600.00	94	1,635,573,500.00	100	1,040,641,560.00	92	958,550,760.00	100	996,327,900.00	88	876,876,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,471,000,860.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100	%	100	1,451,270,000.00	69	998,592,666.00	100	1,065,569,000.00	92	978,344,099.00	100	620,319,100.00	88	546,277,373.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,523,214,138.00	Bagian Hukum, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4 01 4.0 1 29	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100 % 100		548,308,600.00	96	528,998,196.00	100	370,376,512.00	100	368,782,012.00	100	83,121,671.00	100	83,031,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	980,811,808.00	Bagian Perekonomi an Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 30	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas Aparatur	100 % 100		363,000,000.00	75	270,819,886.00	100	330,584,000.00	83	274,071,950.00	100	98,663,600.00	95	93,786,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	638,678,036.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 32	Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100 % 100		1,551,000,000.00	84	1,309,393,070.00	100	2,347,825,000.00	99	2,329,899,008.00	100	624,087,436.00	22	136,312,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,775,604,078.00	Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 34	Program Pemantauan Sistem Distribusi Program Nasional	Presentase Pemantauan Sistem Distribusi Program Nasional	100 % 100		132,123,000.00	93	122,295,750.00	100	115,325,000.00	100	114,782,500.00	100	122,778,900.00	89	109,546,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	346,624,950.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 35	Program Sistem Operasi/Perangkat Lunak Infrastruktur	Presentase Sistem Operasi/Perangkat Lunak Infrastruktur	100 % 100		842,349,000.00	95	803,388,000.00	100	823,923,400.00	98	803,957,900.00	100	665,009,500.00	100	663,689,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,271,034,900.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 41	Program Perencanaan Penyusunan Indikator Pembangunan	Presentase Perencanaan Penyusunan Indikator Pembangunan	100 % 100		75,000,000.00	100	25,232,500.00	100	45,750,000.00	96	44,064,500.00	100	21,829,900.00	21	4,664,150.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,961,150.00	Bagian Perekonomi an Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 46	Program Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	Presentase Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	100 % 100		15,000,000.00	100	14,995,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,995,000.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 45	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon	100 % -		0.00	-	0.00	100	635,341,000.00	99	629,153,600.00	100	81,802,000.00	73	59,362,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	688,515,600.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 46	Program Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	Presentase Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	100 % -		0.00	-	0.00	100	9,685,000.00	100	9,665,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,665,000.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 47	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Presentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100 % 100		166,000,000.00	98	162,107,000.00	100	129,319,500.00	99	128,447,000.00	100	306,050,000.00	92	281,620,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	572,174,500.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 48	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Publik	Presentase Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Publik	100 % 100		55,000,000.00	91	50,264,500.00	100	145,600,000.00	53	77,752,750.00	100	123,799,150.00	84	103,527,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	231,545,200.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 49	Program Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi Keprotokolan	Presentase Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi Keprotokolan	100 % 100		449,840,000.00	78	351,100,000.00	100	313,336,750.00	67	208,389,750.00	100	307,480,200.00	94	289,277,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	848,767,200.00	Bagian Protokol Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 52	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Presentase Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100 % 100		756,195,000.00	99	747,085,675.00	100	800,425,000.00	81	649,434,650.00	100	637,630,525.00	98	626,016,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,022,536,325.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 53	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Presentase Penataan Daerah Otonomi Baru	100 % 100		258,910,000.00	24	62,168,000.00	100	92,025,000.00	51	47,082,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	109,250,500.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4 01 4.0 1 55	Program Pengembangan Data/Informasi Kewilayahan	Presentase Pengembangan Data/Informasi Kewilayahan	100 % 100		344,525,000.00	96	329,904,700.00	100	195,367,500.00	100	195,043,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	524,947,750.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab						
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD								
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja								
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
4	01	4.0.1	56	Program Pemilihan Kepala Pekon	Presentase Pemilihan Kepala Pekon	100 % -		0.00	-		0.00	100	133,428,000.00	99		132,491,400.00	100	521,249,933.00	95.38		497,163,673.00	-		0.00	-		0.00	95.38	629,655,073.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah			
4	01	4.0.1	68	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 % -		0.00	-		0.00	100	110,928,500.00	82		91,428,000.00	100	144,266,054.00	95.53		137,821,550.00	-		0.00	-		0.00	95.53	229,249,550.00	Bagian Protokol Sekretariat Daerah			
4	01	4.0.1	97	Program Fasilitas Kerja Sama Daerah	Presentase Fasilitas Kerja Sama Daerah	100 % -		0.00	-		0.00	-		0.00	100	47,880,000.00	99.87		47,819,150.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	99.87	47,819,150.00	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah		
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP -		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	WTP	44,225,441,451.00	WTP	36,213,386,750.00	WTP		34,836,667,048.00	WTP	115,275,495,249.00	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah			
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 % -		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	14,172,544,951.00	100	15,759,681,585.00	100		11,067,704,126.00	100	40,999,930,662.00	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah			
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100 % -		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	1,470,539,500.00	100	2,065,708,250.00	100		2,182,952,129.00	100	5,719,199,879.00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah			
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	- Angka -		470,896,543,947.57	72.9389		459,500,348,761.00	-	485,075,712,410.31	67.8997		475,807,220,365.00	-	537,045,516,385.59	77.2524		511,710,486,196.46	80.0000	458,880,295,847.76	82.0000	440,133,938,212.00	85.0000	459,724,947,298.00	85.0000	2,805,757,236,680.22				
4	02	4.0.2	51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100 % 100		435,143,493,791.57	100		425,722,796,498.00	100	450,581,527,069.21	100		443,283,274,597.00	100	498,685,978,121.09	100		475,421,334,342.46	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	1,344,427,405,437.46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100 % 100		13,007,040,041.00	100		12,610,722,072.00	100	14,606,767,509.00	100		14,301,415,914.00	100	15,260,097,218.00	100		15,046,779,191.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	41,958,917,177.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
									Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023						
									Kinerja	Rp	Realisasi	Kinerja	Rp	Realisasi	Kinerja	Rp	Realisasi	Kinerja	Rp	Realisasi	Kinerja	Rp	Realisasi	Kinerja					Rp	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
4	02	4.0 2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	125,000,000.00	100	125,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	423,980,000.00	100	377,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	502,200,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	04	4.0 4	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	100	74,100,000.00	100	73,964,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,964,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
4	02	4.0 2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-		0.00	-	0.00	100	40,000,000.00	100	39,800,000.00	100	11,000,000.00	100	11,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	50,800,000.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	100	%	1	2,596,565,000.00	100	2,312,313,149.00	100	2,315,586,700.00	100	2,155,497,314.00	100	2,801,487,525.50	100	2,681,590,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,149,401,313.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	10		Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-		0.00	-	0.00	100	42,000,000.00	100	41,949,604.00	100	13,450,000.00	100	13,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,149,604.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Paket	1	173,441,000.00	1	135,931,000.00	1	58,435,000.00	1	34,172,000.00	1	62,000,000.00	1	50,081,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	220,184,800.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	100	44,250,000.00	100	42,750,000.00	100	43,700,000.00	100	41,240,000.00	100	70,690,000.00	100	70,690,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	154,680,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	32		Program peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	12	Bulan	12	321,000,000.00	12	245,850,000.00	12	171,000,000.00	12	162,965,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	12	408,815,000.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	34		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100	%	100	199,800,000.00	100	175,152,450.00	100	133,024,500.00	100	115,984,250.00	100	85,525,800.00	100	85,435,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	376,572,100.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target									
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
4	02	4.0 2	35	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	100	123,800,000.00	100	121,053,951.00	100	101,346,400.00	100	94,307,496.00	100	938,324,100.00	100	932,922,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,148,284,147.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	39	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	100	%	100	120,000,000.00	100	110,350,000.00	100	259,515,000.00	100	235,970,717.00	100	440,116,500.00	100	393,552,146.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	739,872,863.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0 2	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Jumlah Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya			Paket	-	0.00	-	0.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,500,000.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah		
4	02	4.0 2	41	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	Paket	1	36,800,000.00	1	34,167,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,167,600.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	WTP	26,595,019,694.76	WTP	35,081,926,018.00	WTP	33,018,712,321.00	WTP	94,695,658,033.76	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	410,062,368,835.00	100	380,642,211,030.00	100	407,276,059,116.00	100	1,197,980,638,981.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah					
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	1,517,849,060.00	80	1,962,315,010.00	80	952,200,000.00	80	4,432,364,070.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah					
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	68	1,171,478,300.00	68	675,929,400.00	68	827,220,200.00	68	2,674,627,900.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah					
4	07	4.0 7.0 1	5	1	Belanja Tidak Lansung	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan dan gaji	45	Orang	45	6,031,766,830.00	45	5,734,523,252.00	45	6,013,733,972.10	45	5,269,754,733.00	45	5,435,719,319.60	45	5,044,921,753.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	45	16,049,199,738.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4	07	4.0 7.0 1	03	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	172,425,000.00	100	172,111,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	172,111,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4.03.01.26	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	100 %	100	75,531,500.00	100	61,213,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	61,213,250.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.01.28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Presentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	100 %	100	271,222,000.00	100	264,202,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	264,202,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.03.01.30	Program Pemanfaatan Ruang	Presentase Pemanfaatan Ruang	100 %	100	497,253,000.00	100	497,253,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	497,253,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.07.01.31	Program Pengadaan Jaringan Kerjasama (Networking) Antar Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	Presentase Pengadaan Jaringan Kerjasama (Networking) Antar Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	100 %	100	248,400,000.00	100	247,233,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	247,233,750.00	Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.07.01.34	Program Pengadaan Jaringan Kerjasama (Networking) Antar Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	Presentase Pengadaan Jaringan Kerjasama (Networking) Antar Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	100 %	100	115,000,000.00	100	114,722,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	114,722,600.00	Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	4,470,842,405.00	100	3,998,223,993.00	100	3,844,206,260.00	100	3,346,690,499.00	100	4,370,357,151.40	100	3,378,495,412.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,723,409,904.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	571,095,000.00	100	560,663,750.00	100	29,770,000.00	100	0.00	100	57,445,000.00	100	56,025,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	616,688,750.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	-	0.00	-	0.00	100	25,000,000.00	5	24,500,000.00	100	10,500,000.00	0	4,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
4.	03	4.0 3.0 1	06																					Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan an, Badan Perencanaan Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	100	179,355,000.00	100	174,428,850.00	100	78,741,200.00	100	78,341,600.00	100	116,356,100.00	100	115,722,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	368,492,500.00
2.	14	4.0 3.0 1	15																					Badan Perencanaan an Pembangunan an Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	100	747,915,000.00	100	681,773,045.00	100	240,632,000.00	100	239,722,250.00	100	129,222,500.00	100	114,161,111.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,035,656,406.00
4.	03	4.0 3.0 1	20																					Badan Perencanaan an Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	-	0.00	-	0.00	100	59,066,000.00	11	57,600,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	57,600,950.00
2.	14	4.0 3.0 1	21																					Badan Perencanaan an Pembangunan an Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	100	209,456,000.00	100	198,806,000.00	100	251,462,000.00	100	250,232,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	449,038,800.00
4.	03	4.0 3.0 1	21																					Badan Perencanaan an Pembangunan an Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	100	3,282,323,480.00		3,137,240,801.00	100	3,181,884,800.00	100	3,097,799,682.00	100	2,473,024,300.00	846	2,449,967,849.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,685,008,332.00
4.	03	4.0 3.0 1	22																					Badan Perencanaan an Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	-	0.00	-	0.00	100	509,882,000.00	100	494,182,300.00	100	872,485,850.00	100	855,549,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,349,731,700.00
2.	07	4.0 1.0 2	22																					Badan Perencanaan an Pembangunan an, Penelitian dan Pengembangan an	
				100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	287,897,600.00	100	270,093,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	270,093,500.00

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4.14.1	4.0.1.0.23	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	100	%	-	0.00	-	0.00	100	53,630,000.00	100	53,630,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	53,630,000.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
4.07.1	4.0.3.0.24	Program Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan	Presentase Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan	100	%	100	57,800,000.00	80	16,975,250.00	-	0.00	-	0.00	100	2,700,000.00	0	2,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,675,250.00	Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pengembangan
4.03.1	4.0.3.0.28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah	Presentase Pengembangan an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah	100	%	-	0.00	-	0.00	100	242,415,000.00	100	239,412,900.00	100	492,372,350.00	100	492,168,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	731,581,450.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan
4.07.1	4.0.3.0.31	Program Pengadaan jaringan kerjasama (Networking) Antara Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	Presentase Pengadaan jaringan kerjasama (Networking) Antara Lembaga Kelitbangan dan Instansi Terkait (Pemda dan Swasta)	100	%	-	0.00	-	0.00	100	60,460,000.00	100	59,573,750.00	100	91,263,500.00	100	91,128,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	150,702,200.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pengembangan
1.03.1	4.0.3.0.29	Program Perencanaan Tata Ruang	Presentase Perencanaan Tata Ruang	100	%	100	1,549,800,000.00	100	1,524,170,500.00	100	887,175,000.00	100	871,673,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,395,843,500.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan
1.03.1	4.0.3.0.30	Program Pemanfaatan Ruang	Presentase Pemanfaatan Ruang	100	%	100	0.00	0	0.00	100	607,125,000.00	100	603,316,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	603,316,400.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pengembangan
4.03.1	4.0.3.0.33	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	113,906,000.00	3	111,401,000.00	100	119,009,000.00	3	118,999,909.00	100	14,237,500.00	1	14,237,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	244,638,409.00	Badan Perencanaan dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pengembangan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4.07.3.03.34.1	Program Penyediaan Fasilitas dan Motivasi Kreativitas Masyarakat Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Presentase Penyediaan Fasilitas dan Motivasi Kreativitas Masyarakat Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 % -	0.00	-	0.00	100	125,450,000.00	100	124,800,000.00	100	79,269,600.00	100	77,040,045.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	201,840,045.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
4.03.3.03.35.1	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas Aparatur	100 % 100	72,297,600.00	100	67,373,700.00	100	92,988,000.00	100	78,818,500.00	100	52,037,900.00	100	14,379,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	160,572,100.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
4.03.3.03.38.1	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Presentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100 % 100	264,865,300.00	100	227,981,800.00	100	286,260,000.00	100	277,674,200.00	100	458,713,300.00	100	354,234,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	859,890,100.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
4.01.4.03.2.54	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana, Kewilayahan dan Infrastruktur	Presentase Perencanaan Pembangunan Prasarana, Kewilayahan dan Infrastruktur	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,309,265,150.00	100	3,291,375,147.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,291,375,147.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
4.04.4.03.1.40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahunan Anggaran Sebelumnya	Presentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahunan Anggaran Sebelumnya	% -	0.00	-	0.00	100	11,420,000.00	4	11,420,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,420,000.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	10,626,957,008.00	WTP	11,230,227,494.00	WTP	10,945,614,751.00	WTP	32,802,799,253.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.01.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,224,230,650.00	100	3,302,674,060.00	100	2,331,046,910.00	100	7,857,951,620.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.01.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,613,689,000.00	100	4,558,543,000.00	100	2,660,549,000.00	100	11,832,781,000.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.03.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Iptek yang Dimanfaatkan	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,068,703,300.00	100	2,680,112,200.00	100	1,713,545,000.00	100	6,462,360,500.00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	

[illegible]

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
							Target		Realisasi	Kinerja	Target		Realisasi	Kinerja	Target		Realisasi	Kinerja	Target		Kinerja	Target		Kinerja	Target			Kinerja	Rp	
							Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	Kinerja			Rp	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
4	05	4.0.5	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100	%	100	2,157,082,000.00	100	1,977,328,758.00	100	1,897,483,030.00	100	1,795,091,916.00	100	1,496,941,814.00	100	1,308,632,013.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,081,052,687.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	24,000,000.00	100	22,172,000.00	-	0.00	-	0.00	100	43,524,000.00	100	37,882,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	60,054,500.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	419,396,000.00	100	417,916,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	417,916,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	129,136,700.00	100	126,159,400.00	100	49,997,500.00	100	48,044,250.00	100	7,000,000.00	100	2,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	176,203,650.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	28	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Pengembangan an Komunikasi, Informasi dan Media Masa	100	%	100	20,420,000.00	100	20,420,000.00	100	13,830,000.00	100	6,900,000.00		0.00		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,320,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	29	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	56,800,000.00	100	56,523,000.00	100	72,500,000.00	100	70,033,000.00	100	5,500,000.00	100	5,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	132,056,000.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%	100	3,999,244,500.00	100	3,195,090,699.00	100	2,388,564,930.00	100	1,258,219,750.00	100	1,781,229,400.00	100	1,195,443,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,648,753,949.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	37	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS	Pesentase Peningkatan Kesejahteraan n PNS	100	%	100	119,060,000.00	100	96,883,800.00	100	12,840,000.00	100	12,840,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	109,723,800.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	38	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	-		0.00	-	0.00	100	2,382,368,250.00	100	2,237,488,000.00	100	344,542,547.00	100	282,313,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,519,801,900.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	39	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	-		0.00	-	0.00	100	8,265,000.00	100	8,102,500.00	100	61,474,000.00	100	38,399,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	46,502,400.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
4	05	4.0.5	53	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Persentase Penyelamata n dan Pelestarian Dokumen	100	%	100	34,800,000.00	100	32,921,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	32,921,500.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	4,796,005,789.00	WTP	4,923,797,349.00	WTP	4,773,163,468.00	WTP	14,492,966,606.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,441,536,720.00	100	2,266,864,200.00	100	952,127,300.00	100	5,660,528,220.00	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
1	02	1.0 2	05 01	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang menepatkan gaji dan Tunjangan	621	Orang	621	38,620,557,953.50	621	36,197,746,254.00	716	45,389,409,063.00	716	42,046,084,202.00	704	45,461,819,392.60	704	43,918,914,774.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	704	122,162,745,230.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00	Belanja Langsung Non Program		-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	4,287,352,700.00	-	0.00	-	(224,958.00)	-	0.00	-	0.00	-	0.00		4,287,127,742.00	Dinas Kesehatan	
1	02	1.0 2	00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	8,742,887,991.50	100	8,540,652,016.00	100	8,271,140,450.00	100	8,006,520,039.00	100	8,358,739,070.44	100	7,962,565,396.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	24,509,737,451.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Persentase Kasus Disiplin Pegawai	0	%	0	66,000,000.00	0	66,000,000.00	0	0.00	0	0.00	30	24,000,000.00	30	24,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	30	90,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kursus peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	%	0	0.00	0	0.00	20	15,000,000.00	20	5,300,000.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	5,300,000.00	Dinas Kesehatan
				Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	254,480,170.00	100	251,795,000.00	100	152,600,000.00	100	149,864,950.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	401,659,950.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan n, Kermitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	0	%	0	0.00	0	0.00	100	59,290,000.00	100	55,904,300.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,904,300.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	%	100	120,361,860.00	100	93,399,800.00	100	85,380,000.00	100	84,357,950.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	177,757,750.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	%	100	67,132,493,727.00	100	58,536,699,143.00	100	80,552,449,609.71	100	72,720,308,880.38	100	31,441,488,504.00	100	25,376,329,403.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	156,633,337,426.38	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kader Kesehatan yang mendapatkan Insentif	100	%	100	2,418,040,000.00	100	2,368,567,400.00	100	2,617,130,000.00	100	2,617,110,750.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,985,678,150.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Masyarakat yang terpantau Gizi sesuai standar	100	%	100	58,737,000.00	100	58,090,400.00	100	53,412,500.00	100	51,549,250.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	109,639,650.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.0 2	00 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tenaga Kesling di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mendapat pembinaan Lingkungan Sehat	100	%	100	100,077,250.00	100	98,854,250.00	100	74,152,500.00	100	53,909,400.00	100	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	152,763,650.00	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	02	1.02.00.41	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di RSUD/Puskesmas	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,507,122,100.00	100	1,233,104,005.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,233,104,005.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.42	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,596,260,500.00	100	2,594,226,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,594,226,950.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.43	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase status gizi bayi yang meningkat	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,426,858,300.00	100	2,166,916,519.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,166,916,519.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.44	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Puskesmas yang dilakukan pengawasan kesehatan lingkungan sesuai standar	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,558,900.00	100	15,558,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,558,900.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.45	Program Obat dan Alat Kesehatan	Prosentase ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,447,089,610.00	100	3,374,416,056.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,374,416,056.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.45	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase Program Pengawasan Obat dan Makanan	100	%	100	20,000,000.00	100	18,005,000.00	100	10,500,000.00	100	10,500,000.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	28,505,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.46	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,945,479,900.00	100	14,960,653,947.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,960,653,947.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.47	Program Manajemen Kesehatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,684,351,600.00	WTP	1,593,395,975.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,593,395,975.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.48	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,330,200,000.00	100	445,469,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	445,469,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	69,203,205,448.00	WTP	82,326,215,067.00	WTP	70,585,996,591.00	WTP	222,115,417,106.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	62,691,047,787.00	100	68,161,260,239.00	100	37,066,569,825.00	100	167,918,877,851.00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,187,704,396.00	100	55,187,000.00	100	1,789,364,000.00	100	10,032,255,396.00	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	567,484,000.00	100	500,922,000.00	100	457,296,000.00	100	1,525,702,000.00	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022					Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target			Realisasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	60	3,292,965,000.00	70	3,937,017,000.00	90	545,398,325.00	90	7,775,380,325.00	Dinas Kesehatan						
1	2	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	33,578,327,329.05	WTP	30,588,692,646.00	WTP	50,717,634,536.00	WTP	114,884,654,511.05	Puskesmas						
1	02	1.02	Belanja Tidak Langsung	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	126 Orang	126	12,322,279,999.00	126	11,714,469,889.00	135	14,682,810,482.20	135	12,982,168,402.00	137	13,958,394,168.37	137	12,361,638,894.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	398	37,058,277,185.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100	4,275,981,000.00	100	4,087,950,053.00	100	5,979,414,600.00	100	5,193,559,910.00	100	6,804,880,311.25	100	6,047,887,540.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,329,397,503.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	153,000,000.00	100	131,505,800.00	100	1,059,484,000.00	100	895,649,793.00	100	244,800,800.00	100	227,078,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,254,233,593.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100 %	100	21,000,000.00	100	21,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	17,640,000.00	100	61,895,500.00	100	42,143,144.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	59,783,144.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	100 %	100	67,500,000.00	100	66,709,567.00	100	77,456,840.00	100	4,050,000.00	100	90,707,700.00	100	40,555,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	111,314,767.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Persentase Pningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	12,156,600.00	100	18,625,000.00	100	11,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,656,600.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100	3,922,000,000.00	100	3,839,461,365.00	100	2,174,999,000.00	100	1,588,040,162.00	100	11,893,913,000.00	100	9,622,412,536.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,049,914,063.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	%	-	0.00	-	0.00	100	234,345,000.00	100	143,984,800.00	100	337,062,100.00	100	73,731,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	217,715,900.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Pelayanan Medis	Persentase Pelayanan Medis	100 %	100	73,000,000.00	100	72,990,000.00	100	2,111,727,760.00	100	1,750,780,573.00	100	852,124,800.00	100	739,960,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,563,731,373.00	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100 %	100	13,616,921,909.88	100	10,939,049,731.34	100	13,302,490,877.58	100	12,012,849,605.26	100	12,404,703,591.20	100	11,640,270,215.98	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,592,169,552.58	RSUD Batin Mangunang				
1	02	1.02	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100 %	100	155,918,400.00	100	155,918,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	155,918,400.00	RSUD Batin Mangunang				

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terhadap Laporan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	38,617,962,757.00	WTP	35,922,645,236.00	WTP	36,392,483,886.00	100	110,933,091,879.00	RSUD Batin Mangunang			
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,529,034,300.00	100	21,386,366,320.00	100	15,721,122,619.00	100	41,636,523,239.00	RSUD Batin Mangunang			
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	987,153,992.00	100	1,001,143,992.00	100	379,051,209.00	100	2,367,349,193.00	RSUD Batin Mangunang			
			Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12.15	Tahun	-	22,420,482,180.00	12.15	21,323,982,890.00	-	27,839,474,180.00	12.17	25,691,450,935.00	-	5,445,553,150.00	12.18	5,125,942,650.00	12.19	0.00	12.20	393,737,400.00	12.25	55,098,800.00	12.25	52,590,212,675.00	
1	01	1.01	14	Program Managemet Pelayanan Pendidikan	Persentase Managemet Pelayanan Pendidikan	100	%	100	571,367,500.00	100	567,241,500.00	100	252,137,130.00	100	238,527,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	805,768,750.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	100	%	100	418,612,500.00	100	368,372,670.00	100	543,980,000.00	100	414,924,150.00	100	196,950,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	875,296,820.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Non Formal	100	%	100	345,481,400.00	100	342,111,400.00	100	588,235,770.00	100	556,455,050.00	100	4,825,855,200.00	100	4,648,139,200.00	-	0.00	-	0.00	100	5,546,705,650.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	%	100	388,323,400.00	100	261,557,050.00	100	194,115,280.00	100	181,545,280.00	100	106,731,800.00	100	104,231,800.00	-	0.00	-	0.00	100	547,334,130.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	23	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	100	%	100	1,634,851,380.00	100	1,592,376,400.00	100	4,888,987,000.00	100	4,785,906,050.00	100	86,910,000.00	100	81,570,600.00	-	0.00	-	0.00	100	6,459,853,050.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	24	Program Peningkatan Daya Tampung Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan AlternatifLayanan Pendidikan	Persentase Peningkatan Daya Tampung Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan AlternatifLayanan Pendidikan	100	%	100	18,241,000,000.00	100	17,406,961,870.00	100	20,587,624,000.00	100	18,838,241,655.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,245,203,525.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.01	25	Program Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan	100	%	100	820,846,000.00	100	785,362,000.00	100	784,395,000.00	100	675,851,500.00	100	229,106,150.00	100	200,001,050.00	-	0.00	-	0.00	100	1,661,214,550.00	Dinas Pendidikan	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	303,169,600.00	100	55,098,800.00	100	358,268,400.00	Dinas Pendidikan	
1	1	4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Bahan ajar Bahasa dan Sastra yang sudah di kembangkan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	90,567,800.00	100	0.00	100	90,567,800.00	Dinas Pendidikan	
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.96	Tahun	6.90	518,345,825,095.94	6.96	478,009,315,160.00	6.95	526,889,548,596.82	7.21	488,911,069,249.00	7.00	566,167,479,387.77	7.22	523,415,577,264.00	7.23	612,006,400,734.00	7.34	583,059,724,755.00	7.35	649,351,142,211.00	7.35	3,334,753,229,373.00		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung jawab							
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
1	01	1.0	1	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang mendapat gaji dan tunjangan	3607	Orang	3607	415,796,237,132.94	3607	378,777,875,363.00	3522	428,657,458,464.62	3522	393,253,251,181.00	3341	408,874,747,223.00	3341	371,802,642,825.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	10,470	1,143,833,769,369.00	Dinas Pendidikan
1	01	01.01	01	01	00	Belanja Langsung Non Program					-		132,350,000.00								-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	132,350,000.00	Dinas Pendidikan	
1	01	1.0	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Program Administrasi Perkantoran	100	%	100	30,413,941,677.00	100	28,602,667,436.00	100	29,772,148,602.00	100	28,998,352,517.00	100	28,192,361,000.00	100	27,709,738,955.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	85,310,758,908.00	Dinas Pendidikan
1	01	1.0	1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	%	100	31,500,000.00	100	31,500,000.00	100	0.00	0	0.00		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	31,500,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	1.0	1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	100	%	100	84,700,800.00	100	76,276,800.00	100	60,740,000.00	100	60,607,500.00	100	110,552,847.00	100	79,190,923.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	216,075,223.00	Dinas Pendidikan
1	01	1.0	1	10		Program peningkatan Promosi dan Kerjasama	Persentase Promosi dan Kerjasama		%	-	0.00	-	0.00	100	94,500,000.00	100	94,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	94,500,000.00	Dinas Pendidikan
1	01	1.0	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100	%	100	63,039,677,024.00	100	61,743,071,888.00	100	62,963,410,636.00	100	61,415,879,978.00	100	124,604,506,825.00	100	119,712,695,388.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	242,871,647,254.00	Dinas Pendidikan
1	01	1.0	1	26		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	100	%	100	190,433,900.00	100	189,564,700.00	100	105,000,000.00	100	99,194,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	288,759,450.00	Dinas Pendidikan
4	2	1.0	1	40		Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	703,831,870.00	100	703,831,870.00	100	756,555,680.00	100	756,539,620.00	100	902,493,970.00	100	902,493,970.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,362,865,460.00	Dinas Pendidikan
1	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	446,038,097,899.00	WTP	442,090,425,288.00	WTP	479,829,991,361.00	WTP	1,367,958,514,548.00	Dinas Pendidikan		
1	1	2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	157,906,003,163.00	100	132,052,567,998.00	100	158,558,810,119.00	100	448,517,381,280.00	Dinas Pendidikan		
2	13	2.1	3	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yg mendapatkan Gaji dan Tunjangan	20	Orang	20	2,088,577,659.00	20	1,978,535,683.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	1,978,535,683.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1	3	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan Baik	100	%	100	1,067,986,000.00	95.86	1,023,754,905.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	95.86	1,023,754,905.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1	3	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	19,500,000.00	100	18,850,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,850,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1	3	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akutabel	100	%	100	34,500,000.00		34,340,650.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,340,650.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
2	13	2.1.3	00	21	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran serta Kepemudaan	100	%	100	408,000,000.00	100	405,378,240.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	405,378,240.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	13	2.1.3	00	22	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100	%	100	360,000,000.00	100	346,781,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	346,781,800.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	13	2.1.3	00	23	Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Persentase Penyediaan Pengembangan an dan Pembangunan n Sarana dan Prasarana Keolahragaan	100	%	100	264,302,000.00	100	260,263,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	260,263,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,214,257,035.00	WTP	2,932,172,037.00	WTP	3,529,519,910.00	WTP	7,675,948,982.00	Dinas Pemuda dan Olahraga			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERMUDAAN	Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeleporan dan Kepemimpinan	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	258,968,900.00	100	438,310,600.00	100	392,645,400.00	100	1,089,924,900.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,936,975,200.00	100	1,602,602,600.00	100	3,044,268,900.00	100	6,583,846,700.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	53,969,800.00	100	53,969,800.00	Dinas Pemuda dan Olahraga		
2	17	01	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	20	Orang	20	2,089,469,533.00	20	1,954,298,204.00	20	2,199,988,514.20	20	1,990,297,300.00	20	2,121,314,402.77	20	1,894,479,403.00	-	0.00	-	0.00	20	5,839,074,907.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	17	01	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100	%	100	1,352,275,000.00	100	1,330,078,171.00	100	1,541,846,000.00	100	1,514,742,191.00	100	1,090,190,670.00	100	1,049,844,300.00	-	0.00	-	0.00	100	3,894,664,662.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	17	01	00	03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	21,000,000.00	100	21,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
2	17	01	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	-	0.00	-	0.00	100	10,200,000.00	100	9,200,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,200,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	17	01	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	43,852,500.00	100	43,777,500.00	100	29,077,700.00	100	21,877,700.00	100	41,449,300.00	100	39,849,300.00	-	0.00	-	0.00	100	105,504,500.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	17	01	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	-	0.00	-	0.00	100	35,300,000.00	100	35,300,000.00	100	23,500,000.00	100	23,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	58,800,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	17	01	00	18	Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Informasi	80	%	80	24,300,000.00	80	24,268,500.00	85	31,480,000.00	85	31,437,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85	55,705,500.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH HALAMAN VI - 36

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
2	01	2.0 1	00 10	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama dan Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerja Sama dan Investasi	0	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja		
2	01	2.0 1	00 26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja.	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja.	99.04	%	100	143,614,000.00	100	142,835,000.00	100	184,967,000.00	100	161,532,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	304,367,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
2	01	2.0 1	00 27	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	28,179,100.00	72.83	20,525,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	72.83	20,525,050.00	Dinas Tenaga Kerja		
2	01	2.0 1	00 28	Program Hubungan Industri yang Harmonis	Persentase Hubungan Industri yang Harmonis	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	26,752,600.00	3.94861	25,271,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3.948611	25,271,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	08	2.0 1	00 27	Program Pengembangan Wilayah Tenaga dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pengembangan Wilayah Tenaga dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	93.16	%	100	34,000,000.00	3.886111	31,673,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3.886111	31,673,000.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	08	2.0 1	00 27	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	0	%	-	0.00	-	0.00	100	25,487,000.00	99.84	25,448,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.84	25,448,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	05	2.0 1	00 30	Peningkatan Kualitas dan Informasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Kualitas dan Informasi Sumber Daya Alam	91.25	%	100	21,000,000.00	3.809028	19,162,500.00	100	10,830,000.00	99.95	10,825,500.00	100	10,720,500.00	0.95625	2,420,300.00	-	0.00	-	0.00	0.95625	32,408,300.00	Dinas Tenaga Kerja		
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Opini BPK Terhadap	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	4,170,699,579.00	WTP	4,309,103,487.00	WTP	3,727,353,658.00	WTP	12,207,156,724.00	Dinas Tenaga Kerja				
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Ditindaklanjuti Dan Dilaksana Dengan Baik	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,088,900.00	100	135,097,500.00	100	145,186,400.00	Dinas Tenaga Kerja				
2	07	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	100	41,525,400.00	100	101,725,000.00	100	148,250,400.00	Dinas Tenaga Kerja				
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,213,500.00	100	52,169,300.00	100	22,649,020.00	100	102,031,820.00	Dinas Tenaga Kerja				
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	31,822,900.00	100	86,775,000.00	100	0.00	100	118,597,900.00	Dinas Tenaga Kerja				
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Ketuksertaan Transmigran Yang Bernal Dari Kabupaten Tanggamus	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	51,000,000.00	100	226,000,000.00	100	277,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja				
				Sasaran 6 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Harmonis, Tertib, Tenatram, Aman dan Reliusus	Indeks Rasa Aman	0.49	Poin	0.49	14,802,891,784.00	0.49	13,896,247,026.00	0.49	15,424,273,994.00	0.75	14,398,055,869.45	0.50	16,138,209,314.31	0.91	14,751,872,955.00	0.92	19,044,994,222.00	0.93	19,034,396,114.00	0.94	18,280,981,692.00	0.94	99,406,547,878.45	

HALAMAN VI - 38

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
00	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	100	%	100	320,080,500.00	100	317,236,600.00	100	230,564,700.00	100	228,029,300.00	100	29,136,600.00	100	26,886,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	572,152,500.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
00	23	Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	100	%	100	144,800,000.00	100	143,630,000.00	100	227,112,800.00	100	208,406,400.00	100	145,000,000.00	100	142,498,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	494,535,300.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
00	24	Program Penanganan Konflik	Persentase Kegiatan Penanganan Konflik	100	%	100	89,100,000.00	100	89,100,000.00	100	94,738,800.00	100	94,438,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	183,538,800.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,619,795,681.00	WTP	3,627,485,620.00	WTP	3,411,504,870.00	WTP	10,658,786,171.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,244,600.00	-	0.00	-	47,708,100.00	100	64,952,700.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,496,300.00	100	162,641,500.00	100	225,254,000.00	100	411,391,800.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan keberadaan dan aktifitas ORMAS	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,932,409,090.00	100	1,682,326,420.00	100	1,942,484,235.00	100	5,557,219,745.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,525,500.00	100	36,591,300.00	100	57,116,800.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	39,936,200.00	100	81,889,800.00	100	89,813,000.00	100	211,639,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13.50	%	13.50	1,259,720,000.00	13.50	1,245,430,700.00	13.29	3,169,295,250.00	18.60	2,539,721,057.00	12.84	2,610,796,200.00	13.26	2,229,619,233.00	13.20	1,867,170,300.00	13.15	1,077,939,000.00	13.10	381,004,700.00	13.10	9,340,884,990.00	
1	06	1.1	01	02	Program Pembiayaan Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan	99.81	%	100	85,000,000.00	99.81	84,836,600.00	100	81,000,000.00	73.34	59,405,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	86.89	144,241,600.00	Dinas Sosial

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2	11	2.1 1	00 02	Program peningkatan disiplin aparat																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase pegawai yang disiplin memiliki kelengkapan kerja	100	%	100	57,300,000.00	100	57,300,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	57,300,000.00
2	11	2.1 1	00 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase laporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	88,000,000.00	99.36	87,435,900.00	100	23,000,000.00	99.73	22,937,500.00	100	72,583,800.00	53.01	38,475,950.00	-	0.00	-	0.00	84.03333	148,849,350.00
4	02	2.1 1	00 40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Presentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	320,547,500.00	100	320,547,500.00	100	72,102,200.00	100	72,102,200.00	100	258,835,500.00	100	258,835,500.00	-	0.00	-	0.00	100	651,485,200.00
2	11	2.1 1	00 10	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	116,586,000.00	99.81	115,628,000.00	100	65,875,000.00	98	64,560,250.00	100	8,315,700.00	99.68	8,289,400.00	-	0.00	-	0.00	98.96	188,477,650.00
2	11	2.1 1	00 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase peningkatan volume usaha UMKM	100	%	100	253,243,000.00	72.26257	182,999,890.00	100	839,775,500.00	92.08261	773,287,235.00	100	1,639,809,450.00	99.5785	1,632,897,000.00	-	0.00	-	0.00	87.97	2,589,184,125.00
2	11	2.1 1	00 19	Program Pengembangan Data/Informasi																				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				Presentase wilayah pendataan sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	100	56,000,000.00	93.55	52,388,000.00	100	38,670,000.00	100	38,660,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	64.51	91,048,000.00

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022					Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi									
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
2	11	2.1 1	00 18	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	100	%	100	81,710,000.00	99.82377	81,566,000.00	100	26,432,750.00	99.87705	26,400,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.85	107,966,250.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 30	Program Pengembangan sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	persentase peningkatan sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	%	-	-	0.00	-	0.00	100	35,000,000.00	99.55714	34,845,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.56	34,845,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 32	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Usaha Simpan Pinjam koperasi dan UMKM	%	-	-	0.00	-	0.00	100	38,015,000.00	96.80126	36,799,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	96.8	36,799,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 21	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan Usaha simpan pinjam	100	%	100	40,500,000.00	100	40,500,000.00	100	43,599,500.00	96.72703	42,172,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.36	82,672,500.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Persentase kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi yang tertata dengan baik	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,911,900.00	100	12,911,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,911,900.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
2	11	2.1 1	00 28	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UKM	Persentase kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi yang tertata dengan baik	100	%	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	2,800,000.00	100	2,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,800,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 29	Program Peningkatan Kualitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	presentase kecamatan yang memiliki BMT, LKM	100	%	100	33,000,000.00	97.03242	32,020,700.00	100	6,680,000.00	99.88623	6,672,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.46	38,693,100.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	11	2.1 1	00 22	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	46,994,700.00	99.9064	46,950,700.00	-	0.00	-	0.00	98.46	46,950,700.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
3	06	2.1 1	00 27	Program Pengendalian, Pengawasan , Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase pengendalian , Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	100	%	100	87,400,000.00	98.69565	86,260,000.00	100	186,802,000.00	94.31858	176,189,000.00	100	54,376,400.00	57.8861	31,476,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	83.63	293,925,400.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan
3	06	2.1 1	00 28	Program Pembinaan, Pengembangan/Re vitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan wilayah Pembinaan, Pengembangan n/Revitalisasi i Sarana Distribusi Perdagangan	100	%	100	60,820,000.00	97.79565	60,322,000.00	98.6957	2,849,353,900.00	98.69565	2,528,179,700.00	97.6957	22,740,240.00	98.89	22,738,240.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	2,611,239,940.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan
3	06	2.1 1	00 30	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase wilayah peningkatan penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	%	100	135,700,000.00	98.17244	133,220,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.17	133,220,000.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan		
3	06	2.1 1	00 29	Program Layanan Tern, Tern Ulang	Presentase Layanan Tern/Tern Ulang	100	%	100	1,361,000,000.00	91.00733	1,238,609,750.00	100	1,323,600,000.00	85.43425	1,130,807,750.00	100	46,204,100.00	67.6299	31,247,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	81.36	2,400,665,300.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan
3	07	2.1 1	00 29	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase peningkatan volume produksi IKM	100	%	100	147,643,000.00	94.79	139,953,500.00	100	32,708,800.00	95.76933	31,325,000.00	100	19,290,000.00	99.886	19,268,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	96.82	190,546,500.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan
3	07	2.1 1	00 27	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	100	%	100	1,133,788,000.00	43.85	497,141,500.00	100	1,008,050,000.00	31.15	313,968,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	37.5	811,110,100.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	6,480,321,530.00	WTP	6,365,748,915.00	WTP	6,668,468,564.00	WTP	19,514,539,009.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan			
2	17	02		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,970,000.00	100	10,275,000.00	100	0.00	100	24,245,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan			
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan di periksa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,450,000.00	100	6,250,000.00	100	11,999,800.00	100	47,699,800.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustria n dan Perdagangan			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	42,802,500.00	-	0.00	100	413,692,000.00	100	456,494,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Peningkatan Pemberdayaan UMKM	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	501,040,000.00	100	385,390,000.00	100	0.00	100	886,430,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	100	400,800,000.00	100	600,510,000.00	100	1,016,310,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
3	30	03	2.01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi standar	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	150,110,000.00	-	0.00	100	0.00	100	150,110,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,417,500.00	100	37,725,000.00	100	419,510,000.00	100	478,652,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) berstandar nasional yang berlaku 2. Presentase UTTP yang diawasi 3. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	49,742,500.00	100	31,419,000.00	100	52,053,000.00	100	133,214,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Usaha Perdagangan Yang Di Fasilitas Akses Pemasarannya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	262,130,000.00	100	55,117,500.00	100	55,017,500.00	100	372,265,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,220,000.00	100	150,000,000.00	100	99,420,000.00	100	255,640,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
			Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.02	%	5.02	3,613,033,077.00	5.02	3,483,551,755.00	5.20	4,499,171,899.60	5.03	4,129,611,962.00	5.25	3,436,432,642.07	-1.77	3,235,243,249.00	2.75	3,918,225,166.00	3.50	4,496,553,395.00	4.05	4,705,889,454.00	4.05	23,969,074,981.00	
			Sasaran 8 : Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	7.29	%	-	3,613,033,077.00	7.29	3,483,551,755.00	-	4,499,171,899.60	6.11	4,129,611,962.00	-	3,436,432,642.07	-6.95	3,235,243,249.00	4.00	3,918,225,166.00	4.50	4,496,553,395.00	5.00	4,705,889,454.00	5.00	23,969,074,981.00	
2	12	2.1 2.0 1	5Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	18	Orang	18	2,194,815,577.00	18	2,087,220,652.00	19	2,439,421,099.60	19	2,222,247,206.00	17	2,189,420,282.07	17	2,009,960,735.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	54	6,319,428,593.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HALAMAN VI - 45

HALAMAN VI - 46

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022					Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target		Realisasi	Target			Realisasi	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon	100	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100	5,518,125,900.00	100	4,113,295,950.00	100	5,920,734,800.00	100	15,552,156,650.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Desa					
4	05	4.0	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah Gaji PNS dan Tunjangan yang dapat di bayarkan	29	orang	29	2,396,854,313.00	29	2,232,561,705.00	31	2,768,737,351.00	31	2,531,076,532.00	25	2,841,543,902.33	25	2,176,178,744.00	-	0.00	-	0.00	85	6,939,816,981.00	Kecamatan Kota Agung				
4	05	4.0	5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	2,223,120,000.00	100	2,194,507,100.00	100	2,061,009,000.00	100	2,042,427,000.00	100	2,119,814,999.87	100	1,944,049,700.00	-	0.00	-	0.00	100	6,180,983,800.00	Kecamatan Kota Agung				
4	05	4.0	5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak	%	-	0.00	-	0.00	100	2,050,964,000.00	100	2,048,181,680.00	100	2,284,463,739.00	100	2,284,379,841.00	-	0.00	-	0.00	100	4,332,561,521.00	Kecamatan Kota Agung					
4	05	4.0	6	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Inspeksi mentasi Disiplin Aparatur	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	16,500,000.00	100	16,500,000.00	100	18,724,000.00	100	18,724,000.00	-	0.00	-	0.00	100	48,724,000.00	Kecamatan Kota Agung					
4	05	4.0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Temuan BPK/APDP yang Ditindaklanj uti	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,600.00	100	5,092,500.00	-	0.00	-	0.00	100	5,092,500.00	5,092,500.00	Kecamatan Kota Agung						
4	05	4.0	6	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	27,120,000.00	100	27,120,000.00	100	2,050,000.00	100	1,200,000.00	-	0.00	-	0.00	100	28,320,000.00	Kecamatan Kota Agung					
4	05	4.0	5	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	88,540,000.00	100	88,250,000.00	100	58,215,000.00	100	14,885,000.00	-	0.00	-	0.00	100	103,135,000.00	Kecamatan Kota Agung					
1	05	4.0	6	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	23,750,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	29,520,000.00	100	27,420,000.00	-	0.00	-	0.00	100	79,420,000.00	Kecamatan Kota Agung				
4	05	4.0	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	%	-	0.00	-	0.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00		330,000,000.00		328,895,562.00	-	0.00	-	0.00	100	578,895,562.00	Kecamatan Kota Agung					
4	05	4.0	5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100	%	100	75,000,000.00	100	73,830,000.00	100	128,256,000.00	100	128,256,000.00	100	119,191,500.00	100	63,934,000.00	-	0.00	-	0.00	100	266,020,000.00	Kecamatan Kota Agung				
4	05	4.0	6	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	346,140,000.00	100	346,140,000.00	100	366,340,000.00	100	366,340,000.00	100	314,580,800.00	100	266,362,800.00	-	0.00	-	0.00	100	978,842,800.00	Kecamatan Kota Agung				
4	05	4.0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGENDALIAN PERSAMPAHAN	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100	%	1	60,580,000.00	100	60,580,000.00	100	138,354,000.00	100	138,354,000.00	100	121,307,500.00	100	96,031,000.00	-	0.00	-	0.00	100	294,965,000.00	Kecamatan Kota Agung				

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	5,529,528,857.00	WTP	5,750,323,598.00	WTP	5,394,753,923.00	WTP	16,674,606,378.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	268,916,600.00	100	37,706,600.00	100	9,000,000.00	100	315,623,200.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembanguna n	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,343,398,908.00	100	2,311,617,908.00	100	1,021,622,750.00	100	5,676,639,566.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,720,000.00	100	35,520,000.00	100	69,000,000.00	100	141,240,000.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggara san Urusan Pemerintaha n Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	270,000.00	100	6,435,000.00	100	0.00	100	6,705,000.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	363,495,000.00	100	331,185,000.00	100	323,645,000.00	100	1,018,325,000.00	Kecamatan Kota Agung		
4	05	4.05.00.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	19 Orang	100	1,739,518,343.00	19	1,607,936,608.00	18	1,830,053,056.80	18	1,577,458,378.00	18	1,896,057,786.06	18	1,346,604,166.00					0.00	55	4,531,999,152.00	Kecamatan Wonosobo	
1	05	4.05.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	103,250,000.00	74	77,000,000.00	100	28,304,500.00	79	22,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	79	127,750,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	01	4.05.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	80,999,200.00	100	80,707,200.00	100	134,565,200.00	100	113,148,200.00	100	107,658,900.00	100	95,705,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	289,561,300.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	- %	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,735,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	01	4.01.38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan	100 %	100	21,140,000.00	100	21,140,000.00	100	57,640,000.00	100	39,620,000.00	100	104,694,300.00	100	49,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	110,460,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100	571,732,115.00	100	570,403,200.00	100	566,413,900.00	100	518,556,800.00	100	534,592,924.00	100	420,852,350.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,509,812,350.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak	- %	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	-	0.00	100	113,092,216.00	100	101,782,994.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	101,782,994.00	Kecamatan Wonosobo

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	05	4.0.5	00.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,242,660.00	100	9,242,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,242,000.00	Kecamatan Wonosobo	
4	05	4.0.5	00.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	13,200,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	14,000,000.00	Kecamatan Wonosobo	
4	01	4.0.1	00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin aparat	100	%	-	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Wonosobo
7	01	4.0.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,424,571,944.00	WTP	2,297,704,938.00	WTP	1,980,638,551.00	WTP	6,702,915,433.00	Kecamatan Wonosobo	
7	01	4.0.1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Pengendalian Pembangunan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,009,400.00	100	26,569,400.00	100	0.00	100	45,578,800.00	Kecamatan Wonosobo		
7	01	4.0.1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pkcn/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	86,717,517.00	100	93,063,800.00	100	84,270,600.00	100	264,051,917.00	Kecamatan Wonosobo		
7	01	4.0.1		ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	28,814,400.00	100	79,814,400.00	100	142,828,800.00	Kecamatan Wonosobo		
7	01	4.0.1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pengendalian Pembangunan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,033,000.00	100	54,533,100.00	100	20,309,100.00	100	93,875,200.00	Kecamatan Wonosobo		
4	05	4.0.5	00.5	Belanja Tidak Langsung	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	22	1,811,024,027.00	22	1,696,296,818.00	22	2,010,118,083.00	22	1,832,269,308.00	22	2,100,987,689.23	22	1,704,141,274.00	-	0.00	-	0.00	22	5,232,707,400.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.0.5	00.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,450,000.00	100	27,750,000.00	100	28,250,000.00	100	27,000,000.00	100	28,368,800.00	100	26,650,000.00	-	0.00	-	0.00	100	81,400,000.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.0.5	00.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100	%	100	64,219,200.00	100	63,902,000.00	100	112,185,200.00	100	107,681,250.00	100	87,432,900.00	100	59,222,950.00	-	0.00	-	0.00	100	230,806,200.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.0.5	00.38	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	15,700,000.00	100	15,488,000.00	100	46,600,000.00	100	38,493,000.00	100	56,180,500.00	100	23,365,000.00	-	0.00	-	0.00	100	77,346,000.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.0.5	00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	820,680,872.00	100	764,824,972.00	100	742,828,872.00	100	654,121,511.00	100	749,328,850.00	100	564,260,860.00	-	0.00	-	0.00	100	1,983,207,343.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.0.5	00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak	100	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	172,755,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	172,755,000.00	Kecamatan Talangpadang

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tupuan/ Impact/ Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab																					
										Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022						Tahun 2023																			
										Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi				Target		Realisasi																	
Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp		Kinerja		Rp																	
(1)				(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)	
4	05	4.05	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100	%	100		32,000,000.00	100		32,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100		14,800,000.00	100		13,600,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		45,600,000.00	Kecamatan Talangpadang																		
4	05	4.05	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindaklanjuti	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		18,147,600.00	100		14,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		14,250,000.00	Kecamatan Talangpadang																			
4	05	4.05	10	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100		10,000,000.00	100		10,000,000.00	100		32,360,000.00	100		17,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		27,100,000.00	Kecamatan Talangpadang																			
4	05	4.05	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEGAMAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100		23,000,000.00	100		13,000,000.00	100		12,417,000.00		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		13,000,000.00	Kecamatan Talangpadang																				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP		2,670,100,689.00	WTP		2,546,676,599.00	WTP		2,490,034,721.00	WTP		7,706,812,009.00	Kecamatan Talangpadang																				
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		65,418,250.00	100		61,188,250.00	100		0.00	100		126,606,500.00	Kecamatan Talangpadang																					
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		74,788,100.00	100		104,253,100.00	100		50,626,650.00	100		229,667,850.00	Kecamatan Talangpadang																					
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		35,100,000.00	100		35,100,000.00	100		86,100,000.00	100		156,300,000.00	Kecamatan Talangpadang																					
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakannya dengan Baik	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		8,367,750.00	100		24,961,500.00	100		0.00	100		33,329,250.00	Kecamatan Talangpadang																					
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		77,761,450.00	100		63,231,950.00	100		13,500,000.00	100		154,493,400.00	Kecamatan Talangpadang																					
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13		1,237,176,413.00	13		1,166,576,017.00	13		1,339,821,161.60	13		1,206,817,723.00	13		1,349,618,498.72	13		998,383,977.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	13		3,371,777,717.00	Kecamatan Pulau Panggung															
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100		548,745,400.00	100		539,396,727.00	100		539,680,000.00	100		491,902,858.00	100		431,530,736.00	100		359,723,386.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		1,391,022,971.00	Kecamatan Pulau Panggung															
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100		200,000,000.00	100		182,058,700.00	100		185,475,000.00	100		162,630,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		344,688,700.00	Kecamatan Pulau Panggung																	
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100		13,500,000.00	100		13,500,000.00	100		13,800,000.00	100		13,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100		27,300,000.00	Kecamatan Pulau Panggung																	

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,600.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Pulau Panggung		
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	14,000,000.00	100	14,000,000.00	100	6,000,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	Kecamatan Pulau Panggung
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Knyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Knyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,243,000.00	100	28,250,000.00	100	23,245,500.00	100	27,000,000.00	100	23,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	75,188,500.00	Kecamatan Pulau Panggung
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	63,203,000.00	100	62,906,400.00	100	123,846,000.00	100	110,433,800.00	100	74,952,450.00	100	72,629,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	245,969,200.00	Kecamatan Pulau Panggung
4	4	01	00	32	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan		%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	900,000.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Kecamatan Pulau Panggung
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	16,380,000.00	100	16,342,200.00	100	48,980,000.00	100	35,435,450.00	100	45,285,000.00	100	35,915,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	87,692,900.00	Kecamatan Pulau Panggung
4	4	05	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembiayaan Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembiayaan Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	100	15,959,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,959,300.00	Kecamatan Pulau Panggung
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,842,792,818.07	WTP	1,712,213,236.00	WTP	1,731,391,847.00	WTP	5,286,397,901.07	Kecamatan Pulau Panggung		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,650,000.00	100	45,377,450.00	100	0.00	100	47,027,450.00	Kecamatan Pulau Panggung		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,235,650.00	100	91,300,200.00	100	41,734,450.00	100	198,270,300.00	Kecamatan Pulau Panggung		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	36,440,000.00	100	78,000,000.00	100	148,640,000.00	Kecamatan Pulau Panggung		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	800,000.00	100	3,347,500.00	100	2,902,500.00	100	7,050,000.00	Kecamatan Pulau Panggung		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakn dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,597,500.00	100	8,200,000.00	100	22,797,500.00	Kecamatan Pugung		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,023,600.00	100	1,635,000.00	100	36,658,600.00	Kecamatan Pugung		
0	0	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,163,569,293.00	13	1,091,516,618.00	13	1,220,263,477.40	13	1,100,165,991.00	13	1,248,093,988.21	13	1,091,436,996.00	-	0.00	-	0.00	13	3,283,119,605.00	Kecamatan Cukuh Balak
1	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,790,150.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	83,500,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	1	3.0 1.0 5.1 5.1 2	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100	%	53,550,000.00	100	53,150,000.00	100	102,891,000.00	100	66,491,000.00	100	78,309,300.00	100	32,300,900.00	-	0.00	-	0.00	100	151,941,900.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	1	3.0 1.0 5.1 5.1 2	38	Program Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	15,700,000.00	100	15,050,000.00	100	46,600,000.00	100	46,100,000.00	100	40,797,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	61,150,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	1	3.0 1.0 5.1 5.1 2	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	0.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penurunan Kasus Disiplin Aparatur	100	%	375,438,732.00	100	344,250,000.00	100	349,838,732.00	100	326,459,000.00	100	359,718,894.00	100	231,396,100.00	-	0.00	-	0.00	100	902,105,100.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		0.00		0.00	100	200,000,000.00	100	199,780,000.00	100	38,075,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	199,780,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100	%	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapaaan Pencapaian Kinerja dan keuangan	Jumlah Temuan BPK/APPP yang Ditindaklanjuti	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,140,000.00	100	11,033,000.00	-	0.00	-	0.00	100	11,033,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,500,000.00		5,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
3	5	3.0 1.0 5.1 5.1 2	11	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	36,000,000.00	100	15,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,565,969,029.04	WTP	1,497,198,082.00	WTP	1,338,588,475.00	WTP	4,401,755,586.04	Kecamatan Cukuh Balak

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Input/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	Kecamatan Cukuh Balak	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,209,900.00	100	31,461,100.00	100	36,328,250.00	100	96,999,250.00	Kecamatan Cukuh Balak	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	35,100,000.00	100	70,200,000.00	100	139,500,000.00	Kecamatan Cukuh Balak	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dapat Dilaksanakannya dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,375,000.00	100	18,470,497.00	100	0.00	100	21,845,497.00	Kecamatan Cukuh Balak	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	33,208,150.00	100	15,000,000.00	100	0.00	100	48,208,150.00	Kecamatan Cukuh Balak	
4	05	4.05.00.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	13	Orang	13	1,172,049,128.00	13	1,099,543,469.00	16	1,257,827,377.40	14	1,133,717,996.00	13	1,288,655,180.71	13	1,125,633,207.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	44	3,358,894,672.00	Kecamatan Semaka
1	05	4.05.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	25,450,000.00	100	103,250,000.00	100	72,779,580.00	100	31,793,000.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	93.26	125,229,580.00	Kecamatan Semaka
4	01	4.05.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumentasi Perencanaan yang disusun secara baik dan tepat waktu	100	%	100	41,713,000.00	100	41,323,200.00	100	114,966,000.00	100	92,907,810.00	100	95,141,400.00	100	68,250,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	42	202,481,810.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.05.00.08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	8,000,000.00	100	11,825,000.00	100	1,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	9,250,000.00	Kecamatan Semaka	
4	01	4.05.00.38	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan	100	%	100	2,100,000.00	100	2,100,000.00	100	51,300,000.00	100	12,261,160.00	100	55,686,450.00	100	19,608,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	33,969,160.00	Kecamatan Semaka
4	02	4.05.00.40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	persentase Pembayaran Pekerjaan Tahun sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,381,361.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	0.00	Kecamatan Semaka	
4	05	4.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	574,691,700.00	100	568,555,840.00	100	527,767,500.00	100	480,775,200.00	100	500,498,883.55	100	413,256,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	68.96	1,462,587,340.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	194,580,000.00	100	137,855,605.45	100	132,900,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	97.5	327,480,000.00	Kecamatan Semaka	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	05	4.0.5	00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,603,200.00	100	579,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	38.03	579,900.00	Kecamatan Semaka	
4	05	4.0.5	00.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	8,500,000.00	97.33	8,500,000.00	100	11,250,000.00	100	11,250,000.00	-	0.00	-	0.00	0	19,750,000.00	Kecamatan Semaka	
4	01	4.0.1	00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin aparat	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Semaka
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,865,493,571.07	WTP	1,760,041,154.00	WTP	1,734,608,696.00	WTP	5,360,143,421.07	Kecamatan Semaka	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,319,000.00	100	16,120,000.00	100	0.00	100	23,439,000.00	Kecamatan Semaka	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembanguna n	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	43,883,000.00	100	65,022,000.00	100	47,834,600.00	100	156,739,600.00	Kecamatan Semaka	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,500,000.00	100	53,530,000.00	100	79,875,000.00	100	167,905,000.00	Kecamatan Semaka	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar san Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,347,500.00	-	0.00	100	980,000.00	100	4,327,500.00	Kecamatan Semaka	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,154,500.00	100	23,066,000.00	100	4,796,200.00	100	39,016,700.00	Kecamatan Semaka	
4	05	4.1.5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang	12	1,130,131,568.00	12	1,066,204,707.00	12	1,203,402,208.20	12	1,085,657,614.00	10	1,177,116,023.82	10	964,550,918.00	-	0.00	-	0.00	34	3,116,413,239.00	Kecamatan Pematang Sawa
04	05	4.1	00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,375,000.00	100	29,750,000.00	100	25,250,000.00	-	0.00	-	0.00	100	80,875,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	47,415,000.00	100	47,405,000.00	100	102,755,000.00	100	102,234,000.00	100	137,925,300.00	100	72,703,300.00	-	0.00	-	0.00	100	222,342,300.00	Kecamatan Pematang Sawa
4	05	4.0.5	00.08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Pematang Sawa	
4	05	4.0.5	00.38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	11,620,000.00	100	11,610,200.00	100	44,200,000.00	100	43,750,000.00	100	38,661,850.00	100	1,899,000.00	-	0.00	-	0.00	100	57,259,200.00	Kecamatan Pematang Sawa

HALAMAN VI - 57

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah n Umum yang Dapat Dilaksanakana n dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,400,000.00	100	27,925,000.00	100	4,415,000.00	100	34,740,000.00	Kecamatan Sumberejo		
7	01	06	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	19,874,500.00	100	9,846,800.00	100	29,721,300.00	Kecamatan Sumberejo		
4	05	4.05.00.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	10 Orang	10	1,013,272,795.00	10	928,275,815.00	10	1,045,165,171.40	10	939,131,368.00	10	1,055,503,309.26	10	847,131,318.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	10	2,714,538,501.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	316,479,150.00	100	300,218,550.00	100	271,490,000.00	100	222,397,640.00	100	288,000,726.00	100	241,571,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	764,187,290.00	Kecamatan Ulu Belu
4	05	4.04.01	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	152,305,000.00	100	54,308,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	152,305,000.00	Kecamatan Ulu Belu
1	05	3.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	25,600,000.00	100	28,227,300.00	100	18,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	71,850,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	01	3.01.05.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	48,354,200.00	100	48,353,000.00	100	96,966,000.00	100	78,916,000.00	100	79,729,700.00	100	48,477,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	175,746,850.00	Kecamatan Ulu Belu
3	01	3.01.05.38	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Pengendalian Pembangunan	100 %	100	12,980,000.00	100	12,980,000.00	100	41,100,000.00	100	6,400,000.00	100	63,422,600.00	100	10,692,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	30,072,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	13,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.33	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,600.00	100	5,372,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,372,600.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.32	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	23,000,000.00	100	12,980,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,980,000.00	Kecamatan Ulu Belu
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,434,730,389.00	WTP	1,341,527,866.00	WTP	1,314,795,193.00	WTP	4,091,053,448.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100 %	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,133,000.00	100	18,596,000.00	100	9,896,000.00	100	43,625,000.00	Kecamatan Ulu Belu		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	80	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	52,872,000.00	80	66,564,000.00	80	54,183,000.00	80	173,619,000.00	Kecamatan Ulu Belu			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Disedesakan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	34,200,000.00	100	70,200,000.00	100	138,600,000.00	Kecamatan Ulu Belu			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,428,000.00	100	21,270,000.00	100	8,920,000.00	100	34,618,000.00	Kecamatan Ulu Belu			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	97	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,158,000.00	100	37,852,000.00	100	6,602,000.00	100	53,612,000.00	Kecamatan Ulu Belu			
0	0	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	14	977,861,255.00	14	913,310,520.00	14	1,210,156,892.60	14	1,085,716,959.00	14	1,232,049,409.55	14	1,035,487,591.00	-	0.00	-	0.00	-	3,034,515,070.00	Kecamatan Kelumbayan		
5	05	15	3.01.05.14	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,445,000.00	100	11,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	67,750,000.00	Kecamatan Kelumbayan		
1	01	21	3.01.05.14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	28,570,000.00	100	28,570,000.00	100	78,106,000.00	100	73,382,000.00	100	65,297,050.00	100	37,339,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	139,291,800.00	Kecamatan Kelumbayan
1	01	32	3.01.05.14	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	16,000,000.00	100	9,000,000.00	100	21,539,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan	
1	01	38	3.01.05.14	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	12,540,000.00	100	12,540,000.00	100	33,500,000.00	100	32,409,000.00	100	31,014,650.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	44,949,000.00	Kecamatan Kelumbayan
5	05	1	3.01.05.14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	318,859,200.00	100	316,940,000.00	100	292,410,000.00	100	283,934,000.00	100	267,633,159.00	100	152,688,357.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	753,562,357.00	Kecamatan Kelumbayan
5	05	2	3.01.05.14	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,095,000.00	100	52,440,000.00	100	51,490,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	249,585,000.00	Kecamatan Kelumbayan	
5	05	6	3.01.05.14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,147,500.00	5,775,843.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,775,843.00	Kecamatan Kelumbayan
5	05	10	3.01.05.14	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	100	9,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan	
5	05	3	3.01.05.14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Input/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,654,911,976.05	WTP	1,664,939,646.00	WTP	1,756,261,645.00	WTP	5,076,113,267.05	Kecamatan Kelumbayan					
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,362,500.00	100	8,952,500.00	100	4,462,500.00	100	18,777,500.00	Kecamatan Kelumbayan					
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,745,000.00	100	9,757,500.00	100	28,012,500.00	100	57,515,000.00	Kecamatan Kelumbayan					
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,250,000.00	100	27,600,000.00	100	51,000,000.00	100	113,850,000.00	Kecamatan Kelumbayan					
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakannya dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,525,000.00	100	8,792,500.00	100	8,392,500.00	100	18,710,000.00	Kecamatan Kelumbayan					
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,217,500.00	100	5,494,300.00	100	3,600,000.00	100	16,311,800.00	Kecamatan Kelumbayan					
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,172,013,834.00	13	1,105,031,635.00	13	1,178,438,927.60	13	1,047,706,146.00	13	1,452,445,371.80	13	1,363,237,406.00	-	0.00	-	0.00	13	3,515,975,187.00	Kecamatan Gisting		
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	699,855,960.00	100	665,831,000.00	100	671,800,000.00	100	636,861,700.00	100	733,289,464.00	100	599,873,500.00	-	0.00	-	0.00	100	1,902,566,200.00	Kecamatan Gisting		
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Gisting		
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persebtase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,519,000.00	100	53,497,000.00	100	14,820,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	214,339,000.00	Kecamatan Gisting	
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,146,600.00	100	8,504,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,504,750.00	Kecamatan Gisting	
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,000,000.00	Kecamatan Gisting
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,450,000.00	100	28,450,000.00	100	28,450,000.00	100	28,269,750.00	100	28,558,100.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	83,719,750.00	Kecamatan Gisting
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	27,625,000.00	100	27,625,000.00	100	83,366,000.00	100	79,110,500.00	100	53,037,700.00	100	45,634,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	152,369,750.00	Kecamatan Gisting

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	13,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Gisting
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	8,220,000.00	100	8,220,000.00	100	32,200,000.00	100	28,283,050.00	100	22,738,400.00	100	9,587,500.00	-	0.00	-	0.00	100	46,090,550.00	Kecamatan Gisting
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP		-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,670,464,870.00	WTP	2,538,651,771.00	WTP	2,084,806,290.00	WTP	7,293,922,931.00	Kecamatan Gisting		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	48,020,500.00	100	55,355,500.00	100	13,455,563.00	100	116,831,563.00	Kecamatan Gisting		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayaka n	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,764,100.00	100	36,764,100.00	100	33,914,100.00	100	107,442,300.00	Kecamatan Gisting		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,518,600.00	100	35,718,600.00	100	52,087,500.00	100	123,324,700.00	Kecamatan Gisting		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar an Urusan Pemerintaha n Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,207,900.00	100	17,532,900.00	100	10,701,800.00	100	41,442,600.00	Kecamatan Gisting		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	40,284,800.00	100	40,284,800.00	100	22,408,500.00	100	102,978,100.00	Kecamatan Gisting		
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,044,733,110.00	13	979,454,396.00	13	1,241,642,147.70	13	1,156,284,403.00	13	1,283,716,058.78	13	1,018,702,685.00	-	0.00	-	0.00	13	3,154,441,484.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	403,250,882.00	100	401,409,062.00	100	363,980,000.00	100	315,225,000.00	100	282,807,630.00	100	248,293,800.00	-	0.00	-	0.00	100	964,927,862.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	177,817,300.00	100	181,500,000.00	100	180,225,400.00	-	0.00	-	0.00	100	358,042,700.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	100		100	2,866,600.00	100	2,834,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,834,500.00	Kecamatan Kota Agung Timur

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	24,900,000.00	100	18,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	74,500,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	38,060,000.00	100	38,060,000.00	100	88,966,000.00	100	87,183,500.00	100	52,842,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	178,086,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan		%	-	0.00	-	0.00	100	23,000,000.00	100	14,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	10,260,000.00	100	10,260,000.00	100	37,300,000.00	100	33,634,000.00	100	17,450,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,623,600.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	40	Program Penyelesaian Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,979,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	0.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,699,908,309.95	WTP	1,605,235,119.00	WTP	1,585,149,530.00	WTP	4,890,292,958.95	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	46,887,000.00	100	17,418,400.00	100	64,305,400.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	03			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayaka n	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,887,500.00	100	26,569,000.00	100	22,261,500.00	100	83,718,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	34,578,900.00	100	76,350,000.00	100	145,128,900.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,815,000.00	100	4,100,000.00	100	16,915,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	13,078,300.00	100	5,838,900.00	100	18,917,200.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	05	4.05	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatka n Gaji dan Tunjangan	13	orang	13	1,186,093,977.00	13	1,118,034,105.00	11	1,175,356,045.80	11	1,057,130,473.00	11	1,202,638,499.24	11	1,010,635,709.00	-	0.00	-	0.00	35	3,185,800,287.00	Kecamatan Kota Agung Barat

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
										Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Target			
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
		(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	4	05	4.0	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	487,207,380.00	100	461,411,221.00	100	460,881,380.00	100	449,254,000.00	100	425,210,270.00	100	382,379,529.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,293,044,750.00	Kecamatan Kota Agung Barat	
	4	05	4.0	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,780,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	199,780,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat		
	4	05	4.0	00	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	13,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,300,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
	4	05	4.0	00	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindaklanjuti	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,146,600.00	100	11,002,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,002,900.00	Kecamatan Kota Agung Barat		
	4	05	4.0	00	08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	100	4,000,000.00	100	12,900,900.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat		
	4	01	4.0	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama	%	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	20,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat		
	4	05	4.0	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	27,650,000.00	100	103,250,000.00	100	102,175,000.00	100	94,996,750.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	156,825,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat	
	4	05	4.0	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	49,303,000.00	100	48,697,700.00	100	103,966,000.00	100	99,611,091.00	100	112,985,550.00	100	86,191,191.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	234,499,982.00	Kecamatan Kota Agung Barat	
	4	05	4.0	00	38	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	14,500,000.00	100	14,360,800.00	100	44,100,000.00	100	32,600,000.00	100	73,608,700.00	100	24,064,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	71,025,200.00	Kecamatan Kota Agung Barat	
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,796,889,621.63	WTP	1,683,546,820.00	WTP	1,538,528,693.00	WTP	5,018,965,134.63	Kecamatan Kota Agung Barat		
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	26,053,800.00	100	65,552,700.00	100	11,706,700.00	100	103,313,200.00	Kecamatan Kota Agung Barat				
	7	1	3			PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	70,707,600.00	100	80,549,600.00	100	77,205,300.00	100	228,462,500.00	Kecamatan Kota Agung Barat				
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,338,000.00	100	28,160,000.00	100	57,934,000.00	100	121,432,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat				
	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,907,500.00	100	13,782,500.00	100	28,690,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat		
	7	1	6			PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,501,400.00	100	43,771,000.00	100	27,637,300.00	100	105,909,700.00	Kecamatan Kota Agung Barat				
	4	05	4.0	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	14	1,220,104,807.00	14	1,151,686,853.00	14	1,331,572,500.60	14	1,204,266,887.00	14	1,381,751,188.15	14	1,257,817,731.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	3,613,771,471.00	Kecamatan Gunung Alip	

HALAMAN VI - 64

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022					Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)						
7 01 04	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,170,000.00	100	35,133,500.00	100	57,090,000.00	100	128,393,500.00	Kecamatan Gunung Alip					
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,082,500.00	100	12,834,800.00	100	2,925,000.00	100	36,842,300.00	Kecamatan Gunung Alip					
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,318,500.00	100	4,859,600.00	100	2,325,000.00	100	12,503,100.00	Kecamatan Gunung Alip					
4 01 4 5 1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	13	1,253,031,552.00	13	1,180,488,051.00	13	1,390,272,472.20	13	1,248,532,824.00	14	1,459,853,657.62	14	1,339,875,141.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	3,768,896,016.00	Kecamatan Limau						
4 4 05 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	360,730,300.00	100	350,751,000.00	100	323,348,400.00	100	289,585,300.00	100	334,094,114.00	100	226,824,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	867,160,800.00	Kecamatan Limau					
4 4 05 00 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,355,000.00	100	36,597,700.00	100	32,521,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	230,876,800.00	Kecamatan Limau						
4 4 01 00 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Limau					
4 4 05 00 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,500.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Limau						
4 4 05 00 10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	100	11,000,000.00	100	7,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	Kecamatan Limau						
1 4 05 00 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	26,300,000.00	100	28,506,100.00	100	19,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,550,000.00	Kecamatan Limau					
4 4 05 00 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	33,927,500.00	100	33,927,500.00	100	81,893,500.00	100	55,943,500.00	100	69,405,800.00	100	34,993,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	124,864,850.00	Kecamatan Limau					
4 4 01 00 32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	100	11,000,000.00	100	5,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	Kecamatan Limau						
4 4 05 00 38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	9,580,000.00	100	9,580,000.00	100	34,180,000.00	100	17,271,200.00	100	18,905,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	26,851,200.00	Kecamatan Limau					
4 4 05 00	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,866,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Limau						

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,832,331,562.00	WTP	1,765,336,734.00	WTP	1,592,364,863.00	WTP	5,190,033,159.00	Kecamatan Limau
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,954,100.00	100	33,495,100.00	100	10,698,200.00	100	60,147,400.00	Kecamatan Limau
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	30,490,000.00	100	21,337,390.00	100	26,177,390.00	100	78,004,780.00	Kecamatan Limau
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,500,000.00	100	34,482,600.00	100	73,482,600.00	100	142,465,200.00	Kecamatan Limau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,925,000.00	100	11,022,500.00	100	2,665,000.00	100	16,612,500.00	Kecamatan Limau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,843,900.00	100	32,683,600.00	100	4,729,700.00	100	61,257,200.00	Kecamatan Limau
4	05	4.05.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	22	1,191,026,547.00	22	1,123,588,469.00	22	1,314,803,839.40	22	1,179,969,796.00	22	1,389,544,877.36	22	1,280,945,110.00	-	0.00	-	0.00	22	3,584,503,375.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	26,000,000.00	100	103,250,000.00	100	103,249,600.00	100	27,546,700.00	100	27,546,700.00	-	0.00	-	0.00		156,796,300.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.05.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100 %	100	38,325,000.00	100	38,325,000.00	100	86,291,000.00	100	86,291,000.00	100	61,515,284.00	100	52,484,684.00	-	0.00	-	0.00		177,100,684.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.05.38	Program Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	9,580,000.00		9,580,000.00		34,180,000.00	100	34,180,000.00	100	20,729,500.00	100	11,613,450.00	-	0.00	-	0.00		55,373,450.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penurunan Kasus Disiplin Aparatur	100 %	100	416,617,600.00	100	408,006,000.00	100	398,262,500.00	100	396,411,500.00	100	404,185,816.00	100	366,879,526.00	-	0.00	-	0.00		1,171,297,026.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100 %	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,817,000.00	100	117,210,000.00	100	116,720,000.00	-	0.00	-	0.00		316,537,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	0.00	100	0.00	100	20,100,000.00	100	19,800,000.00	-	0.00	-	0.00	100	33,300,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
4	05	4.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan	Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindaklanjuti	100 %	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,600.00	100	8,147,600.00	-	0.00	-	0.00		8,147,600.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	05	4.0	1	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	-	0.00	100	200,000,000.00	100	181,302,000.00	100	26,927,000.00	100	20,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	201,302,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
4	05	4.0	5	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Siatim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Siatim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,298,000.00	100	450,000.00	-	0.00	-	0.00	100	450,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
4	05	4.0	5	00	06	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	8,000,000.00	100	7,500,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	11,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
4	05	4.0	1	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,453,500,420.25	WTP	1,400,413,544.00	WTP	1,240,640,915.00	WTP	4,094,554,879.25	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,400,000.00	100	5,310,000.00	100	0.00	100	6,710,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,000,000.00	100	38,699,600.00	100	58,098,500.00	100	108,798,100.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	29,100,000.00	100	36,600,000.00	100	99,900,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,525,000.00	100	20,297,500.00	100	6,390,000.00	100	30,212,500.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
7	1	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,665,000.00	100	0.00	100	10,665,000.00	100	10,665,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat		
4	01	4	8	1		Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,265,252,966.00	13	1,191,752,802.00	13	1,402,316,092.00	13	1,241,959,555.00	13	1,463,800,548.90	13	1,312,561,309.00	-	0.00	-	0.00	13	3,746,273,666.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	05	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	327,941,649.00	100	327,340,900.00	100	321,942,550.00	100	321,942,550.00	100	299,261,800.00	100	285,434,000.00	-	0.00	-	0.00	100	934,717,450.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	01	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Air Nanningan		
4	4	05	00	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,950,000.00	100	139,500,000.00	100	139,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	338,450,000.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	05	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Siatim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Siatim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,350,000.00	100	5,350,000.00	-	0.00	-	0.00	100	5,350,000.00	Kecamatan Air Nanningan		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	8,000,000.00	100	8,000,000.00	100		100		-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,000,000.00	Kecamatan Air Naningan
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,000,000.00	100	20,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	76,750,000.00	Kecamatan Air Naningan		
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	30,530,000.00	100	30,530,000.00	100	78,496,000.00	100	78,496,000.00	100	33,966,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	142,992,000.00	Kecamatan Air Naningan		
4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan		%	-	0.00	-	0.00	100	8,540,000.00	100	8,540,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,540,000.00	Kecamatan Air Naningan		
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	8,900,000.00	100	8,900,000.00	100	32,800,000.00	100	32,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	41,700,000.00	Kecamatan Air Naningan		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,849,936,552.81	WTP	1,696,975,048.00	WTP	1,583,380,950.00	WTP	5,130,292,550.81	Kecamatan Air Naningan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	24,574,400.00	100	9,223,200.00	100	33,797,600.00	Kecamatan Air Naningan				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayaka n	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,725,000.00	100	29,307,390.00	100	21,217,390.00	100	70,249,780.00	Kecamatan Air Naningan				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenterama n dan Keterriban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	34,200,000.00	100	60,000,000.00	100	128,400,000.00	Kecamatan Air Naningan				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar san Urusan Pemerintaha n Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	3,957,500.00	100	0.00	100	3,957,500.00	Kecamatan Air Naningan				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,850,000.00	100	13,200,000.00	100	5,400,000.00	100	28,450,000.00	Kecamatan Air Naningan				
4	05	4.1	5	1	Belanja Tidak Langsu ng	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang	16	1,422,497,948.00	16	1,339,758,315.00	18	1,475,359,573.00	18	1,333,172,252.00	18	1,530,862,290.98	14	1,385,645,230.00	-	0.00	-	0.00	14	4,058,575,797.00	Kecamatan Bulok		
4	05	4.1	5		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,135,000.00	100	28,250,150.00	100	20,984,000.00	-	0.00	-	0.00	100	76,369,000.00	Kecamatan Bulok		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
4 05 4.1 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	78,966,000.00	100	74,674,000.00	100	91,590,600.00	100	74,238,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	178,912,000.00	Kecamatan Bulok	
4 01 4.1 53	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,880,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Bulok
4 05 4.1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,500.00	100	625,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	625,000.00	Kecamatan Bulok
4 05 4.1 10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	% -	0.00	-	0.00	100	6,000,000.00	100	6,000,000.00	100	14,130,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,000,000.00	Kecamatan Bulok
4 01 4.1 38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	8,900,000.00	100	8,900,000.00	100	32,900,000.00	100	32,900,000.00	100	59,229,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	41,800,000.00	Kecamatan Bulok	
4 5 4.1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	337,674,700.00	100	336,906,200.00	100	287,734,800.00	100	281,852,000.00	100	334,090,980.00	100	206,802,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	825,560,200.00	Kecamatan Bulok	
4 5 4.1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% -	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	197,704,000.00	100	84,577,500.00	100	77,980,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	275,684,000.00	Kecamatan Bulok
4 5 4.1 15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemberdayasa n Masyarakat	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,154,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Bulok
4 01 4 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Bulok	
4 05 4.1 8	Program Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan	% -	0.00	-	0.00	100	12,000,000.00	100	7,640,000.00	100	14,570,000.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,640,000.00	Kecamatan Bulok
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,848,966,792.00	WTP	1,591,366,715.00	WTP	1,628,368,202.00	WTP	5,068,701,709.00	Kecamatan Bulok	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanak an dengan Baik	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,352,600.00	100	16,145,000.00	100	0.00	100	22,497,600.00	Kecamatan Bulok		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Keluh aran yang Dapat Diberdayaka n	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,810,100.00	WTP1	55,158,000.00	100	56,570,000.00	100	139,538,100.00	Kecamatan Bulok		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggar an Urusan Pemerintaha n Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,815,600.00	100	34,425,000.00	100	63,450,000.00	100	132,690,600.00	Kecamatan Bulok		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggar an Urusan Pemerintaha n Umum yang Dapat Dilaksanaka n dengan Baik	% -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,759,550.00	100	1,800,000.00	100	19,559,550.00	Kecamatan Bulok		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
2	08	2.0 8.0 1	03																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pendendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2	08	2.0 8.0 1	06																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pendendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2	08	2.0 8.0 1	17																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2	08	2.0 8.0 1	18																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2.08.8.0.1	20	Program Peningkatan Pemahaman Kader Tentang Tumbuh Kembang, Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga	Persentase perempuan yang mempunyai usaha dalam keluarga	52	%	52	106,895,000.00	52	106,620,500.00	60	195,000,000.00	55	194,435,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	55	301,055,500.00	Dinas Pembertaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pembertaya an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.8.0.1	22	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan yang mempunyai usaha dalam keluarga	50	%	50	35,860,000.00	50	35,815,000.00	60	64,553,000.00	55	64,416,250.00	65	21,175,000.00	60	21,147,750.00	-	0.00	-	0.00	60	121,379,000.00	Dinas Pembertaya an Perempuan dan Perlindungan n Anak, Dinas Pembertaya an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.8.0.1	23	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase angka kelahiran pada remaja		%		0.00		0.00	38	27,000,000.00	35	26,878,500.00		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	35	26,878,500.00	Dinas Pembertaya an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.8.0.1	24	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan KB yang Berkualitas	Persentase akseptor KB MKJP	25	%	25	6,942,044,100.00	25	6,457,577,700.00	32	7,996,637,000.00	30	7,723,033,300.00	34	7,686,460,000.00	33	6,859,434,336.00	-	0.00	-	0.00	33	21,040,045,336.00	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pembertaya an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.8.0.1	27	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase angka kelahiran pada remaja	65	%	65	35,000,000.00	65	34,314,500.00	38	46,500,000.00	38	46,394,250.00	37,5	18,721,500.00	37,5	15,487,750.00	-	0.00	-	0.00	37,5	96,196,500.00	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pembertaya an Perempuan, Perlindungan n Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribuna	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	15	2,930,811,950.00	20	3,369,900,000.00	20	6,300,711,950.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana				
			Nilai Kabupaten Layak Anak	0.00 Angka	0.00	128,612,000.00	0.00	128,361,550.00	75.00	293,464,000.00	72.90	288,860,650.00	77.00	81,981,800.00	72.90	80,974,800.00	565.00	1,794,714,400.00	570.00	1,208,493,200.00	585.00	723,896,000.00	585.00	4,225,300,600.00				
2	08	2,0 8,0 1	21	Program Penguatan Kelembagaan Pengrusutamaan gender dan anak	Persentase fasilitas layak anak	35	%	35	78,612,000.00	35	78,454,950.00	37	67,464,000.00	36	66,466,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	36	144,920,950.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana			
2	08	2,0 8,0 1	26	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	85	%	85	50,000,000.00	85	49,906,600.00	90	226,000,000.00	90	222,394,650.00	91	81,981,800.00	90	80,974,800.00	-	0.00	-	0.00	90	353,276,050.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana		
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan fasilitas bak anak pada klaster pendidikan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	32	168,314,400.00	35	62,403,200.00	40	40,000,000.00	40	270,717,600.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana				
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	15	1,626,400,000.00	20	1,146,090,000.00	20	683,896,000.00	20	3,456,386,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana				
			Misi 4 : Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				33,280,758,547.25		31,644,791,265.00		36,218,947,792.85		30,032,602,380.00		28,947,802,509.02		22,005,943,188.00		36,187,183,582.00		45,096,147,715.00		34,959,975,543.00		199,926,643,673.00			
			Tujuan 6 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhana Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	2.37	%	3.40		33,280,758,547.25	2.37	31,644,791,265.00	3.48	36,218,947,792.85	2.97	30,032,602,380.00	3.50	28,947,802,509.02	-2.18	22,005,943,188.00	1.50	36,187,183,582.00	1.75	45,096,147,715.00	2.00	34,959,975,543.00	2.00	199,926,643,673.00	

HALAMAN VI - 76

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
3	03	3.0	00	33																					Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Air Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Pemberdaya n dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan	100	%	100	2,841,999,500.00	100	2,765,083,480.00	100	5,949,172,059.00	100	3,823,384,256.00	100	13,215,400.00	0	13,215,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,601,683,136.00
3	03	3.0	00	34																					Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan sarana Pertanian	100	%	100	15,000,000.00	100	14,300,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,800,000.00
3	03	3.0	00	35																					Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	100	%	100	22,500,000.00	100	22,398,800.00	100	17,600,000.00	100	17,444,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	39,843,050.00
4	04	3.0	00	40																					Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	466,799,900.00	100	453,925,900.00	100	76,505,460.00	100	76,505,460.00	100	38,448,100.00	100	38,448,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	568,879,460.00
3	03	3.0	00	86																					Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Penyediaan dan Pengembangan Pembiayaan Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembang an Pembiayaan Pertanian	100	%	100	15,000,000.00	100	14,979,000.00	100	12,100,000.00	100	12,082,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,061,500.00
2	03	2.0	00	02																					Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	341,567,744.00	100	302,569,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	302,569,750.00
2	03	2.0	00	17																					Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program peningkatan pemasaan hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaan hasil produksi pertanian/perkebunan	%	-	-	0.00	-	0.00	100	174,353,100.00	100	148,980,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	148,980,600.00
2	03	2.0	00	18																					Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	%	-	-	0.00	-	0.00	100	76,670,000.00	100	67,218,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	67,218,500.00
2	03	2.0	00	19																					Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	%	-	-	0.00	-	0.00	100	259,440,000.00	100	258,614,025.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	258,614,025.00
2	03	2.0	00	21																					Dinas Pangan dan Pertanian			
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase pencegahan dan penanggulan gan penyakit ternak	%	-	-	0.00	-	0.00	100	51,800,000.00	100	49,549,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	49,549,750.00

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
3	03	2.0 3	00 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	-	0.00	-	0.00	100	1,964,455,000.00	100	1,944,917,514.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,944,917,514.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 27	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	65,500,000.00	80	53,957,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	53,957,550.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 33	Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Air Sentra Tatanan Pangan dan Hortikultura	Persentase Pemberdayaa n Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Air Sentra Tatanan Pangan dan Hortikultura	%	-	0.00	-	0.00	100	251,200,000.00	100	249,887,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	249,887,750.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 36	Program Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)	Persentase Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)	%	-	0.00	-	0.00	100	14,220,000.00	100	14,211,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,211,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 37	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Populasi dan Produktifitas Ternak Kambing Saburai	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Populasi dan Produktifitas Ternak Kambing Saburai	%	-	0.00	-	0.00	100	17,000,000.00	100	16,771,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,771,200.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 51	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	%	-	0.00	-	0.00	100	35,640,000.00	100	34,599,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,599,500.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 54	Program Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan	%	-	0.00	-	0.00	100	1,436,464,000.00	100	1,349,634,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,349,634,900.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 60	Program Implementasi Indikasi Geografi (IG) Kopi Robusta Lampung	Persentase Implementasi Indikasi Geografi (IG) Kopi Robusta Lampung	%	-	0.00	-	0.00	100	54,514,000.00	100	52,860,000.00	100	50,984,000.00	100	49,404,000.00	-	0.00	-	0.00	100	102,264,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0 3	00 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	393,131,820.00	100	391,756,120.00	-	0.00	-	0.00	100	391,756,120.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0 3	00 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	223,220,950.00	80	213,716,350.00	-	0.00	-	0.00	80	213,716,350.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 16	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	293,471,250.00	57.14	291,275,757.00	-	0.00	-	0.00	57.14	291,275,757.00	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
3	03	2.03	0018	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak									100	63,802,350.00	100	61,002,350.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	61,002,350.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0019	Program peningkatan produksi hasil peternakan									100	40,123,000.00	50	34,507,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	50	34,507,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0022	Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Air Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura									100	966,055,388.00	66.67	936,211,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	66.67	936,211,800.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0023	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan Air Sentra Bidang Pertanian									100	1,289,474,900.00	100	1,289,253,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,289,253,500.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0024	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian									100	12,485,600.00	100	12,485,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,485,600.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0028	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani									100	27,175,000.00	100	27,109,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,109,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0029	Program Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan									100	207,384,901.00	50	142,323,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	50	142,323,300.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.03	0031	Program Penyediaan dan Pengembangan Pembiayaan Pertanian									100	52,464,400.00	100	52,429,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	52,429,400.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	0.00	-	0.00	WTP	18,846,327,390.00	WTP	17,764,897,220.00	WTP	13,586,676,484.00	100	50,197,901,094.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									-	0.00	-	0.00	69	403,250,442.00	179	482,706,700.00	199	193,615,500.00	199	1,079,572,642.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									-	0.00	-	0.00	24	3,313,268,546.00	29	5,940,582,000.00	34	3,732,202,900.00	34	12,986,053,446.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
										Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)											
3	27	05																																	

Kode				Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,598,004,315.00	WTP	5,814,162,066.00	WTP	7,955,393,362.00	WTP	15,367,559,743.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	507,307,500.00	5	965,091,700.00	5	1,499,886,750.00	13	2,972,285,950.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	2,945,997,900.00	11	0.00	23	2,945,997,900.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASHU (aman Sehat Utuh dan Halal)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	102,574,500.00	100	289,578,200.00	200	392,152,700.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan		
3	01	3.01	3.00	5	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	24 Orang	24	2,368,927,199.00	24	2,227,643,622.00	24	2,672,121,356.60	24	2,420,460,479.00	24	2,514,804,458.35	24	2,306,877,211.00	-	0.00	-	0.00	72	6,954,981,312.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	98.81 %	100	2,004,508,000.00	98.81	1,980,754,436.00	100	1,951,906,825.00	98.84	1,929,334,148.00	100	1,367,171,376.25	92.17	1,260,156,083.00	-	0.00	-	0.00	92.17	5,170,244,667.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	97.69 %	100	19,500,000.00	97.69	19,050,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	97.69	19,050,000.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	73,257,700.00	100	73,257,500.00	100	19,900,000.00	100	18,100,000.00	-	0.00	-	0.00	100	166,357,500.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	25	Program Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100 %	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	14,940,100.00	100	14,940,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	44,940,100.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	98.31 %	100	703,422,000.00	98.31	691,499,500.00	100	691,096,000.00	97.89	676,488,500.00	100	768,879,000.00	96.06	738,551,400.00	-	0.00	-	0.00	96.06	2,106,539,400.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	27	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bina Usaha	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bina Usaha	99.98 %	100	105,000,000.00	99.98	104,983,350.00	100	123,320,000.00	100	123,317,500.00	100	9,750,000.00	100	9,750,000.00	-	0.00	-	0.00	100	238,050,850.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	28	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	99.62 %	100	298,373,000.00	99.62	297,229,000.00	100	148,293,000.00	98.48	146,038,000.00	100	12,444,000.00	53.07	6,604,000.00	-	0.00	-	0.00	53.07	449,871,000.00	Dinas Perikanan	
3	01	3	00	34	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil dan Menengah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil dan Menengah	100 %	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	208,829,775.00	100	208,829,775.00	100	11,810,200.00	58.59	6,920,000.00	-	0.00	-	0.00	58.59	245,749,775.00	Dinas Perikanan	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	04	3	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	53,720,743.00	100	53,720,743.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	53,720,743.00	Dinas Perikanan		
3	25	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah		WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,962,321,915.00	WTP	3,821,480,263.00	WTP	3,692,636,847.00	WTP	11,476,439,025.00	Dinas Perikanan			
3	25	3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	417,294,300.00	100	66,280,700.00	100	215,735,600.00	100	699,310,600.00	Dinas Perikanan				
3	25	4			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	612,725,400.00	100	83,360,000.00	100	61,840,100.00	100	757,925,500.00	Dinas Perikanan				
3	25	6			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	67,510,000.00	100	54,760,000.00	100	49,057,500.00	100	171,327,500.00	Dinas Perikanan				
					Skor Pola Harapan	74.11	Poin	74.11	461,400,000.00	74.11	446,005,900.00	75.00	985,342,200.00	83.85	853,993,400.00	76.00	10,874,800.00	73.65	9,663,550.00	74.00	5,754,845,474.00	84.00	6,404,464,866.00	85.00	3,031,253,600.00	85.00	16,500,226,790.00	
2	03	2.0	3	01	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100	%	100	304,400,000.00	100	292,201,750.00	100	224,367,200.00	100	175,830,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	468,032,150.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian		
2	03	2.0	3	03	20	program Pengembangan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Distribusi Pangan Dan Cadangan Pangan Masyarakat	100	%	100	34,750,000.00	100	34,714,000.00	100	45,000,000.00	100	42,428,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	77,142,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian		
2	03	2.0	3	00	26	Program Peningkatan Jejaring Kerja Sama Penyuluh dan Agribisnis	Persentase Peningkatan Jejaring Kerja Sama Penyuluh dan Agribisnis	100	%	100	99,750,000.00	100	96,636,150.00	100	15,975,000.00	100	15,862,500.00	100	10,874,800.00	100	9,663,550.00	-	0.00	-	0.00	100	122,162,200.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.0	3	00	36	Program Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)	Persentase Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)	100	%	100	22,500,000.00	100	22,454,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	22,454,000.00	Dinas Ketahanan Pangan		
2	03	2.0	3	00	20	Program Pengembangan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat	%	-	0.00	-	0.00	100	100,000,000.00	100	28,319,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	28,319,500.00	Dinas Pangan dan Pertanian	

HALAMAN VI - 83

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
2	15	1																							Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	5,217,395,519.00	WTP	5,188,967,903.00	WTP	4,674,076,593.00	WTP	15,080,440,015.00		
2	15	0.2																							Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia	60	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	50	1,335,708,690.00	50	529,133,635.00	0.50	1,208,886,200.00	50	3,073,728,525.00		
2	15	3																							Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran	55	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	300,940,000.00	40	97,340,000.00	40	13,090,000.00	40	411,370,000.00		
1	03	1.0 3.1	15																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah pembangunan jalan dan jembatan	10	Paket	10.00		26,131,550,000.00	10.00	20,642,815,000.00	17.00	36,638,200,000.00	17.00	27,349,438,630.00	8.00	1,256,724,050.00	8.00	1,201,445,200.00	-	0.00	-	0.00	35.00	49,193,698,830.00
1	03	1.0 3.1	16																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Program Pengadaan Alat Berat	Persentase Pengadaan Alat Berat		%	-		0.00	-	0.00	100.00	4,202,250,000.00	100.00	3,556,900,000.00	0.00	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	3,556,900,000.00
1	03	1.0 3.1	18																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten	2	Paket	1.00		36,000,000.00	0.00	35,966,250.00	2.00	6,243,900,000.00	2.00	3,845,876,537.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2.00	3,881,842,787.00
			Program Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis	Jumlah Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis	10	Paket	10.00		22,670,450,000.00	10.00	18,796,111,117.00	18.00	49,766,133,000.00	18.00	42,680,025,617.00	1.00	6,126,000,000.00	1.00	1,150,220,386.00	-	0.00	-	0.00	29.00	62,626,357,120.00

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1	03	1.0 3.1	36	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan Kabupaten	Jumlah Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan Kabupaten	Paket	-	0.00	-	0.00	5.00	1,964,000,000.00	5.00	1,756,735,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	1,756,735,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0 3.1	53	Program Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan	Jumlah Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan	106 Paket	106.00	34,704,980,000.00	106.00	24,314,028,400.00	150.00	39,439,450,000.00	150.00	32,641,903,063.00	8.00	4,862,010,579.00	8.00	3,930,759,050.00	-	0.00	-	0.00	264.00	60,886,690,513.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0 3.1	58	Program Pengembangan Perencanaan Infrastruktur	Persentase Pengembangan Perencanaan Infrastruktur	100 %	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	3,054,478,800.00	100.00	2,620,510,560.00	-	0.00	-	0.00	100.00	2,620,510,560.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0 3.1	60	Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jumlah Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	27.00	55,949,856,750.74	27.00	50,431,757,958.23	-	0.00	-	0.00	27.00	50,431,757,958.23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	11,020,213,345.58	100.00	46,188,441,602.00	100.00	57,128,096,763.00	100.00	114,336,751,710.58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	32.00	90,404,685,487.62	13.00	34,693,409,300.00	45.00	48,929,142,805.00	91.00	174,027,237,592.62	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				Sasaran 13 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Wilayah	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	53.65 %	-	91,536,445,530.80	53.65	79,048,893,497.00	-	102,840,154,632.60	54.77	89,297,195,935.00	-	82,465,875,795.96	56.10	76,800,527,565.00	57.00	204,927,275,336.80	60.00	193,870,744,066.00	65.00	90,525,857,520.00	65.00	734,470,493,919.80

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Target	Rp	Kinerja	Realisasi	Rp	Kinerja	Target	Rp	Kinerja	Realisasi	Rp	Kinerja	Target	Rp	Kinerja	Target	Rp	Kinerja	Target		Rp	Kinerja	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
1	03	1.0 5.1	01		BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	118	Orang	118.00	9,400,320,471.00	118.00	8,863,764,412.00	110.00	9,063,229,647.00	110.00	7,949,871,585.00	105.00	8,303,050,670.53	105.00	7,652,026,163.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	105.00	24,465,662,160.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100.00	6,411,753,000.00	100.00	5,749,279,879.00	100.00	5,551,545,600.00	100.00	5,292,337,334.00	100.00	5,100,745,744.47	100.00	4,786,774,165.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	15,828,391,378.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100	%	100.00	470,000,000.00	100.00	456,599,500.00	-	0.00	-	0.00	100.00	580,000,000.00	100.00	538,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	994,599,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	1.0 4.1	06		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	51,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 4.1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100.00	1,540,647,000.00	100.00	1,281,485,003.00	100.00	1,842,500,000.00	100.00	1,152,600,500.00	100.00	197,792,200.00	100.00	175,654,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	2,609,739,703.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	08		Program Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur	Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur	100	%	-	0.00	-	0.00	100.00	1,006,900,000.00	100.00	880,936,800.00	100.00	574,971,528.30	100.00	494,997,391.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	1,375,934,191.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Input/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
																									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
																									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	16																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	16																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	16																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	18	0																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	21																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	27																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	03	1.0 3.1	29																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				2	Paket	2.00	376,500,000.00	2.00	369,421,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2.00	369,421,400.00		
1	03	1.0 3.1	24																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				3707	ha	3707.00	679,200,000.00	3707.00	645,661,882.00	3708.00	535,000,000.00	3708.00	503,098,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	7415.00	1,148,760,482.00		
1	03	1.0 3.1	31	0																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				100	%	100.00	195,000,000.00	100.00	19,952,000.00	100.00	196,500,000.00	100.00	21,482,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	41,434,000.00		
1	03	1.0 3.1	34																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				44	Paket	49.00	19,313,914,000.00	49.00	16,473,612,700.00	45.00	12,293,699,000.00	45.00	10,364,878,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	94.00	26,838,491,000.00		
1	03	1.0 3.1	37																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				100	%	100.00	69,500,000.00	100.00	59,005,200.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	59,005,200.00		
1	03	1.0 3.1	38																						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				100	%	100.00	101,350,000.00	100.00	94,721,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	94,721,450.00		

HALAMAN VI - 90

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
							Target		Realisasi	Kinerja	Rp	Target		Realisasi	Kinerja	Rp	Target		Realisasi	Kinerja	Rp	Target		Kinerja	Rp	Target		Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
1	03	1.0	45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Percentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	100	%	100.00	8,835,899,000.00	100.00	5,159,756,300.00	100.00	12,732,615,000.00	100.00	7,177,664,590.00	100.00	2,051,999,898.00	100.00	1,313,091,038.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	13,650,511,928.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0	47	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Orang	-	0.00	-	0.00	600.00	1,102,100,000.00	600.00	1,012,760,750.00	0.00	2,278,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	600.00	1,012,760,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0	49	Program Pengembangan dan Penataan Kota	Jumlah Pengembangan dan Penataan Kota	2 Dokumen	2.00	189,500,000.00	2.00	175,617,000.00	2.00	579,800,000.00	2.00	571,403,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.00	747,020,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0	54	Program Penunjang Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Percentase Penunjang Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program (IPDMIP)	100	%	-	0.00	-	0.00	100.00	223,600,000.00	100.00	190,237,481.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	190,237,481.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0	61	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi	Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	3,559,622,651.42	11.00	3,196,031,760.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	3,196,031,760.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0	62	Program Normalisasi Alur Sungai	Jumlah Normalisasi Alur Sungai	Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	174,131,074.42	1.00	173,381,040.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	173,381,040.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1	03	1.0 3.1	63	Program Pengembangan dan Penataan Ruang	Percentase Pengembang an dan Penataan Ruang	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	961,639,200.00	100.00	369,009,269.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	369,009,269.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	64	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Percentase Pengembang an Jasa Konstruksi	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	237,748,500.00	100.00	229,176,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	229,176,700.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	15,127,433,886.00	WTP	15,668,617,015.00	WTP	19,162,716,374.00	WTP	49,958,767,275.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	37.00	59,624,710,146.00	27.00	36,640,392,327.00	73.00	10,241,646,359.00	73.00	106,506,748,832.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Percentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten		-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	56.00	17,739,821,600.00	31.00	9,974,325,300.00	66.00	585,680,000.00	66.00	28,299,826,900.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	52.00	15,784,920,550.00	12.00	3,809,234,300.00	26.00	960,680,000.00	90.00	20,554,834,850.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Percentase Pengembangan an Permukiman		-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	51,343,131,600.80	100.00	73,514,556,493.00	100.00	28,031,093,422.00	100.00	152,888,781,515.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Percentase Bangunan Gedung Kabupaten		-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	14,054,617,124.00	100.00	11,348,944,054.00	100.00	8,760,507,600.00	100.00	34,164,068,778.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	1,830,883,231.00	100.00	3,759,789,744.00	100.00	2,792,642,144.00	100.00	8,383,315,119.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan an Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	186,752,300.00	100.00	535,961,000.00	100.00	486,817,000.00	100.00	1,209,530,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	2,503,170,300.00	100.00	4,414,887,200.00	100.00	1,387,962,600.00	100.00	8,306,020,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan an Perumahan Kabupaten	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	60,039,500.00	100.00	1,743,620,000.00	100.00	1,276,432,000.00	100.00	3,080,091,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan a Kawasan Permukiman	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	5,609,855,000.00	100.00	14,087,886,000.00	100.00	4,977,153,000.00	100.00	24,674,894,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																							
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	85,725,500.00	-	0.00	100.00	0.00	100.00	85,725,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	8,951,214,500.00	100.00	9,042,570,000.00	100.00	0.00	100.00	17,993,784,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	8		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	429,277,000.00	-	0.00	-	0.00	100.00	429,277,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	9		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	115,414,500.00	-	0.00	100.00	0.00	100.00	115,414,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	101,850,500.00	-	0.00	100.00	0.00	100.00	101,850,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	2.1	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	28.00 orang	28.00	2,597,057,634.00	28.00	2,464,534,457.00	28.00	2,899,258,895.60	28.00	2,660,710,562.00	28.00	2,997,353,812.77	28.00	2,658,107,341.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	84.00	7,783,352,360.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100.00 %	100.00	911,725,800.00	100.00	911,714,500.00	100.00	1,197,408,340.00	100.00	1,139,966,464.00	100.00	1,124,347,324.40	100.00	987,798,188.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	3,039,479,152.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	100.00 %	100.00	27,000,000.00	100.00	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	27,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100.00 %	100.00	18,574,200.00	100.00	18,574,200.00	100.00	27,386,150.00	100.00	25,211,150.00	100.00	28,568,500.00	100.00	26,387,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	70,172,350.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
2	10	2.1 0	26		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100.00	%	100.00	2,556,550,000.00	100.00	2,556,540,000.00	100.00	3,475,125,000.00	100.00	3,193,093,882.00	100.00	2,870,997,278.00	100.00	2,762,026,340.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	8,511,660,222.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1 0	27		PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN E GOV KAB TANGGAMUS	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan an E Gov Kabupaten Tanggamus	100.00	%	100.00	59,860,000.00	100.00	59,860,000.00	100.00	409,805,750.00	100.00	269,514,386.00	100.00	60,103,100.00	100.00	40,562,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	369,936,386.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1 0	29		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	100.00	%	100.00	348,190,000.00	100.00	348,168,996.00	100.00	106,165,000.00	100.00	52,503,000.00	100.00	71,417,100.00	100.00	39,167,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	439,839,546.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	2.1 0	33		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		100.00	%	100.00	259,400,000.00	100.00	259,400,000.00	100.00	550,450,000.00	100.00	527,446,000.00	100.00	11,660,000.00	100.00	11,660,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	798,506,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	14	2.1 0	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI / STATISTIK DAERAH	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100.00	%	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00	79,125,000.00	100.00	79,125,000.00	100.00	49,475,025.00	100.00	20,013,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	119,138,450.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	01	32		PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian	100.00	%	100.00	25,500,000.00	100.00	25,500,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	29,940,000.00	100.00	21,365,000.00	100.00	13,641,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	69,081,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,912,885,949.00	WTP	3,737,790,883.00	WTP	4,026,349,021.00	WTP		11,677,025,853.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	6,491,337,500.00	100.00	4,807,109,750.00	100.00	3,224,491,000.00	100.00		14,522,938,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	875,230,000.00	100.00	730,060,000.00	100.00	4,503,890,000.00	100.00		6,109,180,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	28,250,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	46,510,000.00	100.00		99,760,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02			PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	70,754,650.00	100.00	30,000,000.00	100.00	61,287,000.00	100.00		162,041,650.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Sasaran 14 : Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi	Ratio Elektrifikasi	89.60	%	89.60	331,200,000.00	89.60	322,433,500.00	95.30	1,024,930,000.00	96.75	978,496,000.00	96.10	90,812,800.00	96.98	78,496,600.00	97.00	705,449,128.00	97.50	432,061,050.00	98.00	5,345,000.00	98.00	2,522,281,278.00	
3	05	2.0 1	00	17	Program pembinaan dan Pengembangan Bidang energi dan Ketenagalistrikan	Persentase pembinaan dan Pengembangan Bidang energi dan Ketenagalistrikan	96.56	%	100	183,600,000.00	4.03889	177,287,000.00	100	980,000,000.00	95.67	937,557,000.00	100	90,812,800.00	2.34167	78,496,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2.341667	1,193,340,600.00	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
3	05	2.01	00	19	Program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Jumlah pengelolaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi	97.63	%	100	147,600,000.00	97.63	145,146,500.00	100	44,930,000.00	100	40,939,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	186,085,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	37,054,900.00	100	5,345,000.00	100	42,399,900.00	Dinas Tenaga Kerja			
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pemakaian Energi Listrik Dalam Rangka Percepatan Perekonomian Dan Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	705,449,128.00	100	395,006,150.00	100	0.00	100	1,100,455,278.00	Dinas Tenaga Kerja			
					Tujuan 7 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.00	285,524,300.00	6.50	384,419,300.00	7.00	60,000,220.00	7.00	729,943,820.00			
					Sasaran 15 : Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.00	285,524,300.00	6.50	384,419,300.00	7.00	60,000,220.00	7.00	729,943,820.00			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	209,054,300.00	20	275,314,300.00	20	0.00	60	484,368,600.00	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	76,470,000.00	100	109,105,000.00	100	60,000,220.00	300	245,575,220.00	Dinas Lingkungan Hidup			
					Tujuan 7 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.27	Poin	55.27	5,262,067,575.00	55.27	5,023,740,503.00	66.00	10,184,994,315.40	62.50	9,486,842,356.00	66.50	8,848,205,711.26	63.76	7,478,584,735.00	64.27	13,058,839,144.00	64.92	9,428,740,867.00	65.56	7,278,853,802.00	65.56	51,755,601,407.00	
					Sasaran 16 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.27	Poin	55.27	5,262,067,575.00	55.27	5,023,740,503.00	66.00	10,184,994,315.40	62.50	9,486,842,356.00	66.50	8,848,205,711.26	63.76	7,478,584,735.00	64.27	13,058,839,144.00	64.92	9,428,740,867.00	65.56	7,278,853,802.00	65.56	51,755,601,407.00	
2	05	2.05	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	30	orang	30	2,274,357,175.00	30	2,150,366,221.00	30	3,471,214,251.40	30	3,131,477,923.00	30	3,583,384,670.26	30	2,807,549,724.00	-	0.00	-	0.00	30	8,089,393,868.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	05	2.05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100	%	100	1,374,370,400.00	100	1,335,918,855.00	100	2,006,279,744.00	100	1,902,536,673.00	100	2,139,044,241.00	100	1,851,973,511.00	-	0.00	-	0.00	100	5,090,429,039.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	05	2.05	01	07	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kualitas kinerja aparatur	100	%	80	21,000,000.00	100	21,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		

HALAMAN VI - 97

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupasan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
5	1	1			Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	18	Orang	20	1,599,252,053.00	18	1,517,252,780.00	18	1,967,777,527.60	17	1,761,068,124.00	20	2,027,952,192.17	16	1,865,968,099.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	51	5,144,289,003.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	1,244,391,200.00	100	1,168,051,938.00	100	1,336,918,340.00	100	1,250,998,408.00	100	1,226,418,234.00	100	1,035,291,818.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,454,342,164.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	19,500,000.00	100	19,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
4	05	4.05	0006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	100	34,370,000.00	100	32,870,000.00	100	14,988,000.00	100	14,988,000.00	100	44,739,300.00	100	36,492,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	84,350,500.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0010		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	-	0.00	-	0.00	100	30,000,000.00	100	28,920,000.00	100	10,825,000.00	100	9,825,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	38,745,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0093		Program Kedarifan dan Logistik	Persentase Penanganan Kedarifan dan Logistik	100	%	100	2,024,888,800.00	100	2,011,890,300.00	100	373,604,000.00	100	323,112,500.00	100	83,776,200.00	100	38,156,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,373,158,800.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0094		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100	%	100	65,605,000.00	100	65,525,000.00	100	156,363,000.00	100	154,926,500.00	100	168,420,000.00	100	160,240,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	380,691,500.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0060		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang Tertangani	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang Tertangani	100	%	100	130,900,000.00	100	130,310,000.00	100	147,620,750.00	100	146,034,450.00	100	20,930,929,600.00	100	11,261,809,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,538,153,950.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0061		Program Pencegahan dan Mitigasi	Persentase Pencegahan dan Mitigasi	100	%	100	90,000,000.00	100	89,217,250.00	100	77,465,000.00	100	77,291,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	166,509,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	0063		Program Kesiapsiagaan	Persentase Kesiapsiagaan	100	%	100	47,550,000.00	100	32,050,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	32,050,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01			Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,867,684,599.00	WTP	3,311,968,028.00	WTP	3,068,660,849.00	WTP	10,248,313,476.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang dibina	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,941,464,500.00	100	558,543,250.00	100	694,290,000.00	100	11,194,297,750.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Mini 6 : Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal					12,226,519,282.00		11,642,778,452.00		26,358,206,751.60		23,255,533,541.00		16,475,141,330.47		13,762,444,010.00		11,992,935,258.00		8,577,314,342.00		6,670,118,003.00		75,901,123,606.00	
					Tujuan 8 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	10.60	%	10.60	12,226,519,282.00	10.60	11,642,778,452.00	11.00	26,358,206,751.60	7.78	23,255,533,541.00	12.00	16,475,141,330.47	-4.31	13,762,444,010.00	1.25	11,992,935,258.00	1.50	8,577,314,342.00	2.00	6,670,118,003.00	2.00	75,901,123,606.00	

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung jawab					
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Rp	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
					Sasaran 18 : Meningkatnya Daya Saing Parwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10.00 %	10.00	12,226,519,282.00	10.00	11,642,778,452.00	14.00	26,358,206,751.60	23.50	23,255,533,541.00	18.00	16,475,141,330.47	-83.00	13,762,444,010.00	20.00	11,992,935,258.00	25.00	8,577,314,342.00	30.00	6,670,118,003.00	30.00	75,901,123,606.00	
3	2	01	5		BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang Mendapatka n Gaji dan Tunjangan	69 Orang	73	3,569,187,582.00	69	3,377,652,503.00	109	5,320,066,751.60	94	4,598,186,023.00	112	5,507,398,857.97	80	3,916,374,427.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	11,892,212,953.00	Dinas Parwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan dengan baik	98 %	100	2,212,496,800.00	98	2,174,218,795.00	100	2,388,987,400.00	94	2,248,010,196.00	100	2,024,219,504.50	97	1,965,121,033.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	97	6,387,350,024.00	Dinas Parwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	47,000,000.00	100	47,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	47,000,000.00	Dinas Parwisata, Dinas Kebudayaan
3	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	98 %	100	53,027,500.00	98	52,079,700.00	100	97,273,250.00	98	95,634,750.00	100	138,563,350.00	96	133,574,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	96	281,288,900.00	Dinas Parwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	13		Program Pemasaan Parwisata	Persentase Pemasaan Parwisata	99.9 %	100	139,500,000.00	99	139,344,750.00	100	106,078,750.00	0.997231	105,785,000.00	100	158,550,000.00	100	158,550,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	403,679,750.00	Dinas Parwisata, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	17		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembang an Kemitraan	%	-	0.00	-	0.00	100	60,180,000.00	100	60,180,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	60,180,000.00	Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	23		Program Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui Pameran/Expo/Fe stival	Persentase Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui Pameran/Ex po/Festival	99.8 %	100	1,052,940,000.00	99	1,050,861,150.00	100	652,000,500.00	99	649,357,100.00	100	49,079,600.00	97	47,618,200.00	0.00	-	0.00	-	0.00	97	1,747,836,450.00	Dinas Parwisata, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga	
3	02	01	23		Program Pengembangan Destinasi Parwisata	Persentase Pengembang an Destinasi Parwisata	91 %	100	3,808,069,500.00	90	3,465,250,404.00	100	3,898,045,750.00	88	3,440,918,766.00	100	4,349,118,014.00	85	3,728,784,080.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	86	10,634,953,250.00	Dinas Parwisata, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	25		Program Pengembangan Sumberdaya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembang an Sumberdaya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	99 %	100	221,931,000.00	98	219,632,500.00	100	74,349,500.00	100	74,349,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	293,982,000.00	Dinas Parwisata, Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga
3	02	01	26		Program Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggaman	Persentase Pembanguna n Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggaman	%	-	0.00	-	0.00	100	30,927,500.00	99	30,895,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99	30,895,500.00	Dinas Parwisata, Kebudayaan Kepemudaa n dan Olahraga

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
3	02	01	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Sebelumnya	99.99	%	100	230,757,700.00	99	230,725,800.00	100	274,920,100.00	99	274,919,200.00	100	1,352,947,220.00	99	1,350,556,320.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99	1,856,201,320.00	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	41	Peningkatan Kapasitas SDM dan Jasa Usaha Industri Pariwisata	Persentase Peningkatan SDM dan Jasa Usaha Industri Pariwisata	99.87	%	100	90,000,000.00	99	89,886,900.00	100	20,545,000.00	100	20,545,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	110,431,900.00	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	42	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	Persentase Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	0.9853	%	100	54,430,000.00	98	53,631,750.00	100	5,221,000.00	99	5,203,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99	58,834,750.00	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	32	Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahaan di Bidang Ekonomi Kreatif	-		0.00	-	0.00	100	94,150,000.00	81	76,674,330.00	100	1,025,900.00	100	1,025,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	77,700,230.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	02	01	21	Program Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	Persentase Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	-		0.00	-	0.00	100	469,778,750.00	84	399,137,150.00	100	76,205,100.00	99	75,549,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99	474,686,250.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	02	01	21	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	-		0.00	-	0.00	100	194,550,000.00	62	121,680,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	63	121,680,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	02	01	21	Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Persentase Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	-		0.00	-	0.00	100	12,141,795,000.00	0.870884	10,574,096,226.00	100%	2,724,733,784.00	0.84118	2,291,990,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	84	12,866,086,726.00	Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	16	01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Seni Budaya	99.47	%	100	480,450,000.00	99	477,925,000.00	100	365,162,500.00	86	315,924,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	87	793,849,500.00	Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	16	01	18	Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	98.73	%	100	170,000,000.00	0.987294	167,840,000.00	100	21,288,000.00	100	21,288,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	189,128,000.00	Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	16	01	19	Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	100	%	100	62,729,200.00	100	62,729,200.00	100	91,107,000.00	99	90,969,300.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	193,698,500.00	Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	16	01	20	Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan	Persentase Perencanaan Pembangunan Kebudayaan	100	%	100	34,000,000.00	100	34,000,000.00	100	51,780,000.00	100	51,780,000.00	100	53,300,000.00	100	53,300,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	139,080,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaan lokal yang Difasilitasi Pengembang any	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	30	883,500,000.00	40	494,576,500.00	50	283,500,000.00	50	1,661,576,500.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
01	01		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembang any	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	264,022,550.00	-	0.00	-	0.00	20	264,022,550.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
01	01		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang Teregister	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	38,000,000.00	-	0.00	-	0.00		38,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
01	01		PROGRAM PEMBIHAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Penelitian Dokumen Sejarah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	50	40,000,000.00	60	0.00	60	40,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOT A	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	6,675,865,707.00	WTP	6,233,481,012.00	WTP	5,058,008,503.00	WTP	17,967,355,222.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pembanguna n Fasilitas Destinasi Pariwisata	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	76	3,747,909,301.00	77	1,495,663,230.00	78	1,328,609,500.00	78	6,572,182,031.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	01	02	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi/ Ee nt Pariwisata yang Diskut	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	380,017,700.00	45	288,613,600.00	48	0.00	48	668,631,300.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Keparwisataa n dan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	3,620,000.00	45	0.00	48	0.00	48	3,620,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembang an Ekonomi Kreatif	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	45	24,980,000.00	48	0.00	48	24,980,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
JUMLAH						1,647,834,231,117.93		1,527,711,794,512.80		1,814,735,408,301.66		1,678,742,417,518.67		1,807,630,524,556.50		1,648,643,730,414.86		1,986,334,724,658.65		1,930,197,496,585.00		1,869,941,910,400.00		10,641,572,074,090.00

Tabel VI.5 Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus Terhadap Program Prioritas Nasional

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	PN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas																				
	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	134	14.5	15.7	17.9	19.5	URUSAN ESDM : Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Bauran Energi (%)	279	301	319	336	349	URUSAN ESDM : Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan (%)	-	100	100	100	100
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68.00	68.00	68.80	69.20	70.30			-	-	-	-	-							
	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/ hari)	2100	2100	2100	2100	2100	URUSAN PANGAN : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan konsumsi masyarakat (%).	86	86	87	88	89	URUSAN PANGAN : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari (%)	-	16	16	16	16
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57		Stabilitas harga pangan (koefisien)	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%	cv ≤ 5%							
	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	36	37	38	39	40	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala kecil (rasio)	-	050	050	050	050	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan UMKM (%)	-	100	100	100	100
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pengembangan UKMK	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembangan dan Usaha (persen)	-	419	607	822	1,091	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pengembangan UKMK	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	-	100	100	100	100
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	51	52	53	54	55	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	-	3,962	4,198	4,434	4,670	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Peresentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	-	3,066	3,774	4,245	4,717	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang di awasi dan di periksa (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	-	2,655	2,655	2,655	2,655	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan dan perlindungan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	-	1,415	14.15	2,123	2,358	URUSAN KOPERASI DAN UMKM : Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	-	100	100	100	100
																	Persentase UTTP yang diawasi (%)	-	100	100	100	100
																	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan (%)	-	100	100	100	100

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024																					
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET																			
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)															
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	URUSAN PERTANIAN : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. URUSAN PERTANIAN : Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana URUSAN PERTANIAN : Program Penyuluhan Pertanian.	1. Padi (ton) 2. Jagung (ton) 3. Ubi Kayu (ton) 4. Cabai Besar (ton) 5. Bawang Merah (ton) 6. Nanas (ton) 7. Pisang (ton) 8. Manggis (ton)	2.650 2.610 5.997 37 2 662 1.208 4	2.705 2.675 6.146 39 2 664 1.221 4	2.786 2.742 6.300 41 2 682 1.269 4	2.870 2.810 6.458 43 2 701 1.305 4	2.956 2.825 6.619 45 3 722 1.329 4	URUSAN PERTANIAN : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. URUSAN PERTANIAN : Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana URUSAN PERTANIAN : Program Penyuluhan Pertanian.	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%) Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%) Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian (%) Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina (%)	-	24	29	34	34															
				-	-	5	11	11																													
				-	0.08	0.08	0.08	0.08																													
				-	5	5	5	5																													
				Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	65	69	72	75															78	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Volume Ekspor Perikanan (ton)	188 191 19	151 161 18	159 169 19	167 187 20	184 206 22	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap (%) Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya (%) Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan (%)	-	100	100	100	100
					-	100	100	100															100														
					-	100	100	100															100														
				Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	50	55	65	75															81	URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri di Provinsi (unit usaha)	-	150	150	150	150	URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peresentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	-	100	100	100	100
					Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	48	50	52															53														
			-						-	45	48	45																									
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	URUSAN PARIWISATA: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Promosi Penanaman Modal URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan Peringkat tujuan investasi nasional Presentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	-	80	85	90	95	URUSAN PARIWISATA: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Promosi Penanaman Modal URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif (%) Persentase kerjasama penanaman modal (%) Persentase Kenaikan nilai Realisasi PMDN/PMA (%)	-	-	45	48	45															
				-	100	100	100	100																													
				-	100	100	100	100																													

RPJMN TAHUN 2020-2024									RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024									
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	URUSAN TENAGA KERJA: Program penempatan tenaga kerja	Persentase kenaikan tenaga kerja yang mendapat layanan penempatan	55	60	65	75	80	URUSAN TENAGA KERJA: Program penempatan tenaga kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar (%)	-	100	100	100	100			
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5			URUSAN TENAGA KERJA: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang bersertifikasi	60	65	70			75	100	URUSAN TENAGA KERJA: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan (%)	-	100	100	100
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	142	146	150	153	157	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan			80	85	90	95	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	-			21	-	-	-
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	197	203	209	214	220			URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	80	85	90	95			URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	-	21	-	-	-
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	130	135	140	145	150					URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	80	85					90	95	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	-
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	190	200	200	210	210	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	80	85			90	95	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	-	21	-	-			-
2	PN	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																							
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	37	37	39	41	41	URUSAN PERTANIAN : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	1. Padi (ton)	2.650	2.705	2.786	2.870	2.956	URUSAN PERTANIAN : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	-	24	29	34	34			
				2. Jagung (ton)	2.610	2.675	2.742	2.810		2.825	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (%)	-	-	5	11		11								
				URUSAN PERTANIAN : Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	3. Ubi Kayu (ton)	5.997	6.146	6.300	6.458	6.619	URUSAN PERTANIAN : Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian (%)	-	0.08	0.08	0.08	0.08								
					4. Cabai Besar (ton)	37	39	41	43	45		URUSAN PERTANIAN : Program Penyuluhan Pertanian.	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina (%)	-	5	5	5	5							
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	65	69	72	75	78	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	188	151	159	167	184	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap (%)	-	100	100	100	100			
				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	191	161	169		187	206	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	-	100		100	100	100						
				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (ton)	19	18	19	20	22	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan (%)	-	100	100	100	100								
					Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	50	55	65	75	81		URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri di Provinsi (unit usaha)	-	150	150	150	150	URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	-	100	100	100	100
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	48	50	52	53	55	URUSAN PARIWISATA: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya	80		85	90	95	URUSAN PARIWISATA: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata (%)	-		76	77	78	78		

RPJMN TAHUN 2020-2024									RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
									URUSAN PARIWISATA: Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan		80	85	90	95	URUSAN PARIWISATA: Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti (%)	-	40	45	48	48	
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189- 1.214	1.314- 1.333	1.439- 1.452	1.564- 1.570	1.689	URUSAN PARIWISATA: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	-	80	85	90	95	URUSAN PARIWISATA: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)	-	-	45	48	45	
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	56	62	69	78	84	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Promosi Penanaman Modal	Peringkat tujuan investasi nasional	7	7	7	7	7	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kerjasama penanaman modal (%)	-	100	100	100	100	100
									URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100%	100%	100%	100%	100%	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan nilai Realisasi PMDN/PMA (%)	-	100	100	100	100	100
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	URUSAN TENAGA KERJA: Program penempatan tenaga kerja	Persentase kenaikan tenaga kerja yang mendapat layanan penempatan	55	60	65	75	80	URUSAN TENAGA KERJA: Program penempatan tenaga kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar (%)	-	100	100	100	100	100
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	URUSAN TENAGA KERJA: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang bersertifikasi	60	65	70	75	100	URUSAN TENAGA KERJA: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan (%)	-	100	100	100	100	100
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	142	146	150	153	157															
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	197	203	209	214	220															
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	130	135	140	145	150	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	URUSAN PARIWISATA : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	-	21	-	-	-	-
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	190	200	200	210	210															
3	PN	Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing																					
	pp	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Ibu	115	115	112	110	105			-	-	-	-	-	-
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	206	195	186	176	160	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi	537	540	535	530	520			-	-	-	-	-	-
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	129	122	116	11	10	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Neonatal	471	460	450	425	400			-	-	-	-	-	-
			Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,6 8,3 8,0 7,7 74	86	83	80	77	74	URUSAN PPA: Program Pengendalian Penduduk	Unmet Need		847	826	804	785	URUSAN PPA: Program Pengendalian Penduduk	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	-	2.4	2.3	2.3	23	
										URUSAN PPA: Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana		100	100	100	100	URUSAN PPA: Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase partisipasi Keluarga dalam program KB (%)	-	80	82	82	82

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	241	211	184	160	140	URUSAN PPA: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		467	100	100	100	URUSAN PPA: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina (%)	-	12.5	15	15	15
									URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	2,518	2,308	1,804	1,600	1,400			-	-	-	-	-
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	81	78	75	73	70	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	927	799	6.71	5.43	4.51			-	-	-	-	-
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	021	021	019	019	018	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia >15 tahun	024	026	021	021	019			-	-	-	-	-
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2,720	2,520	2,310	2,110	1,900	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Case Detection Rate) (persen)	58	71	78	78	79			-	-	-	-	-
			Jumlah kabupaten/kot a yang mencapai eliminasi malaria	3,250	3,450	3,650	3,850	4,050	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	11 kab/k ota	12 kab/k ota	13 kab/kot a	14 kab/kot a	15 kab/ko ta			-	-	-	-	-
			Insidensi hepatitis B (persen)	168	154	139	124	109	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentasi Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan C (DDHBC)	85	90	95	100	100			-	-	-	-	-
			Insidensi hepatitis B (persen) 1,68 1,54 1,39 1,24 1,09 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Persentase rumah sakit terakreditasi	91	90	89	88	87	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan dan Implementasi Regulasi tentang KTR	10 Kab/k ota	11 Kab/K ota	13 Kab/Kot a	14 Kab/Kot a	15 Kab/Ko ta			-	-	-	-	-
				800	850	900	950	1,000	URUSAN KESEHATAN : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.556 .322.9 82	71.156 .408.8 44	39.941.8 77.165	44.539.8 48.356	49.115. 133.72 7			-	-	-	-	-
									URUSAN KESEHATAN : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	61.262 .900	72.074 .000	82.885.1 00	395.000. 000	610.00 0.000	URUSAN KESEHATAN : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten (%)	-	100	100	100	100
																		-	100	100	100	100
																		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya (%)				
									URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.918. 604.48 6	4.650. 564.10 3	5.430.64 8.716	8.992.87 5.000	13.654. 812.50 0	URUSAN KESEHATAN : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar (%)	-	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	875	885	895	906	916	URUSAN PENDIDIKAN : Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	-	10	10	10	10	URUSAN PENDIDIKAN : Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik (%)	-	100	100	100	100
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	1,341	136	1,379	1,397	1,416														

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									URUSAN PENDIDIKAN : Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kegiatan Pengembangan Kurikulum Melalui Kegiatan Pemanfaatan TIK di Sekolah yang Dilaksanakan	-	-	62	64	66	URUSAN PENDIDIKAN : Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum yang Disusun Sesuai Standar Mutu Pendidikan (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN PENDIDIKAN : Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus	-	10	11	12	13			-	-	-	-	-
	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	6,634					URUSAN SOSIAL : PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	03	170	172	174	176	URUSAN SOSIAL : Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN SOSIAL : Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	20	20	20	20	20	URUSAN SOSIAL : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN PPA : Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak		100	100	100	100	URUSAN PPA : Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase peningkatan fasilitas hak anak pada klaster pendidikan (%)	-	32	35	35	35
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menur un	Menur un	Menur un	Menur un	URUSAN PPA : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan		100	100	100	100	URUSAN PPA : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak (%)	-	15	20	20	20
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,2779428	91,27896233	91,33469578	91,38627023	URUSAN PPA : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG		100	100	100	100	URUSAN PPA : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Anggaran Responsif Gender Terhadap Belanja Daerah (%)	-	58.83	62	65	65
									URUSAN PPA : Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date		100	100	100	100			-	-	-	-	-
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	URUSAN PPA : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga		100	100	100	100	URUSAN PPA : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase cakupan anggota keluarga UPPKS (%)	-	77	82	85	85
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	URUSAN PPA : Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		100	100	100	100	URUSAN PPA : Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan (%)	-	85	87	99	99
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menur un	Menur un	Menur un	Menur un	URUSAN PPA : Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		100	100	100	100							
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	279				40	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pelayanan Administrasi Menggunakan Smart Village (%)		25	25	25	25	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pekon tertib administrasi (%)	-	100	100	100	100

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Yang Aktif (%)		25	25	25	25	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Perseentase lembaga masyrakat , lembaga adat dan masyarakat yg berpartisipasi dalam proses (%)		100	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000	URUSAN KEHUTANAN : Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (Pemberian Akses Legal Bukan Kewenangan Provinsi) tapi provinsi sebagai support sistem berdasarkan UU 23 Tahun 2014	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	500	185.91393	500	500	500			-	-	-	-	-
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000														-	-	-	-	-
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087										-	-	-	-	-
4	PN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																				
	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni dan apresiasi seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya.	-	5	5	5	5	URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaan lokal yang Difasilitasi Pengembangannya (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah siswa yang mendapat edukasi seni tradisional dan perfilman	10	10	10	10	10	URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembangannya (%)	-	100			
	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter							URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Peningkatan jumlah Tim Cagar Budaya yang mendapat edukasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	5	5	5	5	5	URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang Teregister (%)	-	100			
									URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase jumlah koleksi cagar budaya Museum yang dirawat	5	5	5	5	5	URUSAN KEBUDAYAAN : Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Penerbitan Dokumen Sejarah (%)	-		100	100	100
5	PN	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																				
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	8,235	835	848	86	87	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Program Kawasan Permukiman	Persentase (%)	96.37	96.87	97.38	97.92	98.47	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Pembangunan Kawasan Permukiman (%)	-	100	100	100	100
																URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan Kabupaten (%)	-	87.25	87.52	88	88

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% Akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43 % Akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07 % Akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03 % Akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% Akses layak (termasuk 15% akses aman)	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP : Program Pengelolaan Dan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak (%)	74.84	77.15	81.00	83.60	85.06	URUSAN PU & PR : Program Pengelolaan Dan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten (%)	-	56.71	56.73	56.77	56.77
									URUSAN LINGKUNGAN HIDUP : Program Pengembangan Permukiman.	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak (%)	74.84	77.15	81.00	83.60	85.06	URUSAN PU & PR : Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman Kumuh Kabupaten (%)	-	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP: 23,6%, BJP:68,2 %)	93,8% (JP: 25,46 %, BJP:68, 4%)	95,9% (JP: 27,1%, BJP:68, 7%)	97,9% (JP: 28,9%, BJP:69, 0%)	100% (JP: 30,4%, BJP:69, 5%)	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	79.26	81.03	82.85	84.76	86.75	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten (%)	-	#####	#####	#####	#####
									URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Program Pengembangan Permukiman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	79.26	81.03	82.85	84.76	86.75	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten (%)	-	#####	#####	#####	#####
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)						URUSAN PERHUBUNGAN : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis)	27%	30%	35%	40%	50%	URUSAN PERHUBUNGAN : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia (%)	-	50	50	50	50
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol, baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2500 km)						URUSAN PU & PR : Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	79%	74%	76%	77%	78%	URUSAN PU & PR : Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus (%)	-	30.52	35.01	38.82	44.8
			Jumlah Pelabuhan Utama (Hub) yang memenuhi standar (7 Pelabuhan)						URUSAN PERHUBUNGAN : Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran (Operasional dan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional) (persen)	100	100	100	100	100	URUSAN PERHUBUNGAN : Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran (%)	-	40	40	40	40
			Kinerja tepat waktu (ontime performance) penerbangan (90%)						URUSAN PERHUBUNGAN : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (IKM Pelayanan Transportasi Umum yang menjadi Wewenang Provinsi)	-	83	84	85	86	URUSAN PERHUBUNGAN : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia (%)	-	50	50	50	50
			Panjang Jaringan KA yang beroperasi (7.635 km)						URUSAN PERHUBUNGAN : Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian (Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Lampung) (persen)	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-
			PP	Energi dan Tenaga Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	100	100	100	100	100	URUSAN ESDM : Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	94	95	96	97	98			-	-	-

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pemenuhan kebutuhan (konsumsi listrik)	1142	1203	1268	1336	1408	URUSAN ESDM : Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pemenuhan Kebutuhan listrik untuk daerah terpencil dan pedesaan serta masyarakat tidak mampu (kab/Kota)	3	3	3	3	3			-	-	-	-	-
			Penurunan emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	471	492	536	592	607	URUSAN ESDM : Program pengelolaan ketenagalistrikan (indicator kinerja: pengawasan usaha ketenagalistrikan dalam menjalankan iplementasi program penurunan emisi Co2 dari pembangkit dan K3L di Provinsi Lampung	Penurunan emisi Co2 pembangkit (Ton).	01	02	03	04	05			-	-	-	-	-
									URUSAN ESDM : Program Pengelolaan energy terbarukan (indicator kinerja : FS dan pembangunan PLTS atap?rooftop pada gedung/fas milik pemerintah									-	-	-	-	-
6	PN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim																				
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	8,410	8,420	8,430	8,440	8,450	URUSAN LH : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup		8,424	8,434	8,444	8,454	URUSAN LH : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang (%)	-	30	30	30	30
			Indeks Kualitas Air (IKA)	5510	5520	5530	5540	5550	URUSAN LH : Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		5,834	5,844	5,854	5,864	URUSAN LH : Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase lembaga , kelompok atau masyarakat yang melaporkan pengaduan tentang pencemaran/ kerusakan lingkungan (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN LH : Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100	100	100	100	URUSAN LH : Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu (%)	-	30	30	30	30
									URUSAN LH : Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup		100	100	100	100	URUSAN LH : Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Progam Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER) (%)	-	40	40	40	40
									URUSAN LH : Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal		100	100	100	100	URUSAN LH : Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terverifikasi (%)	-	20	20	20	20
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5,850	5,900	5,950	6,000	6,050	URUSAN LH : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100	100	URUSAN LH : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)	-	100	100	100	100

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	6,160	6,250	6,350	6,450	6,550	URUSAN LH : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		100	100	100	100	URUSAN LH : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam (%)	-	20	20	20	20
	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Dampak Bencana (persen)	010	010	010	010	010	URUSAN PEMERINTAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : Program Penanggulangan Bencana	Prosentase peningkatan upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100	100	100	100	100	URUSAN PEMERINTAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : Program Penanggulangan Bencana	Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana (%)	-	100	100	100	100
	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Energi (persen)	118	125	128	128	132	URUSAN LH : Prosentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energy (persen)	1. FS dan pembangunan PLTS atap / rooftop pada fas gedung milik pemerintah. 2. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah terpencil dan pedesaan serta masyarakat tidak mampu	10.87	10.83	10.99	111	11.32			-	-	-	-	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Lahan (persen)	458	507	531	572	583	URUSAN LH : Prosentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energy (persen)	Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	-	0,167	0,153	0,184	0,180			-	-	-	-	-
									URUSAN KEHUTANAN : Program Pengelolaan Hutan Lahan (persen)	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Lahan (persen)	04,198	00,512	00,511	00,509	00,507			-	-	-	-	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah (persen)	85	90	93	94	94	URUSAN LH : Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional	733	771	807	824	883	URUSAN LH : Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah yang Dilaksanakan sesuai Standar Mutu (%)	-	14	14	14	14
									URUSAN LH : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional						URUSAN LH : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase TPS Limbah B3 di yang Dikelola dengan Baik (%)	-	12	12	12	12
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Pesisir dan Kelautan (persen)	65	66	68	70	73	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN : Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil (Juta ha)	019	023	027	031	035			-	-	-	-	-
7	PN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																				
	PP	Reformasi Birokrasi dan Tata kelola	PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85	URUSAN PERENCANAAN : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	URUSAN PERENCANAAN : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap APBD (%)	-	100	100	100	100
									URUSAN PERENCANAAN : Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan movev pada bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, serta Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	URUSAN PERENCANAAN : Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional (%)	-	100	100	100	100

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS 2019-2024						
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									URUSAN PENGAWASAN : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	-	82	84	86	88	URUSAN PENGAWASAN : Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3 (%)	-	40	45	48	48
									URUSAN PENGAWASAN : Program Perumusaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	-	301	303	305	308	URUSAN PENGAWASAN : Program Perumusaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder) (%)	-	77	77	78	78
									URUSAN KEUANGAN : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasat dan Pendukung pada Badan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	URUSAN KEUANGAN : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP
									URUSAN KEUANGAN : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengukuran Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	100	100	100	100	100	URUSAN KEUANGAN : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	6,8	8	8,5	8,5

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara sumber-sumber keuangan dengan implementasi urusan pemerintahan dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi

intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu, yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

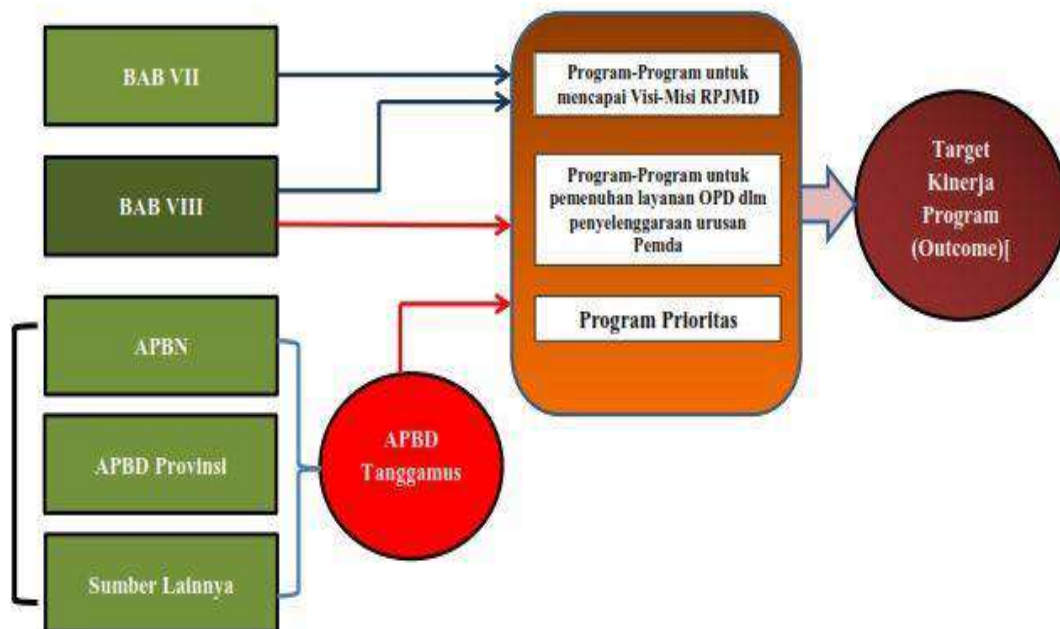
Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanggamus berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif)

selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 106 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.

Gambar VII. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD



Sumber : Analisis data diolah, 2021

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan analisis kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus

KODE	KAPASITAS RIIL/BELANJA	REALISASI		
		2018	2019	2020
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	882,147,297,971.19	1,051,735,940,271.72	1,024,662,464,107.05
2	BELANJA	1,527,711,794,512.80	1,678,742,417,518.67	1,648,643,730,414.86
2.1	Belanja Tidak Langsung	988,364,067,342.00	1,029,913,807,908.45	1,038,820,486,516.46
2.1.1	Belanja Pegawai	571,588,271,590.00	595,604,313,782.45	571,727,253,090.46
2.1.4	Belanja Hibah	80,480,172,979.00	46,013,658,600.00	49,698,135,200.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	282,000,000.00	957,863,719.00	958,833,090.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,709,109,154.00	3,904,146,807.00	5,132,723,782.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	330,638,976,121.00	382,649,390,000.00	374,651,395,392.00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	722,126,690.00	0.00	0.00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	1,943,410,808.00	784,435,000.00	36,652,145,962.00
2.2.	Belanja Langsung	539,347,727,170.80	648,828,609,610.22	609,823,243,898.40
2.2.1	Belanja Pegawai	99,371,378,132.00	87,071,154,462.00	90,745,126,430.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267,687,656,163.80	320,064,754,118.22	310,570,886,093.17
2.2.3	Belanja Modal	172,288,692,875.00	241,692,701,030.00	208,507,231,375.23

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018-2020

Tabel VII.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Tanggamus

KODE	KAPASITAS RIIL/BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1,326,343,903,977.95	1,267,344,730,522.00	1,034,754,046,973.12
5	BELANJA DAERAH	1,986,334,724,658.65	1,930,197,496,585.00	1,600,583,516,262.40
5.1	Belanja Operasi	1,252,096,797,748.65	1,271,405,939,729.00	1,028,117,035,569.51
5.1.01	Belanja Pegawai	659,990,820,680.70	662,852,766,063.00	565,829,469,289.28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539,908,869,602.95	549,938,014,577.00	409,016,173,100.14
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	52,197,107,465.00	52,470,159,089.00	47,223,143,180.10
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	645,000,000.00	548,250,000.00
5.2	Belanja Modal	336,490,392,325.00	296,228,130,424.00	213,479,334,571.45
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7,230,000,000.00	8,200,000,000.00	1,850,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,724,780,430.00	49,890,176,532.00	48,642,922,118.70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,154,096,784.00	64,187,487,865.00	32,093,743,932.50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	217,292,220,727.00	169,652,276,027.00	127,239,207,020.25

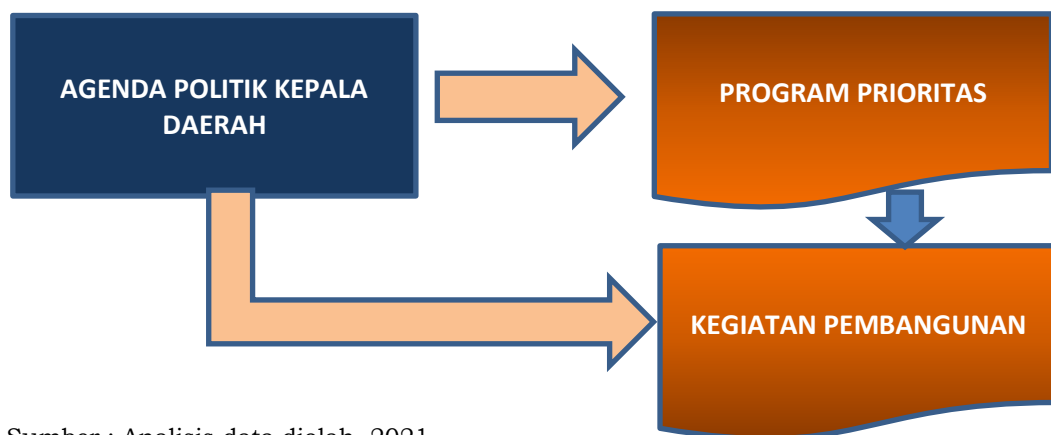
KODE	KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI		
		2021	2022	2023
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,089,294,384.00	4,298,190,000.00	3,653,461,500.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	14,089,803,986.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14,089,803,986.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	383,657,730,599.00	345,563,426,432.00	341,987,146,121.44
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,221,961,185.00	5,800,840,318.00	2,224,560,121.44
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	377,435,769,414.00	339,762,586,114.00	339,762,586,000.00

Sumber : Proyeksi APBD 2021-2023, (data diolah)

Ada 2 agenda Perumusan Program Pembangunan dalam RPJMD, yaitu Program berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program berdasarkan Agenda Politik Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah.

Pengintegrasian Program Pembangunan, khususnya yang berdasarkan Agenda Politik Kepala Daerah berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

Gambar VII. 2 Ilustrasi Pengintegrasian Agenda Politik Kepala Daerah ke Dalam Program Pembangunan



Sumber : Analisis data diolah, 2021

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat dijabarkan pendefinisian program- program prioritas pembangunan melalui 55 rencana aksi dalam janji kampanye Kepala Daerah terpilih, yang dapat diamati dalam tabel VII.3 berikut:

Tabel VII.3 Integrasi Agenda Politik Kepala Daerah Dalam Program Pembangunan Kabupaten Tanggamus

MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas	25 Reformasi Birokrasi (Bupati berkantor di Kecamatan, Membentuk Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (SABER PEKAN), Peningkatan kesejahteraan Aparatur yang terukur, memangkas birokrasi perijinan yang tidak efektif dan efisien, peningkatan SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Kepegawaian Daerah
		27 Akte Kelahiran dapat diterima masyarakat di Klinik Bersalin, Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit.	Program Pencatatan Sipil
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		28 Penambahan Mobil E-KTP Keliling	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pendaftaran Penduduk
		46 Pemberdayaan atau pembangunan Fasilitas Kamtibmas di titik rawan kriminalitas	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		47 Penambahan kendaraan patroli TNI/POLRI.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		48 Hibah Anggaran Peningkatan SDM/Profesional bagi penegak hukum	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		49 Menciptakan Aparatur Profesional; Membudayakan Aparatur yang Jujur, Ramah dan Resposif; Program SMS CENTRE BUPATI Menjawab Keluhan Masyarakat	Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		51 Membentuk Dewan Pertimbangan Pemerintah Daerah (Beranggotakan Mantan Bupati dan Tokoh Masyarakat Tanggamus)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1 Pemberantasan Buta Aksara AL-Qur'an (Sertifikasi lancar baca Al-Qur'an, MTQ Tingkat Sekolah Gebyar TPQ)	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		3 Beasiswa Santri dan Santriwati berprestasi kedalam maupun keluar negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengelolaan Pendidikan
		6 Peningkatan bantuan Pondok Pesantren dan TPA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		7 Memberikan penghargaan Santri dan Santriwati, Siswa dan Siswi, berprestasi termasuk pembiayaan untuk kompetisi tingkat Provinsi hingga Nasional	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengelolaan Pendidikan
		21 Penambahan Dokter Spesialis di RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		22 Meningkatkan insentif bagi tenaga Non ASN bidang pendidikan dan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		23 Peningkatan Bantuan Operasional dan Insentif Tendik PAUD dan Tenaga Kependidikan.	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		24 Peningkatan Bantuan Operasional Posyandu dan Kader Posyandu serta meningkatkan pembinaan/pelatihan Kader Posyandu Balita dan Kader Lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		29 Pengadaan Mobil PAUD/TPA Keliling	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Pendidikan
		30 Pengadaan USG (Ultrasonography) di setiap Puskesmas Rawat Inap untuk pemeriksaan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		31 Program Mobil Ambulance/Mobil Bantuan Sosial Pekon Gratis disetiap Pekon	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
		32 Menambah Armada Mobil Puskesmas Keliling di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		33 Peningkatan Layanan Home Care dan Kartu Lansia (mendatangi melakukan pemeriksaan rutin melalui Motor Reaksi Cepat Pelayanan Kesehatan (MRC-YANKES))	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		35 Penambahan Unit Sekolah Baru di daerah terpencil dan rumah dinas guru	Program Pengelolaan Pendidikan
		39 Penambahan Bis Sekolah Gratis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		41 Program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		42 Program Beasiswa masyarakat tidak mampu berprestasi ke perguruan tinggi negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	2 Peningkatan insentif guru ngaji, bantuan operasional penggiat keagamaan, bantuan Majelis Taklim dan organisasi keagamaan lainnya.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		4 Peningkatan Wisata Religi untuk semua agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		5 Peningkatan bantuan tempat ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		11 Mengembangkan Koperasi dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Nelayan, UMKM dan Pedagang Pasar	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengembangan UMKM
		12 Mendirikan Pegadaian Syari'ah.	Program Pengembangan UMKM Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		13 Percepatan pembangunan Kawasan Industri Maritim/KIM untuk membuka lapangan pekerjaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
		16 Membangun Balai Latihan Kerja/BLK.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		18 Revitalisasi BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		19 Penerbitan Perda Tentang Perlindungan Produk Lokal	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengembangan UMKM
		20 Mendorong berkembangnya industri manufaktur (mesin pengubah bahan mentah menjadi produk ekonomis) berbasis produk lokal	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengembangan UMKM
		26 Bantuan Operasional RT	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		50 Membentuk Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, beranggotakan masyarakat lintas suku dan etnis	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		52 Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam perencanaan program Bupati	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		54 Peningkatan Program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial
		55 Pembinaan dan pengembangan kreatifitas generasi muda; Membentuk kader kebangsaaan satu orang disetiap Pekon; Pembinaan Karang Taruna; Pembinaan Risma;	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan	10 Peningkatan Kegiatan atau Bantuan untuk Ketahanan Pangan dan UMKM/Sai Pekon Sai Produk melalui pelatihan pelaku UMKM, KWT, Anggota Majelis Taklim dan Penyandang Disabilitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pemberdayaan Sosial

MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
		14 Mendorong pembangunan SMK Pertanian Terpadu (Menciptakan generasi petani yang handal, sebagai pusat persilangan bibit-bibit unggul dan menciptakan tenaga-tenaga penyuluh)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengelolaan Pendidikan
		15 Peningkatan SDM Petani melalui Sekolah Lapangan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	8 Peningkatan infrastruktur jalan, drainase, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata serta fasilitas umum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		9 Membuka akses jalan daerah terpencil dalam kegiatan TMMD/Karya Bhakti TNI dengan prioritas seperti wilayah kecamatan Pematang Sawa	
		17 Kegiatan Jum'at Bedah Rumah Tidak Layak Huni setiap tahunnya dengan target 500 rumah	
		38 Perluasan jaringan komunikasi HP di daerah terpencil	
		40 Mendorong dibangunnya Green Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi (Angkutan Bus).	

MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
		43 Program penanggulangan banjir di wilayah Tanggamus bagian Barat (Embung untuk irigasi dan pariwisata)	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		44 Pembangunan Rest Area dan Gapura perbatasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	45 Pembangunan Stadion Gelora Tanggamus	Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		37 Pengadaan Mobil Patroli Sampah dan pembenahan sistem pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan	53 Program Sai Petani HKm merupakan Sai Duta Pelestarian Hutan (SPSD), adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan hutan dan pencegahan banjir serta kering mata air di musim kemarau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		34 Pengembangan serta promosi pariwisata yang bebasiskan SDA dan Agrowisata termasuk promosi produk UMKM berbasiskan Teknologi Informasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



MISI	PRIORITAS DAERAH	AGENDA 55 RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020
			Program Pengembangan UMKM
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		36 Pengembangan/Pelestarian seni budaya, pengembangan Museum Adat Lampung, Penerbitan Buku Sejarah dan adat istiadat Lampung serta di bagi gratis kepada siswa/siswi	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pengelolaan Permuseuman
			Program Pengelolaan Pendidikan

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2021

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih;
- 2) Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 4) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
- 5) Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk periode Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Tanggamus, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus disajikan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang pada Tabel VII.4. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab sebelumnya.

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018-2020 merupakan program pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Mulai tahun 2021, nomenklatur program sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku lagi sehingga program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada tahun 2021-2023 merupakan program pembangunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian indikasi program pembangunan berikut indikasi pendanaannya untuk setiap pencapaian Misi tercantum pada tabel berikut:

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

HALAMAN VII - 15

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
										Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)									
1	01	1.0	1	25	Program Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan	100 %	100	820,846,000.00	100	785,362,000.00	100	784,395,000.00	100	675,851,500.00	100	229,106,150.00	100	200,001,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,661,214,550.00	Dinas Pendidikan					
1	01	1.0	1	26	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100 %	100	190,433,900.00	100	189,564,700.00	100	105,000,000.00	100	99,194,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	288,759,450.00	Dinas Pendidikan					
4	2	1.0	1	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100 %	100	703,831,870.00	100	703,831,870.00	100	756,555,680.00	100	756,539,620.00	100	902,493,970.00	100	902,493,970.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,362,865,460.00	Dinas Pendidikan					
1	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	446,038,097,899.00	WTP	442,090,425,288.00	WTP	479,829,991,361.00	WTP	1,367,958,514,548.00	Dinas Pendidikan							
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	157,906,003,163.00	100	132,052,567,998.00	100	158,558,810,119.00	100	448,517,381,280.00	Dinas Pendidikan							
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	303,169,600.00	100	55,098,800.00	100	358,268,400.00	Dinas Pendidikan							
1	1	4			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Bahan ajar Bahasa dan Sastra yang sudah di kembangkan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	90,567,800.00	100	0.00	100	90,567,800.00	Dinas Pendidikan							
1	02	1.0	2	05 01	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	621 Orang	621	38,620,557,953.50	621	36,197,746,254.00	716	45,389,409,063.00	716	42,046,084,202.00	704	45,461,819,392.60	704	43,918,914,774.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	704	122,162,745,230.00	Dinas Kesehatan					
1	02	1.0	2	00	Belanja Langsung Non Program		-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4,287,352,700.00	-	0.00	-	(224,958.00)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4,287,127,742.00	Dinas Kesehatan					
1	02	1.0	2	00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100	8,742,887,991.50	100	8,540,652,016.00	100	8,271,140,450.00	100	8,006,520,039.00	100	8,358,739,070.44	100	7,962,565,396.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	24,509,737,451.00	Dinas Kesehatan					
1	02	1.0	2	00 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penurunan Persentase Kasus Disiplin Pegawai	0 %	0	66,000,000.00	0	66,000,000.00	0	0.00	0	0.00	30	24,000,000.00	30	24,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	30	90,000,000.00	Dinas Kesehatan					
1	02	1.0	2	00 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Kursus peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 %	0	0.00	0	0.00	20	15,000,000.00	20	5,300,000.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	5,300,000.00	Dinas Kesehatan					
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100	254,480,170.00	100	251,795,000.00	100	152,600,000.00	100	149,864,950.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	401,659,950.00	Dinas Kesehatan					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	02	1.02.00.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	0	%	0	0.00	0	0.00	100	59,290,000.00	100	55,904,300.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,904,300.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	%	100	120,361,860.00	100	93,399,800.00	100	85,380,000.00	100	84,357,950.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	177,757,750.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	%	100	67,132,493,727.00	100	58,536,699,143.00	100	80,552,449,609.71	100	72,720,308,880.38	100	31,441,488,504.00	100	25,376,329,403.00	-	0.00	-	0.00	100	156,633,337,426.38	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kader Kesehatan yang mendapatkan Insentif	100	%	100	2,418,040,000.00	100	2,368,567,400.00	100	2,617,130,000.00	100	2,617,110,750.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,985,678,150.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Masyarakat yang terpantau Gizi sesuai standar	100	%	100	58,737,000.00	100	58,090,400.00	100	53,412,500.00	100	51,549,250.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	109,639,650.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tenaga Kesling di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mendapat pembinaan/pembinaan Lingkungan Sehat	100	%	100	100,077,250.00	100	98,854,250.00	100	74,152,500.00	100	53,909,400.00	100	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	152,763,650.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	%	100	1,655,521,738.00	100	1,544,468,330.00	0	2,671,693,500.00	0	2,126,562,938.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,671,031,268.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,145,699,060.13	100	2,030,738,165.00	-	0.00	-	0.00	100	2,030,738,165.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.35	Program Pelayanan Medis	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	1	Unit	1	372,471,250.00	1	34,634,500.00	0	124,440,000.00	0	24,505,500.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	2	59,140,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.36	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Analisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	Laporan	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	24,536,400.00	100	24,476,500.00	-	0.00	-	0.00	100	24,476,500.00	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1	02	1.02.00.47	Program Manajemen Kesehatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,684,351,600.00	WTP	1,593,395,975.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,593,395,975.00	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.00.48	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,330,200,000.00	100	445,469,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	445,469,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	69,203,205,448.00	WTP	82,326,215,067.00	WTP	70,585,996,591.00	WTP	222,115,417,106.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	62,691,047,787.00	100	68,161,260,239.00	100	37,066,569,825.00	100	167,918,877,851.00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,187,704,396.00	100	55,187,000.00	100	1,789,364,000.00	100	10,032,255,396.00	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	567,484,000.00	100	500,922,000.00	100	457,296,000.00	100	1,525,702,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kader Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	60	3,292,965,000.00	70	3,937,017,000.00	90	545,398,325.00	90	7,775,380,325.00	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	33,578,327,329.05	WTP	30,588,692,646.00	WTP	50,717,634,536.00	WTP	114,884,654,511.05	Puskesmas
1	02	1.02.5.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	126 Orang	126	12,322,279,999.00	126	11,714,469,889.00	135	14,682,810,482.20	135	12,982,168,402.00	137	13,958,394,168.37	137	12,361,638,894.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	398	37,058,277,185.00	RSUD Batin Mungunang
1	02	1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100 %	100	4,275,981,000.00	100	4,087,950,053.00	100	5,979,414,600.00	100	5,193,559,910.00	100	6,804,880,311.25	100	6,047,887,540.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,329,397,503.00	RSUD Batin Mungunang
1	02	1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100 %	100	153,000,000.00	100	131,505,800.00	100	1,059,484,000.00	100	895,649,793.00	100	244,800,800.00	100	227,078,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,254,233,593.00	RSUD Batin Mungunang
1	02	1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100 %	100	21,000,000.00	100	21,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	RSUD Batin Mungunang
1	02	1.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	17,640,000.00	100	61,895,500.00	100	42,143,144.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	59,783,144.00	RSUD Batin Mungunang
1	02	1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	100 %	100	67,500,000.00	100	66,709,567.00	100	77,456,840.00	100	4,050,000.00	100	90,707,700.00	100	40,555,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	111,314,767.00	RSUD Batin Mungunang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	03	1.0 3.1	02																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	100.00	470,000,000.00	100.00	456,599,500.00	-	0.00	-	0.00	100.00	580,000,000.00	100.00	538,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	994,599,500.00
1	04	1.0 4.1	06																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	51,000,000.00
1	03	1.0 4.1	06																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	100.00	1,540,647,000.00	100.00	1,281,485,003.00	100.00	1,842,500,000.00	100.00	1,152,600,500.00	100.00	197,792,200.00	100.00	175,654,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	2,609,739,703.00
1	03	1.0 3.1	08																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	-	0.00	-	0.00	100.00	1,006,900,000.00	100.00	880,936,800.00	100.00	574,971,528.30	100.00	494,997,391.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	1,375,934,191.00
				3	Paket	6.00	4,084,875,000.00	6.00	2,727,657,700.00	3.00	2,323,350,000.00	3.00	1,956,780,400.00	2.00	464,951,200.00	2.00	29,246,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	4,713,684,300.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
1	03	1.0 3.1	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah pembangunan jalan dan jembatan	10	Paket	10.00	26,131,550,000.00	10.00	20,642,815,000.00	17.00	36,638,200,000.00	17.00	27,349,438,630.00	8.00	1,256,724,050.00	8.00	1,201,445,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	35.00	49,193,698,830.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	16	Program Pengadaan Alat Berat	Persentase Pengadaan Alat Berat	%	-	0.00	-	0.00	100.00	4,202,250,000.00	100.00	3,556,900,000.00	0.00	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	3,556,900,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	03	1.0 3.1	18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten	2	Paket	1.00	36,000,000.00	0.00	35,966,250.00	2.00	6,243,900,000.00	2.00	3,845,876,537.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2.00	3,881,842,787.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis	Jumlah Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis	10	Paket	10.00	22,670,450,000.00	10.00	18,796,111,117.00	18.00	49,766,133,000.00	18.00	42,680,025,617.00	1.00	6,126,000,000.00	1.00	1,150,220,386.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	29.00	62,626,357,120.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	16	Program penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2	Paket	2.00	442,250,000.00	2.00	421,789,500.00	11.00	2,981,000,000.00	8.00	2,601,294,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.00	3,023,084,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	03	1.0 3.1	16																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	100.00	300,000,000.00	100.00	208,717,770.00	-	0.00	-	0.00	100.00	1,540,754,000.00	100.00	1,415,593,283.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	1,624,311,053.00
1	03	1.0 3.1	18																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	249,010,000.00	100.00	222,162,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	222,162,400.00	
1	03	1.0 3.1	21																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				303	Rmh	146.00	1,133,950,000.00	146.00	1,103,712,131.00	303.00	2,679,450,000.00	303.00	2,619,105,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	449.00	3,722,817,881.00
1	03	1.0 3.1	27																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				100	%	100.00	973,150,000.00	100.00	885,705,342.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	885,705,342.00
1	03	1.0 3.1	29																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
				2	Paket	2.00	376,500,000.00	2.00	369,421,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2.00	369,421,400.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target									
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
1	03	1.0 3.1	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3707	ha	3707.00	679,200,000.00	3707.00	645,661,882.00	3708.00	535,000,000.00	3708.00	503,098,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	7415.00	1,148,760,482.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	31	0	Program Penyusunan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan	Percentase Standar Harga Satuan Kabupaten	100	%	100.00	195,000,000.00	100.00	19,952,000.00	100.00	196,500,000.00	100.00	21,482,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	41,434,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	34		Program Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	44	Paket	49.00	19,313,914,000.00	49.00	16,473,612,700.00	45.00	12,293,699,000.00	45.00	10,364,878,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	94.00	26,838,491,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	36		Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan Kabupaten	Jumlah Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan dan Jembatan Kabupaten		Paket	-	0.00	-	0.00	5.00	1,964,000,000.00	5.00	1,756,735,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.00	1,756,735,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	37		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Bidang Pengairan	Percentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Bidang Pengairan	100	%	100.00	69,500,000.00	100.00	59,005,200.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	59,005,200.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	03	1.0 3.1	38																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				100	%	100.00	101,350,000.00	100.00	94,721,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	94,721,450.00	
1	03	1.0 3.1	40																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				6	Paket	6.00	3,552,886,000.00	6.00	1,446,734,000.00	5.00	5,691,500,000.00	5.00	4,891,808,201.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	6,338,542,201.00	
1	03	1.0 3.1	40																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				100	%	100.00	24,585,629,425.80	100.00	24,223,223,600.00	100.00	27,696,669,100.00	100.00	27,523,071,300.00	100.00	32,639,782,215.65	100.00	32,526,164,904.00	-	0.00	-	0.00	100.00	84,272,459,804.00	
1	03	1.0 3.1	41																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				22	Paket	22.00	1,568,915,000.00	22.00	1,539,205,800.00	3.00	5,797,875,000.00	3.00	5,012,737,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	25.00	6,551,943,750.00	
1	03	1.0 3.1	42																					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				4	Paket	4.00	436,349,000.00	4.00	400,978,775.00	21.00	1,768,097,150.00	9.00	1,597,615,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	13.00	1,998,594,175.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan/ Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
1	03	1.0 3.1	43	Program Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Jumlah Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	13.00	12,340,268,673.00	9.00	11,157,977,383.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	9.00	11,157,977,383.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	44	Program Peningkatan Pembangunan Perumahan	Percentase Peningkatan Pembangunan Perumahan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	6,251,842,300.00	100.00	5,961,878,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	5,961,878,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Percentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah	100 %	100.00	8,835,899,000.00	100.00	5,159,756,300.00	100.00	12,732,615,000.00	100.00	7,177,664,590.00	100.00	2,051,999,898.00	100.00	1,313,091,038.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	13,650,511,928.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	47	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Orang	-	0.00	-	0.00	600.00	1,102,100,000.00	600.00	1,012,760,750.00	0.00	2,278,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	600.00	1,012,760,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	49	Program Pengembangan dan Penataan Kota	Jumlah Pengembangan dan Penataan Kota	2 Doku men	2.00	189,500,000.00	2.00	175,617,000.00	2.00	579,800,000.00	2.00	571,403,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.00	747,020,750.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target									
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
1	03	1.0 3.1	53		Program Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan	Jumlah Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan	106	Paket	106.00	34,704,980,000.00	106.00	24,314,028,400.00	150.00	39,439,450,000.00	150.00	32,641,903,063.00	8.00	4,862,010,579.00	8.00	3,930,759,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	264.00	60,886,690,513.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	54		Program Pemunjang Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Percentase Pemunjang Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program (IPDMIP)	100	%	-	0.00	-	0.00	100.00	223,600,000.00	100.00	190,237,481.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	190,237,481.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	03	1.0 3.1	58		Program Pengembangan Perencanaan Infrastruktur	Percentase Pengembangan Perencanaan Infrastruktur	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	3,054,478,800.00	100.00	2,620,510,560.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	2,620,510,560.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	03	1.0 3.1	60		Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Jumlah Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	27.00	55,949,856,750.74	27.00	50,431,757,958.23	-	0.00	-	0.00	-	0.00	27.00	50,431,757,958.23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	03	1.0 3.1	61		Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi		Paket	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	3,559,622,651.42	11.00	3,196,031,760.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11.00	3,196,031,760.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
1	03	1.0 3.1	62	Program Normalisasi Alur Sungai	Jumlah Normalisasi Alur Sungai	Paket	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	174,131,074.42	1.00	173,381,040.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	173,381,040.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	63	Program Pengembangan dan Penataan Ruang	Persentase Pengembangan dan Penataan Ruang	100 %	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	961,639,200.00	100.00	369,009,269.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	369,009,269.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	1.0 3.1	64	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100 %	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	237,748,500.00	100.00	229,176,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	229,176,700.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
X	X X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	15,127,433,886.00	WTP	15,668,617,015.00	WTP	19,162,716,374.00	WTP	49,958,767,275.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	37.00	59,624,710,146.00	27.00	36,640,392,327.00	73.00	10,241,646,359.00	73.00	106,506,748,832.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten		-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	56.00	17,739,821,600.00	31.00	9,974,325,300.00	66.00	585,680,000.00	66.00	28,299,826,900.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama/ (Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi i Kabupaten	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	52,00	15,784,920,550.00	12,00	3,809,234,300.00	26,00	960,680,000.00	90,00	20,554,834,850.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	11,020,213,345.58	100,00	46,188,441,602.00	100,00	57,128,096,763.00	100,00	114,336,751,710.58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	51,343,131,600.80	100,00	73,514,556,493.00	100,00	28,031,093,422.00	100,00	152,888,781,515.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Kabupaten	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	14,054,617,124.00	100,00	11,348,944,054.00	100,00	8,760,507,600.00	100,00	34,164,068,778.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	1,830,883,231.00	100,00	3,759,789,744.00	100,00	2,792,642,144.00	100,00	8,383,315,119.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	32,00	90,404,685,487.62	13,00	34,693,409,300.00	45,00	48,929,142,805.00	91,00	174,027,237,592.62	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	186,752,300.00	100,00	535,961,000.00	100,00	486,817,000.00	100,00	1,209,530,300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	2,503,170,300.00	100,00	4,414,887,200.00	100,00	1,387,962,600.00	100,00	8,306,020,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan Kabupaten	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	60,039,500.00	100,00	1,743,620,000.00	100,00	1,276,432,000.00	100,00	3,080,091,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan Kawasan Permukiman	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	5,609,855,000.00	100,00	14,087,886,000.00	100,00	4,977,153,000.00	100,00	24,674,894,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																							
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	85,725,500.00	-	0,00	100,00	0,00	100,00	85,725,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	8,951,214,500.00	100,00	9,042,570,000.00	100,00	0,00	100,00	17,993,784,500.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	%	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100	1,001,659,600.00	100	100,814,000.00	100	116,640,500.00	100	1,219,114,100.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
5	1	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	18 Orang	20	1,599,252,053.00	18	1,517,252,780.00	18	1,967,777,527.60	17	1,761,068,124.00	20	2,027,952,192.17	16	1,865,968,099.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	51	5,144,289,003.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
4	05	4.05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	1,244,391,200.00	100	1,168,051,938.00	100	1,336,918,340.00	100	1,250,998,408.00	100	1,226,418,234.00	100	1,035,291,818.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,454,342,164.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	19,500,000.00	100	19,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100	34,370,000.00	100	32,870,000.00	100	14,988,000.00	100	14,988,000.00	100	44,739,300.00	100	36,492,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	84,350,500.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	30,000,000.00	100	28,920,000.00	100	10,825,000.00	100	9,825,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	38,745,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	93	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Penanganan Kedaruratan dan Logistik	100 %	100	2,024,888,800.00	100	2,011,890,300.00	100	373,604,000.00	100	323,112,500.00	100	83,776,200.00	100	38,156,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,373,158,800.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	94	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100 %	100	65,605,000.00	100	65,525,000.00	100	156,363,000.00	100	154,926,500.00	100	168,420,000.00	100	160,240,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	380,691,500.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	60	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang Tertangani	100 %	100	130,900,000.00	100	130,310,000.00	100	147,620,750.00	100	146,034,450.00	100	20,930,929,600.00	100	11,261,809,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,538,153,950.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	61	Program Pencegahan dan Mitigasi	Persentase Pencegahan dan Mitigasi	100 %	100	90,000,000.00	100	89,217,250.00	100	77,465,000.00	100	77,291,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	166,509,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	05	4.05	00	63	Program Kesiapsiagaan	Persentase Kesiapsiagaan	100 %	100	47,550,000.00	100	32,050,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	32,050,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,867,684,599.00	WTP	3,311,968,028.00	WTP	3,068,660,849.00	WTP	10,248,313,476.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang dilina	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,941,464,500.00	100	558,543,250.00	100	694,290,000.00	100	11,194,297,750.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	06	1.1	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25.00 Orang	25	2,341,814,212.00	25	2,220,033,438.00	25	2,684,923,026.60	25	2,425,250,471.00	25	2,577,451,053.00	25	2,355,141,921.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	24.00	7,000,425,830.00	Dinas Sosial

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target									
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
1	06	1.0	6	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	99.69	%	100	1,026,340,000.00	99.69	1,023,202,726.00	100	1,106,581,250.00	98.02	1,084,625,912.00	100	1,360,342,450.00	83.14	1,131,027,978.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	92.72	3,238,856,616.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	01	01	02	Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan	99.81	%	100	85,000,000.00	99.81	84,836,600.00	100	81,000,000.00	73.34	59,405,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	86.89	144,241,600.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	01	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100	1	25,500,000.00	100	25,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	42,450,000.00	98.92815	41,995,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.33	67,495,000.00	Dinas Sosial
0	06	1.1	01	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	99.8	100		41,340,000.00	99.7968	41,256,000.00	100	70,826,000.00	94.1545	66,685,850.00	100	108,783,400.00	94.93654	103,275,198.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	95.6	211,217,048.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	10		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	0	0	0.00	0	0.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	99.7	100		22,000,000.00	99.7045	21,935,000.00	100	22,000,000.00	99.875	21,972,500.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.79	43,907,500.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	99.51	100		380,500,000.00	99.5083	378,629,100.00	100	326,500,000.00	96.9628	316,583,600.00	100	1,200,196,600.00	94.54844	1,134,767,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	95.95	1,829,979,900.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	18		Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial	Prosentase PSKS yang Aktif	99.6639	%	100	92,500,000.00	99.6639	92,189,068.00	100	150,000,000.00	64.9892	97,483,866.00	100	95,432,900.00	43.33528	41,356,111.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	68.37	231,029,045.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	22		Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS	99.54	100		466,320,000.00	99.5407	464,178,000.00	100	462,000,000.00	77.4819	357,966,400.00	100	237,915,000.00	91.93657	218,730,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	89.25	1,040,875,300.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	24		Program Penelitian dan Pengembangan Manajemen Sosial	Persentase PMKS	99.9179	%	100	123,000,000.00	99.9179	122,899,000.00	100	158,000,000.00	79.4577	125,543,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	88.41	248,442,200.00	Dinas Sosial
1	06	1.1	00	25		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	94.5615	%	100	182,900,000.00	94.5615	172,953,000.00	100	2,119,795,250.00	78.2269	1,658,250,357.00	100	1,172,684,600.00	74.71072	876,121,133.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	77.9	2,707,324,490.00	Dinas Sosial
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	WTP	3,659,436,591.00	WTP	3,742,869,853.00	WTP	3,675,764,554.00	WTP	11,078,070,998.00	Dinas Sosial	
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	529,691,500.00	100	530,828,500.00	100	115,299,500.00	100	1,175,819,500.00	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
3	05	2.01	0019	Program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Jumlah pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	97.63	%	100	147,600,000.00	97.63	145,146,500.00	100	44,930,000.00	100	40,939,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	186,085,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	05	2.01	0030	Peningkatan Kualitas dan Informasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Kualitas dan Informasi Sumber Daya Alam	91.25	%	100	21,000,000.00	3.80903	19,162,500.00	100	10,830,000.00	99.95	10,825,500.00	100	10,720,500.00	0.95625	2,420,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.95625	32,408,300.00	Dinas Tenaga Kerja
3	08	2.01	0027	Program Pengembangan Wilayah Tangganda dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pengembangan Wilayah Tangganda dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	93.16	%	100	34,000,000.00	3.88611	31,673,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3.88611	31,673,000.00	Dinas Tenaga Kerja		
3	08	2.01	0027	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	0	%	-	0.00	-	0.00	100	25,487,000.00	99.84	25,448,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.84	25,448,500.00	Dinas Tenaga Kerja		
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Opini BPK Terhadap	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	4,170,699,579.00	WTP	4,309,103,487.00	WTP	3,727,353,658.00	WTP	12,207,156,724.00	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Ditindaklanjuti Dan Dilaksana Dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,088,900.00	100	135,097,500.00	100	145,186,400.00	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	100	41,525,400.00	100	101,725,000.00	100	148,250,400.00	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,213,500.00	100	52,169,300.00	100	22,649,020.00	100	102,031,820.00	Dinas Tenaga Kerja			
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	31,822,900.00	100	86,775,000.00	100	0.00	100	118,597,900.00	Dinas Tenaga Kerja			
3	29	05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	37,054,900.00	100	5,345,000.00	100	42,399,900.00	Dinas Tenaga Kerja			
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Bersaal Dari Kabupaten Tanggamus	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	51,000,000.00	100	226,000,000.00	100	277,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja			
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pemakaian Energi Listrik Dalam Rangka Percepatan Perekonomian Dan Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	705,449,128.00	100	395,006,150.00	100	0.00	100	1,100,455,278.00	Dinas Tenaga Kerja			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2.08.01.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	32 Orang	32	3,709,893,768.00	32	3,436,827,333.00	28	3,517,371,792.00	28	3,095,329,371.00	29	3,450,867,926.40	29	3,143,621,212.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	29	9,675,777,916.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendendaia n Penduduk dan keluarga Berencana, Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87 %	87	1,931,230,750.00	86	1,888,838,444.00	87	1,511,546,200.00	86	1,472,302,929.00	89	1,320,353,702.00	88	1,298,293,377.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	88	4,659,434,750.00	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.03	Program Peningkatan Disipli Aparatur	Persentase kedisiplinan	55 %	55	19,500,000.00	55	19,500,000.00	0.00	0	60	6,800,000.00	60	6,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	60	26,300,000.00	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
2	08	2.0 8.0 1	06																						Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana			
2	08	2.0 8.0 1	17	Program Peningkatan kualitas Hidup Perempuan, Penghapusan diskriminasi dan Kekerasan	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	88	%	88	74,518,000.00	88	74,166,550.00	90	46,500,000.00	89	44,181,550.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	89	118,348,100.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana		
2	08	2.0 8.0 1	18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43	%	43	54,340,000.00	43	54,193,000.00	46	41,500,000.00	45	40,228,000.00	51	70,067,200.00	49	69,962,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	49	164,383,450.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana
2	08	2.0 8.0 1	20	Program Peningkatan Pemahaman Kader Tentang Tumbuh Kembang Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga	Persentase perempuan yang mempunyai usaha dalam keluarga	52	%	52	106,895,000.00	52	106,620,500.00	60	195,000,000.00	55	194,435,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	55	301,055,500.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan keluarga Baerencana		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2.08.01.21	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase fasilitas layak anak	35 %	35	78,612,000.00	35	78,454,950.00	37	67,464,000.00	36	66,466,000.00	0.00				-	0.00	-	0.00	-	0.00	36	144,920,950.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.22	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan yang mempunyai usaha dalam keluarga	50 %	50	35,860,000.00	50	35,815,000.00	60	64,553,000.00	55	64,416,250.00	65	21,175,000.00	60	21,147,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	60	121,379,000.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.23	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase angka kelahiran pada remaja	%		0.00		0.00	38	27,000,000.00	35	26,878,500.00				0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	35	26,878,500.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.24	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan KB yang Berkualitas	Persentase akseptor KB M&TP	25 %	25	6,942,044,100.00	25	6,457,577,700.00	32	7,996,637,000.00	30	7,723,033,300.00	34	7,686,460,000.00	33	6,859,434,336.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	33	21,040,045,336.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2.08.01.26	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	85 %	85	50,000,000.00	85	49,906,600.00	90	226,000,000.00	90	222,394,650.00	91	81,981,800.00	90	80,974,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	90	353,276,050.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
20801	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Persentase angka kelahiran pada remaja	65 %	65	35,000,000.00	65	34,314,500.00	38	46,500,000.00	38	46,394,250.00	37,5	18,721,500.00	37,5	15,487,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	37,5	96,196,500.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
40401	Program Penyelesaian Kewajiban atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	persentase penyelesaian retensi	100 %	100	29,925,400.00	100	29,925,400.00	100	49,870,600.00	100	49,870,600.00	100	99,762,700.00	100	99,760,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	179,556,200.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	4,846,858,583.00	WTP	4,903,683,349.00	WTP	4,800,877,200.00	WTP	14,551,419,132.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2082	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan anggaran responsif gender terhadap belanja daerah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	58.83	111,565,600.00	62	21,444,800.00	65	30,000,000.00	65	163,010,400.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2083	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85	283,912,900.00	87	278,155,000.00	90	252,430,600.00	90	814,498,500.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana
2084	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase cakupan anggota keluarga UPPKS	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	77	36,152,300.00	82	27,106,200.00	85	0.00	85	63,258,500.00	Dinas Pemberdayaan an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Baerencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2	03	2.03	0003	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase Peningkatan disiplin aparat	100	%	100	49,500,000.00	100	49,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	41,503,000.00	100	41,382,000.00	-	0.00	-	0.00	100	90,882,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.03	0005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	548,460,600.00	100	546,772,650.00	100	546,595,300.00	100	482,405,948.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,029,178,598.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.03	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	105,000,000.00	100	103,605,000.00	100	29,000,000.00	100	29,000,000.00	100	63,299,900.00	100	63,268,400.00	-	0.00	-	0.00	100	195,873,400.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.03	0118	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100	%	100	304,400,000.00	100	292,201,750.00	100	224,367,200.00	100	175,830,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	468,032,150.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.03	0320	program Pengembangan Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Distribusi Pangan Dan Cadangan Pangan Masyarakat	100	%	100	34,750,000.00	100	34,714,000.00	100	45,000,000.00	100	42,428,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	77,142,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.03	0026	Program Peningkatan Jejaring Kerja Sama Penyuluh dan Agribisnis	Persentase Peningkatan Jejaring Kerja Sama Penyuluh dan Agribisnis	100	%	100	99,750,000.00	100	96,636,150.00	100	15,975,000.00	100	15,862,500.00	100	10,874,800.00	100	9,663,550.00	-	0.00	-	0.00	100	122,162,200.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.03	0117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100	%	100	45,000,000.00	100	44,990,000.00	100	24,800,000.00	100	20,776,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,766,250.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.03	0019	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	100	%	100	555,000,000.00	100	553,357,650.00	100	234,809,100.00	100	225,695,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	779,053,600.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
3	03	3.0.3	00	33	Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolan Air Sentra Tanaman Pangan dan Holikultura	Persentase Pemberdayaan dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengelolaan	100	%	100	2,841,999,500.00	100	2,765,083,480.00	100	5,949,172,059.00	100	3,823,384,256.00	100	13,215,400.00	0	13,215,400.00	-	0.00	-	0.00	100	6,601,683,136.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.0.3	00	34	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	100	%	100	15,000,000.00	100	14,300,000.00	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,800,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.0.3	00	35	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	100	%	100	22,500,000.00	100	22,398,800.00	100	17,600,000.00	100	17,444,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	39,843,050.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
4	04	3.0.3	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	466,799,900.00	100	453,925,900.00	100	76,505,460.00	100	76,505,460.00	100	38,448,100.00	100	38,448,100.00	-	0.00	-	0.00	100	568,879,460.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	3.0.3	00	86	Program Penyediaan dan Pengembangan Pembiayaan Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Pembiayaan Pertanian	100	%	100	15,000,000.00	100	14,979,000.00	100	12,100,000.00	100	12,082,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,061,500.00	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0.3	00	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	341,567,744.00	100	302,569,750.00	-	0.00	-	0.00	100	302,569,750.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0.3	00	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	%	-		0.00	-	0.00	100	174,353,100.00	100	148,980,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	148,980,600.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0.3	00	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	%	-		0.00	-	0.00	100	76,670,000.00	100	67,218,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	67,218,500.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0.3	00	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	%	-		0.00	-	0.00	100	259,440,000.00	100	258,614,025.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	258,614,025.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0.3	00	21	Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak	Persentase pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak	%	-		0.00	-	0.00	100	51,800,000.00	100	49,549,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	49,549,750.00	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
3	03	2.0 3	00 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	-	0.00	-	0.00	100	1,964,455,000.00	100	1,944,917,514.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,944,917,514.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 27	Program Peningkatan Kualitas Aparatur		Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	65,500,000.00	80	53,957,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	53,957,550.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 33	Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Air Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura		Persentase Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pengolahan Air Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	-	0.00	-	0.00	100	251,200,000.00	100	249,887,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	249,887,750.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 36	Program Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)		Persentase Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)	%	-	0.00	-	0.00	100	14,220,000.00	100	14,211,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,211,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 37	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Populasi dan Produktifitas Ternak Kambing Saburai		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Populasi dan Produktifitas Ternak Kambing Saburai	%	-	0.00	-	0.00	100	17,000,000.00	100	16,771,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,771,200.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 51	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani		Persentase Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	%	-	0.00	-	0.00	100	35,640,000.00	100	34,599,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,599,500.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 54	Program Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan		Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan	%	-	0.00	-	0.00	100	1,436,464,000.00	100	1,349,634,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,349,634,900.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 60	Program Implementasi Indikasi Geograf (IG) Kopi Robusta Lampung		Persentase Implementasi Indikasi Geograf (IG) Kopi Robusta Lampung	%	-	0.00	-	0.00	100	54,514,000.00	100	52,860,000.00	100	50,984,000.00	100	49,404,000.00	-	0.00	-	0.00	100	102,264,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0 3	00 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	393,131,820.00	100	391,756,120.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	391,756,120.00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	03	2.0 3	00 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)		Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	223,220,950.00	80	213,716,350.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	213,716,350.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 16	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	293,471,250.00	57.14	291,275,757.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	57.14	291,275,757.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 18	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		Persentase pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	63,802,350.00	100	61,002,350.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	61,002,350.00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	03	2.0 3	00 19	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	40,123,000.00	50	34,507,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	50	34,507,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	16	602,646,100.00	16	492,552,866.00	16	750,413,400.00	16	1,845,612,366.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	69	403,250,442.00	179	482,706,700.00	199	193,615,500.00	199	1,079,572,642.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	24	3,313,268,546.00	29	5,940,582,000.00	34	3,732,202,900.00	34	12,986,053,446.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Lahar Sewah Yang Terkena Bencana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.08	704,328,300.00	0.08	649,789,800.00	0.08	652,098,700.00	0.08	2,006,216,800.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5,152,199,374.00	5	5,911,912,000.00	5	2,280,840,200.00	5	13,344,951,574.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2	05	2.05	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	30 orang	30	2,274,357,175.00	30	2,150,366,221.00	30	3,471,214,251.40	30	3,131,477,923.00	30	3,583,384,670.26	30	2,807,549,724.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	05	2.05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100 %	100	1,374,370,400.00	100	1,335,918,855.00	100	2,006,279,744.00	100	1,902,536,673.00	100	2,139,044,241.00	100	1,851,973,511.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	01	07	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kualitas kinerja aparatur	100 %	80	21,000,000.00	100	21,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	00	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja keuangan yang akuntabel	100 %	100	29,317,000.00	100	29,203,900.00	100	21,420,000.00	100	21,369,500.00	100	21,036,400.00	100	12,908,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	00	10	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	kerjama / kemitraan terhadap masyarakat	-	kerja sama	-	0.00	-	0.00	4	20,000,000.00	-	20,000,000.00	4	7,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	05	2.05	00	16	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indek Kualias Lingkungan Hidup	61.4 indeks	66.5	713,315,000.00	61.4	689,340,722.00	66.5	1,138,302,500.00	63.2	1,075,815,900.00	66.5	713,816,100.00	62.5	629,853,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	00	19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Media informasi kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 media informasi	1	134,400,000.00	1	122,664,305.00	1	108,497,000.00	1	108,047,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	00	25	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Volume sampah akhir yang dikirim ke TPA	3000 m3	1000	544,194,000.00	-	504,334,500.00	1000	1,206,400,380.00	7000	1,155,876,680.00	1000	750,209,800.00	9800	674,796,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	2.05	00	26	Program konservasi sumberdaya alam	persentase terlaksananya konservasi sumberdaya alam	2 %	90	171,114,000.00	2	170,912,000.00	90	97,962,000.00	-	97,962,000.00	90	91,000,000.00	2	90,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuk/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2.05.2.05.00.27	Program Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan	persentase pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan sesuai dengan peruntukanny	%	-	0.00	-	0.00	90	1,001,199,840.00	30	946,819,480.00	90	1,171,535,300.00	70	1,041,013,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,987,832,980.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.00.29	Program penataan dan pengembangan keindahan kota	Persentase Pemeliharaan dan Penataan Taman / Median Jalan dan Relief	%	-	0.00	-	0.00	90	1,113,718,600.00	100	1,026,937,200.00	90	235,471,900.00	100	227,583,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,254,520,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.00.40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	135,207,300.00	100	135,207,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	135,207,300.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	9,146,388,644.00	WTP	6,683,708,367.00	WTP	5,341,502,307.00	WTP	21,171,599,318.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen RPPLH dan KLAS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	30	726,840,000.00	30	502,530,000.00	30	767,850,000.00	90	1,997,220,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	30	208,029,100.00	30	413,675,500.00	30	45,420,000.00	90	667,124,600.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (HAYATI)	Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	209,054,300.00	20	275,314,300.00	20	0.00	60	484,368,600.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah TPS limbah B3 di Kabupaten Tanggamus	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	12	1,468,132,900.00	12	171,192,900.00	12	0.00	36	1,639,325,800.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Program Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	182,830,000.00	40	22,800,000.00	40	0.00	120	205,630,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terverifikasi	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	39,452,900.00	20	38,932,900.00	20	0.00	60	78,385,800.00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	76,470,000.00	100	109,105,000.00	100	60,000,220.00	300	245,575,220.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok/ lembaga yang mengikuti Program Penilaian Pengelolaan lingkungan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	60	51,637,500.00	60	70,480,000.00	60	0.00	180	122,117,500.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lembaga , kelompok atau masyarakat yang melaporkan pengaduan tentang pencemaran/ kerusakan lingkungan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,686,900.00	100	19,260,000.00	100	0.00	300	36,946,900.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	persentase Pengelolaan Sampah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	1,217,841,200.00	14	1,506,161,200.00	15	1,124,081,495.00	15	3,848,083,895.00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	06	2.1	5 01	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	48	Orang	48	4,103,001,296.00	48	3,812,880,007.00	47	4,501,243,107.20	47	4,065,153,349.00	45	4,172,839,090.24	45	3,799,298,430.00	-	0.00	-	0.00	-	11,677,331,786.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	94.44	%	100	2,216,762,000.00	94.44	2,093,611,241.00	100	2,610,072,000.00	96.98	2,531,233,141.00	100	1,932,037,470.00	93.35	1,803,527,057.00	-	0.00	-	0.00	-	6,428,371,439.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	69,300,000.00	100	69,300,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	69,300,000.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	100	%	100	37,100,000.00	90.37	33,526,000.00	100	27,920,000.00	83.03	23,182,250.00	100	36,586,700.00	99.96	36,572,700.00	-	0.00	-	0.00	-	93,280,950.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	13,700,000.00	100	13,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	43,700,000.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil	
2	06	2.1	07	Program Pendaftaran dan Mutasi	Persentase Penduduk yang memiliki KIA dan KTP-el	6.78	%	100	2,035,582,000.00	6.78	1,875,929,142.00	100	1,877,091,500.00	6.75	1,793,023,505.00	100	2,118,481,000.00	15.96	2,097,742,137.00	-	0.00	-	0.00	-	5,766,694,784.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	08	Program Pengumpulan Perapahan Data Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	4.73	%	100	266,500,000.00	4.73	260,906,000.00	100	241,690,000.00	5.38	238,690,000.00	100	22,922,850.00	2.46	22,922,850.00	-	0.00	-	0.00	-	522,518,850.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	06	2.1	11	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase OPD yang Melakukan PKS	5.41	%	100	20,180,000.00	5.41	17,315,195.00	100	32,600,000.00	17.86	32,415,688.00	100	14,135,900.00	57.14	11,974,384.00	-	0.00	-	0.00	-	61,705,267.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	8,500,839,851.00	WTP	8,374,090,813.00	WTP	8,166,735,680.00	100	25,041,666,344.00	Dinas Kependudukan an dan Pencatatan Sipil		

HALAMAN VII - 49

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur	100.00 %	100.00	27,000,000.00	100.00	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1.00	27,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.06	PROGRAM PENINGKATAN AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100.00 %	100.00	18,574,200.00	100.00	18,574,200.00	100.00	27,386,150.00	100.00	25,211,150.00	100.00	28,568,500.00	100.00	26,387,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	70,172,350.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.26	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100.00 %	100.00	2,556,550,000.00	100.00	2,556,540,000.00	100.00	3,475,125,000.00	100.00	3,193,093,882.00	100.00	2,870,997,278.00	100.00	2,762,026,340.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	8,511,660,222.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.27	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN E GOV KABUPATEN TANGGAMUS	Persentase Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan E Gov Kabupaten Tanggamus	100.00 %	100.00	59,860,000.00	100.00	59,860,000.00	100.00	409,805,750.00	100.00	269,514,386.00	100.00	60,103,100.00	100.00	40,562,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	369,936,386.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	100.00 %	100.00	348,190,000.00	100.00	348,168,996.00	100.00	106,165,000.00	100.00	52,503,000.00	100.00	71,417,100.00	100.00	39,167,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	439,839,546.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.33	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		100.00 %	100.00	259,400,000.00	100.00	259,400,000.00	100.00	550,450,000.00	100.00	527,446,000.00	100.00	11,660,000.00	100.00	11,660,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	798,506,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100.00 %	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00	79,125,000.00	100.00	79,125,000.00	100.00	49,475,025.00	100.00	20,013,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	119,138,450.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.32	PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian	100.00 %	100.00	25,500,000.00	100.00	25,500,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	29,940,000.00	100.00	21,365,000.00	100.00	13,641,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	69,081,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP -	0.00 -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,912,885,949.00	WTP	3,737,790,883.00	WTP	4,026,349,021.00	WTP	11,677,025,853.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik	% -	0.00 -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	6,491,337,500.00	100.00	4,807,109,750.00	100.00	3,224,491,000.00	100.00	14,522,938,250.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government	% -	0.00 -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	875,230,000.00	100.00	730,060,000.00	100.00	4,503,890,000.00	100.00	6,109,180,000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	% -	0.00 -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	28,250,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	46,510,000.00	100.00	99,760,000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi	% -	0.00 -	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100.00	70,754,650.00	100.00	30,000,000.00	100.00	61,287,000.00	100.00	162,041,650.00		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
2	11	2.1 1	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	39	Orang	39	4,389,082,045.00	39	4,151,134,616.00	41	4,855,047,329.20	41	4,201,495,717.00	42	4,894,979,878.89	42	4,051,963,244.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	42	12,404,593,577.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	11	2.1 1	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	2,518,216,500.00	94.37	2,376,561,236.00	100	2,176,237,550.00	95.42	2,076,558,471.00	100	1,808,985,725.00	92.1	1,666,024,145.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,119,143,852.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	11	2.1 1	00	02	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai yang disiplin memakai kelengkapan kerja	100	%	100	57,300,000.00	100	57,300,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	57,300,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	11	2.1 1	00	06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	100	%	100	88,000,000.00	99.36	87,435,900.00	100	23,000,000.00	99.73	22,937,500.00	100	72,583,800.00	53.01	38,475,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	84.0333	148,849,350.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	02	2.1 1	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Presentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	100	%	100	320,547,500.00	100	320,547,500.00	100	72,102,200.00	100	72,102,200.00	100	258,835,500.00	100	258,835,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	651,485,200.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
2	11	2.1.1	00	10																					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
					100	%	100	116,586,000.00	99.81	115,628,000.00	100	65,875,000.00	98	64,560,250.00	100	8,315,700.00	99.68	8,289,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.96	188,477,650.00
2	11	2.1.1	00	17																					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
					100	%	100	253,243,000.00	72.2626	182,999,890.00	100	839,775,500.00	92.0826	773,287,235.00	100	1,639,809,450.00	99.57846	1,632,897,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	87.97	2,589,184,125.00
2	11	2.1.1	00	19																					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
					100	%	100	56,000,000.00	93.55	52,388,000.00	100	38,670,000.00	100	38,660,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	64.51	91,048,000.00
2	11	2.1.1	00	18																					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
					100	%	100	81,710,000.00	99.8238	81,566,000.00	100	26,432,750.00	99.877	26,400,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.85	107,966,250.00
2	11	2.1.1	00	30																					Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
					%	-		0.00	-	0.00	100	35,000,000.00	99.5571	34,845,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	99.56	34,845,000.00
2	11	2.1.1	00	32																					Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
					%	-		0.00	-	0.00	100	38,015,000.00	96.8013	36,799,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	96.8	36,799,000.00
2	11	2.1.1	00	21																					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
					100	%	100	40,500,000.00	100	40,500,000.00	100	43,599,500.00	96.727	42,172,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.36	82,672,500.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
2	11	2.1	1	00	21	Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Persentase kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi yang teratai dengan baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,911,900.00	100	12,911,900.00	-	0.00	-	0.00	-	100	12,911,900.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2	11	2.1	1	00	28	Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UKM	Persentase koperasi dan UKM yang berdaya saing	100 %	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	2,800,000.00	100	2,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	17,800,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	11	2.1	1	00	29	Program Peningkatan Kualitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	presentase kecamatan yang memiliki HMT, LKM	100 %	100	33,000,000.00	97.0324	32,020,700.00	100	6,680,000.00	99.8862	6,672,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	98.46	38,693,100.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	11	2.1	1	00	22	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	46,994,700.00	99.90637	46,950,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.46	46,950,700.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	06	2.1	1	00	27	Program Pengendalian, Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase pengendalian , Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	100 %	100	87,400,000.00	98.6957	86,260,000.00	100	186,802,000.00	94.3186	176,189,000.00	100	54,376,400.00	87.88614	31,476,400.00	-	0.00	-	0.00	83.63	293,925,400.00	Dinas Perdagangan ,Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	06	2.1	1	00	28	Program Pembinaan, Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan wilayah Pembinaan, Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100	60,820,000.00	97.7957	60,322,000.00	98.6957	2,849,353,900.00	98.6957	2,528,179,700.00	97.6957	22,740,240.00	98.89	22,738,240.00	-	0.00	-	0.00	0	2,611,239,940.00	Dinas Perdagangan ,Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	06	2.1	1	00	30	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase wilayah peningkatan efisiensi perdagangan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100 %	100	135,700,000.00	98.1724	133,220,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	98.17	133,220,000.00	Dinas Perdagangan ,Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	06	2.1	1	00	29	Program Layanan Tera, Tera Ulang	Persentase Layanan Tera/Tera Ulang	100 %	100	1,361,000,000.00	91.0073	1,238,609,750.00	100	1,323,600,000.00	85.4343	1,130,807,750.00	100	46,204,100.00	67.62993	31,247,800.00	-	0.00	-	0.00	81.36	2,400,665,300.00	Dinas Perdagangan ,Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target									
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
3	07	2.1	00	29	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase peningkatan volume produksi IKM	100	%	100	147,643,000.00	94.79	139,953,500.00	100	32,708,800.00	95.7693	31,325,000.00	100	19,290,000.00	99.88595	19,268,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	96.82	190,546,500.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	07	2.1	00	27	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah	100	%	100	1,133,788,000.00	43.85	497,141,500.00	100	1,008,050,000.00	31.15	313,968,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	37.5	811,110,100.00	Dinas Perdagangan , Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	6,480,321,530.00	WTP	6,365,748,915.00	WTP	6,668,468,564.00	WTP	19,514,539,009.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan					
2	17	02			PROGRAM PENILAIAN KESHAATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,970,000.00	100	10,275,000.00	100	11,999,800.00	100	36,244,800.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	02			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,450,000.00	100	6,250,000.00	100	0.00	100	35,700,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	42,802,500.00	-	0.00	100	413,692,000.00	100	456,494,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Peningkatan Pemberdayaan UMKM	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	501,040,000.00	100	385,390,000.00	100	0.00	100	886,430,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	100	400,800,000.00	100	600,510,000.00	100	1,016,310,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
3	30	03	2	01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi standar	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	150,110,000.00	-	0.00	100	0.00	100	150,110,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,417,500.00	100	37,725,000.00	100	419,510,000.00	100	478,652,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku 2. Persentase UTTP yang diawasi 3. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	49,742,500.00	100	31,419,000.00	100	52,053,000.00	100	133,214,500.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Perdagangan Yang Di Fasilitasi Akses Pemasarannya	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	262,130,000.00	100	55,117,500.00	100	55,017,500.00	100	372,265,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	6,220,000.00	100	150,000,000.00	100	99,420,000.00	100	255,640,000.00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
2	12	2.0.1	5	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	18	Orang	18	2,194,815,577.00	18	2,087,220,652.00	19	2,439,421,099.60	19	2,222,247,206.00	17	2,189,420,282.07	17	2,009,960,735.00	-	0.00	-	0.00	54	6,319,428,593.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	1,086,075,000.00	100	1,064,189,603.00	100	1,309,808,800.00	100	1,258,662,756.00	100	992,958,860.00	100	971,241,264.00	-	0.00	-	0.00	100	3,294,093,623.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Displin Aparatur	100	%	100	19,500,000.00	100	19,500,000.00	100	41,000,000.00	100	39,540,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	59,040,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100	%	100	34,425,000.00	100	34,425,000.00	100	18,684,000.00	100	15,559,000.00	100	26,116,000.00	100	26,116,000.00	-	0.00	-	0.00	100	76,100,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	16	Program Peningkatan Iklim Investasi	Persentase kenaikan nilai realisasi PMDN/PMA (Milyar Rupiah)	100	%	100	36,000,000.00	100	35,999,000.00	100	31,140,000.00	100	31,140,000.00	100	24,020,000.00	100	24,007,750.00	-	0.00	-	0.00	100	91,146,750.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase kerjasama penanaman modal	100	%	100	167,217,500.00	100	167,217,500.00	100	185,529,000.00	100	185,529,000.00	100	103,276,000.00	100	103,276,000.00	-	0.00	-	0.00	100	456,022,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	17	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Pertanahan Investasi dan Peluang Usaha	Persentase perizinan yang terbit tepat waktu dan sesuai SOP	100	%	100	45,000,000.00	100	45,000,000.00	100	437,165,000.00	100	340,510,000.00	100	89,626,500.00	100	89,626,500.00	-	0.00	-	0.00	100	475,136,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2.0.1	19	Program Data Informasi dan Pengawasan Pengaduan	Persentase permasalahan/ pengaduan yang diselesaikan	100	%	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	36,424,000.00	100	36,424,000.00	100	11,015,000.00	100	11,015,000.00	-	0.00	-	0.00	100	77,439,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	3,323,669,690.00	WTP	3,614,728,619.00	WTP	3,590,018,194.00	WTP	10,528,416,503.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	137,537,600.00	100	0.00	100	137,537,600.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	213,228,300.00	100	378,910,000.00	100	541,221,260.00	100	1,133,359,560.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	326,122,000.00	100	326,122,000.00	100	365,200,000.00	100	1,017,444,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data terpilah	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,205,176.00	100	39,255,176.00	100	209,450,000.00	100	303,910,352.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	13	2.1.3.5.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yg mendapatkan Gaji dan Tunjangan	20 Orang	20	2,088,577,659.00	20	1,978,535,683.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	20	1,978,535,683.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan Baik	100 %	100	1,067,986,000.00	95.86	1,023,754,905.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	95.86	1,023,754,905.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	19,500,000.00	100	18,850,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,850,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100 %	100	34,500,000.00		34,340,650.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,340,650.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.21	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran serta Kepemudaan	100 %	100	408,000,000.00	100	405,378,240.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	405,378,240.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.22	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100 %	100	360,000,000.00	100	346,781,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	346,781,800.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	2.1.3.00.23	Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Persentase Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	100 %	100	264,302,000.00	100	260,263,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	260,263,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,214,257,035.00	WTP	2,932,172,037.00	WTP	3,529,519,910.00	WTP	7,675,948,982.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
3	02	01	23	Program Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui Pameran/Expo/ Festival	Persentase Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui Pameran/Expo/ Festival	99.8	%	100	1,052,940,000.00	99	1,050,861,150.00	100	652,000,500.00	99	649,357,100.00	100	49,079,600.00	97	47,618,200.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	23	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	91	%	100	3,808,069,500.00	90	3,465,250,404.00	100	3,898,045,750.00	88	3,440,918,766.00	100	4,349,118,014.00	85	3,728,784,080.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	25	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99	%	100	221,931,000.00	98	219,632,500.00	100	74,349,500.00	100	74,349,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	26	Program Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus	Persentase Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus		%	-	0.00	-	0.00	100	30,927,500.00	99	30,895,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Sebelumnya	99.99	%	100	230,757,700.00	99	230,725,800.00	100	274,920,100.00	99	274,919,200.00	100	1,352,947,220.00	99	1,350,556,320.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	41	Peningkatan Kapasitas SDM dan Jasa Usaha Industri Pariwisata	Persentase Peningkatan SDM dan Jasa Usaha Industri Pariwisata	99.87	%	100	90,000,000.00	99	89,886,900.00	100	20,545,000.00	100	20,545,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	42	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	Persentase Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	0.9853	%	100	54,430,000.00	98	53,631,750.00	100	5,221,000.00	99	5,203,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	32	Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif		%	-	0.00	-	0.00	100	94,150,000.00	81	76,674,330.00	100	1,025,900.00	100	1,025,900.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	21	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Peranserta Kepemudaan		%	-	0.00	-	0.00	100	469,778,750.00	84	399,137,150.00	100	76,205,100.00	99	75,549,100.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	02	01	21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		%	-	0.00	-	0.00	100	194,550,000.00	62	121,680,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
3	03	3.0	3	54	PROGRAM PENGUKURAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Presentase Peningkatan Produksi Perkebunan	5	%	5	949,861,500.00	5	944,744,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	944,744,500.00	Dinas Peternakan dan Perkebunan		
3	03	3.0	3	55	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA BIDANG PERKEBUNAN	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	5	%	5	25,250,000.00	5	25,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	25,250,000.00	Dinas Peternakan dan Perkebunan		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,598,004,315.00	WTP	5,814,162,066.00	WTP	7,955,393,362.00	WTP	15,367,559,743.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3	507,307,500.00	5	965,091,700.00	5	1,499,886,750.00	13	2,972,285,950.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	2,945,997,900.00	11	0.00	23	2,945,997,900.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	102,574,500.00	100	289,578,200.00	200	392,152,700.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	01	4.0	1	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	85	Orang	150	9,802,824,947.38	85	9,042,879,771.00	160	10,532,248,875.08	85	9,844,291,147.00	163	10,709,633,540.71	84	10,130,267,109.00	-	0.00	-	0.00	84	29,017,438,027.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan Baik	100	%	100	30,518,514,000.00	92	28,046,607,499.00	100	28,537,224,721.00	94	26,693,787,449.30	100	21,164,112,044.80	89	18,748,204,032.50	-	0.00	-	0.00	100	73,488,598,980.80	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0	1	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	100	58,500,000.00	97	56,784,000.00	100	501,500,000.00	100	499,800,000.00	100	388,425,000.00	98	381,200,000.00	-	0.00	-	0.00	100	937,784,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	-	0.00	-	0.00	100	429,559,668.00	100	428,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	428,100,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
4	01	4.0	1	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang Akuntabel	100	%	100	467,565,000.00	69	324,726,093.00	100	339,521,100.00	93	316,718,400.00	100	477,303,725.00	80	381,383,375.00	-	0.00	-	0.00	100	1,022,827,868.00	Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian tata Pemerintahan dan Sekretariat Daerah
4	01	4.0	1	07	Program Pengelolaan, Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PEMDA	Presentase Pengelolaan, Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PEMDA	100	%	100	7,392,220,000.00	92	6,794,121,633.00	100	9,768,543,000.00	66	6,474,859,428.50	100	4,757,773,300.00	100	4,737,427,591.00	-	0.00	-	0.00	100	18,006,408,652.50	Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	01	4.0.1.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemunjang Kinerja Terhadap Pelayanan PEMDA	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemunjang Kinerja Terhadap Pelayanan PEMDA	100	%	100	945,000.00	-	0.00	100	38,059,096.00	18	6,820,000.00	100	23,326,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,820,000.00	Bagian Umum Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%	100	1,736,717,600.00	94	1,635,573,500.00	100	1,040,641,560.00	92	958,550,760.00	100	996,327,900.00	88	876,876,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,471,000,860.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100	%	100	1,451,270,000.00	69	998,592,666.00	100	1,065,569,000.00	92	978,344,099.00	100	620,319,100.00	88	546,277,373.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,523,214,138.00	Bagian Hukum, Organisasi Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.29	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	548,308,600.00	96	528,998,196.00	100	370,376,512.00	100	368,782,012.00	100	83,121,671.00	100	83,031,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	980,811,808.00	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.30	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas Aparatur	100	%	100	363,000,000.00	75	270,819,886.00	100	330,584,000.00	83	274,071,950.00	100	98,663,600.00	95	93,786,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	638,678,036.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.32	Program Peningkatan Nilai-Nilai Kegamaan dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Peningkatan Nilai-Nilai Kegamaan dan Wawasan Kebangsaan	100	%	100	1,551,000,000.00	84	1,309,393,070.00	100	2,347,825,000.00	99	2,329,899,008.00	100	624,087,436.00	22	136,312,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,775,604,078.00	Bagian Keragaman dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.34	Program Pemantauan Sistem Distribusi Program Nasional	Presentase Pemantauan Sistem Distribusi Program Nasional	100	%	100	132,123,000.00	93	122,295,750.00	100	115,325,000.00	100	114,782,500.00	100	122,778,900.00	89	109,546,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	346,624,950.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.35	Program Sistem Operasi/Perangkat Lunak Infrastruktur	Presentase Sistem Operasi/Perangkat Lunak Infrastruktur	100	%	100	842,349,000.00	95	803,388,000.00	100	823,923,400.00	98	803,957,900.00	100	665,009,500.00	100	663,689,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,271,034,900.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.41	Program Perencanaan Penyusunan Indikator Pembangunan	Presentase Perencanaan Penyusunan Indikator Pembangunan	100	%	100	75,000,000.00	100	25,232,500.00	100	45,750,000.00	96	44,064,500.00	100	21,829,900.00	21	4,664,150.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,961,150.00	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.46	Program Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	Presentase Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	100	%	100	15,000,000.00	100	14,995,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,995,000.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.45	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon	100	%	-	0.00	-	0.00	100	635,341,000.00	99	629,153,600.00	100	81,802,000.00	73	59,362,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	688,515,600.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.46	Program Penerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	PresentasePenerbitan Administrasi Nara Rupa Bumi	100	%	-	0.00	-	0.00	100	9,685,000.00	100	9,665,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,665,000.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.47	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Presentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100	%	100	166,000,000.00	98	162,107,000.00	100	129,319,500.00	99	128,447,000.00	100	306,050,000.00	92	281,620,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	572,174,500.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.48	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Publik	Presentase Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Publik	100	%	100	55,000,000.00	91	50,264,500.00	100	145,600,000.00	53	77,752,750.00	100	123,799,150.00	84	103,527,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	231,545,200.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	01	4.0.1.49	Program Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi Keprotokolan	Presentase Optimalisasi Pelayanan dan Administrasi Keprotokolan	100	%	100	449,840,000.00	78	351,100,000.00	100	313,336,750.00	67	208,389,750.00	100	307,480,200.00	94	289,277,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	848,767,200.00	Bagian Protokol Sekretariat Daerah

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab																							
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																									
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target																											
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp																								
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)
4	01	4.0	1	52	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Presentase Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100	%	100		756,195,000.00	99	747,085,675.00	100		800,425,000.00	81	649,434,650.00	100		637,630,525.00	98		626,016,000.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100		2,022,536,325.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah										
4	01	4.0	1	53	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Presentase Penataan Daerah Otonomi Baru	100	%	100		258,910,000.00	24	62,168,000.00	100		92,025,000.00	51	47,082,500.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100		109,250,500.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah													
4	01	4.0	1	55	Program Pengembangan Data/Informasi Kewilayahan	Presentase Pengembangan Data/Informasi Kewilayahan	100	%	100		344,525,000.00	96	329,904,700.00	100		195,367,500.00	100		195,043,050.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100		524,947,750.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah												
4	01	4.0	1	56	Program Pemilihan Kepala Pekon	Presentase Pemilihan Kepala Pekon	100	%	-		0.00	-		0.00	100		133,428,000.00	99		132,491,400.00	100		521,249,933.00	95.38		497,163,673.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	95.38		629,655,073.00	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah											
4	01	4.0	1	68	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	%	-		0.00	-		0.00	100		110,928,500.00	82		91,428,000.00	100		144,266,054.00	95.53		137,821,550.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	95.53		229,249,550.00	Bagian Protokol Sekretariat Daerah											
4	01	4.0	1	97	Program Fasilitas Kerja Sama Daerah	Presentase Fasilitas Kerja Sama Daerah	100	%	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100		47,880,000.00	99.87		47,819,150.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	99.87		47,819,150.00	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah											
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	-	0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	WTP	44,225,441,451.00	WTP	36,213,386,750.00	WTP		34,836,667,048.00	WTP		115,275,495,249.00	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah																
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	14,172,544,951.00	100	15,759,681,585.00	100		11,067,704,126.00	100		40,999,930,662.00	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah																
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100	%	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	1,470,539,500.00	100	2,065,708,250.00	100		2,182,952,129.00	100		5,719,199,879.00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah																
4	1	4.0	1	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah Peminan dan Anggota DPRD yang mendapatkan gaji dan tunjangan	45	Orang	45		19,411,254,060.11	45	18,184,171,344.00	45		19,414,688,844.32	45		18,429,674,318.00	45		18,877,231,685.64	45		17,898,178,818.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	135		54,512,024,480.00	Sekretariat DPRD												
4	1	4.0	1	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	46	Orang	46		3,861,896,925.00	46	3,649,465,170.00	46		4,291,890,572.20	46		3,887,394,558.00	46		3,976,398,365.12	46		3,633,315,772.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	138		11,170,175,500.00	Sekretariat DPRD												
4	1	4.0	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100		13,801,249,842.00	100	12,260,674,379.00	100		14,229,190,460.00	100		12,935,897,758.00	100		17,017,793,438.00	100		16,302,045,937.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100		41,498,618,074.00	Sekretariat DPRD												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	1	4.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	567,400,000.00	100	532,048,000.00	100	3,806,150,000.00	100	3,467,362,000.00	100	1,043,617,600.00	100	958,350,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	4,957,760,900.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	100	565,650,000.00	100	534,975,000.00	100	946,250,000.00	100	895,575,000.00	100	654,250,000.00	100	641,290,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	2,071,840,000.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	1,871,230,000.00	100	1,802,424,254.00	100	2,506,678,000.00	100	2,472,646,968.00	100	1,652,700,500.00	100	1,648,676,178.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	5,923,747,400.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	100	%	100	71,008,100.00	100	62,446,200.00	100	30,130,000.00	100	28,025,000.00	100	35,010,300.00	100	34,395,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	124,866,400.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0	%	-	0.00	-	0.00	100	30,000,000.00	100	29,935,000.00	100	43,010,000.00	100	30,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	60,185,000.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100	%	100	21,153,675,000.00	100	20,383,063,273.00	100	20,273,161,000.00	100	19,996,050,424.00	100	26,318,034,900.00	100	25,324,170,798.05	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,703,284,495.05	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	16	Program peningkatan pelayanan pelayanann kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase peningkatan pelayanan pelayanann kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%	100	183,670,000.00	100	183,427,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	183,427,500.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	28	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100	%	100	405,520,000.00	100	394,782,354.00	100	527,000,000.00	100	511,383,500.00	100	408,874,100.00	100	391,335,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	300	1,297,500,854.00	Sekretariat DPRD
4	1	4.01	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya		%	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	-	0.00	100	310,000,000.00	100	300,685,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	300,685,000.00	Sekretariat DPRD
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	83,618,228,527.00	100	94,795,898,626.00	100	89,546,850,954.00	100	267,960,978,107.00		Sekretariat DPRD	
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi Dengan Baik		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,392,664,400.00	100	11,617,952,500.00	100	10,977,009,988.00	100	35,987,626,888.00		Sekretariat DPRD	
				UNSUBSIDIARIS URUSAN PEMERINTAHAN																								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toljuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4.	03	4.0	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	571,095,000.00	100	560,663,750.00	100	29,770,000.00	100	0.00	100	57,445,000.00	100	56,025,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	616,688,750.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.	03	4.0	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur	100	%	-	0.00	-	0.00	100	25,000,000.00	5	24,500,000.00	100	10,500,000.00	0	4,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4.	03	4.0	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	%	100	179,355,000.00	100	174,428,850.00	100	78,741,200.00	100	78,341,600.00	100	116,356,100.00	100	115,722,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	368,492,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2.	14	4.0	15	Program Peningkatan Data / Informasi	Presentase Peningkatan Data / Informasi	100	%	100	747,915,000.00	100	681,773,045.00	100	240,632,000.00	100	239,722,250.00	100	129,222,500.00	100	114,161,111.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,035,656,406.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan
4.	03	4.0	20	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Presentase Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	100	%	-	0.00	-	0.00	100	59,066,000.00	11	57,600,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	57,600,950.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2.	14	4.0	21	Program Pengembangan Jaringan Data Spasial	Presentase Pengembangan Jaringan Data Spasial	100	%	100	209,456,000.00	100	198,806,000.00	100	251,462,000.00	100	250,232,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	449,038,800.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondist Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	02	4.0.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	100	%	1	2,596,565,000.00	100	2,312,313,149.00	100	2,315,586,700.00	100	2,155,497,314.00	100	2,801,487,525.50	100	2,681,590,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,149,401,313.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.10	Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	42,000,000.00	100	41,949,604.00	100	13,450,000.00	100	13,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	55,149,604.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4	02	4.0.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Paket	1	173,441,000.00	1	135,931,000.00	1	58,435,000.00	1	34,172,000.00	1	62,000,000.00	1	50,081,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	220,184,800.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	100	44,250,000.00	100	42,750,000.00	100	43,700,000.00	100	41,240,000.00	100	70,690,000.00	100	70,690,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	154,680,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.32	Program peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	12	Bulan	12	321,000,000.00	12	245,850,000.00	12	171,000,000.00	12	162,965,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	12	408,815,000.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.34	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100	%	100	199,800,000.00	100	175,152,450.00	100	133,024,500.00	100	115,984,250.00	100	85,525,800.00	100	85,435,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	376,572,100.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.35	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	100	123,800,000.00	100	121,053,951.00	100	101,346,400.00	100	94,307,496.00	100	938,324,100.00	100	932,922,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,148,284,147.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.39	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	100	%	100	120,000,000.00	100	110,350,000.00	100	259,515,000.00	100	235,970,717.00	100	440,116,500.00	100	393,552,146.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	739,872,863.00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	02	4.0.2.40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Jumlah Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Paket	-	0.00	-	0.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,500,000.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	02	4.0.2	41	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	Paket	1	36,800,000.00	1	34,167,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,167,600.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	26,595,019,694.76	WTP	35,081,926,018.00	WTP	33,018,712,321.00	WTP	94,695,658,033.76	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	410,062,368,835.00	100	380,642,211,030.00	100	407,276,059,116.00	100	1,197,980,638,981.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	1,517,849,060.00	80	1,962,315,010.00	80	952,200,000.00	80	4,432,364,070.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	68	1,171,478,300.00	68	675,929,400.00	68	827,220,200.00	68	2,674,627,900.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
4	05	4.0.5	00	01	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	31	Orang	31	2,612,422,027.00	31	2,464,060,541.00	31	2,951,529,437.29	31	2,781,116,562.00	31	2,763,595,344.75	31	2,526,990,774.00	-	0.00	-	0.00	31	7,772,167,877.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang di laksanakan dengan baik	100	%	100	2,157,082,000.00	100	1,977,328,758.00	100	1,897,483,030.00	100	1,795,091,916.00	100	1,496,941,814.00	100	1,308,632,013.00	-	0.00	-	0.00	100	5,081,052,687.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	24,000,000.00	100	22,172,000.00	-	0.00	-	0.00	100	43,524,000.00	100	37,882,500.00	-	0.00	-	0.00	100	60,054,500.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	419,396,000.00	100	417,916,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	417,916,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pelaporan capaian kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	129,136,700.00	100	126,159,400.00	100	49,997,500.00	100	48,044,250.00	100	7,000,000.00	100	2,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	176,203,650.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	28		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	100	%	100	20,420,000.00	100	20,420,000.00	100	13,830,000.00	100	6,900,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,320,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	05	4.0.5	29		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	56,800,000.00	100	56,523,000.00	100	72,500,000.00	100	70,033,000.00	100	5,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	132,056,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja			
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	01	4.01	40	PROGRAM Peningkatan SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	%	100	234,039,000.00	100	234,014,700.00	100	142,064,000.00	100	141,706,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	375,721,600.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri		
4	05	4.05	96	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KORPRI	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Korpri	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,412,500.00	100	21,395,850.00	-	0.00	-	0.00	100	21,395,850.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri		
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	521,491,930.00	WTP	521,739,910.00	WTP	514,098,200.00	WTP	1,557,330,040.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri			
5	03	02		PROGRAM KEPENGAWAIAAN DAERAH	Persentase PNS yang capaian kinerjanya Berpredikat Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	40,464,200.00	100	58,309,500.00	100	34,789,000.00	100	133,562,700.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri			
				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																								
4	01	4.01	51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	44	Orang	44	5,091,372,814.00	44	4,874,481,007.00	41	5,944,881,780.60	41	5,471,362,057.00	46	6,983,288,994.15	46	6,683,096,379.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	131	17,028,939,443.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	1,449,012,500.00	100	1,436,841,185.00	100	1,458,990,450.00	100	1,441,282,583.00	100	1,533,336,914.00	100	1,467,027,711.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,345,151,479.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai inspektorat yang disiplin	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	0	0.00	0	0.00	100	26,250,000.00	100	25,477,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	38,977,500.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	78	%	78	71,846,400.00	78	71,846,400.00	80	65,501,000.00	80	59,281,000.00	82	86,549,900.00	82	82,037,150.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	82	213,164,550.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	0	0.00	0	0.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Pengawasan Internal yang Di Lakukan Sesuai Standar	80	%	81	1,599,026,000.00	81	1,588,070,125.00	83	1,700,863,000.00	83	1,700,859,003.00	85	1,733,385,653.00	85	1,691,142,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85	4,980,071,528.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	22	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Bersertifikat	100	%					88	191,000,000.00	100	188,546,454.00	90	111,406,000.00	100	107,223,319.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	295,769,773.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	38	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	80	%	80	128,415,100.00	80	124,569,560.00	84	141,376,250.00	84	141,281,229.00	85	135,361,200.00	85	135,334,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85	401,184,789.00	Inspektorat Daerah
4	01	4.00	54	Program Koordinasi dan Monitoring Pemberantasan Tipikor	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pemberantasan Tipikor	80	%	80	378,200,000.00	80	376,588,000.00	83	538,881,000.00	100	518,166,195.00	85	326,289,000.00	100	303,357,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,198,111,695.00	Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	01	4 00 03	Program Pembiayaan dan Pelayanan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Pemerintah Pekon Yang Mengelola Anggaran Dana Desa Sesuai Peraturan Yang Ada	100	%	100	50,000,000.00	100	49,809,750.00	100	16,092,900.00	100	16,087,320.00	100	30,208,600.00	100	15,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	80,897,070.00	Inspektorat Daerah
01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	10,692,976,813.00	WTP	11,720,513,619.00	WTP	12,084,406,686.00	WTP	34,497,897,118.00	Inspektorat Daerah			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder)	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	76	387,996,800.00	77	495,655,000.00	78	1,343,606,600.00	78	2,227,258,400.00	Inspektorat Daerah			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Maturnas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	40	1,328,487,377.90	45	2,186,620,000.00	48	495,655,000.00	48	4,010,762,377.90	Inspektorat Daerah			
			UNSUB KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN																								
4	05	4.0 5 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah Gaji PNS dan Tunjangan yang dapat di bayarkan	29	orang	29	2,396,854,313.00	29	2,232,561,705.00	31	2,768,737,351.00	31	2,531,076,532.00	25	2,841,543,902.33	25	2,176,178,744.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85	6,939,816,981.00	Kecamatan Kota Agung
4	05	4.0 5 00 5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	2,223,120,000.00	100	2,194,507,100.00	100	2,061,009,000.00	100	2,042,427,000.00	100	2,119,814,999.87	100	1,944,049,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,180,983,800.00	Kecamatan Kota Agung
4	05	4.0 5 00 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak	%	-	0.00	-	0.00	100	2,050,964,000.00	100	2,048,181,680.00	100	2,284,463,739.00	100	2,284,379,841.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,332,561,521.00	Kecamatan Kota Agung	
4	05	4.0 5 00 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	16,500,000.00	100	16,500,000.00	100	18,724,000.00	100	18,724,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	48,724,000.00	Kecamatan Kota Agung	
4	05	4.0 5 00 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindaklanjuti	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,600.00	100	5,092,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,092,500.00	Kecamatan Kota Agung	
4	05	4.0 5 00 08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	27,120,000.00	100	27,120,000.00	100	2,050,000.00	100	1,200,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	28,320,000.00	Kecamatan Kota Agung	
4	05	4.0 5 00 10	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	88,540,000.00	100	88,250,000.00	100	58,215,000.00	100	14,885,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	103,135,000.00	Kecamatan Kota Agung	
1	05	4.0 5 00 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	23,750,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	29,520,000.00	100	27,420,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	79,420,000.00	Kecamatan Kota Agung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	05	4.0 5	00	15	PROGRAM Peningkatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	%	-	0.00	-	0.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00		330,000,000.00		328,895,562.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	578,895,562.00	Kecamatan Kota Agung
4	05	4.0 5	00	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100 %	100	75,000,000.00	100	73,830,000.00	100	128,256,000.00	100	128,256,000.00	100	119,191,500.00	100	63,934,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	266,020,000.00	Kecamatan Kota Agung
4	05	4.0 5	00	38	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	346,140,000.00	100	346,140,000.00	100	366,340,000.00	100	366,340,000.00	100	314,580,800.00	100	266,362,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	978,842,800.00	Kecamatan Kota Agung
4	05	4.0 5	00	53	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	1	60,580,000.00	100	60,580,000.00	100	138,354,000.00	100	138,354,000.00	100	121,307,500.00	100	96,031,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	294,965,000.00	Kecamatan Kota Agung
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	5,529,528,857.00	WTP	5,750,323,598.00	WTP	5,394,753,923.00	WTP	16,674,606,378.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	268,916,600.00	100	37,706,600.00	100	9,000,000.00	100	315,623,200.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,343,398,908.00	100	2,311,617,908.00	100	1,021,622,750.00	100	5,676,639,566.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,720,000.00	100	35,520,000.00	100	69,000,000.00	100	141,240,000.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	270,000.00	100	6,435,000.00	100	0.00	100	6,705,000.00	Kecamatan Kota Agung		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	363,495,000.00	100	331,185,000.00	100	323,645,000.00	100	1,018,325,000.00	Kecamatan Kota Agung		
4	05	4.0 5	00	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	19 Orang	100	1,739,518,343.00	19	1,607,936,608.00	18	1,830,053,056.80	18	1,577,458,378.00	18	1,896,057,786.06	18	1,346,604,166.00				0.00	55	4,531,999,152.00	Kecamatan Wonosobo		
1	05	4.0 5	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	103,250,000.00	74	77,000,000.00	100	28,304,500.00	79	22,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	79	127,750,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	01	4.0 5	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	80,999,200.00	100	80,707,200.00	100	134,565,200.00	100	113,148,200.00	100	107,658,900.00	100	95,705,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	289,561,300.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.0 5	00	08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	- %	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,735,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,000,000.00	Kecamatan Wonosobo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	01	4.01.38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan	100	%	100	21,140,000.00	100	21,140,000.00	100	57,640,000.00	100	39,620,000.00	100	104,694,300.00	100	49,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	110,460,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	571,732,115.00	100	570,403,200.00	100	566,413,900.00	100	518,556,800.00	100	534,592,924.00	100	420,852,350.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,509,812,350.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	-	0.00	100	113,092,216.00	100	101,782,994.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	101,782,994.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,242,660.00	100	9,242,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,242,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	05	4.05.00.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0		-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	13,200,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,000,000.00	Kecamatan Wonosobo
4	01	4.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin aparatur	100	%	-	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Wonosobo
7	01	4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,424,571,944.00	WTP	2,297,704,938.00	WTP	1,980,638,551.00	WTP	6,702,915,433.00	Kecamatan Wonosobo	
7	01	4.01.1	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Pengendalian Pembangunan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,009,400.00	100	26,569,400.00	100	0.00	-	0.00	100	45,578,800.00	Kecamatan Wonosobo
7	01	4.01.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pokok/Keluahan yang Dapat Diberdayakan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	86,717,517.00	100	93,063,800.00	100	84,270,600.00	100	264,051,917.00	Kecamatan Wonosobo		
7	01	4.01.1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	28,814,400.00	100	79,814,400.00	100	142,828,800.00	Kecamatan Wonosobo		
7	01	4.01.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pengendalian Pembangunan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,033,000.00	100	54,533,100.00	100	20,309,100.00	100	93,875,200.00	Kecamatan Wonosobo		
4	05	4.05.00.5	Belanja Tidak Langsung	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	22	1,811,024,027.00	22	1,696,296,818.00	22	2,010,118,083.00	22	1,832,269,308.00	22	2,100,987,689.23	22	1,704,141,274.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	22	5,232,707,400.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.05.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,450,000.00	100	27,750,000.00	100	28,250,000.00	100	27,000,000.00	100	28,368,800.00	100	26,650,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	81,400,000.00	Kecamatan Talangpadang
4	05	4.05.00.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100	%	100	64,219,200.00	100	63,902,000.00	100	112,185,200.00	100	107,681,250.00	100	87,432,900.00	100	59,222,950.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	230,806,200.00	Kecamatan Talangpadang

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
					Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	05	4.0 5	00 38	PROGRAM PENGENDALIA N PEMBANGUNA N	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	15,700,000.00	100	15,488,000.00	100	46,600,000.00	100	38,493,000.00	100	56,180,500.00	100	23,365,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	77,346,000.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	820,680,872.00	100	764,824,972.00	100	742,828,872.00	100	654,121,511.00	100	749,328,850.00	100	564,260,860.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,983,207,343.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak	100	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	172,755,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	172,755,000.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100	%	100	32,000,000.00	100	32,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	14,800,000.00	100	13,600,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	45,600,000.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindaklanjuti	%	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,600.00	100	14,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,250,000.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 10	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	32,360,000.00	100	17,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,100,000.00	Kecamatan Talangpadan g
4	05	4.0 5	00 08	PROGRAM PENGEMBANG AN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	-	0.00	-	0.00	100	23,000,000.00	100	13,000,000.00	100	12,417,000.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Talangpadan g
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,670,100,689.00	WTP	2,546,676,599.00	WTP	2,490,034,721.00	WTP	7,706,812,009.00	Kecamatan Talangpadan g		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGA RAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,418,250.00	100	61,188,250.00	100	0.00	100	126,606,500.00	Kecamatan Talangpadan g		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	74,788,100.00	100	104,253,100.00	100	50,626,650.00	100	229,667,850.00	Kecamatan Talangpadan g		
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,100,000.00	100	35,100,000.00	100	86,100,000.00	100	156,300,000.00	Kecamatan Talangpadan g		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGA RAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan s Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,367,750.00	100	24,961,500.00	100	0.00	100	33,329,250.00	Kecamatan Talangpadan g		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	77,761,450.00	100	63,231,950.00	100	13,500,000.00	100	154,493,400.00	Kecamatan Talangpadan g		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab							
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD									
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target											
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)							
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,237,176,413.00	13	1,166,576,017.00	13	1,339,821,161.60	13	1,206,817,723.00	13	1,349,618,498.72	13	998,383,977.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	13	3,371,777,717.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	548,745,400.00	100	539,396,727.00	100	539,680,000.00	100	491,902,858.00	100	431,530,736.00	100	359,723,386.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,391,022,971.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	182,058,700.00	100	185,475,000.00	100	162,630,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	344,688,700.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	13,800,000.00	100	13,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,300,000.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,600.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	14,000,000.00	100	14,000,000.00	100	6,000,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	Kecamatan Pulau Pangung
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,243,000.00	100	28,250,000.00	100	23,245,500.00	100	27,000,000.00	100	23,700,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	75,188,500.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	63,203,000.00	100	62,906,400.00	100	123,846,000.00	100	110,433,800.00	100	74,952,450.00	100	72,629,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	245,969,200.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	01	00	32	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan		%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	900,000.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	16,380,000.00	100	16,342,200.00	100	48,980,000.00	100	35,435,450.00	100	45,285,000.00	100	35,915,250.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	87,692,900.00	Kecamatan Pulau Pangung
4	4	05	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya		%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,000,000.00	100	15,959,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,959,300.00	Kecamatan Pulau Pangung
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,842,792,818.07	WTP	1,712,213,236.00	WTP	1,731,391,847.00	WTP	5,286,397,901.07		5,286,397,901.07	Kecamatan Pulau Pangung
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,650,000.00	100	45,377,450.00	100	0.00	100	47,027,450.00		47,027,450.00	Kecamatan Pulau Pangung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pokor/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	65,235,650.00	100	91,300,200.00	100	41,734,450.00	100	198,270,300.00		198,270,300.00	Kecamatan Pulau Pangung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja	Rp			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	36,440,000.00	100	78,000,000.00	100	148,640,000.00	Kecamatan Pulau Pangung	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	800,000.00	100	3,347,500.00	100	2,902,500.00	100	7,050,000.00	Kecamatan Pulau Pangung	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	30,475,000.00	100	25,168,500.00	100	0.00	100	55,643,500.00	Kecamatan Pulau Pangung	
5	3	01.05	1Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	30	Orang	30	1,913,620,104.00	30	1,814,782,807.00	30	2,049,452,985.20	30	1,876,189,693.00	30	2,110,272,709.09	30	1,802,624,677.00	-	0.00	-	0.00	30	5,493,597,177.00	Kecamatan Pugung	
5	3	01.05	15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	27,750,000.00	100	28,250,000.00	100	28,247,000.00	100	28,453,900.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	82,997,000.00	Kecamatan Pugung	
1	3	01.05	21Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	88,076,700.00	100	87,985,680.00	100	139,073,400.00	1	138,387,900.00	1	102,709,300.00		77,154,300.00	-	0.00	-	0.00	100	303,527,880.00	Kecamatan Pugung	
1	3	01.05	32Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	13,000,000.00	100	2,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Pugung		
1	3	01.05	38Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	20,460,000.00	100	20,233,200.00	100	56,260,000.00	100	55,547,000.00	100	28,917,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	75,780,200.00	Kecamatan Pugung	
5	3	01.05	1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	414,345,172.00	100	412,713,298.00	100	393,705,700.00	100	378,880,950.00	100	425,262,090.00	100	316,404,300.00	-	0.00	-	0.00	100	1,107,998,548.00	Kecamatan Pugung	
5	3	01.05	2Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	-	200,000,000.00	100	199,670,000.00	100	92,475,000.00	100	78,480,000.00	-	0.00	-	0.00	100	278,150,000.00	Kecamatan Pugung		
5	3	01.05	6Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,122,500.00	100	13,621,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,621,900.00	Kecamatan Pugung
5	3	01.05	10Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Pugung		
5	3	01.05	3Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Pugung	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,338,500,165.00	WTP	2,091,874,733.00	WTP	1,799,106,658.00	WTP	6,229,481,556.00	Kecamatan Pugung		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,409,600.00	100	13,030,000.00	100	42,439,600.00	Kecamatan Pugung		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
3	5	3.0 1.0 5.1 2	11	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	36,000,000.00	100	15,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	Kecamatan Cukuh Balak			
7	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,565,969,029.04	WTP	1,497,198,082.00	WTP	1,338,588,475.00	WTP	4,401,755,586.04	Kecamatan Cukuh Balak			
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	0.00	Kecamatan Cukuh Balak			
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,209,900.00	100	31,461,100.00	100	36,328,250.00	100	96,999,250.00	Kecamatan Cukuh Balak			
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	35,100,000.00	100	70,200,000.00	100	139,500,000.00	Kecamatan Cukuh Balak			
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,375,000.00	100	18,470,497.00	100	0.00	100	21,845,497.00	Kecamatan Cukuh Balak			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	33,208,150.00	100	15,000,000.00	100	0.00	100	48,208,150.00	Kecamatan Cukuh Balak			
4	05	4.0 5	00 1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	13	Orang	13	1,172,049,128.00	13	1,099,543,469.00	16	1,257,827,377.40	14	1,133,717,996.00	13	1,288,655,180.71	13	1,125,633,207.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	44	3,358,894,672.00	Kecamatan Semaka
1	05	4.0 5	00 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	25,450,000.00	100	103,250,000.00	100	72,779,580.00	100	31,793,000.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	93.26	125,229,580.00	Kecamatan Semaka
4	01	4.0 5	00 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumentasi Perencanaan yang disusun secara baik dan tepat waktu	100	%	100	41,713,000.00	100	41,323,200.00	100	114,966,000.00	100	92,907,810.00	100	95,141,400.00	100	68,250,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	42	202,481,810.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.0 5	00 08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	8,000,000.00	100	11,825,000.00	100	1,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	9,250,000.00	Kecamatan Semaka	
4	01	4.0 5	00 38	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan	100	%	100	2,100,000.00	100	2,100,000.00	100	51,300,000.00	100	12,261,160.00	100	55,686,450.00	100	19,608,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	33,969,160.00	Kecamatan Semaka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	02	4.05	0040	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	persentase Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,381,361.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0	0.00	Kecamatan Semaka	
4	05	4.05	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100	574,691,700.00	100	568,555,840.00	100	527,767,500.00	100	480,775,200.00	100	500,498,883.55	100	413,256,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	68.96	1,462,587,340.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.05	0002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	194,580,000.00	100	137,855,605.45	100	132,900,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	97.5	327,480,000.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.05	0006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,603,200.00	100	579,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	38.03	579,900.00	Kecamatan Semaka
4	05	4.05	0010	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	8,500,000.00	97.33	8,500,000.00	100	11,250,000.00	100	11,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0	19,750,000.00	Kecamatan Semaka
4	01	4.01	0003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Semaka
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,865,493,571.07	WTP	1,760,041,154.00	WTP	1,734,608,696.00	WTP	5,360,143,421.07	Kecamatan Semaka		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,319,000.00	100	16,120,000.00	100	0.00	100	0.00	100	23,439,000.00	Kecamatan Semaka
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	43,883,000.00	100	65,022,000.00	100	47,834,600.00	100	156,739,600.00	100	156,739,600.00	Kecamatan Semaka
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,500,000.00	100	53,530,000.00	100	79,875,000.00	100	167,905,000.00	100	167,905,000.00	Kecamatan Semaka
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,347,500.00	-	0.00	100	980,000.00	100	4,327,500.00	100	4,327,500.00	Kecamatan Semaka
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,154,500.00	100	23,066,000.00	100	4,796,200.00	100	39,016,700.00	100	39,016,700.00	Kecamatan Semaka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4 05 4.1 5 1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12	1,130,131,568.00	12	1,066,204,707.00	12	1,203,402,208.20	12	1,085,657,614.00	10	1,177,116,023.82	10	964,550,918.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	34	3,116,413,239.00	Kecamatan Pematang Sawa
04 05 4.1 00 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,375,000.00	100	29,750,000.00	100	25,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	80,875,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	47,415,000.00	100	47,405,000.00	100	102,755,000.00	100	102,234,000.00	100	137,925,300.00	100	72,703,300.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	222,342,300.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	20,000,000.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	11,620,000.00	100	11,610,200.00	100	44,200,000.00	100	43,750,000.00	100	38,661,850.00	100	1,899,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	57,259,200.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 40 2	Program Penyelesaian Kewajiban atas Pembayaran Pekerjaan Tahun anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban atas Pembayaran Pekerjaan Tahun anggaran Sebelumnya	100 %	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	18,000,000.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	440,094,720.00	100	439,901,600.00	100	419,833,000.00	100	364,568,800.00	100	457,976,766.00	100	333,339,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,137,809,900.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan dengan baik	%	-	0.00	-	0.00	100	270,000,000.00	100	248,726,000.00	100	46,050,000.00	100	44,146,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	292,872,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem yang dilaksanakan dengan baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,147,500.00	100	3,144,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,144,500.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang dilaksanakan dengan baik	%	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	9,918,000.00	100	18,050,000.00	100	9,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,918,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
4 05 4.0 5 00 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100 %	100	16,500,000.00	100	16,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	8,800,000.00	100	3,300,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,800,000.00	Kecamatan Pematang Sawa
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,732,369,197.33	WTP	1,613,094,287.00	WTP	1,412,718,494.00	WTP	4,758,181,978.33	Kecamatan Pematang Sawa
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,586,400.00	100	30,199,600.00	100	10,274,300.00	100	45,060,300.00	Kecamatan Pematang Sawa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	33,598,100.00	100	44,322,000.00	100	34,596,900.00	100	112,517,000.00	Kecamatan Pematang Sawa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	01	4.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin aparatur	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Sumberejo
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,764,832,906.94	WTP	1,626,803,195.00	WTP	1,523,638,197.00	WTP	4,915,274,298.94	Kecamatan Sumberejo		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,404,000.00	100	31,104,000.00	100	16,414,000.00	100	57,922,000.00	Kecamatan Sumberejo		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	43,920,050.00	100	77,986,250.00	100	34,369,300.00	100	156,275,600.00	Kecamatan Sumberejo		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,807,500.00	100	35,807,500.00	100	76,402,500.00	100	148,017,500.00	Kecamatan Sumberejo		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,400,000.00	100	27,925,000.00	100	4,415,000.00	100	34,740,000.00	Kecamatan Sumberejo		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	19,874,500.00	100	9,846,800.00	100	29,721,300.00	Kecamatan Sumberejo		
4	05	4.05.00.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	10 Orang	10	1,013,272,795.00	10	928,275,815.00	10	1,045,165,171.40	10	939,131,368.00	10	1,055,503,309.26	10	847,131,318.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	10	2,714,538,501.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	316,479,150.00	100	300,218,550.00	100	271,490,000.00	100	222,397,640.00	100	288,000,726.00	100	241,571,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	764,187,290.00	Kecamatan Ulu Belu
4	05	4.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	152,305,000.00	100	54,308,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	152,305,000.00	Kecamatan Ulu Belu
1	05	3.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	25,600,000.00	100	28,227,300.00	100	18,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	71,850,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	01	3.01.05.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	48,354,200.00	100	48,353,000.00	100	96,966,000.00	100	78,916,000.00	100	79,729,700.00	100	48,477,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	175,746,850.00	Kecamatan Ulu Belu
3	01	3.01.05.38	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Pengendalian Pembangunan	100 %	100	12,980,000.00	100	12,980,000.00	100	41,100,000.00	100	6,400,000.00	100	63,422,600.00	100	10,692,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	30,072,000.00	Kecamatan Ulu Belu
3	05	3.01.05.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	13,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Ulu Belu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
3	05	3.01	05	33	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,600.00	100	5,372,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,372,600.00	Kecamatan Ulu Belu	
3	05	3.01	05	32	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	23,000,000.00	100	12,980,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,980,000.00	Kecamatan Ulu Belu	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	WTP	1,434,730,389.00	WTP	1,341,527,866.00	WTP	1,314,795,193.00	WTP	4,091,053,448.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,133,000.00	100	18,596,000.00	100	9,896,000.00	100	43,625,000.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	80	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	80	52,872,000.00	80	66,564,000.00	80	54,183,000.00	80	173,619,000.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketertinan dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	34,200,000.00	100	70,200,000.00	100	138,600,000.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	4,428,000.00	100	21,270,000.00	100	8,920,000.00	100	34,618,000.00	Kecamatan Ulu Belu		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	97	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,158,000.00	100	37,852,000.00	100	6,602,000.00	100	53,612,000.00	Kecamatan Ulu Belu		
0	0	5	1		Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	14	977,861,255.00	14	913,310,520.00	14	1,210,156,892.60	14	1,085,716,959.00	14	1,232,049,409.55	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	3,034,515,070.00	Kecamatan Kelumbayan
3	01	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,445,000.00	100	11,250,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	67,750,000.00	Kecamatan Kelumbayan
3	01	05	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	28,570,000.00	100	28,570,000.00	100	78,106,000.00	100	73,382,000.00	100	65,297,050.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	139,291,800.00	Kecamatan Kelumbayan
3	01	05	32		Program Pengembangan Nilai-nilai Kaagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Kaagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	16,000,000.00	100	9,000,000.00	100	21,539,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan	
3	01	05	38		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	12,540,000.00	100	12,540,000.00	100	33,500,000.00	100	32,409,000.00	100	31,014,650.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	44,949,000.00	Kecamatan Kelumbayan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab																																																																								
							Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																																																																										
							Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																																																																										
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp																																																																									
(1)				(2)				(3)				(4)				(5)				(6)				(7)				(8)				(9)				(10)				(11)				(12)				(13)				(14)				(15)				(16)				(17)				(18)				(19)				(20)				(21)				(22)				(23)				(24)				(25)			
3.01.5.14	01	5	14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	318,859,200.00	100	316,940,000.00	100	292,410,000.00	100	283,934,000.00	100	267,633,159.00	100	152,688,357.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	753,562,357.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																						
3.01.5.14	01	5	14	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,095,000.00	100	52,440,000.00	100	51,490,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	249,585,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
3.01.5.14	01	5	14	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,147,500.00		5,775,843.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,775,843.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
3.01.5.14	01	5	14	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	100	9,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
3.01.5.14	01	5	14	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,654,911,976.05	WTP	1,664,939,646.00	WTP	1,756,261,645.00	WTP	5,076,113,267.05	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,362,500.00	100	8,952,500.00	100	4,462,500.00	100	18,777,500.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,745,000.00	100	9,757,500.00	100	28,012,500.00	100	57,515,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan dan Keterlibatan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,250,000.00	100	27,600,000.00	100	51,000,000.00	100	113,850,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,525,000.00	100	8,792,500.00	100	8,392,500.00	100	18,710,000.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,217,500.00	100	5,494,300.00	100	3,600,000.00	100	16,311,800.00	Kecamatan Kelumbayan																																																																							
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,172,013,834.00	13	1,105,031,635.00	13	1,178,438,927.60	13	1,047,706,146.00	13	1,452,445,371.80	13	1,363,237,406.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	13	3,515,975,187.00	Kecamatan Gisting																																																																						
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	699,855,960.00	100	665,831,000.00	100	671,800,000.00	100	636,861,700.00	100	733,289,464.00	100	599,873,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,902,566,200.00	Kecamatan Gisting																																																																						
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Gisting																																																																						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,519,000.00	100	53,497,000.00	100	14,820,000.00	-	0.00	-	0.00	100	214,339,000.00	Kecamatan Gisting		
	4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,146,600.00	100	8,504,750.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,504,750.00	Kecamatan Gisting	
	4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,000,000.00	Kecamatan Gisting
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,450,000.00	100	28,450,000.00	100	28,450,000.00	100	28,269,750.00	100	28,558,100.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	100	83,719,750.00	Kecamatan Gisting	
	4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	27,625,000.00	100	27,625,000.00	100	83,366,000.00	100	79,110,500.00	100	53,037,700.00	100	45,634,250.00	-	0.00	-	0.00	100	152,369,750.00	Kecamatan Gisting
	4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100	%	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	100	13,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,000,000.00	Kecamatan Gisting
	4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	8,220,000.00	100	8,220,000.00	100	32,200,000.00	100	28,283,050.00	100	22,738,400.00	100	9,587,500.00	-	0.00	-	0.00	100	46,090,550.00	Kecamatan Gisting
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	2,670,464,870.00	WTP	2,538,651,771.00	WTP	2,084,806,290.00	WTP	7,293,922,931.00	Kecamatan Gisting		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	48,020,500.00	100	55,355,500.00	100	13,455,563.00	100	116,831,563.00	Kecamatan Gisting	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pokok/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,764,100.00	100	36,764,100.00	100	33,914,100.00	100	107,442,300.00	Kecamatan Gisting	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,518,600.00	100	35,718,600.00	100	52,087,500.00	100	123,324,700.00	Kecamatan Gisting	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,207,900.00	100	17,532,900.00	100	10,701,800.00	100	41,442,600.00	Kecamatan Gisting	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	40,284,800.00	100	40,284,800.00	100	22,408,500.00	100	102,978,100.00	Kecamatan Gisting	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD										
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target												
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)								
4	01	4	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,044,733,110.00	13	979,454,396.00	13	1,241,642,147.70	13	1,156,284,403.00	13	1,283,716,058.78	13	1,018,702,685.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	13	3,154,441,484.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	403,250,882.00	100	401,409,062.00	100	363,980,000.00	100	315,225,000.00	100	282,807,630.00	100	248,293,800.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	964,927,862.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	177,817,300.00	100	181,500,000.00	100	180,225,400.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	358,042,700.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	100		100		100	2,866,600.00	100	2,834,500.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	2,834,500.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	24,900,000.00	100	18,000,000.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	74,500,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	38,060,000.00	100	38,060,000.00	100	88,966,000.00	100	87,183,500.00	100	52,842,500.00	100	52,842,500.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	178,086,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan		%	-	0.00	-	0.00	100	23,000,000.00	100	14,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	14,000,000.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	10,260,000.00	100	10,260,000.00	100	37,300,000.00	100	33,634,000.00	100	17,450,950.00	100	11,729,600.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	100	55,623,600.00	Kecamatan Kota Agung Timur
4	4	05	00	40	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,979,700.00	-	0.00	-		0.00	-		0.00	-		0.00	0	0.00	Kecamatan Kota Agung Timur
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,699,908,309.95	WTP	1,605,235,119.00	WTP	1,585,149,530.00	WTP			4,890,292,958.95			Kecamatan Kota Agung Timur	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100			46,887,000.00	100			17,418,400.00	100		64,305,400.00			Kecamatan Kota Agung Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kinerja						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	05	4.05	0038	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	14,500,000.00	100	14,360,800.00	100	44,100,000.00	100	32,600,000.00	100	73,608,700.00	100	24,064,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	71,025,200.00	Kecamatan Kota Agung Barat
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,796,889,621.63	WTP	1,683,546,820.00	WTP	1,538,528,693.00	WTP	5,018,965,134.63	Kecamatan Kota Agung Barat			
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan Publik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	26,053,800.00	100	65,552,700.00	100	11,706,700.00	100	103,313,200.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	70,707,600.00	100	80,549,600.00	100	77,205,300.00	100	228,462,500.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,338,000.00	100	28,160,000.00	100	57,934,000.00	100	121,432,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	14,907,500.00	100	13,782,500.00	100		100	28,690,000.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,501,400.00	100	43,771,000.00	100	27,637,300.00	100	105,909,700.00	Kecamatan Kota Agung Barat			
4	05	4.05	51	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	14	1,220,104,807.00	14	1,151,686,853.00	14	1,331,572,500.60	14	1,204,266,887.00	14	1,381,751,188.15	14	1,257,817,731.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	3,613,771,471.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.05	0015	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	100	%	100	28,250,000.00	100	28,245,000.00	100	28,250,000.00	100	28,245,000.00	100	27,250,200.00	100	27,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	83,490,000.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.05	0021	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	45,503,800.00	100	45,364,400.00	100	95,219,800.00	100	94,470,858.00	100	75,120,300.00	100	73,130,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	212,965,858.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.05	0008	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan yang dilaksanakan dengan baik dan Wawasan Kebangsaan	100	%	-	0.00	-	0.00	100	14,500,000.00	100	10,000,000.00	100	11,507,100.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.05	0038	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	10,260,000.00	100	10,208,700.00	100	35,560,000.00	100	35,352,105.00	100	6,319,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	49,075,805.00	Kecamatan Gunung Alip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target							
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
4	05	4.0.5	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	348,340,652.00	100	341,107,281.00	100	343,960,650.00	100	326,633,520.00	100	382,006,500.00	100	292,483,354.00	-	0.00	-	0.00	100	960,224,155.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.0.1	00	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan dengan baik	100	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,671,376.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	199,671,376.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.0.5	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase Program peningkatan pengembangan sistem yang dilaksanakan dengan baik	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,800.00	100	16,027,550.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	16,027,550.00	Kecamatan Gunung Alip
4	01	4.0.5	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang dilaksanakan dengan baik	100	%	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	11,700,000.00	100	500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	10,500,000.00	Kecamatan Gunung Alip
4	05	4.0.1	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Impelementasi Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	20,600,000.00	100	7,500,000.00	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	Kecamatan Gunung Alip
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,947,572,931.00	100	1,856,006,469.00	100	1,677,842,928.00	100	5,481,422,328.00	Kecamatan Gunung Alip
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,575,500.00	100	6,129,600.00	100	8,989,500.00	100	18,694,600.00	Kecamatan Gunung Alip	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	24,406,500.00	100	23,508,700.00	100	21,842,500.00	100	69,757,700.00	Kecamatan Gunung Alip	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	36,170,000.00	100	35,133,500.00	100	57,090,000.00	100	128,393,500.00	Kecamatan Gunung Alip	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	21,082,500.00	100	12,834,800.00	100	2,925,000.00	100	36,842,300.00	Kecamatan Gunung Alip	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,318,500.00	100	4,859,600.00	100	2,325,000.00	100	12,503,100.00	Kecamatan Gunung Alip	
4	01	4.5.1			Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,253,031,552.00	13	1,180,488,051.00	13	1,390,272,472.20	13	1,248,532,824.00	14	1,459,853,657.62	14	1,339,875,141.00	-	0.00	-	0.00	14	3,768,896,016.00	Kecamatan Limau

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target								
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	360,730,300.00	100	350,751,000.00	100	323,348,400.00	100	289,585,300.00	100	334,094,114.00	100	226,824,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	867,160,800.00	Kecamatan Limau
4	4	05	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persebtase Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,355,000.00	100	36,597,700.00	100	32,521,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	230,876,800.00	Kecamatan Limau	
4	4	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100	13,500,000.00	Kecamatan Limau	
4	4	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	18,147,500.00	100	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,000,000.00	Kecamatan Limau	
4	4	05	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	100	11,000,000.00	100	7,100,000.00		0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	Kecamatan Limau	
1	4	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	26,300,000.00	100	28,506,100.00	100	19,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	73,550,000.00	Kecamatan Limau
4	4	05	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	33,927,500.00	100	33,927,500.00	100	81,893,500.00	100	55,943,500.00	100	69,405,800.00	100	34,993,850.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	124,864,850.00	Kecamatan Limau
4	4	01	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	21,000,000.00	100	11,000,000.00	100	5,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,000,000.00	Kecamatan Limau	
4	4	05	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	9,580,000.00	100	9,580,000.00	100	34,180,000.00	100	17,271,200.00	100	18,905,500.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	26,851,200.00	Kecamatan Limau
4	4	05	00	Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	Persentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,866,200.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Limau	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,832,331,562.00	WTP	1,765,336,734.00	WTP	1,592,364,863.00	WTP	5,190,033,159.00	Kecamatan Limau			
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,954,100.00	100	33,495,100.00	100	10,698,200.00	100	60,147,400.00	Kecamatan Limau			
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	30,490,000.00	100	21,337,390.00	100	26,177,390.00	100	78,004,780.00	Kecamatan Limau			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
7	01	04	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum	Persentase Ganguan Keamanan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,500,000.00	100	34,482,600.00	100	73,482,600.00	100	142,465,200.00	Kecamatan Limau		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan s Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	2,925,000.00	100	11,022,500.00	100	2,665,000.00	100	16,612,500.00	Kecamatan Limau		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,843,900.00	100	32,683,600.00	100	4,729,700.00	100	61,257,200.00	Kecamatan Limau		
4	05	4.05.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang	22	1,191,026,547.00	22	1,123,588,469.00	22	1,314,803,839.40	22	1,179,969,796.00	22	1,389,544,877.36	22	1,280,945,110.00	-	0.00	-	0.00	-	22	3,584,503,375.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	26,000,000.00	100	103,250,000.00	100	103,249,600.00	100	27,546,700.00	100	27,546,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	156,796,300.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Secara Baik dan Tepat Waktu	100	%	100	38,325,000.00	100	38,325,000.00	100	86,291,000.00	100	86,291,000.00	100	61,515,284.00	100	52,484,684.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	177,100,684.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	9,580,000.00	100	9,580,000.00	100	34,180,000.00	100	34,180,000.00	100	20,729,500.00	100	11,613,450.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	55,373,450.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penurunan Kasus Disiplin Aparatur	100	%	100	416,617,600.00	100	408,006,000.00	100	398,262,500.00	100	396,411,500.00	100	404,185,816.00	100	366,879,526.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1,171,297,026.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	199,817,000.00	100	117,210,000.00	100	116,720,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	316,537,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Implementasi Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	0.00	100	0.00	100	20,100,000.00	100	19,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	33,300,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan keuangan	Persentase Temuan BPK/APP yang Ditindaklanjuti	100	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,600.00	100	8,147,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	8,147,600.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	01	4.05.00.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	-	0.00	-	0.00	100	5,500,000.00	100	5,500,000.00	100	5,500,000.00	100	5,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11,000,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung
4	05	4.05.00.08	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100	%	-	0.00	-	0.00	100	9,500,000.00	100	9,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	9,500,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1,859,079,986.75	WTP	1,869,921,145.00	WTP	1,855,950,212.00	WTP	5,584,951,343.75	Kecamatan Bandar Negeri Semuung	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,786,200.00	100	2,660,000.00	100	18,446,200.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung		
7	01	03		PROGRAM PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,682,800.00	100	34,300,600.00	100	27,150,000.00	82,133,400.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	35,225,000.00	100	37,800,000.00	100	54,600,000.00	127,625,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,464,000.00	100	2,924,000.00	100	0.00	6,388,000.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,546,600.00	100	9,000,000.00	100	24,546,600.00	Kecamatan Bandar Negeri Semuung		
4	05	4.05	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang	10	1,018,583,000.00	10	961,756,630.00	10	1,073,302,352.00	10	956,516,702.00	10	1,114,570,778.40	10	1,034,408,131.00	-	0.00	-	0.00	10	2,952,681,463.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.05	1501	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	21,000,000.00	100	28,244,400.00	100	24,750,000.00	-	0.00	-	0.00	100	74,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.05	0021	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	20,339,700.00	100	20,339,700.00	100	70,055,700.00	100	52,983,700.00	100	37,631,600.00	100	28,649,800.00	-	0.00	-	0.00	100	101,973,200.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.05	0008	Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	100	14,000,000.00	100	7,000,000.00	100	3,080,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,000,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.05	0038	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	6,180,000.00	100	6,180,000.00	100	27,280,000.00	100	23,260,000.00	100	11,295,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	29,440,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.05	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	285,984,716.00	100	270,730,300.00	100	280,364,600.00	100	241,529,500.00	100	337,521,242.00	100	196,794,058.00	-	0.00	-	0.00	100	709,053,858.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
4	05	4.01	0002	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	100	200,000,000.00	100	181,302,000.00	100	26,927,000.00	100	20,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	201,302,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	05	4.05	0006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	%	-	-	0.00	-	0.00	100	2,298,000.00	100	450,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	450,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
4	05	4.05	0006	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	8,000,000.00	100	7,500,000.00	100	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	11,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
4	05	4.01	0003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat
7	1	1		PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,453,500,420.25	WTP	1,400,413,544.00	WTP	1,240,640,915.00	WTP	4,094,554,879.25	Kecamatan Kelumbayan Barat	
7	1	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,400,000.00	100	5,310,000.00	100	0.00	100	6,710,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
7	1	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	12,000,000.00	100	38,699,600.00	100	58,098,500.00	100	108,798,100.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
7	1	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	29,100,000.00	100	36,600,000.00	100	99,900,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
7	1	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,525,000.00	100	20,297,500.00	100	6,390,000.00	100	30,212,500.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
7	1	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	10,665,000.00	100	0.00	100	10,665,000.00	Kecamatan Kelumbayan Barat	
4	01	451		Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang	13	1,265,252,966.00	13	1,191,752,802.00	13	1,402,316,092.00	13	1,241,959,555.00	13	1,463,800,548.90	13	1,312,561,309.00	-	0.00	-	0.00	-	3,746,273,666.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	0501		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	327,941,649.00	100	327,340,900.00	100	321,942,550.00	100	321,942,550.00	100	299,261,800.00	100	285,434,000.00	-	0.00	-	0.00	-	934,717,450.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	0103		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Air Nanningan
4	4	0502		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persebaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	198,950,000.00	100	139,500,000.00	100	139,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	338,450,000.00	Kecamatan Air Nanningan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
4	4	05	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	5,350,000.00	100	5,350,000.00	-	0.00	-	0.00	100	5,350,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
4	4	05	00	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	%	-	0.00	-	0.00	100	8,000,000.00	100	8,000,000.00	100	100	-	0.00	-	0.00	100	8,000,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
1	4	05	00	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	%	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,000,000.00	100	20,250,000.00	-	0.00	-	0.00	100	76,750,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
4	4	05	00	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	30,530,000.00	100	30,530,000.00	100	78,496,000.00	100	78,496,000.00	100	33,966,000.00	-	0.00	-	0.00	100	142,992,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
4	4	01	00	32	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	-	%	-	0.00	-	0.00	100	8,540,000.00	100	8,540,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,540,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
4	4	05	00	38	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Program Pengendalian Pembangunan Daerah	100	%	100	8,900,000.00	100	8,900,000.00	100	32,800,000.00	100	32,800,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	41,700,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,849,936,552.81	WTP	1,696,975,048.00	WTP	1,583,380,950.00	WTP	5,130,292,550.81	Kecamatan Air Nanningan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	24,574,400.00	100	9,223,200.00	100	33,797,600.00	Kecamatan Air Nanningan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	19,725,000.00	100	29,307,390.00	100	21,217,390.00	100	70,249,780.00	Kecamatan Air Nanningan	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,200,000.00	100	34,200,000.00	100	60,000,000.00	100	128,400,000.00	Kecamatan Air Nanningan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	100	3,957,500.00	100	0.00	100	3,957,500.00	Kecamatan Air Nanningan	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	-	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	9,850,000.00	100	13,200,000.00	100	5,400,000.00	100	28,450,000.00	Kecamatan Air Nanningan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Toluan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
4	05	4.1	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16	1,422,497,948.00	16	1,339,758,315.00	18	1,475,359,573.00	18	1,333,172,252.00	18	1,530,862,290.98	14	1,385,645,230.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	14	4,058,575,797.00	Kecamatan Bulok
4	05	4.1	5		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	28,250,000.00	100	27,135,000.00	100	28,250,150.00	100	20,984,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	76,369,000.00	Kecamatan Bulok
4	05	4.1	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	78,966,000.00	100	74,674,000.00	100	91,590,600.00	100	74,238,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	178,912,000.00	Kecamatan Bulok
4	01	4.1	53		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,880,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Bulok
4	05	4.1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	8,147,500.00	100	625,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	625,000.00	Kecamatan Bulok
4	05	4.1	10		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	0.00	-	0.00	100	6,000,000.00	100	6,000,000.00	100	14,130,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,000,000.00	Kecamatan Bulok
4	01	4.1	38		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Pembangunan Daerah	100 %	100	8,900,000.00	100	8,900,000.00	100	32,900,000.00	100	32,900,000.00	100	59,229,400.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	41,800,000.00	Kecamatan Bulok
4	5	4.1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	337,674,700.00	100	336,906,200.00	100	287,734,800.00	100	281,852,000.00	100	334,090,980.00	100	206,802,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	825,560,200.00	Kecamatan Bulok
4	5	4.1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	0.00	-	0.00	100	200,000,000.00	100	197,704,000.00	100	84,577,500.00	100	77,980,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	275,684,000.00	Kecamatan Bulok
4	5	4.1	15		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,154,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	0.00	Kecamatan Bulok
4	01	4	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	13,500,000.00	Kecamatan Bulok
4	05	4.1	8		Program Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	100	12,000,000.00	100	7,640,000.00	100	14,570,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,640,000.00	Kecamatan Bulok
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	WTP	1,848,966,792.00	WTP	1,591,366,715.00	WTP	1,628,368,202.00	WTP	5,068,701,709.00	Kecamatan Bulok		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	6,352,600.00	100	16,145,000.00	100	0.00	100	22,497,600.00	Kecamatan Bulok		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tetapan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target		Kondisi						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pokok/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,810,100.00	WTP1	55,158,000.00	100	56,570,000.00	100	139,538,100.00	Kecamatan Bulok		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	34,815,600.00	100	34,425,000.00	100	63,450,000.00	100	132,690,600.00	Kecamatan Bulok		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,759,550.00	100	1,800,000.00	100	19,559,550.00	100	19,559,550.00	Kecamatan Bulok		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,236,600.00	100	23,708,550.00	100	0.00	100	46,945,150.00	Kecamatan Bulok		
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
0	0	5	1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tunjangan dan Gaji	32	Orang	32	2,310,724,280.00	32	2,167,862,527.00	31	2,532,733,454.20	31	2,324,403,851.45	31	2,510,800,263.27	31	2,315,045,672.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	31	6,807,312,050.45	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan Dengan Baik	100	%	100	650,762,500.00	100	607,510,600.00	100	609,689,400.00	100	605,556,545.00	100	632,062,885.00	100	550,978,396.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,764,045,541.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana	100	%	100	7,500,000.00	100	7,500,000.00	100		100		100		-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	7,500,000.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	100	%	100	8,930,000.00	100	8,930,000.00	100	9,631,200.00	100	9,631,200.00	100	8,534,700.00	100	8,534,700.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	27,095,900.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	10	01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100	%	100	0.00	100	0.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	0.00	100	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	15,000,000.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	17		Program Pengembangan Wawasan Krbangsaan	Persentase Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	%	100	177,500,000.00	100	177,250,000.00	100	383,664,400.00	100	375,209,150.00	100	185,536,900.00	100	145,515,608.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	697,974,758.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	100	%	100	320,080,500.00	100	317,236,600.00	100	230,564,700.00	100	228,029,300.00	100	29,136,600.00	100	26,886,600.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	572,152,500.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
00	23		Program Pemeliharaan Keamanan Keterlibatan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Keamanan Keterlibatan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	100	%	100	144,800,000.00	100	143,630,000.00	100	227,112,800.00	100	208,406,400.00	100	145,000,000.00	100	142,498,900.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	494,535,300.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Target		Target						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
00	24		Program Penanganan Konflik	Persentase Kegiatan Penanganan Konflik	100	%	100	89,100,000.00	100	89,100,000.00	100	94,738,800.00	100	94,438,800.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	183,538,800.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	3,619,795,681.00	WTP	3,627,485,620.00	WTP	3,411,504,870.00	WTP	10,658,786,171.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	17,244,600.00	-	0.00	-	47,708,100.00	100	64,952,700.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	23,496,300.00	100	162,641,500.00	100	225,254,000.00	100	411,391,800.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan keberadaan dan aktifitas ORMAS	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	1,932,409,090.00	100	1,682,326,420.00	100	1,942,484,235.00	100	5,557,219,745.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	20,525,500.00	100	36,591,300.00	100	57,116,800.00	100	57,116,800.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik	%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	100	39,936,200.00	100	81,889,800.00	100	89,813,000.00	100	211,639,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
JUMLAH							1,647,834,231,117.93		1,527,711,794,512.80		1,814,735,408,301.66		1,678,742,417,518.67		1,807,630,524,556.50		1,648,643,730,414.86		1,986,334,724,658.65		1,930,197,496,585.00		1,869,941,910,400.00		10,641,572,074,090.00	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Nilai Tukar Petani dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanggamus, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam Tabel VIII.1, VIII.2 dan VIII.3.

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1.	IM.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.19	5.02	5.02	5.20	5.03	5.25	-1.77	5.28	5.30	5.32	2.75	3.50	4.05	4.05
2.	IM.2	PDRB Perkapita	Rupiah	22,868,022	-	24,492,707	-	26,025,543	-	25,742,248	-	-	-	25,250,130	26,280,240	27,360,000	27,360,000
3.	IM.3	Angka Kemiskinan	Persen	13.69	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	9.91	9.33	8.79	11.60	11.00	10.80	10.80
4.	IM.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.08	2.23	2.21	2.22	2.96	2.22	2.96	2.21	2.20	2.00	2.95	3.75	3.00	3.00
5.	IM.5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64.94	65.50	65.67	66.37	66.37	67.06	66.42	67.61	68.16	68.72	66.48	66.57	67.85	67.85
6.	IM.6	Indeks Gini	Angka	0.395	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.220	0.205	0.190	0.292	0.264	0.263	0.263
7.	IM.7	Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	Persen	-	-	63.30	-	63.05	-	68.32	-	-	-	68.37	69.67	71.67	71.67
8.	IM.8	Nilai Tukar Petani	Angka	140.72	-	147.14	-	140.1	-	71.09	-	-	-	88.03	91.34	97.06	97.06
9.	IM.9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00	7.00

Sumber : Analisis data diolah, 2021

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU		
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				UTAMA	PENUNJANG	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023				
	Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas																		
1.	IS.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian	CC	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2.	IS.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	-	-	72.9389	-	67.8997	-	77.2524	-	-	-	80.0000	82.0000	85.0000	85.0000	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat
3.	IS.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	73.47	77.14	77.14	81.00	75.00	85.05	70.93	89.30	93.77	95.64	72.00	85.00	87.00	87.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas
	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing																		
4.	IS.4	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.80	67.85	68.04	69.10	68.40	70.48	68.56	71.89	73.33	74.80	68.60	68.65	68.70	68.70	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas
5.	IS.5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.14	-	12.15	-	12.17	-	12.18	-	-	-	12.19	12.20	12.25	12.25	Dinas Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6.	IS.6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.88	6.90	6.96	6.95	7.21	7.00	7.22	7.10	7.20	7.30	7.23	7.34	7.35	7.35	Dinas Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Misi 3 Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika																		
7.	IS.7	Angka Kemiskinan	Persen	13.69	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	9.91	9.33	8.79	11.60	11.00	10.80	10.80	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8.	IS.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.08	2.23	2.21	2.22	2.96	2.22	2.96	2.21	2.20	2.00	2.95	3.75	3.00	3.00	Dinas Tenaga Kerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
9.	IS.9	Indeks Rasa Aman	Angka	0.45	0.49	0.49	0.49	0.75	0.50	0.91	0.51	0.52	0.53	0.92	0.93	0.94	0.94	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				UTAMA	PENUNJANG
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
10.	IS.10 Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	13.65	13.50	13.50	13.29	13.29	12.84	13.26	12.67	12.34	12.31	13.40	13.34	13.10	13.10	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja
11.	IS.11 Indeks Gini	Angka	0.395	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.220	0.205	0.190	0.292	0.264	0.263	0.263	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Dinas Sosial,Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
12.	IS.12 Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Persen	7.66	-	7.29	-	6.11	-	(6.95)	-	-	-	4.00	4.50	5.00	5.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian dan Sember Daya Alam Sekretariat Daerah
13.	IS.13 Persentase Pekon Maju	Persen	2.01	-	2.34	-	8.03	-	13.04	-	-	-	17.06	18.06	19.06	19.06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup
14.	IS.14 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69.77	-	69.90	-	56.97	-	56.80	-	-	-	56.85	67.00	67.50	67.50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD



NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			2017	2018		2019		2020		Terget Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				UTAMA	PENUNJANG
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
15.	IS.15 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	-	-	-	75.00	-	77.00	-	79.00	81.00	83.00	565.00	567.00	570.00	570.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Misi 4 Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi																		
16.	IS.16 Nilai Tukar Petani	Angka	140.72	-	147.14	-	140.10	-	71.09	-	-	-	88.03	91.34	97.06	97.06	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan dan Peternakan
17.	IS.17 Skor Pola Pangan Harapan	Angka	73.32	74.11	74.11	75.00	83.85	76.00	73.65	77.00	78.00	79.00	83.40	83.55	83.60	83.60	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Misi 5 Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata																		
18.	IS.18 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	45.17	-	46.65	-	37.64	-	51.88	-	-	-	51.10	51.50	52.00	52.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.	IS.19 Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	52.00	-	53.65	-	54.77	-	56.10	-	-	-	57.00	60.00	65.00	65.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.	IS.20 Rasio Elektrifikasi	Persen	79.40	89.60	89.60	95.30	96.75	96.10	96.98	97.00	98.00	99.00	97.00	97.50	98.00	98.00	Dinas Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian dan Sember Daya Alam Sekretariat Daerah
21.	IS.21 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00	7.00	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				UTAMA	PENUNJANG
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
22.	IS.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	52.67	55.27	55.27	66.00	62.50	66.50	63.76	67.00	67.50	68.00	64.27	64.92	65.56	65.56	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.	IS.23 Indeks Risiko Bencana	Angka	141.00	-	135.86	-	132.25	-	129.73	-	-	-	128.00	125.00	120.00	120.00	Badan Penanggulan n Bencana Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal																	
24.	IS.24 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00	10.00	10.00	14.00	23.50	18.00	-83.00	22.00	24.00	28.00	20.00	25.00	30.00	30.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : Analisis data diolah, 2021



Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
	ASPEK KESJAHTERAAN MASYARAKAT																
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi																
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.19	5.02	5.02	5.20	5.03	5.25	-1.77	5.28	5.30	5.32	2.75	3.50	4.05	4.05	Indikator Makro
2	PDRB Perkapita	Rupiah	22,868,022	-	24,492,707	-	26,025,543	-	25,742,248	-	-	-	25,250,130	26,280,240	27,360,000	27,360,000	Indikator Makro
3	Angka Kemiskinan	%	13.69	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	9.91	9.33	8.79	11.60	11.00	10.80	10.80	Indikator Makro, IKU Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.08	2.23	2.21	2.22	2.96	2.22	2.96	2.21	2.20	2.00	2.95	3.75	3.00	3.00	Indikator Makro, IKU Daerah
	Kesejahteraan Sosial																
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64.94	65.50	65.67	66.37	66.37	67.06	66.42	67.61	68.16	68.72	66.48	66.57	67.85	67.85	Indikator Makro
2	Indeks Gini	Angka	0.395	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.220	0.205	0.190	0.292	0.264	0.263	0.263	Indikator Makro, IKU Daerah
3	Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	Persen	-	-	63.30	-	63.05	-	68.32	-	-	-	68.37	69.67	71.67	71.67	Indikator Makro
4	Nilai Tukar Petani	Angka	140.72	-	147.14	-	140.1	-	71.09	-	-	-	88.03	91.34	97.06	97.06	Indikator Makro, IKU Daerah
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00	7.00	Indikator Makro, IKU Daerah
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	CC	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	IKU Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	-	-	72.9389	-	67.8997	-	77.2524	-	-	-	80.0000	82.0000	85.0000	85.0000	IKU Daerah



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	73.47	77.14	77.14	81.00	75.00	85.05	70.93	89.30	93.77	95.64	72.00	85.00	87.00	87.00	IKU Daerah
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.80	67.85	68.04	69.10	68.40	70.48	68.56	71.89	73.33	74.80	68.60	68.65	68.70	68.70	IKU Daerah
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.14	-	12.15	-	12.17	-	12.18	-	-	-	12.19	12.20	12.25	12.25	IKU Daerah
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.88	6.90	6.96	6.95	7.21	7.00	7.22	7.10	7.20	7.30	7.23	7.34	7.35	7.35	IKU Daerah
12	Indeks Rasa Aman	Angka	0.45	0.49	0.49	0.49	0.75	0.50	0.91	0.51	0.52	0.53	0.92	0.93	0.94	0.94	IKU Daerah
13	Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	13.65	13.50	13.50	13.29	13.29	12.84	13.26	12.67	12.34	12.31	13.40	13.34	13.10	13.10	IKU Daerah
14	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Persen	7.66	-	7.29	-	6.11	-	(6.95)	-	-	-	4.00	4.50	5.00	5.00	IKU Daerah
15	Persentase Pekon Maju	Persen	2.01	-	2.34	-	8.03	-	13.04	-	-	-	17.06	18.06	19.06	19.06	IKU Daerah
16	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69.77	-	69.90	-	56.97	-	56.80	-	-	-	56.85	67.00	67.50	67.50	IKU Daerah
17	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	-	-	-	75.00	-	77.00	-	79.00	81.00	83.00	565.00	567.00	570.00	570.00	IKU Daerah
18	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	73.32	74.11	74.11	75.00	83.85	76.00	73.65	77.00	78.00	79.00	83.40	83.55	83.60	83.60	IKU Daerah
19	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	45.17	-	46.65	-	37.64	-	51.88	-	-	-	51.10	51.50	52.00	52.00	IKU Daerah
20	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	52.00	-	53.65	-	54.77	-	56.10	-	-	-	57.00	60.00	65.00	65.00	IKU Daerah
21	Rasio Elektrifikasi	Persen	79.40	89.60	89.60	95.30	96.75	96.10	96.98	97.00	98.00	99.00	97.00	97.50	98.00	98.00	IKU Daerah
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	52.67	55.27	55.27	66.00	62.50	66.50	63.76	67.00	67.50	68.00	64.27	64.92	65.56	65.56	IKU Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
23	Indeks Risiko Bencana	Angka	141.00	-	135.86	-	132.25	-	129.73	-	-	-	128.00	125.00	120.00	120.00	IKU Daerah
24	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	8.00	10.00	10.00	14.00	23.50	18.00	-83.00	22.00	24.00	28.00	20.00	25.00	30.00	30.00	IKU Daerah
	ASPEK PELAYANAN UMUM																
I	Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar																
A	Pendidikan																
1	APK Pendidikan PAUD	%	15.00	45.00	45.00	47.00	47.00	60.00	60.00	70.00	75.00	85.00	70.00	75.00	85.00	85.00	IKU Dinas Pendidikan
2	APK Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	%	91.98	92.00	92.00	98.58	98.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
3	APK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	%	93.00	92.00	92.00	98.58	98.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
4	APK Pendidikan Paket A, B,C	%	52.00	52.00	52.00	57.00	57.00	62.00	62.00	65.00	69.00	73.00	65.00	69.00	73.00	73.00	IKU Dinas Pendidikan
5	APM Pendidikan PAUD	%	15.00	49.99	49.99	59.79	59.79	69.79	79.79	79.79	89.79	99.79	79.79	89.79	99.79	99.79	IKU Dinas Pendidikan
6	APM Pendidikan SD	%	81.01	87.00	87.00	87.70	87.70	93.00	93.00	94.00	95.00	96.00	94.00	95.00	96.00	96.00	IKU Dinas Pendidikan
7	APM Pendidikan SMP	%	79.00	45.00	45.00	66.86	66.86	76.86	86.86	86.86	96.86	100.00	86.86	96.86	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
8	APM Pendidikan Paket A, B, C	%	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	62.00	62.00	65.00	67.00	70.00	65.00	67.00	70.00	70.00	IKU Dinas Pendidikan
9	APS (Angka Putus Sekolah) Pendidikan	%	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	IKU Dinas Pendidikan



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.88	6.90	6.96	6.95	7.21	7.00	7.22	7.10	7.20	7.30	7.23	7.34	7.35	7.35	IKU Dinas Pendidikan
11	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.14	-	12.15	13.08	12.17	13.08	12.18	14.08	15.02	15.05	12.19	12.20	12.25	12.25	IKU Dinas Pendidikan
12	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.90	IKU Dinas Pendidikan
13	Angka Melanjutkan (AM)	%	68.00	68.00	68.00	70.00	70.00	76.00	76.00	84.00	90.00	100.00	84.00	90.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
14	Angka Pendidikan yang lebih tinggi di tamatkan	%	45.00	45.00	45.00	66.86	66.86	76.86	86.86	86.86	96.86	100.00	86.86	96.86	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
15	Rasio Sekolah berakreditasi SD dan SMP	%	61.00	61.00	61.00	62.26	62.26	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	75.00	80.00	85.00	85.00	IKU Dinas Pendidikan
16	Angka Kelulusan SD dan SMP	%	98.00	98.00	98.00	98.79	98.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
17	Angka Melanjutkan ke SMP	%	68.00	68.00	68.00	70.00	70.00	76.00	76.00	84.00	90.00	100.00	84.00	90.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan
18	Nilau Rata rata US SD/Mi	%	7.6	7.6	7.6	7.85	7.85	7.82	7.82	7.84	7.84	8.00	7.84	7.84	8.00	8.00	IKU Dinas Pendidikan
19	Nilai Rata rata UN SMP/MTs.	%	55.00	55.00	55.00	56.00	56.00	57.00	57.00	58.00	59.00	60.00	58.00	59.00	60.00	60.00	IKU Dinas Pendidikan
20	Rasio Kelas SD berkondisi Baik	%	50.00	50.00	50.00	61.97	61.97	68.97	68.97	75.97	82.97	89.97	75.97	82.97	89.97	89.97	IKU Dinas Pendidikan
21	Rasio Kelas SMP berkondisi Baik	%	50.00	50.00	50.00	61.97	61.97	68.97	68.97	75.97	82.97	89.97	75.97	82.97	89.97	89.97	IKU Dinas Pendidikan
22	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	%	45.12	45.12	45.12	46.89	46.89	56.89	56.89	66.89	76.89	86.89	66.89	76.89	86.89	86.89	IKU Dinas Pendidikan
23	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	%	70.04	70.04	70.04	73.18	73.18	83.18	83.18	93.18	100.00	100.00	93.18	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pendidikan



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
24	Persentase Guru Layak SD	%	60.66	60.66	60.66	73.19	73.19	83.19	83.19	93.19	1.00	1.00	93.19	1.00	1.00	1.00	IKU Dinas Pendidikan
25	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	%	50.00	50.00	50.00	52.82	52.82	57.82	57.82	62.82	67.82	72.82	62.82	67.82	72.82	72.82	IKU Dinas Pendidikan
26	Persentase Tenaga Pendidik SMP Berijazah S1	%	30.00	30.00	30.00	32.36	32.36	42.36	42.36	52.36	62.36	72.36	52.36	62.36	72.36	72.36	IKU Dinas Pendidikan
27	Persentase Guru Layak SMP	%	80.56	80.56	80.56	84.19	84.19	87.19	87.19	90.19	93.19	96.19	90.19	93.19	96.19	96.19	IKU Dinas Pendidikan
B	Kesehatan																
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	107	107	107	110.00	26,9	100.00	71,8	90.00	80.00	70.00	90.00	80.00	70.00	70.00	IKU Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,4	0,49	1,2	1.00	1.00	1,2	1.00	1.00	1.00	IKU Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Balita Stunting	%	-	-	-	33.00	29,87	31.00	3.50	0.30	0.29	0.28	0.30	0.29	0.28	0.28	IKU Dinas Kesehatan
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	-	-	-	0,2	0,14	0,3	0,14	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	IKU Dinas Kesehatan
5	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	%	-	-	-	22.00	17.00	40.00	17.30	60.00	80.00	100.00	60.00	80.00	100.00	100.00	IKU Dinas Kesehatan
6	Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	80.00	90.00	90.00	IKU Dinas Kesehatan
C	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	Percentase Peningkatan Jalan Kabupaten Kondisi Mantab	%	2.41	2.41	2.41	2.35	5.23	2.00	-14.24	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Percentase Sarana dan Prasana Sumber Daya Air	%	51.03	51.03	51.03	54.00	51.65	57.00	53.74	60.00	63.00	66.00	60.00	63.00	66.00	66.00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Percentase Pemenuhan Permukiman yang Layak	%	32.69	32.69	32.69	36.00	35.50	40.00	39.00	44.00	48.00	55.00	44.00	48.00	55.00	55.00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Percentase Rencana Tata Ruang Wilayah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
D	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	70.00	70.00	70.00	65.00	64.80	60.00	57.85	55.00	50.00	45.00	55.00	50.00	45.00	45.00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	20.00	20.00	20.00	30.00	29.21	40.00	38.85	50.00	60.00	70.00	50.00	60.00	70.00	70.00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	7.00	7.00	7.00	10.00	7.00	10.00	7.00	17.00	21.00	24.00	17.00	21.00	24.00	24.00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
4	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (Response Time)	%	83.00	83.00	83.00	90.00	89.00	90.00	89.00	90.00	80.00	83.00	90.00	80.00	83.00	83.00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar) yang dibentuk dan /atau dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	0.00	12.00	13.00	13.00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	Kali	5 kali	5 kali	5 kali	6 Kali	1 Kali	10 Kali	7 Kali	20 Kali	25 Kali	30 Kali	20 Kali	25 Kali	30 Kali	30 Kali	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Skor Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0.30	0.30	0.30	-	0.34	-	0.37	-	-	-	0.40	0.45	0.50	0.50	IKU Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	80.00	85.00	IKU Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
E	Sosial																
1	Persentase Penanganan PMKS		48,64	48,64	48,64	13,29	48,77	12,84	69,23	12,67	12,34	12,31	75	80	85	85	IKU Dinas Sosial
2	Persentase PSKS Yang Aktif		73.00	73.00	73.00	75.00	75.00	78.00	80.00	80.00	82.00	85.00	80.00	82.00	85.00	85.00	IKU Dinas Sosial



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
II	Fokus Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar																
A	Tenaga Kerja																
1	Persentase Pencari Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	-	-	-	67,00	71,00	70,00	59.72	96.70	97,00	97.40	60,00	60.05	60.65	60.65	Dinas Tenaga Kerja
2	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	-	-	-	67,00	69.67	70,00	72.95	1.47	1.87	2.27	71,00	71.56	72.30	72.30	Dinas Tenaga Kerja
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1	Persentase akseptor Pengguna KB MKJP	%	30.28	30.28	30.28	32.00	32.79	34.00	34.26	37.00	42.00	45.00	36.00	38.00	40.00	40.00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok BKB	%	7.24	7.24	7.24	10.00	8.26	12.00	11.64	14.00	16.00	18.00	14.00	16.00	18.00	18.00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera	%	12.53	12.53	12.53	12.00	12.48	11.50	12.05	11.90	11.80	11.70	11.90	11.80	11.70	11.70	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
4	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100.00	90.00	100.00	91.00	100.00	92.00	93.00	94.00	92.00	93.00	94.00	94.00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase pencapaian indikator kabupaten layak anak	%	53	53	53.00	65.00	62.00	75.00	73.00	75.00	80.00	85.00	75.00	80.00	85.00	85.00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pangan																
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	5.00	5.00	5.00	5.00	17.20	5.00	17.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
C	Lingkungan Hidup																
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Afolu)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0.26	0.26	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72	5.09	5.09	IKU Dinas Lingkungan Hidup



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Transportasi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18	1.27	1.27	IKU Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dan Penggunaan Produk	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0.01	0.01	IKU Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan limbah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0.36	0.36	IKU Dinas Lingkungan Hidup
6	Indeks Kualitas Air	Angka	56.00	56.00	56.00	56	58.97	58	58.33	1,0 < ipa ≤ 5	0 < ipa ≤ 1	0 < ipa ≤ 1	59.37	59.47	59.47	59.47	IKU Dinas Lingkungan Hidup
7	Indeks Kualitas Udara	Angka	80.00	80.00	80.00	80	87.22	81	83.11	0 - 50	0 - 50	0 - 50	84.21	84.31	84.31	84.31	IKU Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Tutupan Lahan	Angka	33.00	33.00	33.00	34.00	53.36	35.00	53.36	30	30	30.00	38.77	41.37	41.37	41.37	IKU Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Pengelolaan Sampah	Angka	9	9	9	-	11,75	-	15,82	-	-	-	15	15	15	15	IKU Dinas Lingkungan Hidup
D	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	86.70	86.70	86.70	89.20	88.70	90.40	91.8	91.30	92.70	93.50	95.40	97.60	100.00	100.00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	%	88.20	88.20	88.20	91.70	133.20	93.30	100.00	94.60	95.20	96.60	95.62	97.00	99.54	99.54	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Penerbitan KIA	%	5.72	5.72	5.72	7.80	16.50	10.30	33.80	25.60	40.20	80.60	25.60	40.20	62.41	62.41	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
4	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran	%	92.56	92.56	92.56	93.70	79.30	94.10	92.80	95.20	96.40	97.80	95.20	96.40	98.72	98.72	IKU Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	%	15.73	15.73	15.73	22.45	25.47	30.91	54.76	60.73	65.81	80.23	61.72	68.79	85.74	85.74	IKU Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	%	23.67	23.67	23.67	29.38	34.40	38.42	58.74	40.61	45.19	50.35	63.74	75.45	93.74	93.74	IKU Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%	-	-	-	-	5.41	-	9.73	-	-	-	65.90	74.80	100.00	100.00	IKU Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
E	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	Presentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	89,63	89,63	89,63	0.00	99,67	0.00	82,61	0.00	0.00	0.00	99.00	99,99	100.00	100.00	IKU Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	Angka	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	65.00	65.00	IKU Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa
3	Prentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	%	5000.00%	10.00%	50.00	0.00	60.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	100.00	100.00	IKU Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
F	Perhubungan																
1	Persentase Kendaraaan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	37,6	37,6	37,6	100.00	58.10	100.00	49.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Perhubungan
2	Persentase Angkutan Laut Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	IKU Dinas Perhubungan
G	Komunikasi dan Informatika																
1	Indeks SPBE	Angka	1.37	1.37	1.37	-	1.37	-	1.37	2.00	2.50	3.00	2.00	2.50	3.00	3.00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	-	70.00	70.00	-	70.00	-	75.00	80.00	85.00	90.00	80.00	85.00	90.00	90.00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Satu Data Statistik Sektoral dengan baik	%	-	-	-	-	-	-	-	56.00	73.00	80.00	56.00	73.00	80.00	80.00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Menejemen keamanan Informasi	%	-	-	-	-	-	-	-	6.00	12.00	18.00	6.00	12.00	18.00	18.00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
H	Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan																



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	Indeks Daya saing Kabupaten Tanggamus terhadap Kabupaten Lain se Provinsi Lampung	Angka	0.00	0.00	0	0	38.46	0	55.56	60.71	77.78	87.50	60.71	77.78	87.50	87.50	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	%	0.00	0.00	0	0	0	0	0	14.43	50.00	52.38	12.37	50.55	55.56	55.56	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
I	Penanaman Modal																
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	6.67	0.00	7.69	7.14	6.67	7.69	7.14	6.67	6.67	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasir	%	16.18	16.18	16.18	10.00	43.47	22.60	5.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase Capaian unsur Pelayanan Perizinan yang berkinerja sangat baik	%	4.00	4.00	4.00	4.17	4.24	4.27	3.63	4.44	4.55	3.61	4.24	4.45	4.77	4.77	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
J	Pemuda dan Olahraga																
1	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	%								33.33	66.67	100.00	33.33	66.67	100.00	100.00	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
2	Persentase Prestasi Olahraga Minimal Tingkat Provinsi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.43	35.71	42.86	42.86	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
K	Perpustakaan dan Kearsipan																
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Statis	%	-	-	-	-	8.00	-	13.00	-	-	-	14.00	15.00	20.00	20.00	IKU Dinas Perpustakaan an dan Kearsipan Daerah
2	Persentase Peningkatan Pengunjung ke Perpustakaan	%	-	-	4.00	-	-8.00	-	-30.00	-	-	-	10.00	4.00	5.00	5.00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Persentase Perpustakaan Pekon yang di Kelola dengan Baik	%	-	-	14.00	-	15.00	-	14.00	-	-	-	13.00	13.00	17.00	17.00	IKU Dinas Perpustakaan an dan Kearsipan Daerah
III	Fokus Urusan Layanan Pilihan																
A	Perikanan																
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0.20	0.20	0.20	2.00	0.20	2.00	0.20	2.00	2.30	2.50	2.00	2.30	2.50	2.50	IKU Dinas Perikanan
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0.20	0.20	0.20	2.00	0.20	2.00	0.20	2.00	2.30	2.50	2.00	2.30	2.50	2.50	IKU Dinas Perikanan
3	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	0.20	0.20	0.20	1.50	0.20	1.50	0.20	1.50	1.80	2.00	1.50	1.80	2.00	2.00	IKU Dinas Perikanan



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
B	Pariwisata																
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	458,603	458,603	458,603	500,000	599,891	600,000	100,965	700,000	800,000	900,000	700,000	800,000	900,000	900,000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan	%	5	5	5	10	13	15	17	20	25	30	20	25	30	30	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	%	23	23	23	30	0	30	0	33	37	40	33	37	40	40	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
C	Pertanian																
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi Per Hektar	%	56.30	56.30	56.30	57	57.30	56	56.96	59	59	59	59	59	59	59	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Peresentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura Unggulan	%	9.50	9.50	9.50	9	9.36	9	24.46	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Presentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	%	3	3	3	4	4	5	5	-	-	-	3	5	6	6	IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Presentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Unggulan	%	4	4	4	3.50	3.50	5	5	-	-	-	3	5	6	6	IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	%	3	3	3	3.50	3.50	5	5	-	-	-	2	5	5	5	IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
6	Presentase Penurunan Kematian Ternak	%	30	30	30	32	32	35	35	-	-	-	100	100	100	100	IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan
7	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan
D	Energi dan Sumber Daya Mineral																
1	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun	%	0	0	0%	96.62	96.75	96.88	96.98	97,34	97.77	98,2	95.70	95.89	96,00	96,00	Dinas Tenaga Kerja
E	Perdagangan																
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	9.58	9.58	9.58	0	10.24	0	9.70	11.34	18.84	23.08	12.37	25	33.33	33.33	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Tertib Niaga	%	0	0	0	0	0	40	20	20.51	21.86	25.94	21	23.97	26.67	26.67	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
F	Perindustrian																
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	7.07	7.07	7.07	0	7.06	0	6.95	7.22	14.29	25	8.25	25	30	30	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
G	Transmigrasi																
1	Persentase Transmigran meningkat taraf ekonomi dan sosialnya	%	0	0	0	0,70	0	1,0	0	0,124	0,0172	0,0196	0,80	0,86	1.02	1.02	Dinas Tenaga Kerja
IV	Fokus Layanan Urusan Penunjang																
A	Perencanaan Pembangunan																
1	Persentase Kesesuaian Antara Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	85	85	85	90	90	91	91	92	93	95	100	100	100	100	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	%	85	85	85	90	90	91	91	92	93	95	92	93	95	95	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
B	Penelitian dan Pengembangan																
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65	65	65	68	68	70	70	72	74	75	62.32	70	75	75	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	95	95	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
C	Keuangan																
1	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	90.95	90.95	90.95	100	92.50	100	89.41	-	-	-	100	100	100	100	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,261	0,261	0,261	0,290	0,840	0,523	0,691	-	-	-	0,866	0,866	0,866	0,866	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat Penilaian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	%	4.01	4.01	4.01	3.51	4.45	5.70	4.70	-	-	-	5.70	6.07	6.44	6.44	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	%	50	50	50	60	60	70	70	80	90	100	100	100	100	100	IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah
D	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																
1	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	99.37	99.37	99.37	100	97.60	100	99.49	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Angka	49.77	49.77	49.77	55	50	70	65.77	71	73	75	71	73	75	75	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
V	Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan																
1	Nilai LPPD	Angka	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.71	27,132	2.74	2.74	2.78	2.74	2.74	2.78	2.78	IKU Sekretariat Daerah
2	Indeks Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanggamus	Angka	-	-	-	-	-	-	54.64	-	-	-	54.64	54.64	54.64	54.64	IKU Sekretariat Daerah
3	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Angka	-	-	67.60	67.60	67.07	67.60	66.63	67.60	67.60	68.28	67.60	67.60	68.28	68.28	IKU Sekretariat Daerah
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
5	Persentase Produk Hukum Daerah Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	-	-	85	90	90	95	88.06	90	90	95	97	98	100	100	IKU Sekretariat Daerah
6	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan barang jasa)	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	IKU Sekretariat Daerah
7	Persentase Peningkatan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	50	IKU Sekretariat Daerah
8	Persentase Perjanjian Kerjasama yang Diimplementasikan	%	-	-	100	100	100	100	99.87	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
9	Indeks Kinerja Organisasi Keagamaan	Angka	-	-	68	69	66	75	77	73	80	80	70	80	80	80	IKU Sekretariat Daerah



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN PER TAHUN												KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2017	2018		2019		2020		Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan				
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
10	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	%	-	-	97	100	97	100	98	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
11	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Unit Sekretariat Daerah yang Terealisasi	%	-	-	74	75	75	76	73.24	5	5	5	77	79	80	80	IKU Sekretariat Daerah
12	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	13	13	13	13	31	14	71	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat DPRD
13	Persentase ASN yang aktif menjadi Anggota Korpri	%	100	100	100	100	100	100	100	78	80	82	96,73	93,22	91,85	91,85	IKU Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
16	Persentase Event Pengembangan Jiwa Korsa Anggota Korpri	%	40	40	40	-	40	-	0	76	78	80	60	60	60	60	IKU Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
17	Persentase anggota Korpri yang memasuki Purnabhakti yang Memiliki Kewirausahaan	%	-	-	-	-	-	-	0	66	68	70	60	64	72	72	IKU Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
18	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tanggamus	Angka	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
19	IACM (Level Kapabilitas APIP)	Angka	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
20	Persentase Ormas yang berlegalitas dan berkinerja baik	%	70	-	80	-	85	-	87	-	-	-	90	93	95	95	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Persentase Penurunan Tingkat Kriminalitas	%	1.50	1.50	1.50	1.30	1.30	1.30	1.30	1.20	1.10	1.00	1	1	1	1	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Analisis data diolah, 2021



Tabel VIII.4 Penyeragaman Target Indikator Makro Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMN TAHUN 2020-2024					INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024					INDIKATOR PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.50	5.90	6.20	6.50	7.00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.4 - 5.7	2.5 - 3.5	3.0 - 4.0	3.5 - 4.5	4.5 - 5.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.25	2.75	3.50	4.05	-
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11.56	11.27	10.35	9.68	9.20	Tingkat Kemiskinan (%)	11.10	12.76 - 12.40	12.40 - 11.90	11.90 - 11.40	11.40 - 10.90	Tingkat Kemiskinan (%)	10.52	11.60	11.00	10.80	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.80	3.60	3.40	3.00	2.70	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.85	4.5 - 4.0	4.4 - 4.3	4.3 - 4.0	4.0 - 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.22	2.95	3.75	3.00	-
4	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	-	-	75.54	Indeks Pembangunan Manusia	-	69.69 – 70.00	70.00 - 70.30	70.30 - 70.60	70.60 - 70.90	Indeks Pembangunan Manusia	67.06	66.48	66.57	67.85	-
5	Indeks Gini	-	-	-	-	0.360 - 0.374	Indeks Gini	-	0.310 - 0.334	0.308 - 0.324	0.302 - 0.319	0.293 - 0.314	Indeks Gini	0.237	0.292	0.264	0.263	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	-	-	-	27.30	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	6.74	6.91	7.06	7.29	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	6.00	6.50	7.00	-

Sumber : RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus 2018-2023

BAB IX

PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan RPJMN. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 telah disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2019-2024 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 disajikan pada sub bab berikut ini.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 yaitu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020, hasil reviu APIP dan pandemi *Covid-19*. Dampak dari hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1 Pedoman Transisi Tahun 2020-2021

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020. Didalam dua dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan IKK tingkat outcome tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mulai penyusunan APBD Tahun 2021, maka klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berbeda dengan yang termuat dalam dokumen perencanaan yang hanya memuat program dan kegiatan.

9.1.2 Pedoman Transisi Akhir Periode RPJMD (2023)

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD yaitu realisasi pembangunan Tahun 2019 dan 2020; rencana Tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 serta rencana Tahun 2022 dan 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target Tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain itu untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional Tahun 2024, dan hal-hal lain yang penting.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Perkembangan kondisi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus akibat pandemi *Covid-19* menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi *Covid-19* dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret Tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018- 2023 telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 ini.

Dalam rangka mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka di dalam dokumen Perubahan RPJMD ini, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2022 serta RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- 2) Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- 3) Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra-PD, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib menyusun Perubahan Renstra-PD Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan prioritas dan unggulan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan;
- 4) Perubahan Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun Renja-PD untuk setiap tahunnya yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan;

- 5) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota lainnya, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
- 6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra-PD dan Renja-PD secara periodik;
- 7) Dalam hal program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, dimana dimungkinkan Pemerinatahan Daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Orivate Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar ke berbagai daerah di Provinsi Lampung, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lebag a Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengajak kepada seluruh *stakeholders* agar menyukseskan, dan mengawal terwujudnya Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI



Perubahan
RPJMD

KABUPATEN
TANGGAMUS
TAHUN 2018-2023

